



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah juncto Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0920);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah rencana strategis Perangkat Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana...

10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang Pembangunan Daerah.

Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan.

BAB II

ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Arah Pembangunan Daerah periode tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RTRW yang merupakan satu kesatuan dokumen sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 mengacu pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
- (3) RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Bab I memuat pendahuluan;
 - b. Bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. Bab III memuat permasalahan dan isu strategis;
 - d. Bab IV memuat visi dan misi Daerah;
 - e. Bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. Bab VI memuat penutup.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERUBAHAN RPJPD 2025-2045

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. hasil...

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
- a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN:
(7/57/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD Kabupaten Tangerang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, telah dirumuskan visi Indonesia Emas 2045: “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” dengan 5 (lima) sasaran utama visi Indonesia 2045, yaitu: (1) pendapatan per kapita setara negara maju; (2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional mengikat; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat; dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*. Kelima sasaran tersebut diwujudkan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan), 8 (delapan) misi (agenda), dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Kurun waktu RPJPD Kabupaten Tangerang adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 terbagi dalam tahapan Perencanaan pembangunan pada periodisasi Perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam:

- a. RPJMD Kabupaten Tangerang I Tahun 2025-2029;
- b. RPJMD Kabupaten Tangerang II Tahun 2030-2034;
- c. RPJMD Kabupaten Tangerang III Tahun 2035-2039; dan
- d. RPJMD Kabupaten Tangerang IV Tahun 2040-2045.

RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Tangerang. Pentahapan rencana Pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD Kabupaten Tangerang sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD Kabupaten Tangerang memuat strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Tangerang dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Tangerang yang merupakan rencana Pembangunan tahunan Daerah, yang memuat prioritas Pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 ini mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Daerah dengan tetap memperhatikan arahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang, RTRW serta RKPD Kabupaten Tangerang dan dokumen Perencanaan pembangunan lainnya baik di tingkat Daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah.

Kesesuaian RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 ini dengan dokumen Perencanaan di provinsi dan Perangkat Daerah mutlak diperlukan untuk keterpaduan, kesinambungan, harmonisasi, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Dearah dalam mewujudkan tujuan nasional serta visi dan misi Daerah.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana Pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD Kabupaten Tangerang dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2025, tahun 2030, tahun 2035, dan tahun 2040. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui mekanisme perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD Kabupaten Tangerang dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD Kabupaten Tangerang adalah tahun 2025-2045.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 adalah untuk:

1. menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tangerang;
2. menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
3. mendukung koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
4. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
6. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud:

1. untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dan visi serta misi Daerah;
2. untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RTRW Kabupaten Tangerang;
3. untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD; dan
4. untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tangerang dan rencana strategis Perangkat Daerah.

Oleh karenanya RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0924

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan daerah sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Proses penyusunan dokumen RPJPD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top-Down Planning*. Selanjutnya, dalam pasal 16 ayat 1 dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 merujuk pada evaluasi pembangunan pada periode sebelumnya dalam RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025. Hasil evaluasi capaian sasaran pokok menunjukkan realisasi 'Sangat Memuaskan'. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan mengalami tren positif dan di atas rata-rata capaian provinsi dan nasional seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pendapatan per kapita. Akan tetapi, indikator tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan masih di bawah capaian Provinsi Banten serta menjadi isu strategis pembangunan pada rencana pembangunan periode berikutnya.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Tangerang dilaksanakan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Banten. RPJPD Kabupaten Tangerang ini wajib memperhatikan visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan serta indikator utama pembangunan yang ada

dalam RPJPN maupun RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Capaian hasil pembangunan jangka panjang periode 2005-2025 serta capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga menjadi masukan bagi penyusunan RPJPD periode 2025-2045. Peraturan tersebut menyelaraskan antara tujuan pembangunan berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan hidup. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4 juga disebutkan, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam penyusunannya, RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045 harus selaras dengan RPJP Nasional 2025-2045 maupun RPJPD Provinsi Banten 2025-2045.

Berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut lagi, dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, disebutkan salah satu tujuan dari penyelarasan adalah menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat pusat dan daerah provinsi.

Selanjutnya, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 Tanggal 6 Agustus 2024 Tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 menjadi dasar dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efektif.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 16. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
 17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222).

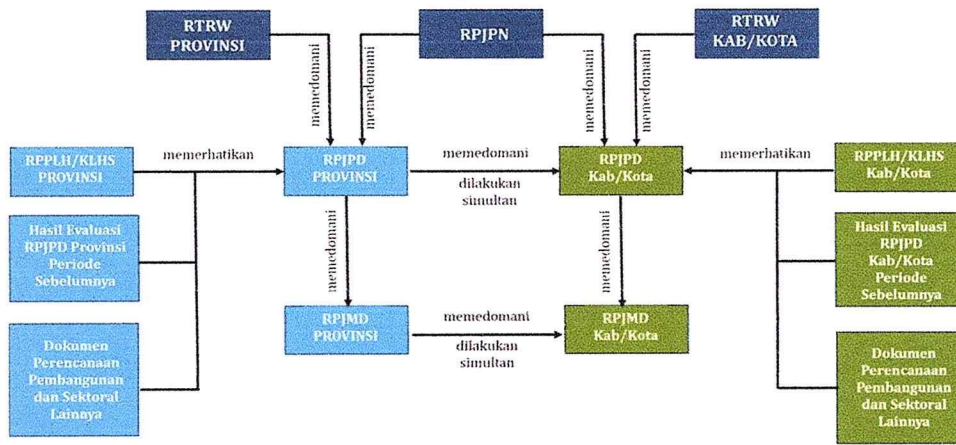
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Tangerang merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan dengan pendekatan teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, serta partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Dalam penyusunannya, RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Banten 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Banten, maupun Kabupaten Tangerang. Selain itu, dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tangerang juga memperhatikan rekomendasi RPPLH dan/atau KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045, Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025, serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

Secara umum, keterkaitan dokumen RPJPD dengan dokumen lainnya dapat digambarkan pada skema berikut:



Gambar 1.1
Keterkaitan antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Lainnya
Sumber: Imendagri tentang Pedoman Penyusunan RPJPD 2025-2045

Penyusunan dokumen RPJPD daerah juga memperhatikan dokumen RPJPD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain, terutama yang berbatasan. Hasil telaah RPJPD daerah lainnya dimaksudkan sebagai sumber informasi dalam hal identifikasi isu-isu strategis. Telaah dokumen RPJPD daerah lain dilakukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan serta upaya strategis yang harus disinergikan; adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama; serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

1.3.1. Telaah Dokumen RPJPN 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai arahan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan pembangunan yang signifikan dalam dinamika global sebagai negara berkembang dan tantangan kedepannya adalah menjadi negara maju. Maka dari itu dalam RPJPN 2025-2045 dirumuskan Visi Indonesia Emas 2045: “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Lima sasaran utama Visi Indonesia 2045, yaitu: (1) Pendapatan per kapita setara negara maju; (2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional mengikat; (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; serta (5) Intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Lima sasaran tersebut diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 indikator utama pembangunan.

Dalam dokumen tersebut juga menjabarkan arahan transformasi ekonomi untuk Wilayah Jawa. Wilayah Jawa diarahkan sebagai koridor “Industri Berbasis Inovasi, Riset, dan Teknologi. Secara khusus, Kabupaten Tangerang diarahkan dengan kebijakan pengembangan kawasan strategis industri Serang-Tangerang dengan klaster industri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan industri orientasi ekspor.

1.3.2. Telaah Dokumen RTRW Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(RTRWN) merupakan pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam dokumen Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dijabarkan arahan rencana pola ruang dan struktur ruang termasuk juga berkaitan dengan Provinsi Banten. Arahan untuk RTR Provinsi Banten yaitu Sistem Perkotaan Nasional yaitu PKN di Serang dan Cilegon serta PKW di Pandeglang dan Rangkas Bitung.

1.3.3. Telaah Dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 menjadi landasan penting dalam merumuskan Dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045. Isu strategis dalam RPJPD Provinsi Banten 2025-2045 adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber daya manusia yang produktif, unggul dan berdaya saing;
- 2) Pembangunan perekonomian yang tangguh dan inklusif;
- 3) Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas;
- 4) Keamanan, ketahanan, demokrasi dan kerjasama pembangunan, serta ekonomi makro yang tangguh;
- 5) Pengembangan kehidupan sosial dan budaya yang arif dan luhur;
- 6) Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan.

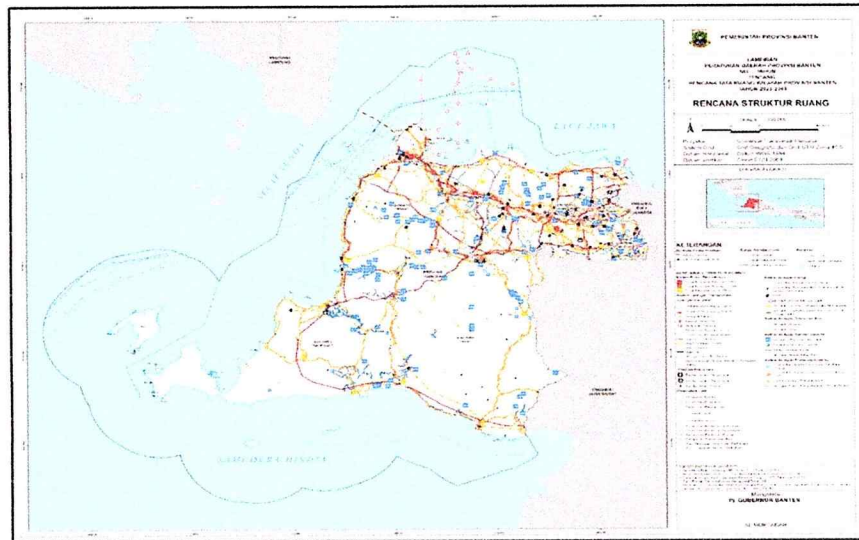
Visi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 yaitu *"Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman dan Taqwa"*. Dalam mewujudkan visi tersebut, dirumuskan melalui misi berikut:

- 1) Misi ke-1: Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing;
- 2) Misi ke-2: Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif;
- 3) Misi ke-3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional;
- 4) Misi ke-4: Mewujudkan Keamanan yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial dan Perekonomian Daerah yang Stabil;
- 5) Misi ke-5: Mewujudkan Sosial Budaya yang Beradab dan Ekologi yang Lestari;
- 6) Misi ke-6: Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Perkuatan Pemerataan, dan Interkoneksi Pembangunan;
- 7) Misi ke-7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Memadai, Berkualitas, dan Berkelanjutan;
- 8) Misi ke-8: Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan yang Inovatif dan Berdaya Saing Global.

1.3.4. Telaah Dokumen RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023-2043 memberikan arahan dalam perencanaan pola ruang dan struktur ruang wilayah. Tujuan penataan ruang Provinsi Banten yang tertuang dalam dokumen ini adalah untuk *"Mewujudkan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif Berkelanjutan dan Berkeadilan melalui*

Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang di atas, dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri atas pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.



Gambar 1.2

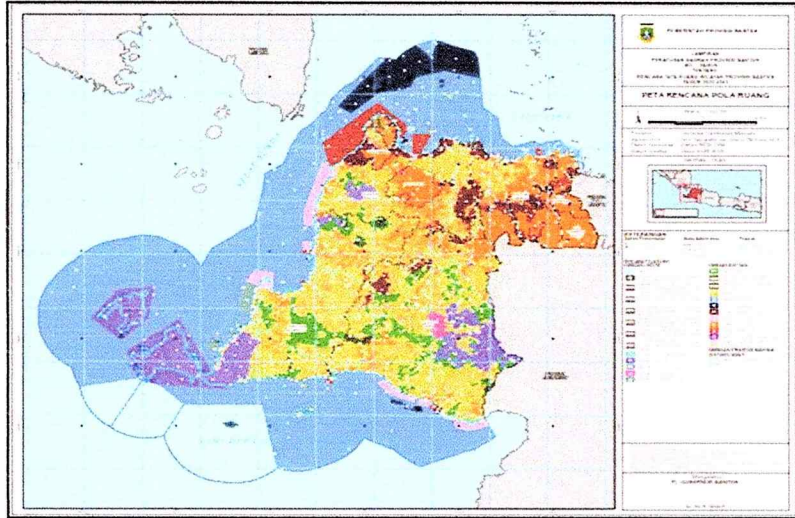
Peta Struktur Ruang Provinsi Banten

Sumber: Lampiran RTRW Provinsi Banten 2023-2043

Gambar diatas merupakan peta struktur ruang Provinsi Banten. Struktur ruang Provinsi Banten yang diarahkan dalam tata ruang Kabupaten Tangerang terdiri atas:

- 1) Sistem Pusat Permukiman
 - Wilayah Kabupaten Tangerang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jabodetabek-punjur yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman, transportasi udara, kelautan dan perikanan, serta pendidikan.
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten Tangerang meliputi Kecamatan Kronjo, Kecamatan Tigaraksa, dan Kecamatan Pagedangan.
- 2) Sistem Jaringan Transportasi
 - Pengembangan terminal bus tipe A yaitu Terminal Balaraja serta terminal bus tipe B yaitu Terminal Pasar Kemis dan Terminal Teluk Naga.
 - Pengembangan Pelabuhan Sepatan dan Pelabuhan Pakujahi sebagai Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pengembangan Pelabuhan Cituis dan Pelabuhan Tanjung Pasir sebagai Pelabuhan Penyeberangan
 - Pengembangan Bandar Udara Soekarna-Hatta sebagai Bandar Udara Pengumpul
 - Pengembangan Bandar Udara Budiarto sebagai Bandar Udara Pengumpan
- 3) Sistem Jaringan Energi
 - Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
 - Pengembangan jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik

- 4) Sistem Jaringan Telekomunikasi
 - Pengembangan jaringan tetap dan jaringan bergerak telekomunikasi di wilayah kabupaten/kota
- 5) Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 - Pengembangan sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air di wilayah kabupaten/kota
- 6) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.



Gambar 1.3
Peta Pola Ruang Provinsi Banten
Sumber: Lampiran RTRW Provinsi Banten 2023-2043

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten terdiri dari perencanaan peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya seperti pada gambar di atas. Selain itu juga diatur mengenai pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Banten yang diarahkan untuk Kabupaten Tangerang, yaitu Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabek-Punjur, di perairan utara Kabupaten Tangerang dapat dilaksanakan reklamasi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.5. Telaah Dokumen RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

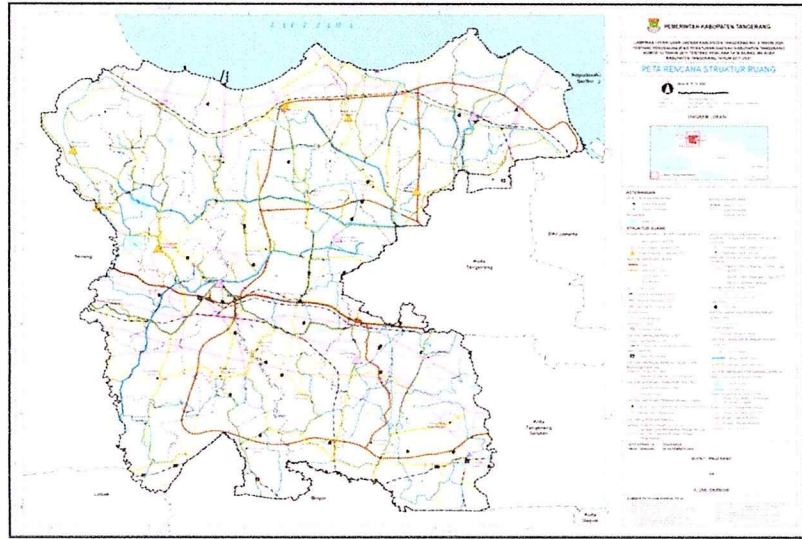
Dokumen RTRW Kabupaten Tangerang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang Kabupaten Tangerang adalah *Mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju Masyarakat madani melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan*. Penjabaran kebijakan dan strategi penataan ruang adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Tangerang

Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang	a) mempersiapkan Ruang Kawasan Peruntukan Industri Daerah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan

Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
mempunyai daya saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional	<ul style="list-style-type: none"> b) meningkatkan dan membangun infrastruktur pendukung Kawasan Industri c) meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran
Pengembangan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> a) mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan kegiatan Industri dan pertanian b) mewujudkan pusat-pusat kegiatan Wilayah baru sesuai dengan kewenangan Daerah c) mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang ada di Daerah sesuai dengan hierarkinya; d) meningkatkan intensitas pembangunan permukiman di tiap Kecamatan melalui pola pembangunan vertikal, pola perluasan dan/atau pengembangan Kawasan Permukiman dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan; e) menata Kawasan Permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Daerah; dan f) meningkatkan aksesibilitas antarpusat perkotaan, antarpusat desa, antarpusat perkotaan, dan pusat desa.
Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a) melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan di atas lahan hasil reklamasi sepanjang pantai utara Daerah dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan Daerah sekitarnya b) membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai utara dengan Wilayah daratan Daerah.
Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> a) mendukung penetapan kawasan pertahanan nasional dengan fungsi khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara b) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara c) mengembangkan Kawasan Peruntukan Lindung dan/atau Kawasan Peruntukan Budi Daya tidak terbangun disekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara dengan Kawasan Peruntukan Budi Daya terbangun d) membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara
Rencana pengembangan RTH	Rencana pengembangan RTH pada kawasan perkotaan ditetapkan paling rendah 30% dari Kawasan Perkotaan yang direncanakan terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%

Sumber: RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

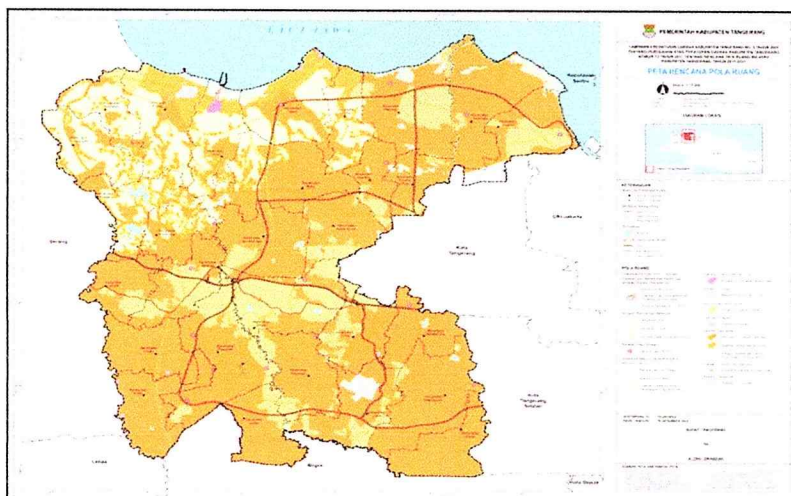


Gambar 1.4

Peta Struktur Ruang Kabupaten Tangerang

Sumber: Lampiran RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

Dari peta rencana struktur ruang di atas, diketahui beberapa perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang meliputi rencana sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana. Rencana sistem perkotaan terdiri dari pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang meliputi kawasan perkotaan di sekitar Jabodetabekpunjur yaitu kecamatan Balaraja dan kecamatan Tigaraksa; pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi kecamatan Kronjo, kecamatan Tigaraksa, dan kecamatan Pagedangan; serta pengembangan pusat-pusat kegiatan lain seperti PPK dan PPL yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Rencana jaringan prasarana diperlihatkan dengan perencanaan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya. Pengembangan jaringan transportasi didukung dengan rencana pembangunan jalan tol, peningkatan kelas terminal tipe A, tipe B, dan tipe C, dan reaktivasi sistem jaringan rel kereta api. Selain itu, perencanaan transportasi laut juga dilaksanakan melalui pengembangan pelabuhan meliputi pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpul lokal, dan terminal khusus laut. Kemudian, pengembangan bandar udara dilaksanakan di bandar udara Soekarno-Hatta dan bandar udara Budiarto.



Gambar 1.5

Peta Pola Ruang Kabupaten Tangerang

Sumber: Lampiran RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

Perencanaan pola ruang Kabupaten Tangerang terdiri dari perencanaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud meliputi kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan cagar budaya. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya diantaranya adalah kawasan hutan lindung hutan bakau mangrove seluas 1.555,32 Ha di pantai utara dan kawasan resapan air seluas 1.555 Ha di bagian hulu sungai DAS Cidurian, Ciujung, Cibareo, dan Cimanceuri. Kawasan perlindungan setempat yang dimaksud adalah sempadan pantai utara, sempadan sungai, dan kawasan sekitar waduk/danau. Mengenai kawasan cagar budaya yang dimaksud meliputi situs makam pahlawan masa lalu, situs sisa fosil *elephant maximus*, dan situs sumur tua. Perencanaan kawasan peruntukan budidaya yang dilaksanakan meliputi kawasan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, dan transportasi.

1.3.6. Telaah Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan perundangan ini diketahui bahwa diperlukan adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah. Kajian ini dilaksanakan melalui beberapa kajian dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Kebijakan Rencana Program (KRP). Penyusunan KLHS ini menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan KLHS juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Muatan KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang berisi tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung, dampak dan risiko lingkungan hidup,

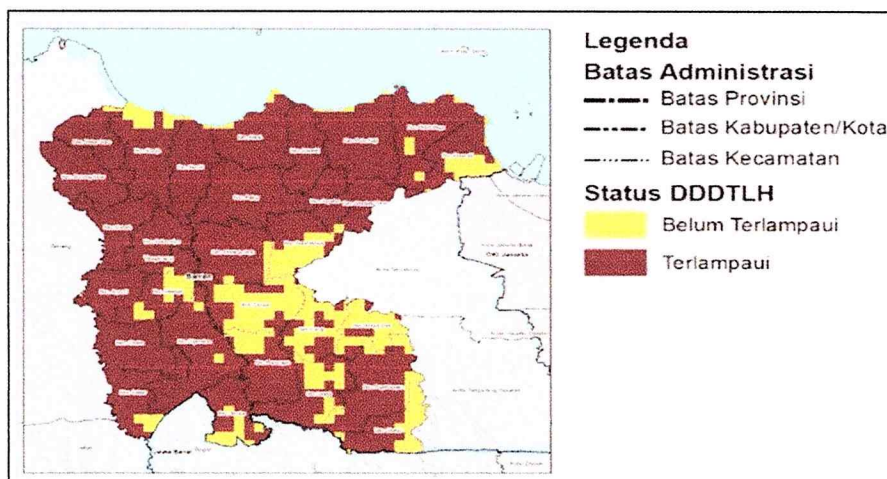
kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Kajian ini juga menetapkan isu-isu terkait lingkungan hidup berdasarkan masalah dan potensi daerah yang dimiliki sebagai berikut.

- 1) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah
- 2) Rendahnya kualitas lingkungan hidup
- 3) Rendahnya tingkat mitigasi bencana di kawasan permukiman dan perumahan perdesaan
- 4) Pendangkalan aliran sungai serta terkendala dalam penanganan normalisasi fungsi sungai
- 5) Belum optimalnya kinerja saluran pengelola air limbah domestik dan industri
- 6) Peningkatan tingkat kemiskinan dan pengangguran
- 7) Optimalisasi tata kelola pemerintah
- 8) Tingkat SDM rendah terhadap pelayanan pemerintah berbasis elektronik

Berdasarkan beberapa isu-isu strategis di atas, terdapat 3 isu paling strategis yang diprioritaskan dalam usulan perumusan kebijakan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang berdasarkan KLHS, yakni sebagai berikut.

- 1) Alih Fungsi Lahan Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman dan Industri

Pengalihan fungsi lahan kawasan primer berdampak kepada beberapa aspek lingkungan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan analisis daya dukung dan daya tampung ketahanan pangan, diketahui bahwa seluas 4% lahan belum terlampaui dan 96% lahan sudah terlampaui. Jika dilihat dari daya dukung dan daya tampung ketersediaan air, seluas 83% wilayah sudah terlampaui. Statistik ini memperlihatkan bahwa seluas 83% wilayah di Kabupaten Tangerang mengalami masa krisis air, dimana kebutuhan air tidak dapat dipenuhi dengan ketersediaan yang ada saat ini.



Gambar 1.6

Daya Dukung Daya Tampung Ketersediaan Air Kabupaten Tangerang

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang

Pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi fungsi permukiman dan industri yang tidak terkendali dapat memberikan dampak kepada tingkat ketahanan daerah terhadap bencana, jasa ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Risiko bencana dapat meningkat karena jumlah *grey infrastructure*

yang bertambah dengan pesat. Jumlah dan kepadatan bangunan/fisik yang tinggi mempengaruhi penilaian kerentanan daerah, yang juga akan semakin meningkat. Sebagai jasa ekosistem, kawasan pertanian berperan sebagai *provider* atau pemberi bagi lingkungan. Tingkat kinerja ekosistem dapat turun akibat adanya emisi GRK yang disebabkan oleh kawasan industri. Selain itu, tingkat keanekaragaman yang hidup dalam ekosistem kawasan pertanian juga akan terusir akibat alih fungsi lahan yang dilakukan.

2) Pendangkalan Aliran Sungai serta Terkendala dalam Penanganan Normalisasi Fungsi Sungai

Pendangkalan air sungai dan terkendalanya penanganan fungsi sungai berkaitan dengan ketersediaan air permukaan bagi wilayah Kabupaten Tangerang. Ketersediaan air permukaan di beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang sudah mencapai titik batasnya. Seluas 83% wilayah yang mengalami masa krisis air memerlukan alternatif sumber daya air baru. Pendangkalan air sungai juga menyebabkan kerusakan pada keanekaragaman sumber daya hayati dan ekosistem sungai. Kurangnya sumber air permukaan dapat meningkatkan potensi bencana kebakaran dan kekeringan.

3) Belum Optimalnya Kinerja Saluran Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Industri

Kualitas D3TLH air yang rendah diketahui disebabkan oleh pengaruh dari rendahnya pengelolaan air limbah domestik dan industri. Kurangnya pengelolaan ini dipengaruhi oleh adanya risiko yang tinggi terhadap kegagalan teknologi. Hasil konsultasi publik menunjukkan beberapa kawasan perumahan (lebih dari 10%) memiliki saluran pembuangan air limbah yang berakhir di saluran drainase jalan maupun sungai. Oleh karenanya perlu adanya pengendalian dan pengelolaan air limbah yang dapat menjaga kualitas air bersih dan air minum di Kabupaten Tangerang.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 disusun dalam rangka menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 akan menjadi landasan dokumen perencanaan daerah RPJMD, RKPD, maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Selain itu, dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 juga menjadi salah satu rujukan bagi peningkatan partisipasi aktor pembangunan di luar pemerintah yang ada di Kabupaten Tangerang.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 yaitu merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Tangerang, dalam rangka:

1. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tangerang;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; serta

4. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang; dasar hukum; hubungan antardokumen perencanaan pembangunan daerah; maksud dan tujuan; serta sistematika penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045.

Bab 2: Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menyajikan gambaran umum tentang kondisi kabupaten sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum.

Dalam bab ini juga menyajikan informasi mengenai evaluasi hasil RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Bab 3: Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan. Dalam bab ini juga menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka panjang disertai isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

Bab 4: Visi dan Misi Daerah

Bab ini menyajikan visi dan misi yang menggambarkan cita-cita pembangunan Kabupaten Tangerang selama 20 (dua puluh) tahun mendatang. Visi misi tersebut memperhatikan muatan visi dan misi RPJPN Tahun 2025-2045 serta RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 untuk menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan daerah. Rumusan visi dan misi disusun sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang.

Bab 5: Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Bab ini memuat tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Penahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik pembangunan. Selanjutnya, sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 disusun untuk menggambarkan secara langsung terwujudnya visi RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045. Pencapaian sasaran pokok ini diukur dengan indikator utama pembangunan untuk melihat kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Bab 6: Penutup

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya manajemen risiko pembangunan daerah sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Aspek geografi meliputi gambaran mengenai lokasi, potensi pengembangan, dan kerentanan terhadap bencana pada wilayah perencanaan, untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah yang sedang direncanakan.

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

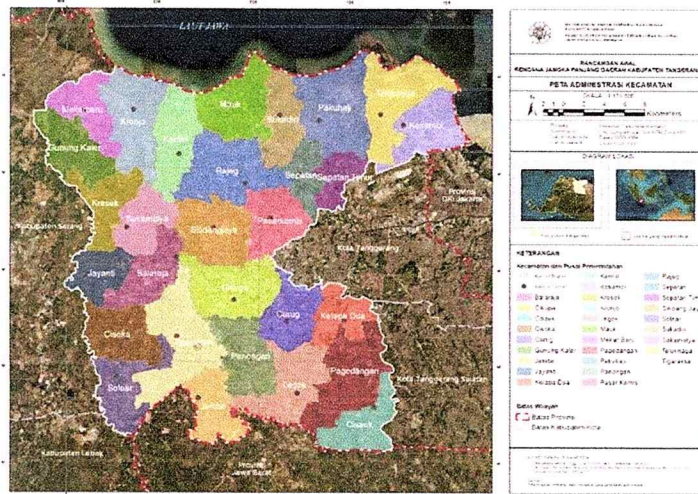
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi, dan Pulau, Kabupaten Tangerang dengan kode wilayah 36.03 memiliki luas wilayah 1.027,757 km². Keputusan tersebut juga menjabarkan bahwa Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa. Berikut adalah rincian data administrasi wilayah Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.1
Administrasi Kecamatan Kabupaten Tangerang

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
			(km ²)	(%)	Kelurahan	Desa
1	Tigaraksa	Tigaraksa	55,32	5,41	1	8
2	Pakuhaji	Pakuhaji	53,24	5,20	2	12
3	Pagedangan	Pagedangan	51,21	5,00	1	5
4	Rajeg	Rajeg	50,16	4,90	-	10
5	Teluknaga	Teluknaga	46,89	4,58	3	4
6	Kronjo	Kronjo	45,14	4,41	-	9
7	Cikupa	Cikupa	44,62	4,36	-	10
8	Sindangjaya	Sindangjaya	41,45	4,05	-	8
9	Mauk	Mauk	40,92	4,00	5	1
10	Legok	Legok	39,51	3,86	-	7
11	Panongan	Panongan	36,27	3,54	3	7
12	Kemiri	Kemiri	35,86	3,50	-	9
13	Kosambi	Kosambi	33,70	3,29	-	10
14	Cisoka	Cisoka	33,64	3,29	1	10
15	Gunung Kaler	Gunung Kaler	32,95	3,22	1	11
16	Solear	Solear	32,60	3,19	-	8
17	Pasarkemis	Pasarkemis	31,98	3,13	1	10
18	Balaraja	Balaraja	31,26	3,05	1	13
19	Curug	Curug	30,39	2,97	1	7
20	Cisauk	Cisauk	29,56	2,89	4	5
21	Jambe	Jambe	28,86	2,82	1	12
22	Sukadiri	Sukadiri	28,72	2,81	1	7
23	Kresck	Kresck	28,57	2,79	-	8
24	Mekarbaru	Mekarbaru	28,40	2,77	-	7
25	Sukamulya	Sukamulya	27,24	2,66	-	7
26	Kelapa Dua	Kelapa Dua	24,09	2,35	-	8
27	Jayanti	Jayanti	23,79	2,32	-	8
28	Sepatan	Sepatan	18,70	1,83	-	13
29	Sepatan Timur	Sepatan Timur	18,38	1,80	2	12
Kabupaten Tangerang		Tigaraksa	1.023,439	100	28	246

Sumber: ArcMap, BPS Kabupaten Tangerang, dan Kementerian Dalam Negeri, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tigaraksa adalah kecamatan terluas dengan persentase luasan 5,41% dari total luas wilayah Kabupaten Tangerang. Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Tigaraksa juga merupakan ibukota Kabupaten Tangerang. Pusat-pusat pemerintahan kecamatan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2023
Sumber: Sumber: ArcMap dan Badan Informasi Geospasial, 2023

Selain pusat-pusat pemerintahan, gambar diatas juga memperlihatkan batas-batas wilayah Kabupaten Tangerang. Batas-batas wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut.

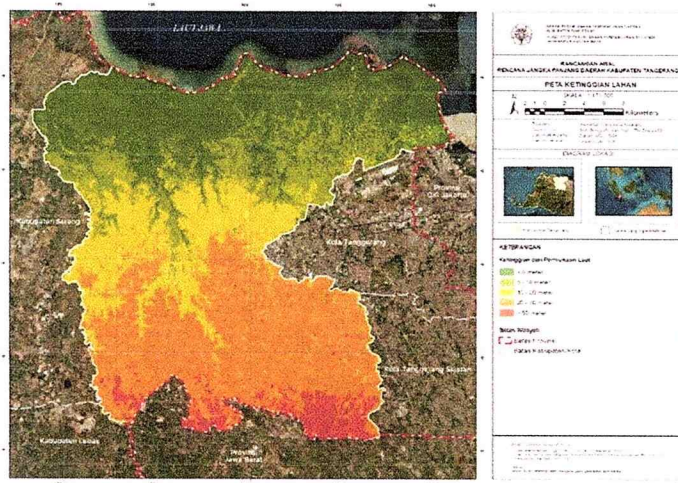
- Utara : Laut Jawa
- Selatan: Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak
- Timur : Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Provinsi DKI Jakarta
- Barat : Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Tangerang terletak pada 6°00'-6°20' Lintang Selatan dan 106°20'-106°43' Bujur Timur. Kabupaten Tangerang terletak pada bagian utara Pulau Jawa sehingga bagian utara wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kabupaten Tangerang juga berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta (pusat pemerintahan dan pusat perekonomian negara). Bagian utara merupakan kawasan pesisir dan bagian lainnya merupakan daratan.

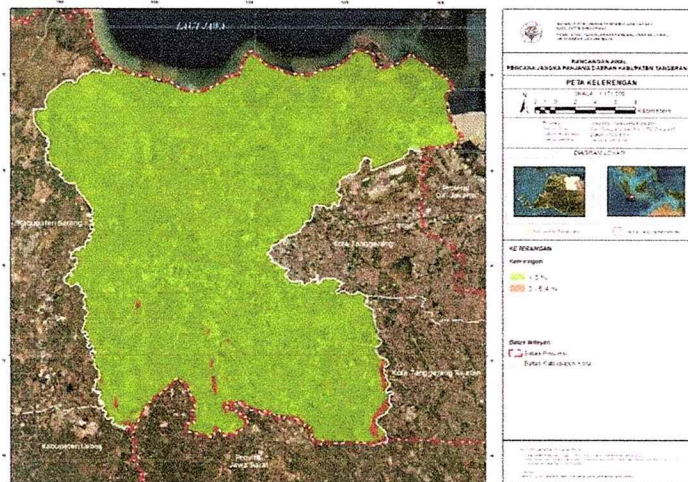
C. Kondisi Topografi

Berdasarkan Dokumen Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023, kondisi topografi wilayah dapat dilihat dari dua jenis, yaitu ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Berdasarkan ketinggian lahan, Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah karena semua wilayahnya berada pada ketinggian di bawah 200 mdpl.



Gambar 2.2
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Tangerang
Sumber: Badan Informasi Geospasial dan ArcMap (diolah), 2023

Berdasarkan gambar diatas, bagian utara Kabupaten Tangerang berada di ketinggian 0-10 mdpl, bagian tengah berada di ketinggian 10-20 mdpl, dan bagian selatan berada di ketinggian >20 mdpl. Data kemiringan lahan menunjukkan bahwa hampir seluruh bagian wilayah Kabupaten Tangerang memiliki kemiringan lahan <3%, sementara sisanya memiliki kemiringan lahan 3 - 6,4%. Berikut adalah peta kemiringan lahan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Tangerang
Sumber: Badan Informasi Geospasial dan ArcMap (diolah), 2023

D. Kondisi Geologi

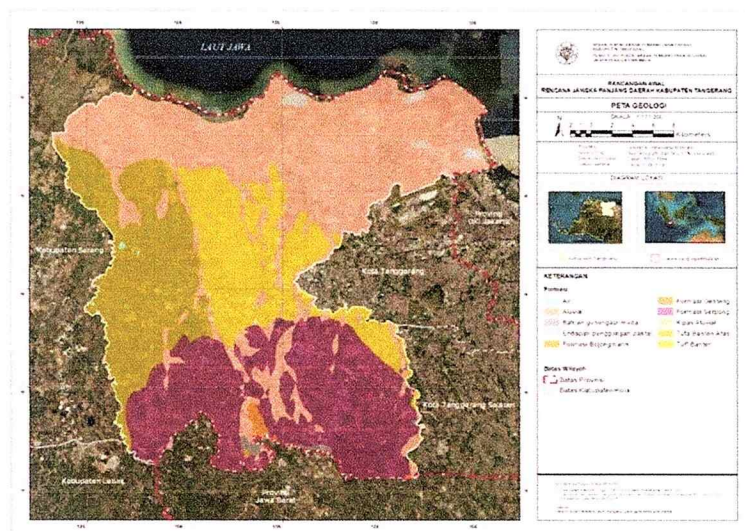
Secara geomorfologi sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang termasuk dataran Batavia (Bemmelen, 1949) yang berupa dataran dengan penyebaran di bagian barat hingga di bagian timur, sedangkan di bagian selatan merupakan kaki dari gunung api Kwarter (Gunung Manceuri, Gunung Panunggangan dan Gunung Simbangpelem) yang terletak di sebelah barat daya Kota Tangerang). Dengan kondisi geomorfologi tersebut, wilayah Kabupaten Tangerang merupakan produk pengendapan batuan tersier dan produk pengendapan dari kegiatan gunungapi kwarter baik secara primer maupun sekunder sebagai batuan sedimen piroklastik dan batuan sedimen

epiklastik, serta produk sedimen klastik sebagai endapan alluvial (Qa) yang terjadi hingga sekarang.

Berdasarkan stratigrafi, wilayah Kabupaten Tangerang tersusun oleh batuan Tersier, dan batuan Kwartir. Batuan Tersier terdapat di bagian selatan wilayah (aliran sungai Cisadane) yang terdiri dari Formasi Bojongmanik (Tmb), Formasi Genteng (Tpg) dan Formasi Serpong (Tpss), sedangkan batuan Kwartir terdiri dari Tuff Banten (QTvb), Batuan Gunungapi Muda (Qv), Endapan Pematang Pantai (Qbr) dan Endapan Aluvial (Qa). Pada saat Tersier diendapkan *Formasi Bojongmanik* terdiri dari perselingan batupasir dengan batulempung dengan sisipan batugamping, sedangkan *Formasi Genteng* terdiri dari tuff batuapung, batupasir tuffan, breksi andesit, konglomerat, dan sisipan batulempung tuffan. *Formasi Serpong* terdiri dari perselingan konglomerat, batupasir, batulanau dan batulempung mengandung sisa sisa tanaman, konglomerat batuapung dan tuff batuapung, sedangkan *Tuff Banten* terdiri dari tuff, tuff batuapung dan batupasir tuffan. Selanjutnya pada saat Kwartir diendapkan *Batuan Gunungapi Muda* yang terdiri dari breksi, lahar, tuff breksi, dan tuff batuapung. Selanjutnya masih pada saat Kwartir diendapkan *Endapan Pematang Pantai* yang berupa pasir halus sampai kasar, sortasi baik, terdapat cangkang moluska, disamping itu juga terjadi *Endapan Alluvial* yang terdiri dari lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah. Hubungan stratigrafi *tidak selaras* terdapat antara *Formasi Genteng* dan *Formasi Serpong*, dan antara *Tuff Banten* dengan *Endapan Pematang Pantai* atau *Endapan Aluvial*. Beberapa *lapisan pasir* pada Endapan Pematang Pantai dan Endapan Alluvial dapat berfungsi sebagai lapisan pembawa air (*akifer*) baik akifer bebas maupun akifer tertekan.

Berdasarkan tinjauan struktur geologi regional, wilayah Kabupaten Tangerang terletak disebelah utara sesar aktif (sesar naik) Baribis yang merupakan pergerakan aktif kerak bumi sehingga menjadi tempat kedudukan episentrum gempa bumi. Struktur geologi wilayah Kabupaten Tangerang didominasi struktur lapisan horizontal bagi batuan sedimen Kwartir, hingga struktur homoklin untuk batuan Tersier.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kabupaten Tangerang mempunyai potensi sumberdaya geologi berupa pasir dan potensi sumberdaya air berupa air permukaan (DAS) dan air tanah sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) Tangerang – Jakarta dengan beberapa lapisan akifer.



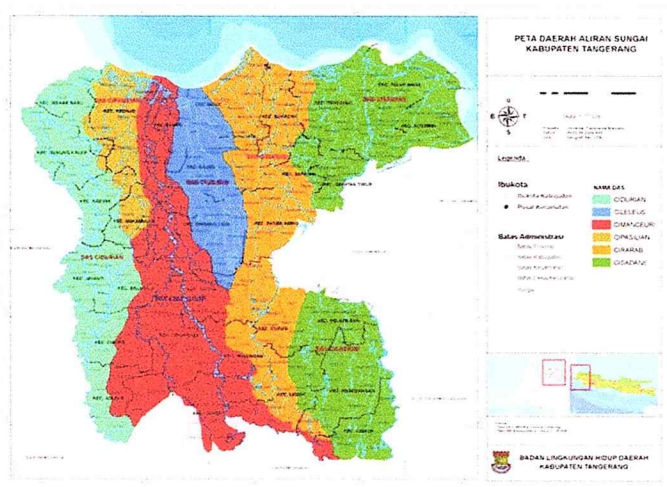
Gambar 2.4
Peta Kondisi Geologi Kabupaten Tangerang

Sumber: Badan Informasi Geospasial dan ArcMap (diolah), 2023

E. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Tangerang dialir oleh banyak sungai. Sungai-sungai tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu disebut sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi enam DAS, yaitu:

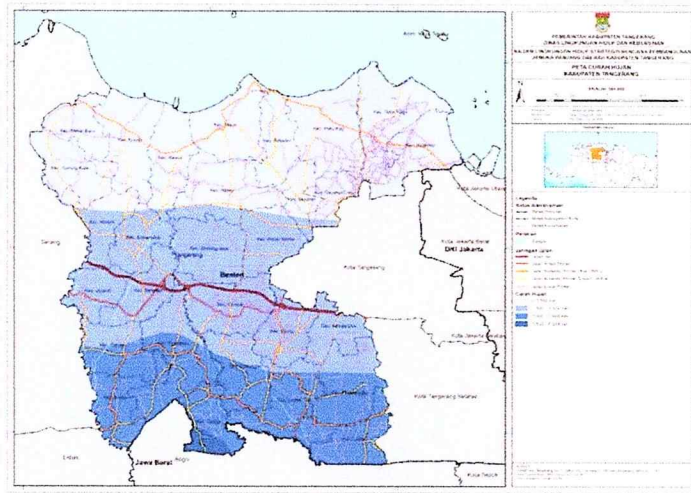
- a. DAS Cidurian :terbentang di bagian barat yang meliputi Kecamatan Mekar Baru sampai Kecamtan Solear.
- b. DAS Cipasilia :berada di bagian utara yang meilupti Kecamatan Kronjo. Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek.
- c. DAS Cimanceuri :terbentang di bagian tengah yang meliputi Kecamatan Kemiri sampai Kecamatan Jambe.
- d. DAS Cileleus :berada di bagian utara yang meliputi Kecamatan Mau, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Sindangjaya.
- e. DAS Cirarab :terbentang di bagian tengah yang meliputi Kecamatan Kecamatan Mau sampai Kecamatan Pagedangan.
- f. DAS Cisadane :berada di bagian timur yang meliputi Kecamatan Teluknaga sampai Kecamatan Cisauk, dan melewati Kota Tangerang.



Gambar 2.5
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tangerang
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang

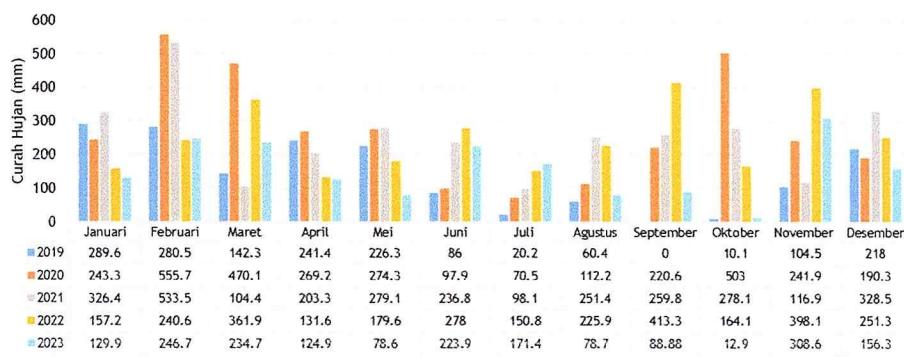
F. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi dapat diamati berdasarkan kondisi curah hujan, suhu, dan kelembaban. Curah hujan di Kabupaten Tangerang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok: kelompok pertama dengan curah hujan <2.500 mm berada di bagian utara, kelompok kedua dengan curah hujan 2.500-3.000 mm berada di bagian tengah, dan kelompok ketiga dengan curah hujan 3.000-3.500 mm berada di bagian selatan. Berikut adalah peta curah hujan Kabupaten Tangerang.



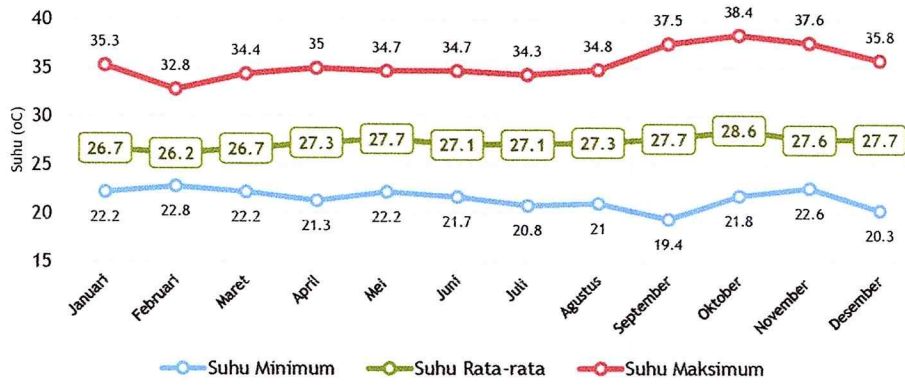
Gambar 2.6
Peta Curah Hujan Kabupaten Tangerang
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang 2023

Berdasarkan periode waktu tahun dan bulannya, curah hujan di Kabupaten Tangerang membentuk grafik yang cekung di bagian tengah (bulan tengah tahun). Setiap tahunnya curah tertinggi berada di bulan yang relatif berbeda; tahun 2019 berada di bulan Januari, tahun 2020 berada di bulan Februari, tahun 2021 berada di bulan Februari, tahun 2022 berada di bulan September, dan tahun 2023 berada di bulan Maret.



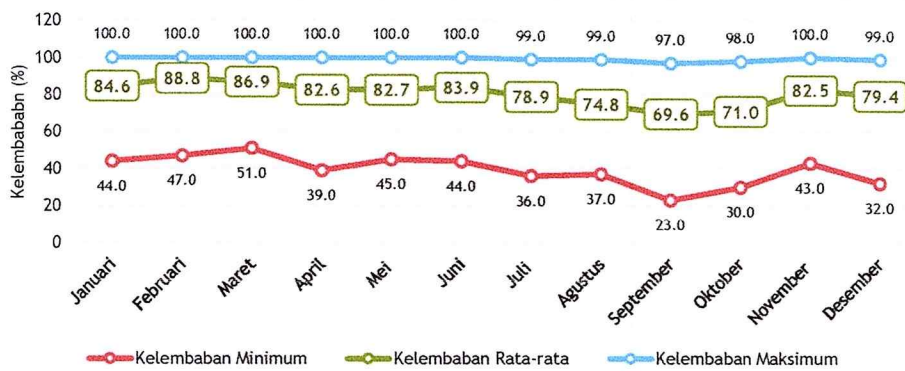
Gambar 2.7
Curah Hujan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

Suhu rata-rata pada tahun 2023 berkisar antara 26,2°C sampai 28,6°C, sedangkan suhu tertinggi pada satu tahun terakhir adalah 38,4°C yang terjadi di bulan Oktober. Sementara itu, suhu terendah adalah 20,3 °C yang terjadi di bulan Desember.



Gambar 2.8
Suhu Kabupaten Tangerang Tahun 2023
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

Kelembaban rata-rata pada tahun 2023 berkisar antara 69,6% sampai 88,8%. Kelembaban tertinggi pada satu tahun terakhir adalah 100% yang terjadi di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan November. Kelembaban terendah adalah 23,0% yang terjadi di bulan September.



Gambar 2.9
Kelembaban Udara Kabupaten Tangerang Tahun 2023
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

G. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Tangerang terdiri dari lahan persawahan; kebun campuran; perkampungan; perairan darat; perkebunan; tegalan/ladang; jasa, industri, dan pergudangan; sungai/danau; pertambangan, tanah terbuka, dan padang.

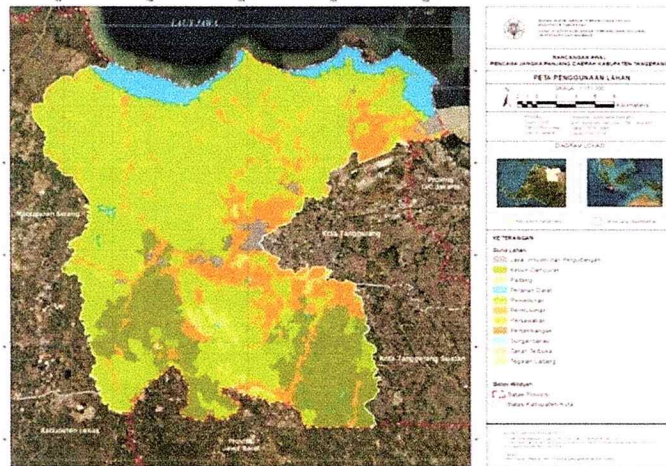
Tabel 2.2
Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No.	Guna Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Persawahan	57.431	56,08
2	Kebun Campuran	16.835	16,44
3	Perkampungan	14.874	14,52
4	Perairan Darat	5.919	5,78
5	Perkebunan	2.183	2,13
6	Tegalan/Ladang	2.049	2,00
7	Jasa, Industri, dan Pergudangan	1.785	1,74

No.	Guna Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
8	Sungai/Danau	1.126	1,10
9	Pertambangan	111	0,11
10	Tanah Terbuka	93	0,09
11	Padang	8	0,01

Sumber: Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten

Jenis penggunaan lahan terluas adalah lahan persawahan dengan luas 57.431 Ha dan persentase luasan 56,08% dari total luas wilayah Kabupaten Tangerang. Lahan persawahan tersebut umumnya berada di bagian utara dan beberapa bagian di bagian selatan. Kebun campuran sebagai lahan terluas kedua berada di bagian selatan. Guna lahan permukiman didominasi dibagian timur yang berdekatan dengan Kota Tangerang.



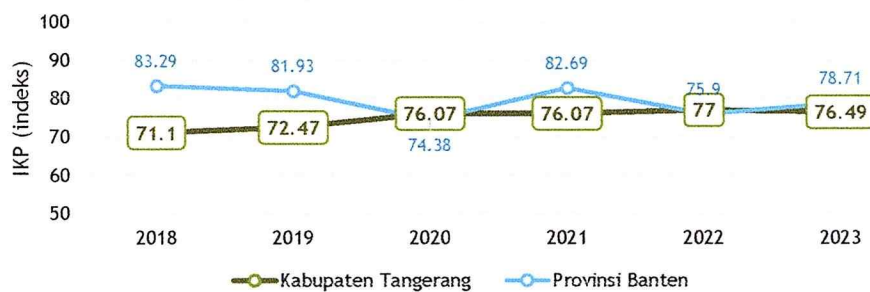
Gambar 2.10

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Sumber: Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten

H. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan ukuran dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di wilayah tertentu. Angka IKP terdiri dari beberapa dimensi penyusun yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/aksesibilitas pangan, dan pemanfaatan pangan.



Gambar 2.11

Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian Tahun 2021-2023

Berdasarkan grafik di atas, selama 6 tahun, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan. Artinya setiap tahun kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang semakin membaik, dengan kondisi stagnan di tahun 2021.

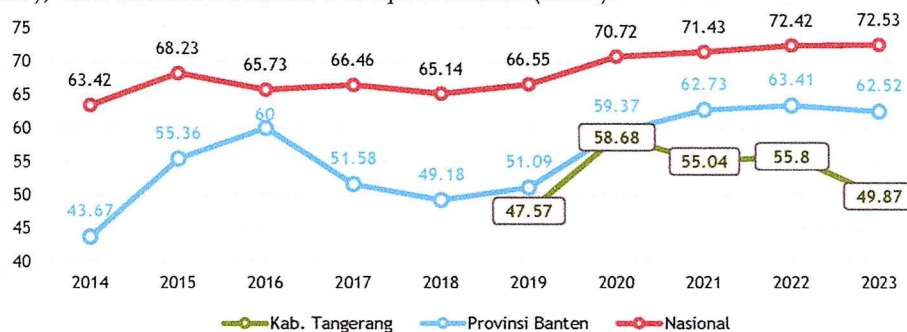
I. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Tangerang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud adalah kawasan hutan lindung (di Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Pakuhaji, Teluknaga, dan Kosambi); kawasan resapan air pada bagian hulu DAS; kawasan sempadan sungai; kawasan sempadan pantai; dan kawasan cagar budaya. Sementara itu kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan pertanian; perikanan; kawasan pertambangan dan energi; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan permukiman; kawasan pertahanan dan keamanan; serta kawasan transportasi.

Berdasarkan aktivitas ekonomi dan diarahkan dalam RTRW, Kabupaten Tangerang berpotensi untuk dikembangkan kegiatan ekonomi perdagangan dan jasa, industri, perumahan, dan pergudangan di Kecamatan Balaraja, Kecamatan Jurug, dan Kecamatan Teluknaga. Dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045, dijabarkan bahwa Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk direncanakan sebagai Kawasan Strategis *Dryport* untuk kegiatan utama transportasi dan pergudangan. Selain itu, wilayah perbatasan Kabupaten Tangerang dengan perbatasan Jakarta dengan kegiatan utama pergudangan, industri, perdagangan dan jasa perlu dioptimalkan untuk mendorong perekonomian Kabupaten Tangerang. Kawasan reklamasi berjarak 200 meter dari garis pantai utara Kabupaten Tangerang diarahkan sebagai kawasan ekonomi baru dengan kegiatan utama perumahan, pelabuhan, dan industri.

J. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana indeks ini digunakan secara nasional dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komponen IKLH ini meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).



*metode perhitungan lama

Gambar 2.12

Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014-2023

Sumber: Buku IKLH Menteri KLHK 2015, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022, RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, dan Tangerang Satu Data (diolah)

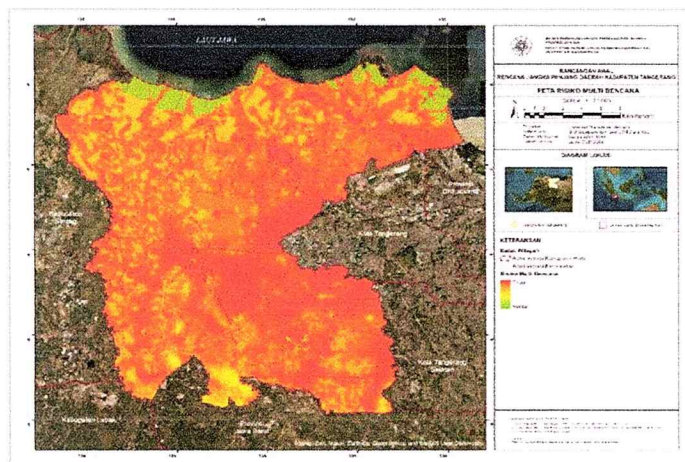
Pada tahun 2022, capaian IKLH Kabupaten Tangerang sebesar 55,8 (kategori sedang) dengan komponen IKU sebesar 71,06 (kategori baik), IKA sebesar 58,89 (kategori sedang), dan IKL sebesar 22,67 (kategori sangat kurang). Masih rendahnya capaian IKL perlu mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan. Berdasarkan dokumen Profil IKLH 2022, dijabarkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan capaian IKLH Kabupaten Tangerang yaitu peningkatan pemantauan kualitas udara, meningkatkan pelayanan IPAL domestik dan industri, pemeliharaan tanaman mangrove, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2023, IKLH memiliki komponen perhitungan baru, yaitu (1) pada IKU berupa penambahan parameter PM 2.5; (2) pada IKA berupa perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-NA; serta (3) pada IKL berupa perubahan klasifikasi tutupan lahan dan memasukkan faktor koreksi lahan gambut. Dengan konversi rumus baru, capaian IKLH Kabupaten Tangerang adalah 61,07 dengan sub komponen IKU sebesar 68,56; IKA sebesar 61,46; serta IKL sebesar 46,54.

Kualitas lingkungan hidup mempengaruhi ketahanan terhadap ancaman krisis iklim. Ancaman krisis iklim menjadi hal penting dalam arah pembangunan wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dan berita menunjukkan ancaman krisis iklim di Kabupaten Tangerang yaitu El nino musim kemarau panjang dan kenaikan muka air laut di wilayah pesisir Tangerang.

K. Indeks Risiko Bencana

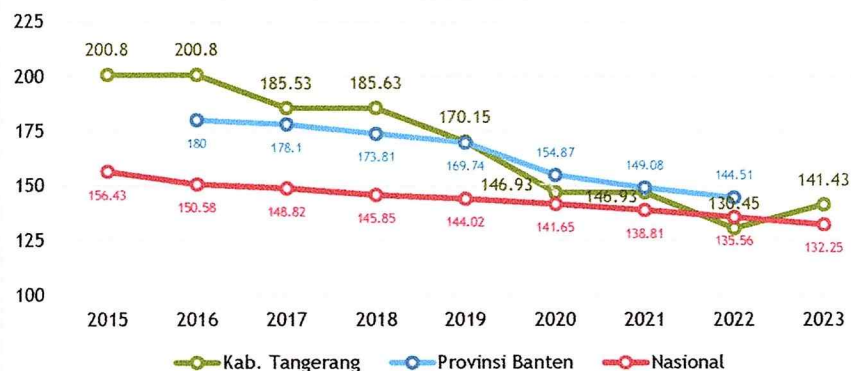
Berdasarkan data yang ditampilkan oleh InaRISK BNPB Tahun 2023, kebencanaan di kabupaten Tangerang terbagi menjadi 3 kelas bahaya diantaranya kelas bahaya rendah, sedang, dan tinggi. Kebencanaan tersebut meliputi bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan likuefaksi. Secara keseluruhan, peta berikut memperlihatkan besaran risiko multi bencana di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.13
Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Tangerang
Sumber: InaRISK BNPB, 2023 (diolah)

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tangerang menunjukkan potensi bencana geologi berupa bencana gempa bumi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Potensi bencana

tsunami terletak di sepanjang pesisir pantai utara yang berjarak 1 km dari bibir pantai, daerah yang memiliki risiko dampak parah yaitu pada Kecamatan Kronjo, Kemiri, dan Mauk. Potensi bencana banjir berupa banjir rob (pasang surut) di kawasan pesisir dan banjir di sepanjang aliran sungai. Kemudian potensi kekeringan dapat terjadi akibat curah hujan di suatu kawasan jauh di bawah curah hujan normal dalam waktu lama. Bencana ini dipicu oleh perubahan siklus iklim global yang ditandai dengan meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan.



Gambar 2.14
 Grafik Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten
 Tahun 2015-2023
 Sumber: *MaRISK BNPB, 2023*

Pada tahun 2023, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang mencapai 141,43 dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mencapai 0,69. Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Tangerang memperlihatkan tren menurun dalam kurun waktu tahun 2015-2022. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan bencana di Kabupaten Tangerang sudah sangat baik. Ancaman krisis iklim tentunya berdampak pada meningkatnya risiko bencana di Kabupaten Tangerang.

1) Luas Kawasan Rawan Banjir

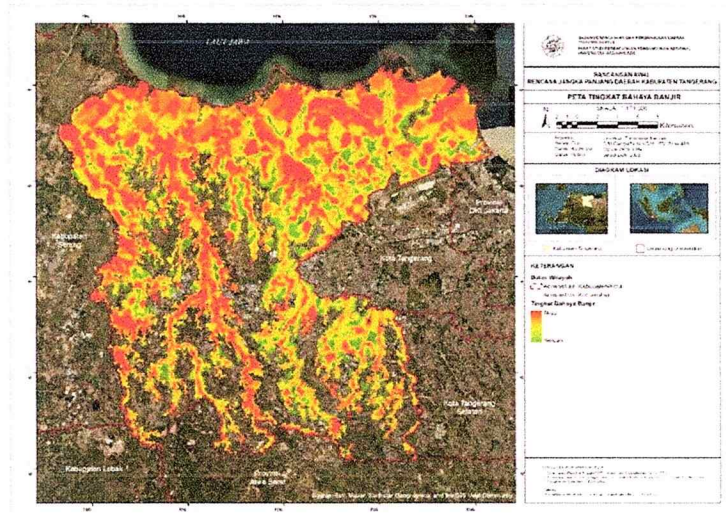
Kawasan yang masuk ke dalam area rawan banjir di Kabupaten Tangerang memiliki karakteristik topografi datar yang berada di sekitar sungai dan pesisir pantai. Potensi bencana banjir didominasi di wilayah bagian utara yang juga termasuk wilayah padat penduduk. Jika dilihat dari potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Provinsi Banten pada tabel berikut, diketahui Kabupaten Tangerang menjadi wilayah dengan kategori tinggi dalam tingkat kerawanan bencana banjir.

Tabel 2.3
 Potensi Banjir di Provinsi Banten Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Bahaya (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Kabupaten Lebak	403	14.356	16.775	31.534	TINGGI
Kabupaten Pandeglang	793	26.636	31.252	58.681	TINGGI
Kabupaten Serang	1.687	31.616	41.596	74.898	TINGGI
Kabupaten Tangerang	1.528	31.408	34.391	67.327	TINGGI
Kota Cilegon	38	2.568	2.013	4.619	TINGGI
Kota Serang	650	7.690	4.230	12.570	SEDAN G
Kota Tangerang	580	8.544	3.727	12.851	TINGGI
Kota Tangerang Selatan	71	3.537	1.892	5.499	TINGGI

Provinsi Banten	5.750	126.35 4	135.87 6	267.98 0	TINGGI
-----------------	-------	-------------	-------------	-------------	--------

Sumber: Dokumen KRB Provinsi Banten Tahun 2021



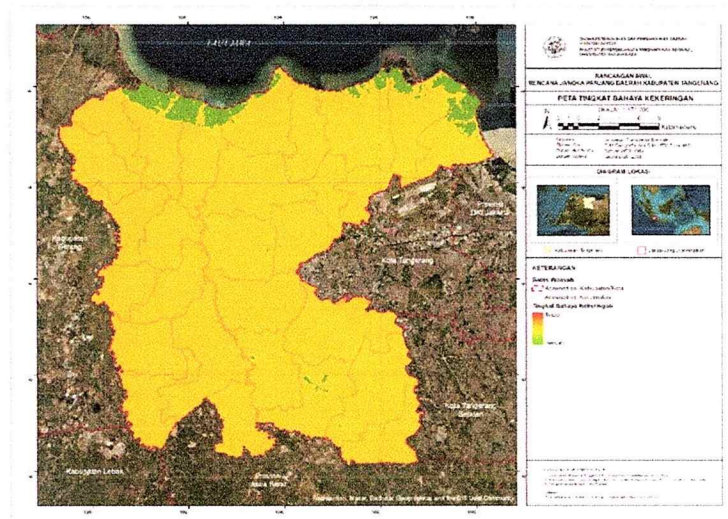
Gambar 2.15
Peta Tingkat Bahaya Banjir Kabupaten Tangerang
Sumber: InaRISK BNPB, 2023

2) Luas Kawasan Rawan Kekeringan
Potensi bahaya kekeringan dilihat berdasarkan parameter faktor meteorologi dan kemampuan tanah dalam menyimpan air. Berdasarkan parameter tersebut, Kabupaten Tangerang dikategorikan sebagai tingkat bahaya sedang di Provinsi Banten dengan total luas 101.186 Ha. Secara lebih rinci, potensi luas dan kelas bahaya kekeringan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Tabel 2.4
Potensi Kekeringan di Provinsi Banten Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Bahaya (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Kabupaten Lebak	-	342.326	330	342.656	SEDANG
Kabupaten Pandeglang	-	149.015	125.674	274.689	TINGGI
Kabupaten Serang	-	131.304	42.124	173.428	TINGGI
Kabupaten Tangerang	-	101.186	-	101.186	SEDANG
Kota Cilegon	-	16.199	1.351	17.550	SEDANG
Kota Serang	-	26.671	-	26.671	SEDANG
Kota Tangerang	-	15.393	-	15.393	SEDANG
Kota Tangerang Selatan	-	14.719	-	14.719	SEDANG
Provinsi Banten	-	796.812	169.480	966.292	TINGGI

Sumber: Dokumen KRB Provinsi Banten Tahun 2021



Gambar 2.16
Peta Tingkat Bahaya Kekeringan di Kabupaten Tangerang
Sumber: InaRISK BNPP, 2023

2.1.2 Aspek Demografi

Demografi adalah studi tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran keruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu (Harmadi, S., 2008). Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan sejarah kependudukan, ada dua pemahaman terkait hubungan antara penduduk dan perubahannya dengan pembangunan suatu wilayah.

A. Jumlah dan Struktur Penduduk

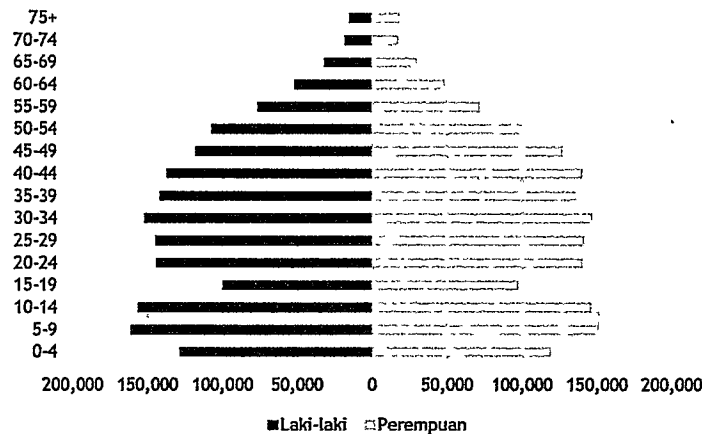
Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kabupaten Tangerang yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang (Jiwa) Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	128.715	118.538	247.253
05-09	161.588	149.909	311.497
10-14	156.204	145.527	301.731
15-19	99.302	97.164	196.466
20-24	144.228	139.862	284.090
25-29	144.568	140.722	285.290
30-34	152.183	146.657	298.840
35-39	141.590	135.122	276.712
40-44	137.169	139.910	277.079
45-49	118.067	126.550	244.617
50-54	107.374	102.314	209.688
55-59	76.279	71.063	147.342
60-64	51.477	47.900	99.377
65-69	31.830	29.048	60.878
70-74	18.183	16.988	35.171
75+	15.084	18.250	33.334

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Total	1.683.841	1.625.524	3.309.365

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2024



Gambar 2.17

Piramida Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2024

Secara garis besar, karakteristik penduduk di Kabupaten Tangerang dapat dilihat melalui piramida penduduk. Piramida penduduk Kabupaten Tangerang adalah piramida penduduk muda yang menunjukkan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Karakteristik penduduk ini menunjukkan ada laju pertumbuhan yang cukup cepat dengan populasi yang masih muda dan berkembang. Kelompok umur dengan populasi paling banyak adalah kelompok umur 25-29 tahun disusul dengan kelompok umur 5-9 tahun. Dengan mengasumsikan bahwa terdapat distribusi setara di dalam tiap kelompok umur, generasi millennial yaitu generasi usia produktif yang lahir pada tahun 1981-1996 (atau berumur 26-41 tahun) mendominasi karakteristik penduduk di Kabupaten Tangerang. Generasi Z dan Generasi X kemudian menyusul di urutan kedua dan ketiga secara berurutan.

Tabel di bawah ini merupakan data jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2023. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pasar Kemis yang terdiri atas 255,35 ribu jiwa penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Mekar Baru.

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk(Jiwa)	Persentase (%)
1	Cisoka	97.591	2,95
2	Solear	101.969	3,08
3	Tigaraksa	163.531	4,94
4	Jambe	55.650	1,68
5	Cikupa	209.140	6,32
6	Panongan	129.996	3,93
7	Curug	176.617	5,34
8	Kelapa Dua	167.553	5,06
9	Legok	124.324	3,76
10	Pagedangan	111.222	3,36
11	Cisauk	91.438	2,76

12	Pasar Kemis	255.345	7,72
13	Sindang Jaya	95.575	2,89
14	Balaraja	124.129	3,75
15	Jayanti	70.728	2,14
16	Suka Mulya	74.309	2,25
17	Kresek	71.795	2,17
18	Gunung Kaler	56.160	1,70
19	Kronjo	65.599	1,98
20	Mekar Baru	44.152	1,33
21	Mauk	91.382	2,76
22	Kemiri	50.977	1,54
23	Sukadiri	66.679	2,01
24	Rajeg	188.209	5,69
25	Sepatan	112.289	3,39
26	Sepatan Timur	105.994	3,20
27	Pakuhaji	127.330	3,85
28	Teluknaga	167.977	5,08
29	Kosambi	111.705	3,38
	Total	3.309.365	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2024

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan dalam dokumen ini adalah metode geometrik. Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2012 hingga 2023 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun melambat.



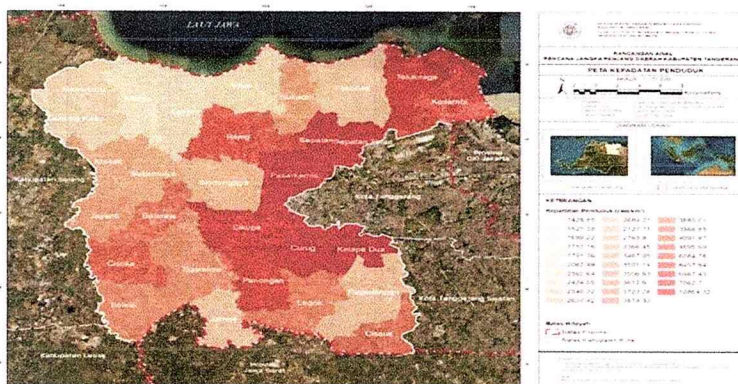
Gambar 2.18

Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2012 – 2023

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

C. Distribusi / Pesebaran Penduduk

Jika dilihat dari persebaran jumlah penduduk, maka Kabupaten Tangerang memiliki persebaran yang tidak merata (lihat Gambar 2.19) dengan perbedaan hingga 86 persen antara kecamatan yang terpadat dan terendah kepadatannya. Kepadatan penduduk paling tinggi ditemukan di Kecamatan Pasar Kemis di angka 10.864,31 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kronjo dengan kepadatan sebesar 1.428,9 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan tinggi adalah kecamatan yang berbatasan dengan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Provinsi DKI Jakarta. Pertumbuhan kepadatan paling tinggi terjadi di Kecamatan Rajeg dengan peningkatan kepadatan penduduk hingga 40%. Kecamatan ini juga mengalami laju pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.



Gambar 2.19
Peta Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022
Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2023 (diolah)

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro dengan menggunakan perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun untuk menjadi gambaran pembangunan suatu wilayah. Perekonomian Kabupaten Tangerang yang didukung oleh sektor industri dan perdagangan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, PDRB ADHK Kabupaten Tangerang sebesar 108.570,43 miliar rupiah dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,18% dan capaian tersebut diatas provinsi dan nasional. Jika melihat berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sektor lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 10,98% dan sektor lapangan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,34%.



Gambar 2.20
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2023
Sumber: Hasil Olahan, 2023

Gambar diatas menunjukkan perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang dengan provinsi dan nasional. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang berada di atas nasional, tetapi cenderung mengalami perlambatan. Periode tahun 2019-2020 terjadi perlambatan ekonomi sebagai dampak dari pandemi dan mampu untuk kembali pulih tahun 2021-2022. Pada tahun 2023, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang mencapai 5,18%

dan capaian tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Provinsi Banten (4,81%) dan nasional (5.05%), capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2023 lebih tinggi.

- PDRB menurut Lapangan Usaha

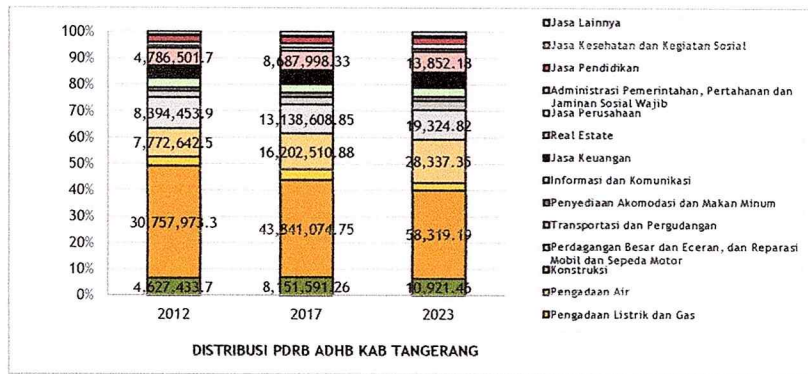
Tabel 2.7

PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (dalam Miliar Rupiah)

Kode	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.045,55	9.435,98	9.473,10	10.135,98	10.921,46
B	Pertambangan dan Penggalian	58,54	55,54	50,93	45,88	47,24
C	Industri Pengolahan	49.164,34	45.200,55	48.117,52	53.176,12	58.319,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.693,53	4.096,16	4.630,76	4.936,40	4.893,85
E	Pengadaan Air	85,48	93,49	100,24	102,87	110,41
F	Konstruksi	20.797,30	20.159,33	23.459,65	26.926,03	28.337,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.234,31	15.934,12	16.403,33	17.698,47	19.324,82
H	Transportasi dan Pergudangan	4.320,45	4.148,08	4.651,38	5.330,79	6.083,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.133,60	2.021,19	2.123,07	2.342,57	2.586,71
J	Informasi dan Komunikasi	4.505,50	4.898,70	5.144,75	5.553,03	6.132,02
K	Jasa Keuangan	7.290,26	7.412,07	8.239,97	9.597,07	9.774,50
L	Real Estate	10.957,41	11.392,27	11.859,43	12.706,97	13.852,18
M.N	Jasa Perusahaan	1.537,10	1.470,01	1.454,75	1.569,84	1.769,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.469,16	2.571,45	2.618,05	2.742,84	2.941,08
P	Jasa Pendidikan	3.899,57	3.981,03	3.957,24	4.030,36	4.404,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	656,87	695,57	774,48	811,76	917,25
R.S.T.U	Jasa lainnya	2.240,33	2.166,13	2.225,00	2.461,19	2.886,34
PDRB (dalam miliar rupiah)		140.089,29	135.731,68	145.283,68	160.168,18	173.302,66

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Pada tahun 2023, PDRB ADHB Kabupaten Tangerang sebesar 173.302,66 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 58.319,19 miliar rupiah (33,65% dari PDRB), lapangan usaha konstruksi sebesar 28.337,35 miliar rupiah (16,35% dari PDRB) dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19.324,82 miliar rupiah (11,15% dari PDRB).



Gambar 2.21

Diagram Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Tangerang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012, Tahun 2017, dan Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Gambar di atas menunjukkan diagram distribusi lapangan usaha pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Tangerang. Dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kontribusi lapangan usaha terbesar adalah sektor industri pengolahan. Di Kabupaten Tangerang terdapat beberapa kawasan industri besar dengan jenis industri petrokimia, barang logam, dan industri makanan, akan tetapi persentase kontribusi sektor tersebut menurun. Hal ini menunjukkan pergeseran struktur PDRB Kabupaten Tangerang dari sektor sekunder (industri) ke sektor tersier (perdagangan dan jasa). Selain itu, kontribusi lapangan usaha Konstruksi terus meningkat dan menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar kedua. Hal tersebut dipicu oleh pembangunan infrastruktur Kabupaten Tangerang seperti proyek strategis nasional dan regional Provinsi Banten.

Selain itu dalam dokumen RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026 dijabarkan mengenai penentuan sektor basis dan non basis sektor unggulan di Kabupaten Tangerang tahun 2015-2022. Berdasarkan hasil analisis LQ, bahwa terdapat lima sektor basis di Kabupaten Tangerang yaitu (1) Jasa Keuangan dan Asuransi; (2) Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Konstruksi; (4) Industri Pengolahan; serta (5) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara itu berdasarkan analisis *shift share* ditemukan bahwa seluruh sektor lapangan usaha (17 lapangan usaha) yang ada di Kabupaten Tangerang tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan rata-rata Provinsi Banten.

- PDRB menurut Pengeluaran

Tabel 2.8

PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)

PDRB Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tangerang (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	72.998.709,26	71.693.730,68	74.770.602,15	81.562.475,55	88.641.195,83
Konsumsi LNPRT	710.429,81	679.685,90	701.768,54	749.881,39	811.729,66
Konsumsi Pemerintah	5.031.644,99	4.621.839,02	4.890.012,15	5.219.166,20	6.001.089,65
Pembentukan Modal Tetap Bruto	35.233.021,18	35.450.044,41	37.900.875,49	40.717.192,10	46.853.056,17
Perubahan Inventori	4.346,34	716,21	61,28	300,11	49.843,77
Ekspor	98.587.772,18	94.833.778,71	105.562.340,92	132.194.567,86	150.386.973,45
Impor	72.476.636,17	71.548.113,04	78.541.984,01	100.275.406,41	119.441.224,54
PDRB	140.089.287,58	135.731.681,88	145.283.676,52	160.168.176,80	173.302.663,99

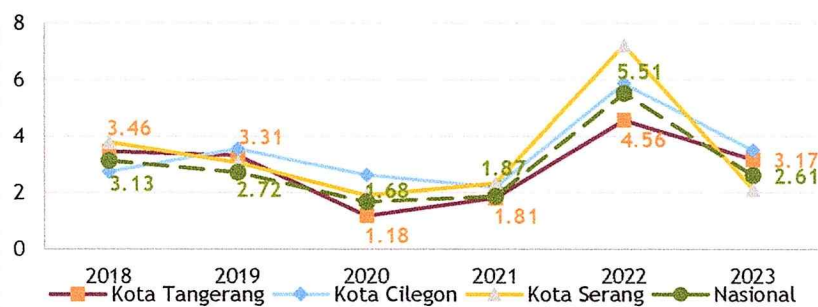
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Selain dilihat berdasarkan lapangan usaha, kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran pelaku ekonominya. Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran tahun 2023, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi terbesar yaitu sekitar 50,92%. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat inflasi di Provinsi Banten yang mempengaruhi dengan daya beli masyarakat konsumsi barang dan jasa yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada Desember 2023, Tangerang mengalami inflasi yoy (*year on year*) sebesar 3,71%. Selain itu, ekspor luar wilayah juga mempunyai peran penting yaitu sebesar 82,53% produk wilayah Kabupaten Tangerang diekspor ke luar wilayah.

Sementara itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang dapat menggambarkan investasi, memberikan kontribusi sebesar 25,42% kepada perekonomian. Kinerja investasi Kabupaten Tangerang terlihat dari laju kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN. Dalam lima tahun terakhir, nilai PMDN Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif dan berhasil meningkat 55,3 dari tahun 2021-2022 (DPMPTSP, 2022). Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

B. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/ penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat kesejahteraan masyarakat. Pada Desember 2023, Tangerang mengalami inflasi yoy (*year on year*) sebesar 3,71 persen. Inflasi di Tangerang disebabkan oleh kenaikan harga dari indeks 10 kelompok pengeluaran. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy di Kota Tangerang (per Desember 2023) yaitu (1) kelompok makanan, minuman, dan tembakau; (2) kelompok perawasan pribadi dan jasa lainnya; serta (3) kelompok pakaian dan alas kaki.



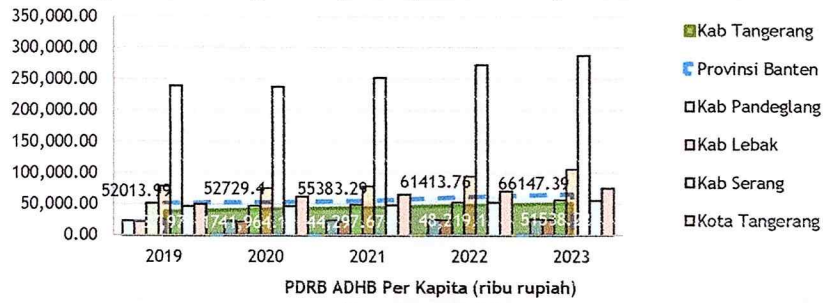
Gambar 2.22
Perbandingan Tingkat Inflasi Umum Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Nasional Tahun 2018-2023
Sumber: BPS Nasional (diolah)

C. PDRB per kapita

Kesejahteraan penduduk dapat digambarkan dengan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menurut harga konstan sebesar 32,29 juta rupiah dan menurut harga berlaku sebesar 51,54 juta rupiah.

Gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan PDRB ADHB per kapita menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten. Berdasarkan grafik tersebut, PDRB ADHB Kabupaten Tangerang lebih rendah dibanding Provinsi Banten yang sebesar 66,15 juta rupiah. PDRB ADHB Kota Cilegon menjadi

yang tertinggi sebesar 287,53 juta rupiah, sementara Kabupaten Tangerang terendah ketiga dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.



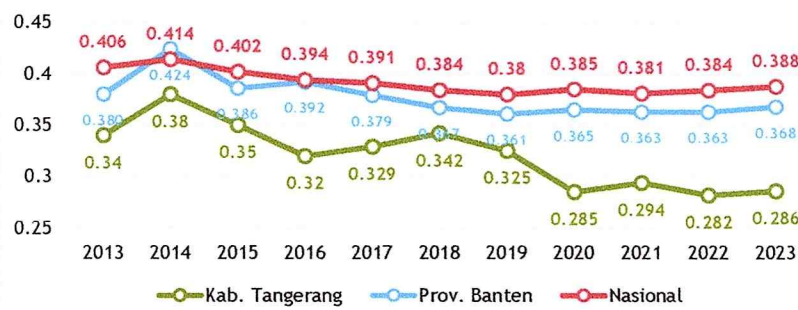
Gambar 2.23

Perbandingan PDRB ADHB per Kapita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

D. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah tertentu. Hasil perhitungan berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati satu maka semakin parah ketimpangan di wilayah tersebut. Indeks Gini Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 0,286 yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah. Grafik diatas menunjukkan dalam 10 tahun terakhir Indeks Gini Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan lebih rendah dibanding Indeks Gini Provinsi Banten dan nasional.



Gambar 2.24

Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2013-2023

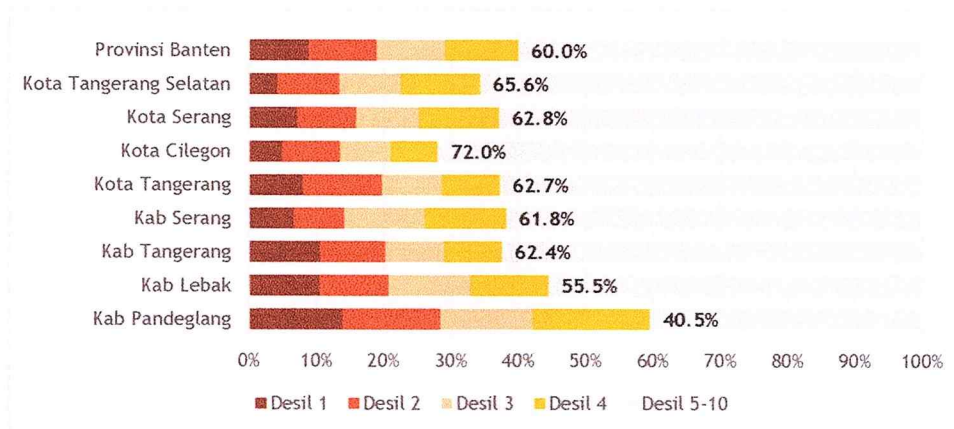
Sumber: Statistik Indeks Gini Menurut Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 dan Provinsi Banten dalam Angka 2023 (diolah)

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023, ketimpangan di Kabupaten Tangerang dipengaruhi oleh kurang berkembangnya sektor pertanian, nilai tambah sektor pertanian yang rendah, produktivitas tenaga kerja (sektor rumah makan, hotel, dan restoran) yang rendah, industri padat modal yang membutuhkan sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah yang tinggi, dan berbagai faktor lainnya.

E. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

Pemerataan pendapatan (ukuran Bank Dunia) diukur dengan persentase jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Diagram dibawah ini menunjukkan persentase jumlah penduduk berdasarkan

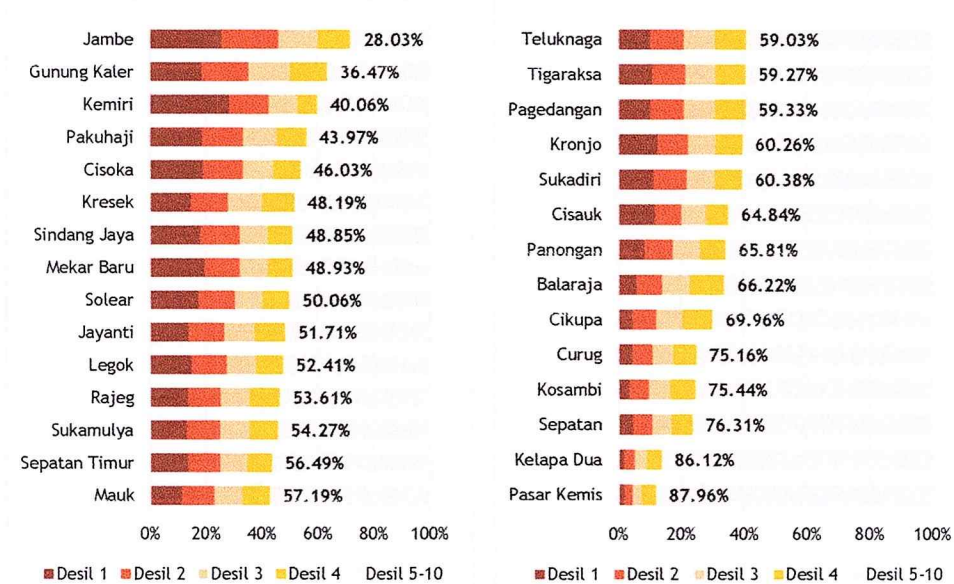
kelompok pendapatan desil 1 (10%), desil 2(20%), desil 3 (30%), desil 4 (40%), desil 5-10 (> 40%).



Gambar 2.25

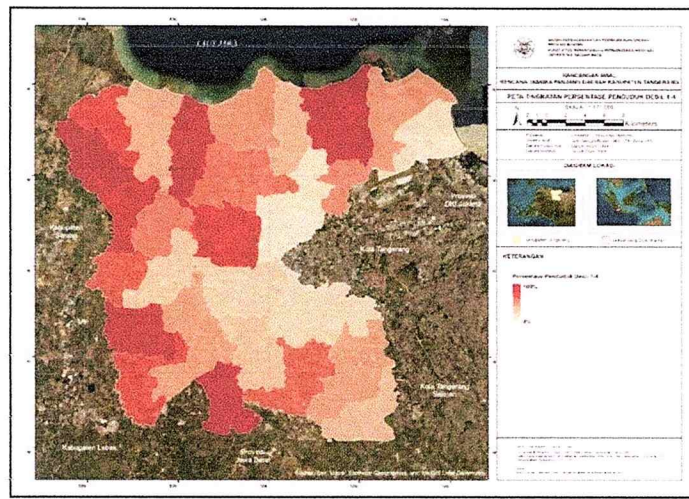
Perbandingan Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendapatan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2022
 Sumber: Website P3KE Kemenko PMK (<https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>)

Berdasarkan diagram diatas, bahwa persentase penduduk dengan berpendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 37,6% atau 1.260.022 jiwa. Capaian tersebut lebih baik dibanding Provinsi Banten sebesar 40% dari jumlah penduduk Banten. Pada tahun 2022, jumlah penduduk dalam desil 1 sebanyak 356.068 jiwa (8,1%), desil 2 sebanyak 321.511 jiwa (9,6%), desil 3 sebanyak 296.699 (8,9%), dan desil 4 sebanyak 285.804 jiwa (8,5% dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang).



Gambar 2.26

Perbandingan Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendapatan menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022
 Sumber: Website P3KE Kemenko PMK (<https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>)

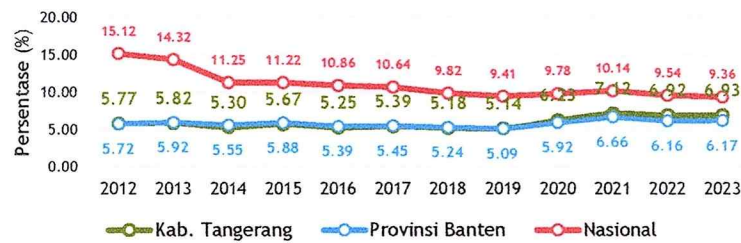


Gambar 2.27
Peta Tingkat Persentase Penduduk Berpendapatan Desil 1-4
Sumber: Hasil Olahan, 2023

Berdasarkan kecamatan dengan jumlah penduduk desil 1-4 terbesar yaitu Kecamatan Rajeg. Berdasarkan diagram diatas, bahwa persentase penduduk terbesar dengan kelompok berpendapatan 40% terendah (Desil 1-4) yaitu Kecamatan Jambe dengan jumlah penduduk Desil 1-4 sebesar 38.634 jiwa atau 71,97% dari jumlah penduduk kecamatan tersebut. Sementara itu persentase penduduk terendah untuk kelompok Desil 1-4 adalah Kecamatan Pasar Kemis yang sebesar 33.891 atau 12,04% dari jumlah penduduk kecamatan tersebut.

F. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pada tahun 2023, Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang sebesar 604.362 rupiah/kapita/bulan. Angka tersebut di lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten yang sebesar 618.721 rupiah/kapita/bulan.



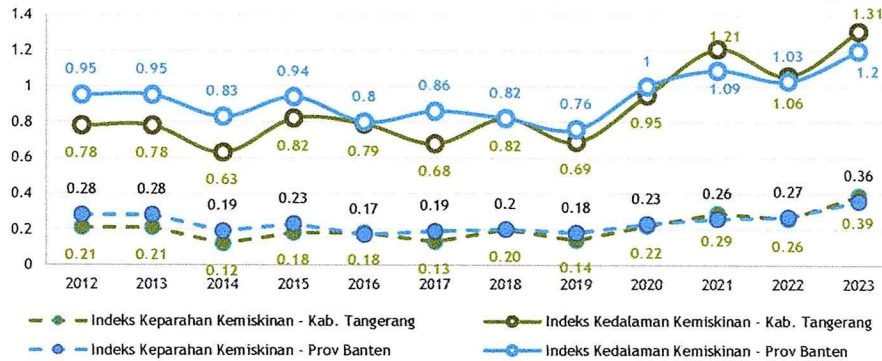
Gambar 2.28
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2012-2023
Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional (diolah)

Gambar di atas menunjukkan perbandingan Persentase Penduduk Miskin (PPM) Kabupaten Tangerang dengan provinsi dan nasional dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan grafik tersebut, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang sebesar 6,92% dimana mengalami peningkatan menjadi 6,93% (2023) dan posisinya di bawah nasional. Namun, dalam lima

tahun terakhir persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang meningkat dan di atas persentase penduduk miskin Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tertinggi ketiga di mana yang tertinggi adalah Kabupaten Pandeglang sebesar 9,27% sementara yang terendah adalah Kota Tangerang Selatan yang sebesar 2,57%.

G. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi Indeks Keparahan Kemiskinan maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Gambar 2.29
Perbandingan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2012-2023
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Pada tahun 2023, Indeks Keparahan kemiskinan Kabupaten Tangerang sebesar 1,31 dan berada di atas provinsi yang mencapai 1,2. Sementara itu, Indeks Kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tangerang sebesar 0,39 dan berada di atas provinsi yang mencapai angka 0,36.

H. Persentase Keluarga Pra Sejahtera

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 tahapan yaitu keluarga pra sejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KSI), keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, dan keluarga sejahtera III plus, di mana masing-masing tahapan terdapat indikator penilaiannya. Keluarga Pra Sejahtera (KPS) yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*).

Tabel 2.9
Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Keluarga di Provinsi Banten Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Keluarga Prasejahtera	Keluarga Sejahtera		Jumlah
		I	II	
Kab Pandeglang	71.065	181.082	66.598	318.745
Kab Lebak	67.211	206.557	83.969	357.737
Kab Tangerang	109.242	355.235	148.328	612.805
Kab Serang	61.082	239.872	92.347	393.301
Kota Tangerang	40.139	191.369	94.318	325.826
Kota Cilegon	9.952	53.629	35.717	99.298

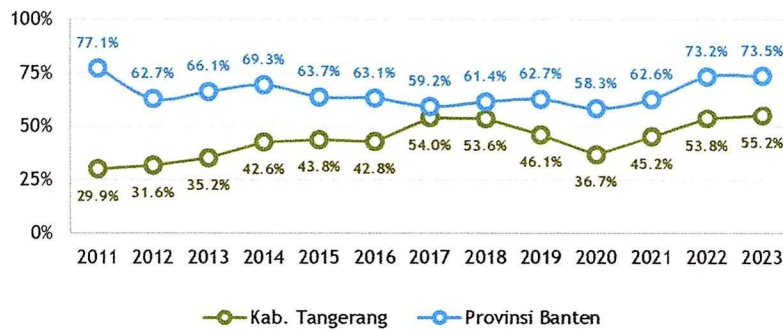
Kabupaten/Kota	Keluarga Prasejahtera	Keluarga Sejahtera		Jumlah
		I	II	
Kota Serang	23.030	74.459	46.780	144.269
Kota Tangerang Selatan	31.573	95.253	104.732	231.558
Provinsi Banten	413.294	1.397.456	672.789	2.483.539

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan tabel diatas, bahwa keluarga pra sejahtera di Kabupaten Tangerang sebesar 109.242 keluarga atau 17,83% dari jumlah keluarga. Sementara di Provinsi Banten keluarga pra sejahtera sebesar 413.294 keluarga atau 16,64%. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, persentase keluarga pra sejahtera Kabupaten Tangerang ke-tiga tertinggi setelah Kab Pandeglang (22,30% dari jumlah keluarga) dan Kab Lebak (18,79% dari jumlah keluarga).

I. Persentase PAD terhadap pendapatan atau Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan ukuran kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah yang dihitung dengan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Berdasarkan gambar di bawah, Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tangerang dalam kategori Cukup (30-40%) dan Baik (40-50%). Dalam 10 tahun terakhir, DDF Kabupaten Tangerang lebih rendah dibanding Provinsi Banten.



Gambar 2.30
Perbandingan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2011-2023
Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks kualitas keluarga merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia, basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Nilai indeks kualitas keluarga di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 72,49 menjadi 76,38 di tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan kategori kualitas keluarga di Provinsi Banten adalah 'Responsif Gender dan Hak Anak'. Di tahun 2023, Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Tangerang mencapai angka 64,71 (DPPPA Kabupaten Tangerang)

B. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Di tahun 2022, capaian IPA Provinsi Banten adalah 64,33 sementara capaian Kabupaten Tangerang adalah 63,48 (Kementerian PPPA, 2022).

C. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah instrumen yang menggambarkan perkembangan kemajuan pada ranah kebudayaan. IPK berperan sebagai alat ukur pencapaian dalam pembangunan kebudayaan bagi pemerintah pusat dan daerah. Saat ini belum dilakukan pengukuran untuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, IPK Kabupaten Tangerang dicerminkan dari nilai IPK Provinsi Banten, sebagai gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan daerah yang diukur dari dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Adapun capaian IPK Provinsi Banten dari tahun 2018 sampai dengan 2023 mengalami fluktuatif, yaitu 49,69; 51,43; 48,95; 47,47; 51,41; dan 52,49. Selama kurun waktu enam tahun, capaian tersebut masih di bawah capaian nasional.

D. Pendidikan

1) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf menunjukkan pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Indikator ini penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Gambar dibawah ini menunjukkan Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional dari tahun 2012-2023.



Gambar 2.31

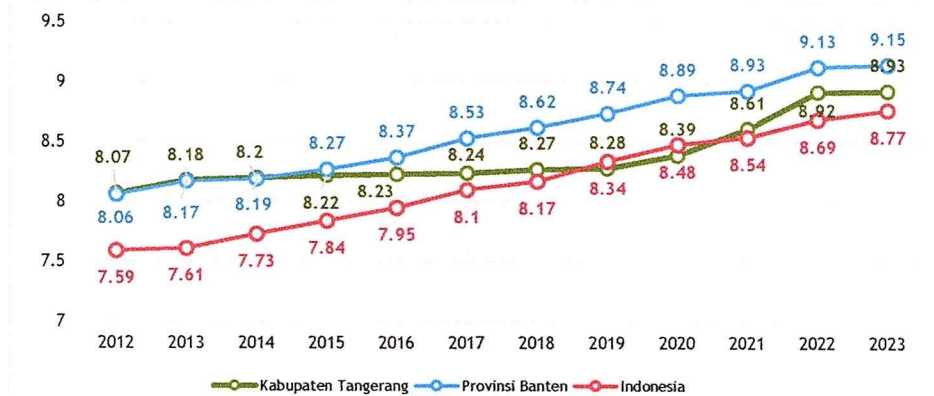
Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2012 – 2023

Sumber: BPS Nasional dan BPS Kabupaten Tangerang (2022)

Berdasarkan grafik di atas bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif dengan kemiripan tren dengan Provinsi Banten. Pada tahun 2023 angka melek huruf di Kabupaten Tangerang adalah sebesar 97,96%. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang merupakan angka tertinggi. Dibandingkan dengan capaian provinsi angka melek huruf di Kabupaten Tangerang lebih rendah pada pada tahun 2012 hingga tahun 2020 dan meningkat lebih tinggi dari Provinsi Banten pada tahun 2021 dengan gap yang kecil.

2) Angka Rata- Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia dalam bab pengetahuan. Untuk menghitung Rata - Rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi mengenai partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Analisis ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Berikut adalah diagram RLS Kabupaten Tangerang dan perbandingannya dengan Provinsi Banten dan Indonesia.



Gambar 2.32

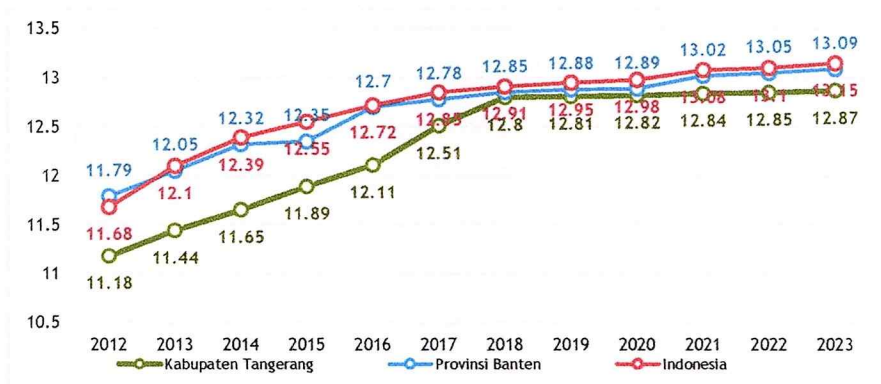
Grafik Rata - Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tangerang dengan Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang dan Nasional, 2023

Capaian indikator RLS Kabupaten Tangerang dalam sepuluh tahun terakhir telah mampu melampaui capaian nasional pada tahun 2023. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Tangerang adalah 8,93 tahun sementara capaian nasional tercatat sebesar 8,77 tahun. Namun capaian kabupaten masih lebih rendah daripada capaian Provinsi Banten yang sebesar 9,15 tahun. Capaian RLS mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di kabupaten ini telah mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas tiga pada jenjang sekolah menengah pertama.

3) Angka Harapan Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di daerah.



Gambar 2.33

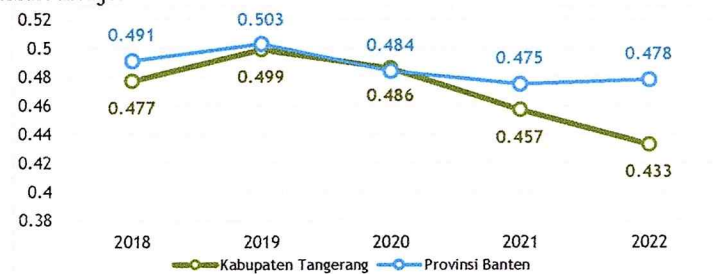
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2012 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang dan Nasional, 2023

Berdasarkan gambar di atas, capaian HLS Kabupaten Tangerang masih berada di bawah capaian nasional menurut gambar di atas dengan dengan gap yang kecil yaitu capaian Kabupaten Tangerang tercatat sebesar 12,87 tahun dan capaian nasional sebesar 13,09 tahun di tahun 2023. Dalam dimensi pengetahuan tersebut, anak-anak berusia tujuh tahun di Kabupaten Tangerang memiliki harapan dapat menjalani pendidikan selama 12 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I.

4) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung Indeks Ketimpangan Gender meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja.



Gambar 2.34

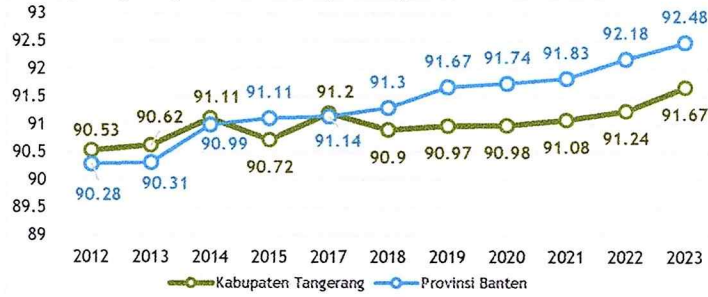
Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Tangaerang Tahun 2018 - 2022

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang

5) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG membutuhkan data IPM yang terdiri dari tiga unsur, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar

hidup layak. Semakin mendekati 100, maka semakin kecil ketimpangan pembangunan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki



Gambar 2.35

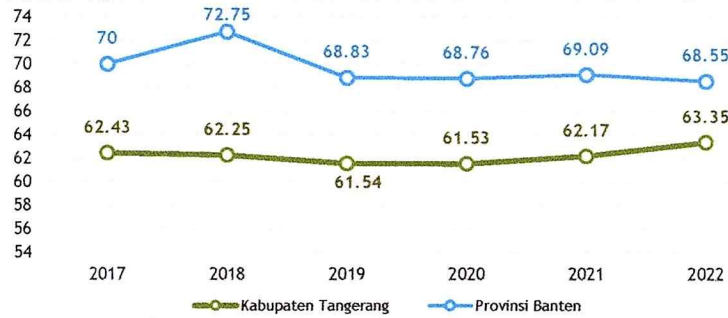
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, 2023

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang mengalami tren peningkatan tiap tahunnya sejak tahun 2018. Namun meskipun demikian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang selalu berada di bawah Provinsi Banten pada tahun 2012-2023.

6) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur yang mencerminkan tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam aspek ekonomi dan politik. IDG fokus pada tingkat partisipasi dengan cara mengukur kesenjangan gender dalam sektor ekonomi, partisipasi politik, dan proses pengambilan keputusan. IDG memiliki beberapa dimensi, termasuk representasi di lembaga parlemen, proses pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan.



Gambar 2.36

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang Tahun 2017 – 2022

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang

E. Kesehatan

1) Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi balita dapat diukur berdasarkan indeks berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Gizi kurang dan gizi buruk didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Gizi buruk didefinisikan sebagai keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi dan atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 0 - 59 bulan. Berikut merupakan grafik prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.37

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 - 2022
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 – 2023 dan Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Peningkatan prevalensi balita gizi buruk terlihat sangat jelas pada tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada tantangan akses menuju fasilitas Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi yang sesuai yang juga bisa disebabkan oleh kemampuan perekonomian masyarakat yang tidak baik pada saat pandemi.

2) Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang merupakan keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 sampai -3 standar deviasi, dan atau lingkar lengan 11,5 - 12,5 cm pada anak usia 0 - 59 bulan. Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk digunakan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga perlu menjadi prioritas dalam upaya perbaikan pangan dan gizi.



Gambar 2.38

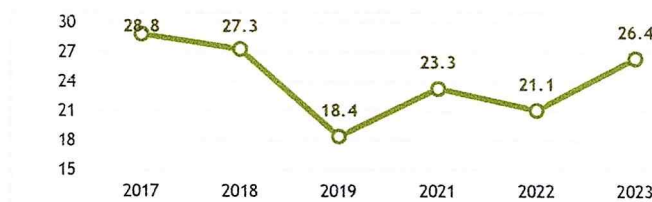
Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 - 2022
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 – 2023 dan Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Tren prevalensi balita gizi kurang cenderung menurun dari tahun 2014 – 2019 dan meningkat pada tahun 2020 kemudian kembali menurun mendekati capaian tahun sebelum pandemi pada tahun 2021 dan pada meningkat lagi pada tahun 2022 dan 2023 dengan angka stagnan sebesar 2,5%.

3) Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi anak di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting diukur menggunakan panjang/tinggi badan menurut umur bila Z-Score TB/U atau PB/U kurang dari -2 SD. Menurut Ruswati (2021) penyebab dari stunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung.

Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi anak dan berdampak pada stunting. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan.



Gambar 2.39

Prevalensi Stunting di Kabupaten Tangerang Tahun 2017 - 2023

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

Angka Stunting di Kabupaten Tangerang cenderung menurun pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2017. Angka stunting tertinggi ada di tahun 2021 dengan 23,3%. Kementerian Kesehatan di lain sisi menargetkan prevalensi stunting untuk ditekan menuju angka 14% pada tahun 2024 dengan laju penurunan 3,8% per tahunnya. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 – 2022 di Kabupaten Tangerang adalah sebesar 2,2% dan untuk mencapai target dari nasional perlu diturunkan sebesar kurang lebih 3,55% tiap tahunnya selama 2022-2024.

F. Pertanian

1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Legalitas aset tanah melalui sertifikat memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tanah, memberikan rasa aman masyarakat atas kepemilikan tanah, dan meningkatkan akses masyarakat pada lembaga keuangan. Sehingga, tanah bersertifikat dapat berdampak untuk meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Mardiana, Siregar, & Juanda, 2016). Statistik menunjukkan luas lahan bersertifikat di Kabupaten Tangerang selalu mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2012, bidang tanah bersertifikat di Kabupaten Tangerang diketahui seluas 351.647.197 m², angka ini meningkat hingga mencapai 805.777.901 m² pada tahun 2023. Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Tangerang diperlihatkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 10

Luas Bidang Tanah Bersertifikat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023

Kota/Kabupaten	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Kabupaten Serang	454.252.308	510.083.027	522.091.680	538.079.446	562.549.439	566.877.321
Kabupaten Pandeglang	790.256.887	899.709.147	920.461.888	977.208.302	999.909.468	1.000.140.317
Kabupaten Lebak	1.019.641.060	1.188.511.579	1.236.040.225	1.316.292.566	1.351.779.946	1.354.539.661
Kabupaten Tangerang	654.285.519	712.925.639	731.891.905	766.452.433	798.495.925	805.777.901
Kota Tangerang	191.758.851	200.197.969	205.158.781	208.376.658	211.945.706	212.317.761
Cilegon	115.417.822	121.892.064	125.764.958	127.411.702	129.328.508	129.820.752
Tangerang Selatan	142.078.340	152.112.009	155.086.435	158.131.721	160.336.693	160.756.978
Kota Serang	116.690.672	130.494.848	143.293.871	152.883.631	156.668.624	156.987.568
Provinsi Banten	3.484.381.459	3.915.926.282	4.039.789.743	4.244.836.459	4.371.014.309	4.387.218.259

Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, 2023

2) Penyelesaian Izin Lokasi

Mengadaptasi dari Peraturan Menteri Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha atau perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk syarat izin usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya. Izin Lokasi diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen kepada pelaku usaha yang memerlukan tanah untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki atau menguasai tanah sebagai syarat terbitnya Izin Usaha. Menurut data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Banten, diketahui sebanyak 238 usaha mengajukan permohonan izin lokasi pada Tahun 2021.

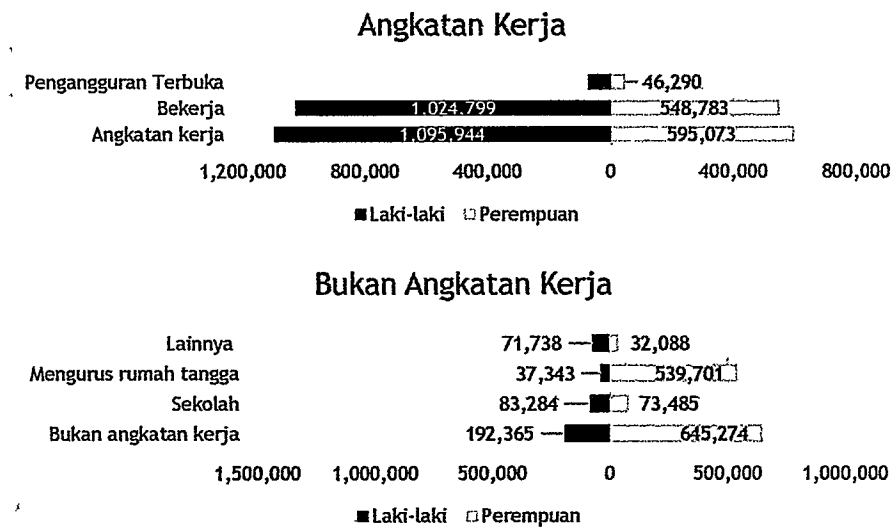
Tabel 2.11
Jumlah Izin Lokasi Provinsi Banten Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Kota Tangerang Selatan	53
2	Kabupaten Serang	-
3	Kabupaten Tangerang	238
4	Kabupaten Pandeglang	-
5	Kabupaten Lebak	15
6	Kota Tangerang	99
7	Kota Cilegon	59

Sumber: Kanwil BPN Provinsi Banten, 2023

G. Ketenagakerjaan

1) Profil ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang



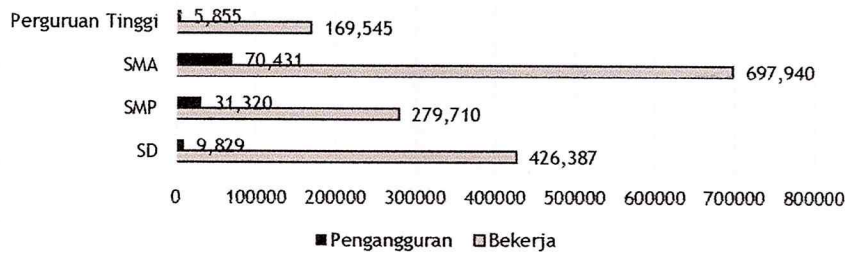
Gambar 2.40

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Diagram diatas menunjukkan profil penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut jenis kelamin di Kabupaten Tangerang tahun 2023. Berdasarkan diagram diatas bahwa sebesar 64,81% angkatan kerja dengan jenis kelamin laki-laki sedangkan 77,3% bukan angkatan kerja dengan jenis kelamin perempuan.

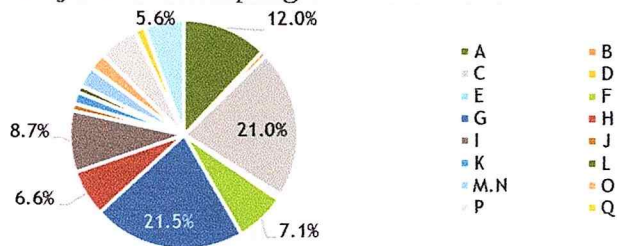
- Penduduk bekerja menurut jenjang pendidikan



Gambar 2.41
 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten
 Tangerang Tahun 2023
 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Diagram di atas menunjukkan profil angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Tangerang tahun 2023. Berdasarkan diagram diatas, sebesar 44,4% angkatan kerja bekerja dengan pendidikan tamat SMA dan 60,0% angkatan kerja pengangguran dengan pendidikan tamat SMA.

• Penduduk bekerja menurut lapangan usaha



Lapangan Usaha	Jumlah (ribu)	Lapangan Usaha	Jumlah (ribu)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	662,5	J Informasi dan Komunikasi	56,2
B Pertambangan dan Penggalian	42,6	K Jasa Keuangan	90,7
C Industri Pengolahan	1158,5	L Real Estate	55,1
D Pengadaan Listrik dan Gas	10,6	M.N Jasa Perusahaan	156,9
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	31,4	O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	132,4
F Konstruksi	390,7	P Jasa Pendidikan	312,0
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi	1186,4	Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78,5
H Transportasi dan Pergudangan	361,7	R.S.T Jasa lainnya	311,0
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	479,5	.U	

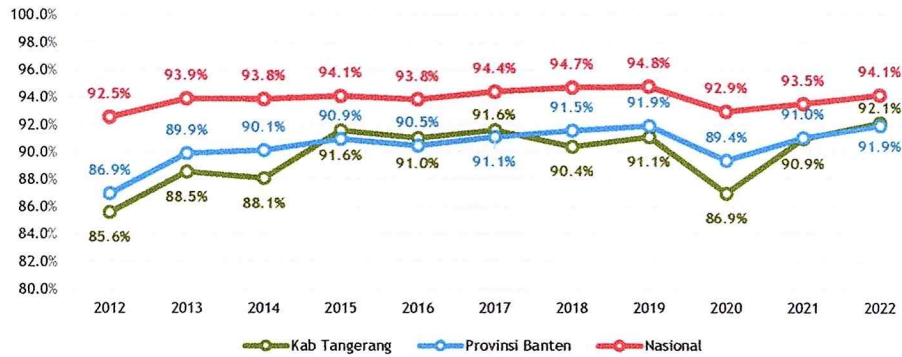
Gambar 2.42
 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
 Tangerang Tahun 2023
 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Diagram di atas menunjukkan jumlah penduduk bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan diagram tersebut bahwa persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha terbesar berturut-turut yaitu (1) lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 1,17 juta jiwa (21,5%); (2) lapangan usaha industri pengolahan sebesar 1,16 juta jiwa (21,0%); dan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 662,5 ribu jiwa (12,0%).

2) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan penduduk yang termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja dimaknai sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pada tahun 2022, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Tangerang sebesar 92,1% yang berada di atas Provinsi Banten dengan capaian 91,9%. Namun, capaian tersebut masih di bawah nasional dengan TKK sebesar 94,1%.



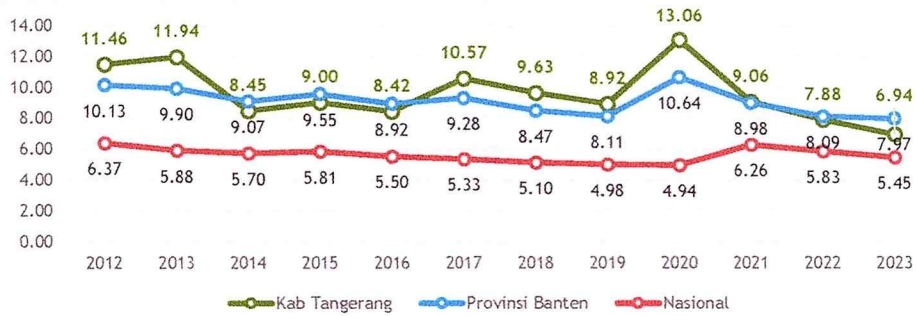
Gambar 2.43

Perbandingan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2012-2022

Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional (diolah)

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Secara umum, dalam sepuluh tahun terakhir, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun (membaik), yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,68% per tahun.



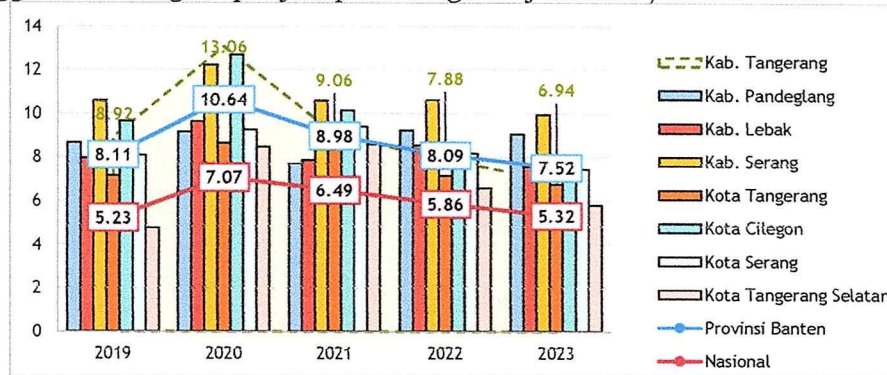
Gambar 2.44

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2012-2023

Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang tahun 2012 hingga 2022 mengalami penurunan dari 11,46% menjadi 7,88%, namun pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 13,06%. Pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang mencapai 6,94%. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023, tingginya angka pengangguran Kabupaten Tangerang yaitu karakter investasi padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja serta ketidakmampuan kompetensi SDM penduduk Kab, Tangerang untuk mengakses tenaga kerja.

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2017 hingga 2021) Kabupaten Tangerang menempati angka pengangguran yang lebih tinggi daripada Provinsi Banten dan termasuk 3 tertinggi bersama dengan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon (Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi berarti tingkat penyerapan tenaga kerja rendah).



Gambar 2.45

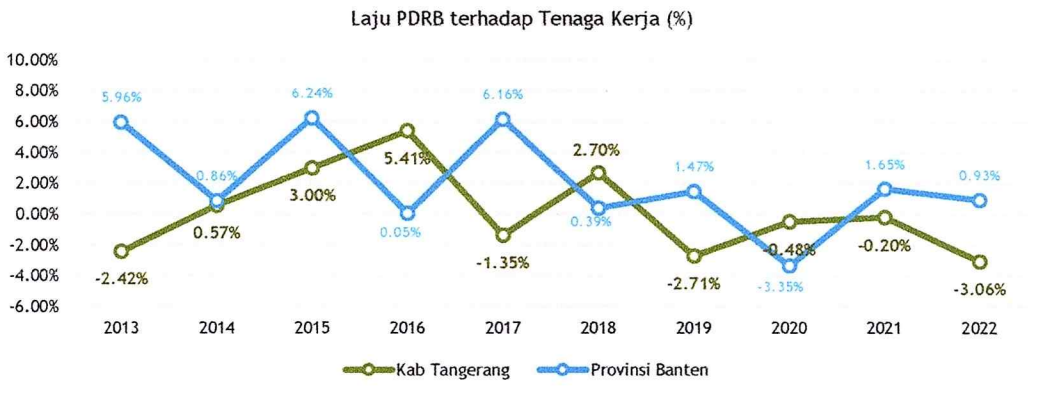
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten Dengan Masing - Masing Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Seiring dengan dilaksanakannya program-program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, pada tahun 2022-2023 indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten ini kembali membaik. Meskipun demikian, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang masih berada di atas (lebih buruk) capaian nasional. Berdasarkan peringkat secara nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten menempati posisi kedua tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia yang menunjukkan adanya permasalahan terkait tingkat pengangguran yang dialami oleh penduduk di Provinsi Banten. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang yang tinggi harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemangku kepentingan.

4) Laju pertumbuhan PDRB terhadap tenaga kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja digunakan untuk memonitor tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi suatu daerah (Badan Pusat Statistik, 2023). Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja dihitung dengan persentase produk domestik regional bruto terhadap jumlah tenaga kerja.



Gambar 2.46
Perbandingan Laju PDRB per Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2013-2022
Sumber: Hasil Olahan, 2023

Diagram di atas menunjukkan perbandingan laju PDRB per tenaga kerja di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten. Pada tahun 2021-2022, laju PDRB per tenaga kerja Kabupaten Tangerang sebesar -3.06% dan capaian ini lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten yang sebesar 0,93%.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Seni Budaya

Seni budaya masyarakat dapat berjalan melalui langkah pembangunan yang tepat. Fasilitas fisik dan kelembagaan perlu diperhatikan untuk mendukung hal tersebut. Berdasarkan renstra Dinas Pemuda Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Tangerang tahun 2018-2023, disebutkan bahwa Kabupaten Tangerang belum memiliki Gedung Kesenian. Sementara itu Gedung Kesenian dapat menjadi pusat urusan seni budaya yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pengelolaan kelembagaan seni budaya yang tepat dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni budaya. Minat masyarakat pada seni budaya dapat dilihat pada persentase kelompok kesenian yang berjalan aktif. Semakin besar persentase tersebut, maka kesejahteraan masyarakat pada seni budaya dapat dikatakan semakin baik.

Tabel 2.12

Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase kelompok kesenian yang aktif (%)	50,68	56,16	n/a	n/a	n/a	n/a

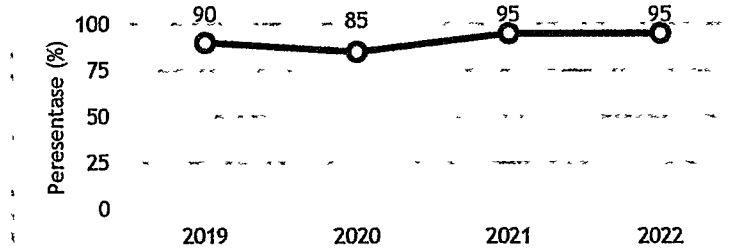
Sumber: Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023

Persentase kelompok kesenian Kabupaten Tangerang tahun 2018 meningkat sebesar 5,48% dari tahun 2017. Peningkatan tersebut merupakan capaian yang baik. Namun di tahun-tahun berikutnya data tersebut tidak ditemukan lagi.

B. Olahraga

Fasilitas dan aktivitas Olahraga dapat dilihat sebagai indikator kesejahteraan masyarakat pada bagian Olahraga. Fasilitas Olahraga dapat berupa lapangan dan gedung. Pada tahun 2023, di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang memiliki 1 stadion mini (28 stadion mini dan 1 sport center).

Masyarakat Kabupaten Tangerang memiliki minat yang cukup tinggi terhadap aktivitas Olahraga. Persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam berolahraga pada tahun 2019 sampai tahun 2022 berada di atas 85%. Pada tahun 2021 dan 2022, persentasenya mencapai 95%.



Gambar 2.47

Persentase Kelompok Masyarakat yang Berperan Aktif dalam Berolahraga Tahun 2019-2022

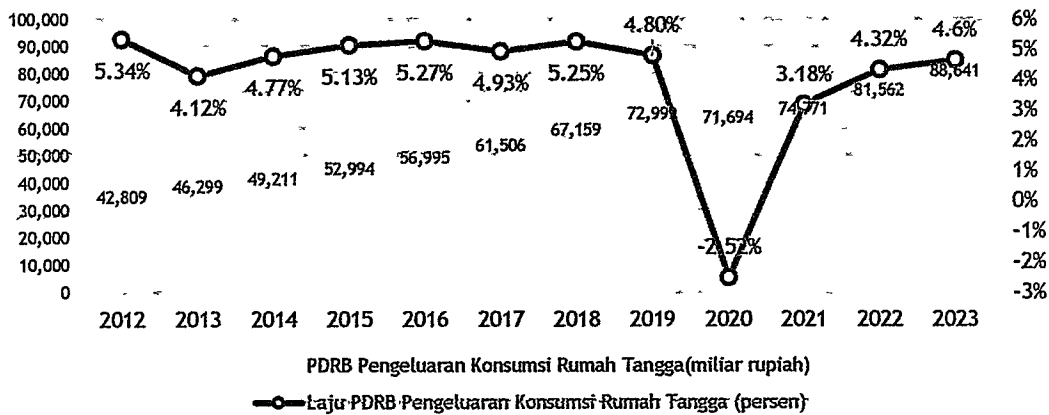
Sumber: LKPD Bupati Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup.



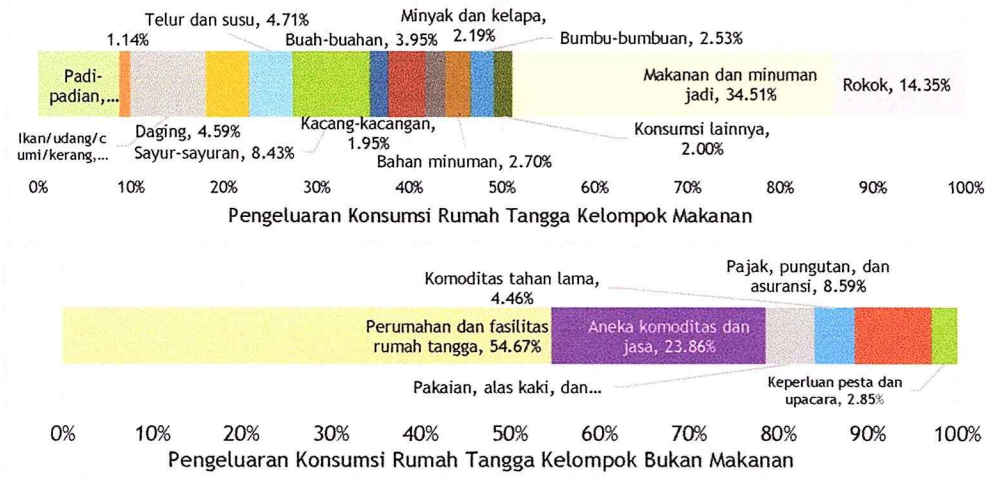
Gambar 2.48

PDRB dan Laju PDRB Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Berdasarkan grafik di atas bahwa PDRB ADHB pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 88.641,20 miliar rupiah dengan laju pertumbuhan mencapai 4,6% dari tahun 2022. Pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan drastis laju PDRB pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari pandemi terjadi penurunan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2021-2023 terjadi peningkatan yang menunjukkan adanya peningkatan penghasilan masyarakat yang tercermin pada peningkatan kinerja sektor Perdagangan, Transportasi, dan Pariwisata (Bank Indonesia, 2023)¹.

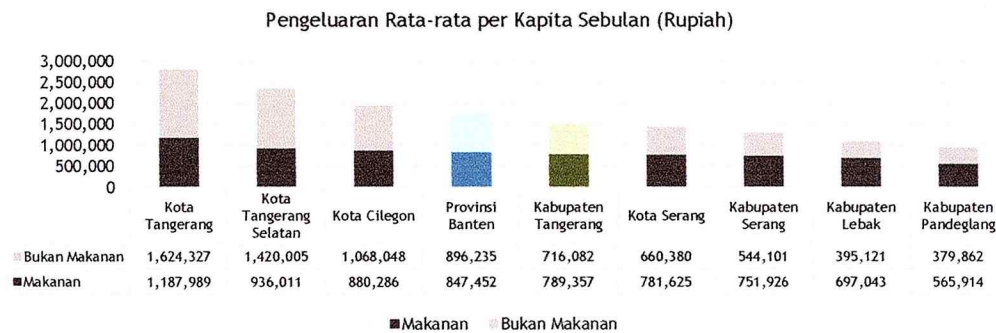
¹ Bank Indonesia (2023). Laporan Perekonomian Provinsi Banten November 2023. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/>



Gambar 2.49
 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2023
 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Pada tahun 2023, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.505.438 per jiwa/bulan dengan pengeluaran kelompok makanan sebesar Rp789.357 per jiwa/bulan (atau 52,43% dari total pengeluaran) dan pengeluaran kelompok bukan makanan sebesar Rp716.082 per jiwa/bulan (atau 47,57% dari total pengeluaran).

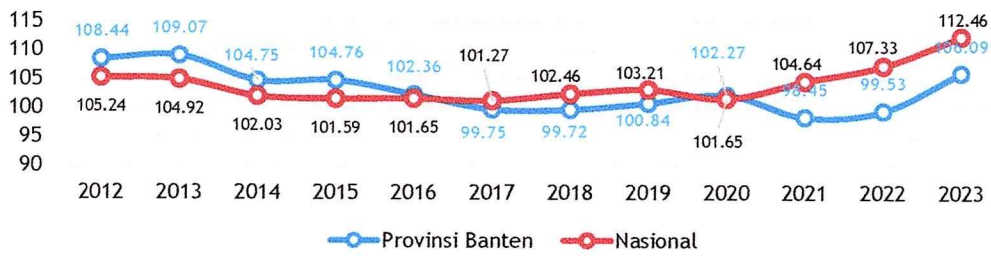
Perbandingan pengeluaran per kapita dapat mencerminkan perbandingan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan/atau kontribusi sektor ekonomi, serta potensi pasar dalam suatu daerah. Berdasarkan diagram di atas, bahwa pengeluaran per kapita Kabupaten Tangerang tertinggi ketiga diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Selain itu, dari gambar di atas tercermin bahwa wilayah perkotaan memiliki kecenderungan pengeluaran makanan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran bukan makanan.



Gambar 2.50
 Perbandingan Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2023
 Sumber: BPS Provinsi Banten(diolah)

B. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP>100 artinya Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih besar daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani.

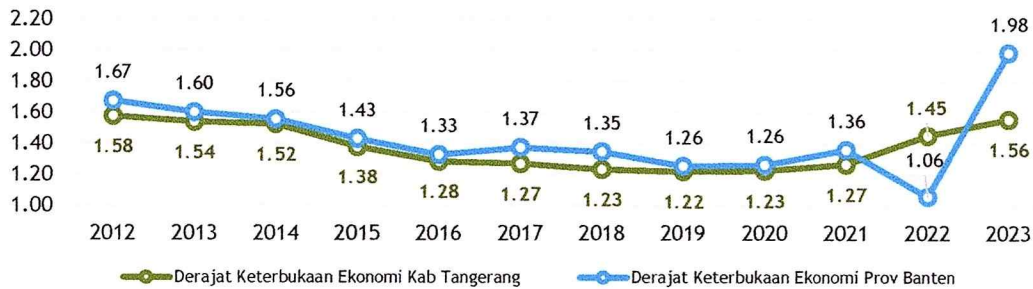


Gambar 2.51
 Nilai Tukar Petani Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012-2023
 Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan diagram di atas, secara umum NTP Provinsi Banten dalam 10 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan menurun di mana kondisi ini berbanding terbalik dengan NTP Nasional yang meningkat utamanya dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini perlu disikapi serius dalam pembangunan Banten untuk lebih memperhatikan dalam peningkatan kesejahteraan petani dan kaitannya dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

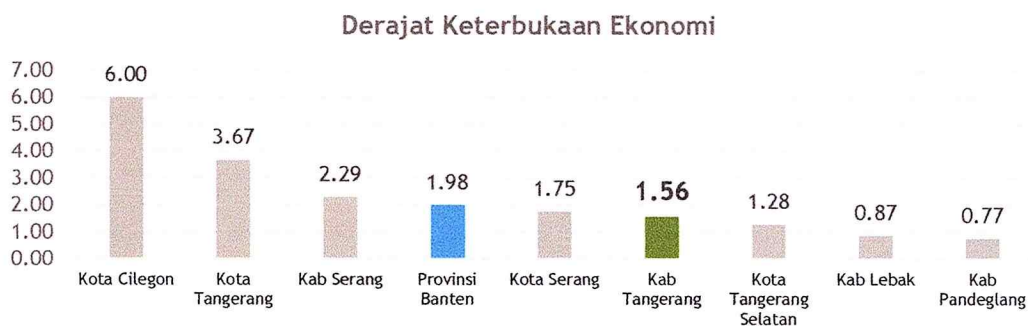
C. Indikator Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi negara/daerah diukur dari kegiatan ekspor dan impor, Semakin banyak kegiatan ekspor dan impor, semakin menunjukkan semakin tingginya derajat keterbukaan ekonomi suatu negara/daerah.



Gambar 2.52
 Perbandingan Derajat Keterbukaan Ekonomi Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2023
 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Pada tahun 2023, Kabupaten Tangerang memiliki nilai ekspor yang mencapai 150.386,97 miliar rupiah, nilai impor sebesar 119.441,22 miliar rupiah, dan PDRB ADHB sebesar 173.330,27 miliar rupiah. Maka dari itu nilai derajat keterbukaan ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2023 mencapai 1,56%. Capaian tersebut di bawah Provinsi Banten yang sebesar 1,98%. Sementara itu, jika melihat tren dalam 10 tahun terakhir, bahwa derajat keterbukaan ekonomi Kabupaten Tangerang cenderung menurun, tetapi kembali meningkat pada tahun 2021-2022.



Gambar 2.53
Perbandingan Derajat Keterbukaan Ekonomi Menurut Kabupaten/kota di
Provinsi Banten Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan diagram di atas, derajat keterbukaan ekonomi Kabupaten Tangerang keempat terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh besaran nilai ekspor dan/atau nilai impor pada masing-masing daerah.

D. Produktivitas Total Daerah

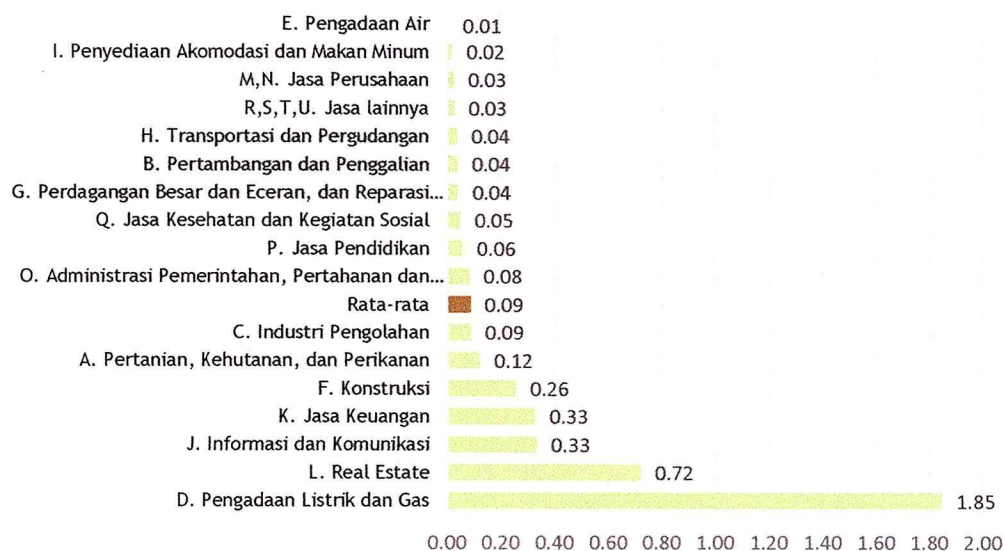
Produktivitas total daerah merupakan perbandingan antara nilai tambah sektor terhadap jumlah angkatan kerja. Tabel di bawah ini merupakan hasil perhitungan rasio produktivitas sektor/lapangan usaha di Kabupaten Tangerang tahun 2021.

Tabel 2. 13
Rasio Produktivitas Menurut Sektor/Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

Lapangan Usaha	Nilai Tambah Bruto (dalam Miliar Rupiah)	Angkatan Kerja Sektor	Rasio Produktivitas Sektor
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.473,10	77.370	0,12
B. Pertambangan dan Penggalian	50,93	1.295	0,04
C. Industri Pengolahan	48.117,52	540.077	0,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.630,76	2.508	1,85
E. Pengadaan Air	100,24	14.792	0,01
F. Konstruksi	23.459,65	91.403	0,26
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.403,33	402.534	0,04
H. Transportasi dan Pergudangan	4.651,38	122.384	0,04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.123,07	112.021	0,02
J. Informasi dan Komunikasi	5.144,75	15.376	0,33
K. Jasa Keuangan	8.239,97	25.118	0,33
L. Real Estate	11.859,43	16.441	0,72
M,N. Jasa Perusahaan	1.454,75	57.784	0,03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.618,05	31.405	0,08
P. Jasa Pendidikan	3.957,24	68.136	0,06
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	774,48	15.638	0,05
R,S,T,U. Jasa lainnya	2.225,00	80.929	0,03
JUMLAH / RATA-RATA	145.283,68	1.675.211	0,09

Sumber: Hasil Olahan, 2023

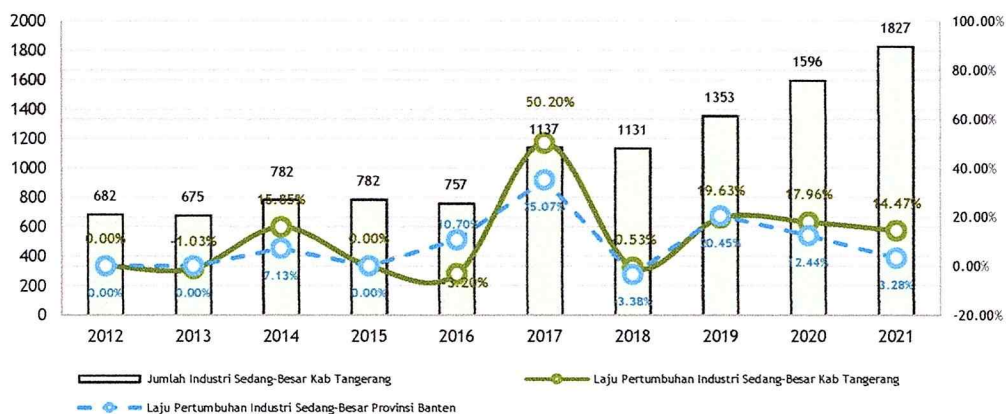
Berdasarkan diagram di bawah, rasio produktivitas daerah Kabupaten Tangerang tahun 2021 sebesar 0,09 dengan nilai tambah bruto sebesar 145.283.68 miliar rupiah dengan tenaga kerja sebesar 1.675.211 jiwa. Berdasarkan lapangan usaha dengan rasio produktivitas daerah yaitu: (1) Pengadaan listrik dan gas sebesar 1,85; (2) Real estate sebesar 0,72; dan (3) Informasi dan komunikasi sebesar 0,33.



Gambar 2.54
 Diagram Rasio Produktivitas Menurut Sektor/Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2021
 Sumber: Hasil Olahan, 2023

• **Pertumbuhan Industri**

Pertumbuhan industri menjadi salah satu indikator untuk melihat peningkatan kinerja ekonomi khususnya sektor industri yang menjadi lapangan usaha utama di Kabupaten Tangerang. Gambar dibawah menunjukkan pertumbuhan industri sedang-besar di Kabupaten Tangerang dalam 10 tahun terakhir.



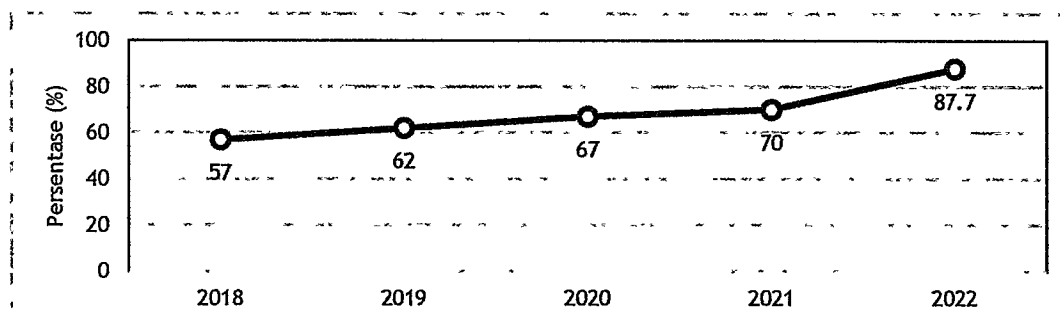
Gambar 2.55
 Pertumbuhan Industri Sedang-Besar Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2021
 Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan industri sedang besar di Kabupaten Tangerang meningkat secara signifikan terutama pada tahun 2016-2017 yang meningkat 50,2%. Laju pertumbuhan industri Kabupaten Tangerang cenderung lebih tinggi dibanding Provinsi Banten.

E. **Persentase Wirausaha Muda**

Wirausaha muda adalah satu bentuk representasi kesehatan ekonomi di suatu daerah. Dalam hal ini Kabupaten Tangerang menganalisis melalui pertumbuhan wirausaha muda yang turut berperan aktif dalam

pembangunan ekonomi. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi generasi muda dalam perekonomian dan membantu memotivasi lebih banyak orang muda untuk menjadi wirausaha.



Gambar 2.56

Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

Berdasarkan grafik di atas, angka persentase wirausaha muda selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka persentase wirausaha muda mencapai 87.7%. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 wirausaha di Kabupaten Tangerang, 88 di antaranya berusia muda. Hal ini memberi arti bahwa dunia wirausaha di Kabupaten Tangerang memiliki peluang untuk terus berkembang karena didominasi oleh generasi muda.

F. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Jenis dan jumlah bank dalam suatu daerah digunakan untuk mengukur kemudahan untuk mengakses kelembagaan keuangan, simpanan, dan jasa lalu lintas pembayaran. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten (2024), jumlah kantor bank umum di Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebanyak 210 unit kantor. Jumlah tersebut menempati peringkat kedua terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Prov. Banten. Tabel dibawah ini merupakan perbandingan jumlah kantor bank umum menurut kab/kota di Provinsi Banten.

Tabel 2. 14

Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kantor Bank Umum					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Pandeglang	68	69	71	71	54	43
Kabupaten Lebak	63	60	61	67	49	43
Kabupaten Tangerang	299	291	283	276	233	210
Kabupaten Serang	96	95	87	109	87	69
Kota Tangerang	459	453	444	437	363	311
Kota Cilegon	69	66	66	82	70	59
Kota Serang	40	39	38	55	44	41
Kota Tangerang Selatan	116	110	102	176	164	146
Provinsi Banten	1.210	1.183	1.152	1.273	1.064	922

Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka (diolah)

G. Jumlah Restoran atau Rumah Makan

Pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari pajak daerah, yang mana semuanya terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersangkutan. Pajak hotel dan restoran sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah sangat potensi untuk ditingkatkan mengingat peran pajak hotel dan restoran ini dalam peningkatan PAD.

Tabel 2. 15
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kabupaten/kota di Provinsi
Banten Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Pandeglang	116	118	124	116	116	116
Kabupaten Lebak	56	56	57	56	39	70
Kabupaten Tangerang	724	810	878	907	960	1.020
Kabupaten Serang	18	18	18	16	19	19
Kota Tangerang	385	406	418	426	462	760
Kota Cilegon	7	2	10	2	53	832
Kota Serang	107	51	51	46	59	45
Kota Tangerang Selatan	202	314	477	477	692	1.949
Provinsi Banten	1.615	1.775	2.033	2.046	2.400	4.811

Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka 2023

Tabel diatas menunjukkan jumlah rumah makan atau restoran di Provinsi Banten menurut kabupaten/kota. Pada tahun 2022, jumlah rumah makan atau restoran di Kabupaten Tangerang mencapai 1.020 unit. Jumlah tersebut terbanyak kedua setelah Kota Tangerang Selatan. Jika melihat tren dalam enam tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Tangerang.

H. Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jenis dan jumlah penginapan hotel dapat menunjukkan perkembangan wisata di suatu daerah dimana sebagai sarana pendukung akomodasi untuk kebutuhan masyarakat (wisatawan). Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah akomodasi di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 16
Jumlah Akomodasi, Kamar, Tempat Tidur di Kabupaten Tangerang Tahun
2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Akomodasi	13	19	19	18	18	20
2	Kamar	1260	1841	2411	2468	2232	2007
3	Tempat tidur	1772	2605	3474	3554	3315	3040

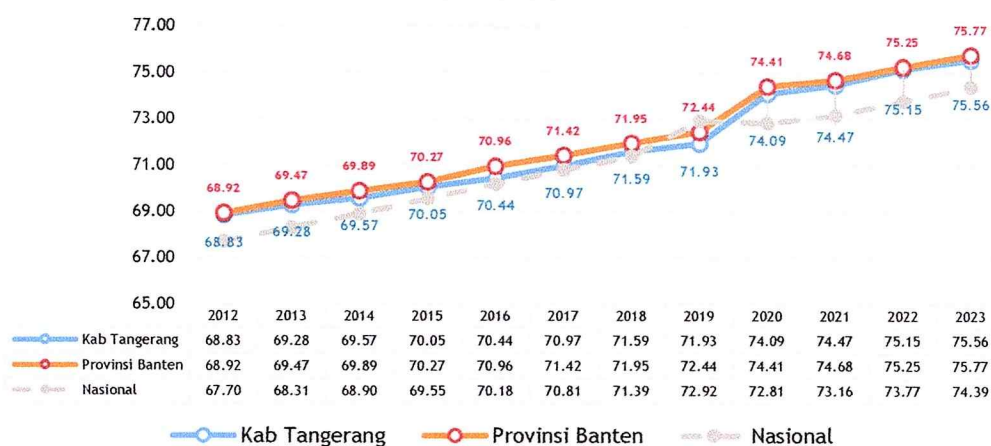
Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka 2023

Berdasarkan data diatas bahwa terjadi peningkatan jumlah akomodasi dan kapasitasnya mengikuti peningkatan wisatawan di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2019, Rata-Rata Lama Menginap Tamu (RLMT) mencapai 1,5 hari (BPS, 2019).

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran rata-rata capaian aspek utama pembangunan manusia yang meliputi umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Pengukuran IPM pada aspek kesehatan mengacu pada indikator angka harapan hidup. Aspek pengetahuan dapat diukur melalui indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk aspek hidup layak dapat diukur menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Diagram di bawah ini merupakan perbandingan IPM nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.57

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2023

Sumber: BPS Nasional (diolah)

Secara umum, capaian IPM Kabupaten Tangerang dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan besaran yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59 persen, dengan capaian IPM pada tahun 2012 sebesar 68,83, dan meningkat menjadi 75,56 di tahun 2023. Namun kondisi IPM di Kabupaten Tangerang selalu di bawah angka pencapaian Provinsi Banten dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Capaian IPM Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 menempati posisi keenam dari delapan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, namun telah mampu melampaui capaian nasional pada tahun 2023 sebesar 74,39. Pada tahun 2023, Kabupaten Tangerang masih disusul oleh 4 kabupaten kota lainnya dalam hal capaian IPM yang dapat dilihat pada tabel berikut.

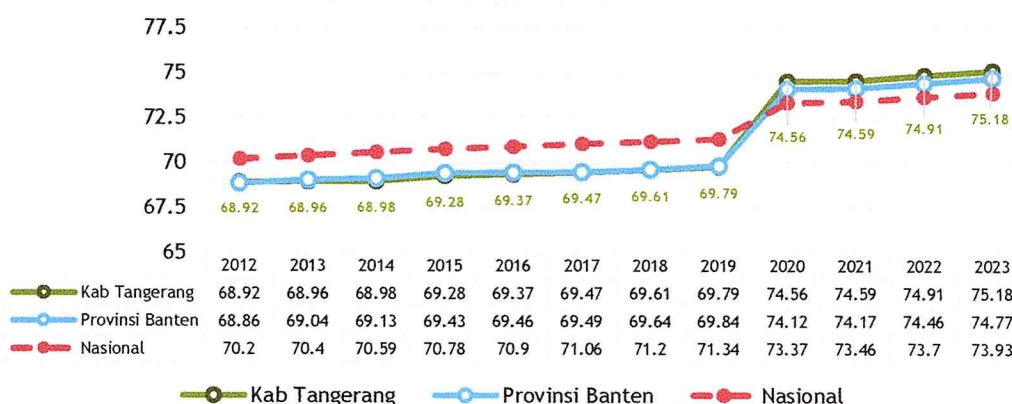
Tabel 2. 17

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023

Kabupaten/kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Tangerang Selatan	64,34	64,91	68,86	69,02	69,70	70,28
Kota Tangerang	63,37	63,88	66,39	66,50	67,19	67,68
Kota Cilegon	71,59	71,93	74,09	74,47	75,15	75,56
Kota Serang	65,93	66,38	70,93	71,05	71,99	72,63
Kab Tangerang	77,92	78,43	79,83	80,08	80,44	80,98
Kab Serang	72,65	73,01	76,80	77,11	77,68	78,24
Kab Pandeglang	71,68	72,10	75,25	75,53	76,01	76,43
Kab Lebak	81,17	81,48	82,73	82,98	83,28	83,57
Provinsi Banten	71,95	72,44	74,41	74,68	75,25	75,77

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

Angka harapan hidup adalah salah satu aspek yang diperhatikan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Semakin tinggi capaian Angka Harapan Hidup maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama.



Gambar 2.58
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2012 – 2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023

Berdasarkan grafik diatas, capaian Angka Harapan Hidup menunjukkan kenaikan signifikan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh perbedaan perhitungan dimana capaian tahun 2020-2023 merupakan hasil perhitungan *Long Form* SP2020. Angka harapan hidup di Kabupaten Tangerang tidak jauh berbeda dengan Provinsi Banten namun capaian angka harapan hidup masih berada di bawah capaian Nasional. Pada Tahun 2023 angka harapan hidup di Indonesia adalah 73,93 sedangkan di Kabupaten Tangerang adalah 75,18 tahun.

B. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)



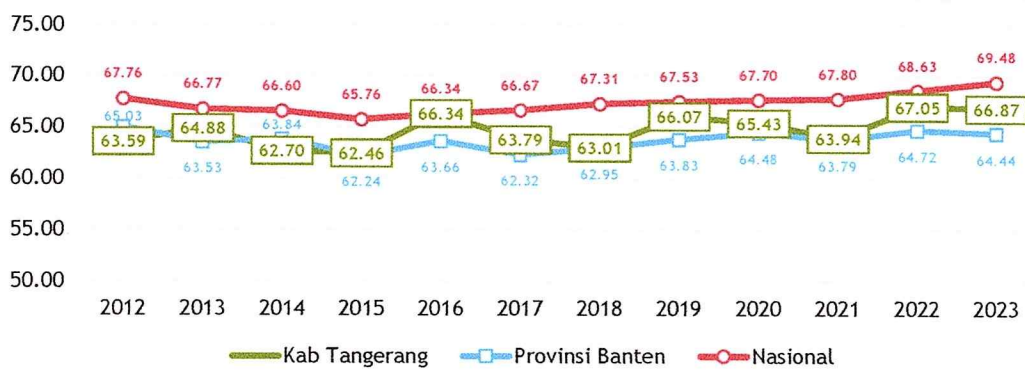
Gambar 2.59
Angkatan Kerja Tamat Perguruan Tinggi dan Rasio Lulusan Perguruan Tinggi per 10.000 penduduk di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2018-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar di atas menunjukkan jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tamat perguruan tinggi serta rasio lulusan perguruan tinggi per 10.000 penduduk di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten tahun 2018-2023. Pada tahun 2023, rasio lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang mencapai 629,56 tiap 10.000 penduduk dan capaian ini lebih rendah dibanding Provinsi Banten yang mencapai 827,43 tiap 10.000 penduduk.

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikasi besaran penduduk usia

kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian wilayah.

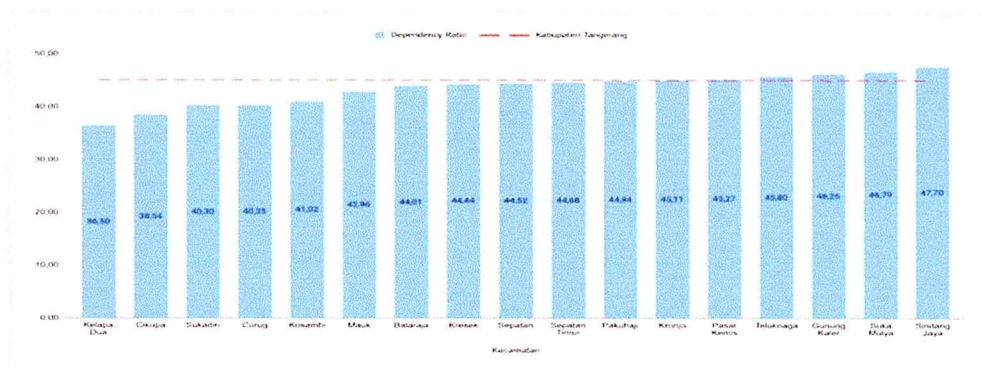


Gambar 2.60
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2012-2023
Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional (diolah)

Pada tahun 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tangerang sebesar 66,87% yang berada diatas Provinsi Banten dengan capaian 64,44%. Namun, capaian tersebut masih dibawah nasional dengan TPAK sebesar 69,48%.

D. Rasio Ketergantungan

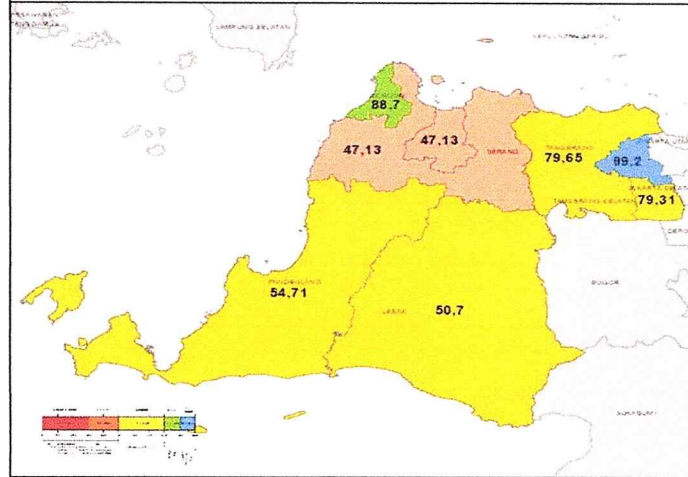
Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur, dapat diketahui pada tahun 2022 bahwa *dependency ratio* penduduk Kabupaten Tangerang adalah 41,07 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 42 penduduk yang berusia tidak produktif. Rasio ini lebih rendah daripada rasio nasional yang berada di angka 44,4 dan juga lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Banten. Jika dilihat dari tren rasio ketergantungan, rasio ketergantungan Kabupaten Tangerang mengalami penurunan sebesar 8,7% selama sepuluh tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan beban tanggungan penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) berkurang dan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua memiliki nilai rasio ketergantungan yang paling rendah.



Gambar 2.61
Grafik Rasio Ketergantungan Tiap Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022
Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka 2023 (diolah)

E. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, indikator kunci urusan perpustakaan salah satunya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2022, IPLM Kabupaten Tangerang adalah 79,65. Angka tersebut masuk dalam kategori sedang dan menempati urutan ketiga terbesar di Provinsi Banten.



Gambar 2.62

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (PLM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022

Sumber: Perpunas, 2022

2.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

A. Perhubungan

1) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan penduduk memperlihatkan seberapa besar kapasitas jalan dalam menampung jumlah pergerakan. Rasio ini menghitung panjang jalan dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Tangerang. Hasilnya akan menjelaskan kemampuan 1 km jalan untuk memberikan layanan kepada sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Angka rasio di Kabupaten Tangerang meningkat dari 2,61 pada tahun 2019 hingga 2,96 pada tahun 2022, hal ini menunjukkan adanya peningkatan layanan aksesibilitas jalan bagi masyarakat.

Tabel 2. 18

Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Total (km)	992,61	992,61	992,61	992,61
Jumlah Penduduk	3.800.787	3.245.619	3.293.533	3.352.472
Rasio	1:3.829	1:3.270	1:3.318	1:3.377

Sumber: opendata.tangerangkabupatengo.id; Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2023 (diolah)

2) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Menurut Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini

terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Jumlah panjang jalan seluruhnya akan dibagi dengan jumlah kendaraan yang ada untuk mencari seberapa besar rasionya. Dari perhitungan diketahui bagi setiap kendaraan di Kabupaten Tangerang tersedia sekitar 6,86 kilometer jalan.

Tabel 2. 19

Jumlah Kendaraan Menurut Jenisnya di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022

Jenis Kendaraan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sepeda Motor	1.224.583	1.216.558	1.339.870	1.253.300	1.203.050	1.199.905
Mobil Penumpang	150.003	168.626	192.302	189.087	189.647	199.489
Truk	46.980	50.043	55.246	53.669	52.844	54.044
Bus	210	245	400	310	1.648	1.623
Jumlah						1.455.061

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023

Tabel 2. 20

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan Total	Rasio
Kabupaten Tangerang	992,61 km	1.445.061	1:6,86

Sumber: Hasil Olahan, 2023

3) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap

Tingkat kemantapan jalan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan seberapa tinggi kesiapan jalan dan kondisi jalan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu, kondisi jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan.
- b. Jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan.
- c. Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan jalan.
- d. Jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak dalam ukuran besar, dan terkelupas cukup dalam, disertai dengan kerusakan lapis fondasi seperti amblas, sungkur, dan sebagainya.

Proporsi jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Tangerang diperlihatkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 21

Proporsi dan Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

	Tahun
--	-------

Indikator	2019	2020	2021	2022
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (km)	566,25	569,28	752,7	774,86
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Sedang (km)	312,75	299,79	148	114,21
Panjang Jalan Total (km)	992,61	992,61	992,61	992,61
Persentase Kondisi Mantap (%)	88,55%	87,55%	90,74%	92,59%

Sumber: opendata.tangerangkab.go.id, 2023

Proporsi panjang jalan di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren yang meningkat. Jika dilihat dari presentase, jalan mantap berhasil naik dari 88,55% pada tahun 2019 menuju 92,59% pada tahun 2022. Angka proporsi jalan dalam kondisi mantap memperlihatkan seberapa panjang jalan yang sudah mencapai kelayakan (kondisi baik dan sedang). Jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat harus mendapatkan perbaikan segera demi menjaga keselamatan berkendara.

B. Penataan Ruang

1) Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif diperlihatkan dari penggunaan lahan pertanian sawah dan bukan sawah. Lahan pertanian merupakan lahan yang aktif dalam menghasilkan panen sebagai bahan produksi. Lahan sawah dikhususkan untuk pertanian tanaman pangan padi, sementara pertanian bukan sawah menghasilkan panen selain tanaman padi. Kabupaten Tangerang diketahui memiliki 36.202 Ha lahan pertanian sawah dan 18.845 Ha lahan pertanian bukan sawah. Apabila dijumlahkan didapat luas lahan produktif di Kabupaten Tangerang mencapai 55.047 Ha pada tahun 2020.

Tabel 2. 22

Luas Lahan Total Menurut Penggunaan Lahan dan Kabupaten/Kota di Banten Tahun 2020 (Hektar)

Kabupaten/Kota	Penggunaan Lahan		Total Luas Lahan Produktif
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	
Kab Pandeglang	52.640	207.039	259.679
Kab Lebak	51.298	228.252	279.550
Kab Tangerang	36.202	18.845	55.047
Kab Serang	48.123	55.888	104.011
Kota Tangerang	351	496	847
Kota Cilegon	1.423	6.898	8.321
Kota Serang	8.474	8.450	16.924
Kota Tangerang Selatan	10	661	671
Provinsi Banten	198.521	526.529	725.050

Sumber: Indikator Pertanian Provinsi Banten Tahun 2021

C. Komunikasi dan Informatika

1) Daya Listrik yang Terpasang

Daya listrik yang terpasang menunjukkan jumlah kWh yang mampu digunakan di kabupaten/kota masing-masing. Daya ini dialirkan untuk memberikan layanan listrik kepada rumah tangga. Kabupaten Tangerang menjadi kabupaten yang memiliki daya listrik terbesar di Provinsi Banten dengan angka 3.583.602.153 kWh daya listrik terpasang diikuti oleh Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang.

Tabel 2. 23
 Daya Listrik yang Terpasang di Provinsi Banten Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	Daya Listrik Terpasang (kWh)			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pandeglang	210.719.710	221.913.660	234.876.510	249.605.260
Kabupaten Lebak	392.383.620	419.835.670	475.821.720	502.868.070
Kabupaten Tangerang	3.077.992.651	3.287.742.351	3.403.422.454	3.583.602.153
Kabupaten Serang	1.520.058.050	1.596.799.400	1.686.258.000	1.876.550.450
Kota Tangerang	1.507.083.119	1.555.083.682	1.538.498.186	1.608.512.586
Kota Cilegon	1.481.017.220	1.488.344.220	1.485.443.920	1.532.771.070
Kota Serang	327.343.810	347.264.310	366.344.310	388.548.660
Kota Tangerang Selatan	2.034.489.750	2.145.136.650	2.156.914.800	2.292.092.300
Provinsi Banten	10.551.087.930	11.062.119.943	11.347.579.900	12.034.550.549

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

2) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase distribusi listrik untuk setiap rumah tangga pada tahun 2021 di Provinsi Banten termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sudah mencapai 99,3% pada tahun 2021. Rasio elektrifikasi memperlihatkan Kabupaten Tangerang sudah mencapai angka 97,31%, berada di posisi kelima di Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang juga menjadi penyumbang terbanyak dalam jumlah rumah tangga belum berlistrik di Provinsi Banten dengan angka 27.132 rumah tangga.

Tabel 2. 24
 Persentase Jumlah Pelanggan Listrik di Provinsi Banten Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (PLN)	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik Non PLN	Jumlah Rumah Tangga Belum Berlistrik	Rasio Elektrifikasi (%)
Kab Pandeglang	349.747	2.534	15.687	95,75%
Kab Lebak	360.543	119	23.266	93,81%
Kab Tangerang	980.206	1.062	27.132	97,31%
Kab Serang	451.125	0	15.425	96,66%
Kota Tangerang	577.676	0	40	99,99%
Kota Cilegon	120.682	0	1.167	98,81%
Kota Serang	225.912	1.519	2.449	98,67%
Kota Tangerang Selatan	455.534	0	147	99,97%
Provinsi Banten	3.521.425	5.234	85.313	99,30%

Sumber: Laporan Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2021

3) Persentase Penduduk yang Menggunakan Handphone atau Telepon

Persentase penduduk yang menggunakan handphone atau telepon di Kabupaten Tangerang memiliki tren yang fluktuatif. Persentase pengguna sempat naik pada tahun 2017 mencapai 71,46 sebelum akhirnya terus turun hingga 63,50% pada tahun 2020. Pengguna telepon di Kabupaten Tangerang menempati posisi terbanyak kelima di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang.

Tabel 2. 25
 Persentase Penduduk yang Menggunakan Handphone atau Telepon di Provinsi Banten Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Pandeglang	45,35	47,23	57,37	47,93	53,20	50,23
Kabupaten Lebak	43,57	43,08	60,18	46,51	49,01	47,07

Kabupaten Tangerang	59,68	60,59	71,46	64,69	63,98	63,50
Kabupaten Serang	49,79	50,64	60,97	58,21	59,61	56,71
Kota Tangerang	74,98	74,17	78,20	74,92	74,86	76,26
Kota Cilegon	67,60	68,74	78,66	72,34	71,54	74,63
Kota Serang	57,95	61,40	71,84	59,71	64,70	65,93
Kota Tangerang Selatan	77,60	76,01	82,81	79,76	79,35	76,79
Provinsi Banten	60,49	60,92	70,60	64,25	65,21	64,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2022

2.3.4 Daya Saing Iklim Berinvestasi

A. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Aspek daya saing daerah dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2022 yang mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Perhitungan IDSD didasarkan pada empat komponen, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
PROV. BANTEN	4,25	3,13	4,15	3,39	3,78	3,51	2,13	4,00	3,07	4,78	3,77	3,27	3,60
RATA-RATA KAB/KOTA	4,27	3,04	4,42	2,88	3,73	3,42	3,40	3,27	1,48	4,78	2,54	2,80	3,28
PANDEGLANG	4,16	2,01	3,81	2,08	3,47	2,68	3,12	2,83	1,12	4,43	3,07	1,79	2,88
LEBAK	4,38	3,23	3,78	2,37	3,67	2,53	3,24	2,70	1,19	4,46	2,60	1,72	2,99
KAB. TANGERANG	4,33	3,42	4,57	3,04	3,86	3,37	2,75	3,10	3,26	5,00	2,62	3,69	3,58
KAB. SERANG	4,25	3,32	4,20	2,79	3,47	2,95	2,16	3,55	1,12	4,88	2,51	2,49	3,14
KOTA TANGERANG	4,39	3,68	4,86	3,42	3,99	4,17	4,12	3,46	-	5,00	2,28	3,59	-
CILEGON	4,25	2,95	4,82	3,02	3,61	4,07	2,10	2,94	0,88	5,00	2,74	2,69	3,26
KOTA SERANG	-	1,99	4,41	2,78	3,72	3,48	4,73	3,76	-	4,50	1,86	2,97	-
TANGERANG SELATAN	4,14	3,75	4,93	3,54	4,06	4,11	5,00	3,81	1,29	4,94	2,65	3,48	3,81

Gambar 2.63

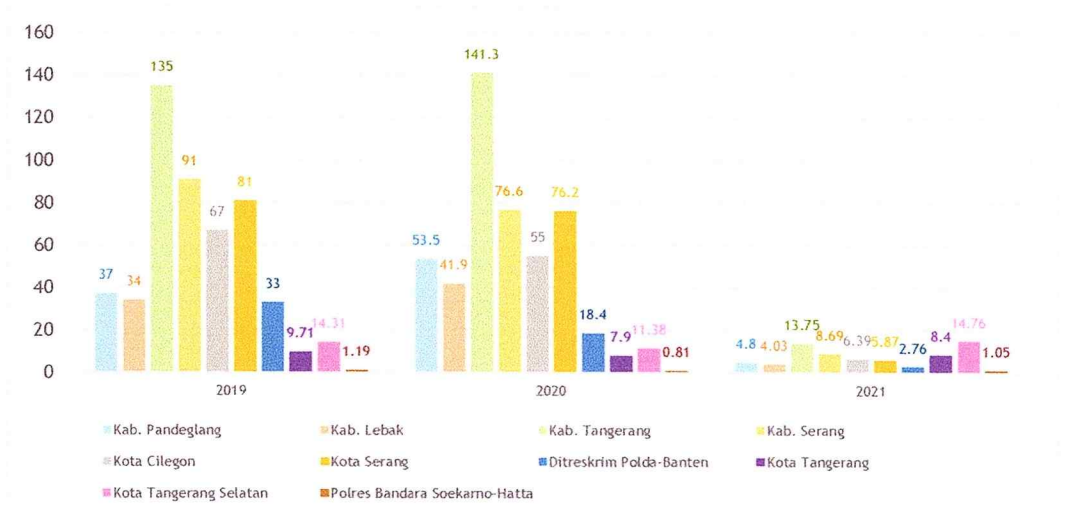
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/kota, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2023

Sumber: Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022

Berdasarkan Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023 (BRIN, 2023), capaian IDSD Kabupaten Tangerang sebesar 3,58 dan capaian ini lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Banten. Komponen pilar yang unggul di Kabupaten Tangerang adalah Pilar 10 "Ukuran Pasar". Sementara itu, komponen pilar yang terendah adalah Pilar 11 "Dinamisme Bisnis".

B. Angka Kriminalitas

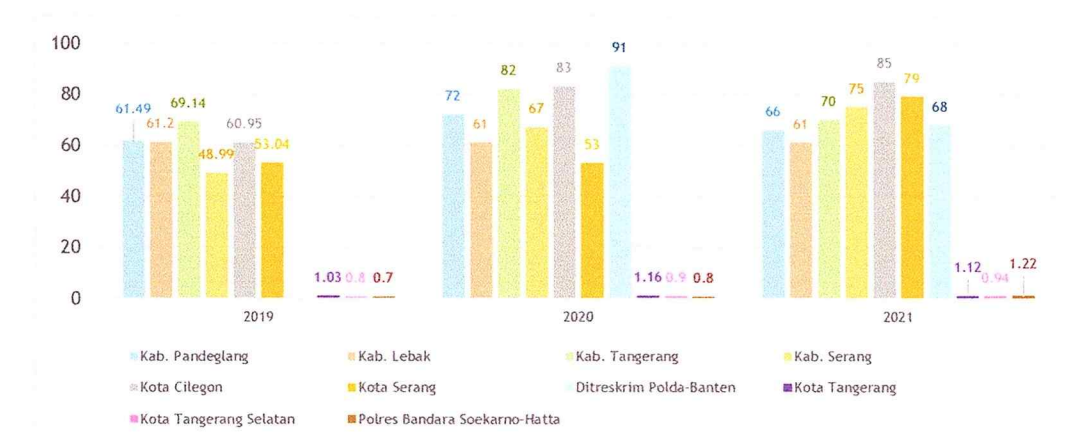
Kriminalitas menjadi salah satu faktor pembentuk iklim berinvestasi. Semakin kecil tingkat kriminalitas pada suatu wilayah maka semakin besar tingkat keamanan dari gangguan oknum masyarakat pada wilayah tersebut.



Gambar 2.64
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk Tahun 2019-2021
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Angka kriminalitas atau dapat juga disebut sebagai risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 adalah 13,75. Artinya dari 100.000 penduduk terdapat 14 penduduk yang terkena kejahatan. Angka tersebut berada di urutan ke-dua tertinggi di Provinsi Banten. Dua tahun sebelumnya angka capaiannya menempati urutan pertama.

Dari banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Tangerang, lebih dari setengahnya berhasil diselesaikan. Persentase penyelesaian tindak pidana pada tahun 2019, 2020, dan 2021 adalah 69,14%, 85%, dan 70%, suatu capaian yang fluktuatif.



Gambar 2.65
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2019-2021
Sumber: BPS Provinsi Banten

C. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama berdasarkan variabel Pola Pendidikan Keluarga, Peran Kementerian Agama, dan Impementasi Kearifan Lokal (Kementerian Agama RI, 2020). Pada tahun 2022, IKUB Provinsi Banten mencapai 68,92 dan IKUB Nasional mencapai 73,09.

D. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi yang ter terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu: (1) Aspek Kebebasan (7 indikator); (2) Aspek Kesetaraan (7 indikator); (3) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator). Perhitungan IDI tersedia untuk tingkat pusat (Kementerian/ Lembaga) dan tingkat nasional (provinsi dan nasional). IDI dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Terdapat tiga kategori nilai: (1) Kategori Tinggi (>80); (2) Kategori Sedang (60-80); (3) Kategori Rendah (<60). Pada tahun 2022, capaian IDI Provinsi Banten 78,75 alias dalam kategori ‘Sedang’ dan capaian ini lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 80,41.

E. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Gambar dibawah ini merupakan besaran dan persentase realisasi retribusi daerah Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.66
Besaran dan Persentase Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022
Sumber: Website DPJK Kemenkeu

Berdasarkan grafik diatas bahwa dalam tujuh tahun terakhir, besaran retribusi daerah Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022, retribusi daerah Kabupaten Tangerang mencapai 61,87 miliar rupiah dengan persentase realisasi retribusi sebesar 77,5%. Capaian ini menurun dari tahun 2021.

F. Lama Proses Perijinan

Sistem perijinan dan non-perijinan di Kabupaten Tangerang diatur dalam Perda Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. Jenis perizinan dan non-perizinan diberikan berdasarkan urusan pemerintah daerah. Prosedur perizinan dan non-perizinan terdiri dari verifikasi, permohonan, pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan, serta pemberian keputusan. Jangka waktu pelayanan DPMPSTSP ditetapkan paling lama 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non-perizinan secara lengkap dan benar. Selain itu, pemohon dapat mengajukan pengaduan melalui DPMPSTSP paling lambat 30 hari kerja sejak pemohon menerima pelayanan perizinan dan nonperizinan. Sistem informasi pelayanan perizinan dan non-perizinan berbasis web di Kabupaten Tangerang yaitu “SIPINTER”.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1) Capaian Mutu Pendidikan

Capaian kualitas pendidikan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat melalui pencapaian rapot pendidikan, yang indikator penyusunnya didasarkan pada *input*, proses, dan *output* pendidikan. Pada tabel berikut, disajikan capaian mutu pendidikan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 yang merujuk pada rapor pendidikan. Berdasarkan tabel, hanya terdapat 3 indikator yang mampu melampaui target tahun 2023 yakni skor kemampuan literasi SD, iklim kebhinekaan SD dan iklim kebhinekaan SMP.

Tabel 2. 26

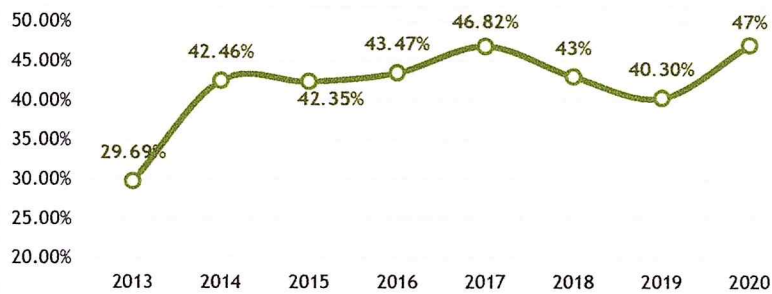
Capaian Mutu Pendidikan Tahun 2023 di Kabupaten Tangerang

No	Indikator	Jenjang	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Skor Kemampuan Literasi	SD	54,27	56,18
2	Skor Kemampuan Literasi	SMP	63,50	63,14
3	Skor Kemampuan Numerasi	SD	41,20	45,97
4	Skor Kemampuan Numerasi	SMP	62,90	57,41
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	PAUD	100,00	72,07
6	Angka Partisipasi Sekolah 7-15	SD/SMP	100,00	98,78
7	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Kesetaraan	Kesetaraan	100,00	9,70
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	PAUD	54,61	49,02
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	PAUD	56,26	55,01
10	Iklim Inklusivitas	SD	58,27	54,46
11	Iklim Inklusivitas	SMP	57,68	53,84
12	Iklim Keamanan	SD	73,99	72,26
13	Iklim Keamanan	SMP	69,74	65,07
14	Iklim Kebinekaan	SD	69,53	70,70
15	Iklim Kebinekaan	SMP	65,62	68,54

Sumber: Surat Mendikbudristek 2024 Nomor: 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024

2) Pendidikan Anak Usia Dini

Cakupan PAUD adalah persentase siswa berusia 3-6 tahun yang menerima Pendidikan Anak Usia Dini. Upaya serius pemerintah dalam mengatasi isu anak diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). PAUD HI memiliki empat tujuan khusus yang mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan, serta koordinasi lintas sektor. Pemerintah juga mewajibkan pelaksanaan PAUD selama setahun sebelum masuk Sekolah Dasar (SD), yaitu untuk anak usia 5 hingga 6 tahun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. PAUD penting untuk pengembangan anak dan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Berikut adalah grafik angka cakupan pendidikan PAUD di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.67
Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2020 (%)

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang 2021 dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2013. Namun hanya 47% dari seluruh anak 3-6 tahun menerima pendidikan anak usia dini. Pada tahun 2022 terdapat 49.469 murid PAUD di Kabupaten Tangerang dengan status sekolah negeri untuk 701 siswa dan sekolah swasta untuk 48.768 siswa. Cakupan ini dapat dipengaruhi oleh keengganan orang tua untuk mengarahkan anaknya mengikuti pendidikan anak usia dini dan kurang optimalnya pelayanan pendidikan bagi anak usia dini.

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Sejak tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya APK mencakup pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SMA/SMK/MA).



Gambar 2.68
Grafik Perbandingan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2012 – 2023

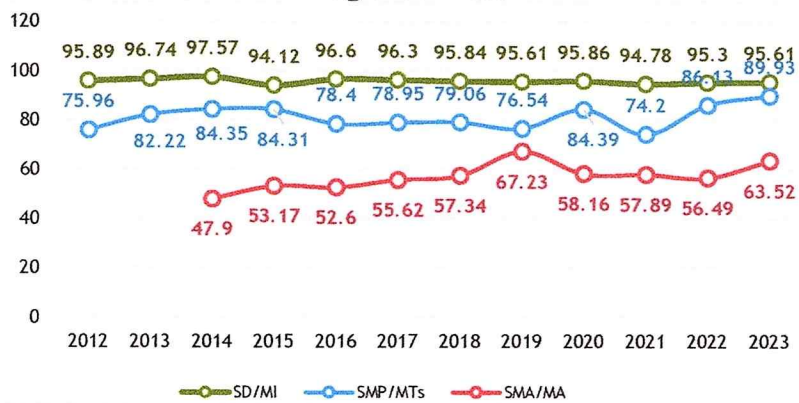
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2023

Secara umum, APK dapat dijadikan indikator keberhasilan sektor pendidikan. APK juga digunakan, untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi masyarakat secara umum di suatu tingkat pendidikan. Secara keseluruhan angka partisipasi kasar seluruh SD, SMP dan PAUD di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Sedangkan untuk SMA/MA mengalami peningkatan sedikit. Motivasi dari remaja untuk menempuh pendidikan serta kurangnya bimbingan orang tua untuk mengarahkan anaknya menempuh

pendidikan yang lebih tinggi dapat menjadi salah satu penyebab mengapa partisipasi menurun. Penyebab lainnya juga dapat disebabkan oleh keputusan untuk bekerja ketika sudah mencapai umur yang cukup untuk bekerja yang menyebabkan tidak berpartisipasi pada pendidikan yang lebih tinggi.

4) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengindikasikan proporsi anak-anak dalam suatu kelompok usia yang bersekolah di tingkat yang sesuai dengan rentang usia mereka. APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya dibandingkan dengan jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tangerang sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2.69

Grafik Perbandingan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2012 – 2023

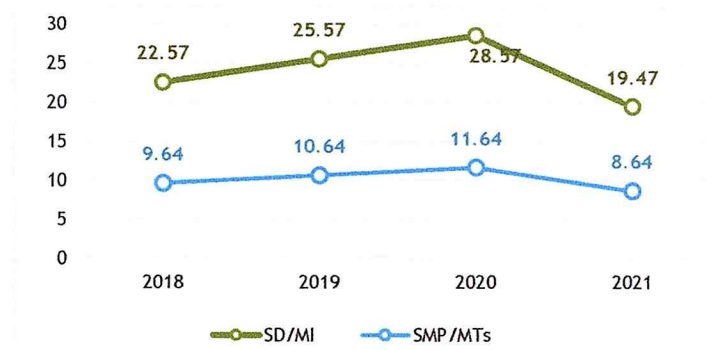
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2023

Secara keseluruhan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan SMP/MTs. Sedangkan APM SMA/MA mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2014. Angka Partisipasi Murni jenjang SMP dan jenjang SMA di Kabupaten Tangerang lebih rendah daripada APM di Indonesia pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2022. Pada tahun 2022, APM SMP sederajat di Indonesia berada di nilai 80,89 dan APM SMA sederajat adalah 61,99. Hal ini menunjukkan diperlukan adanya peningkatan partisipasi penduduk untuk menempuh pendidikan. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa APM SMA di Kabupaten Tangerang paling rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya akses menuju pendidikan atau pandangan penduduk terhadap pendidikan yang menganggap bahwa pendidikan lebih lanjut kurang bernilai.

5) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) mencerminkan persentase penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dibandingkan dengan penduduk dengan jumlah penduduk. Indikator ini memiliki fungsi penting untuk menggambarkan pencapaian dalam pembangunan pendidikan di suatu wilayah, dan juga membantu dalam

perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama dalam mengukur kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dan permintaan pasar kerja.



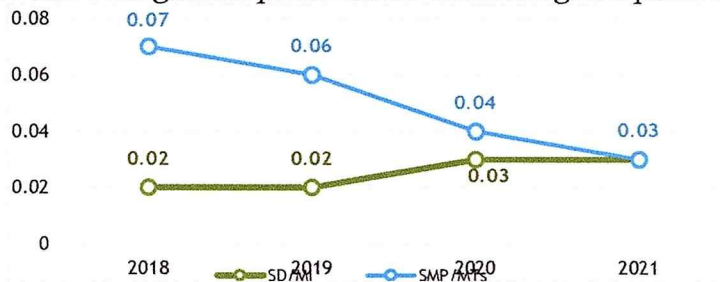
Gambar 2.70

Angka Pendidikan yang ditamatkan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tangerang (%) Tahun 2018 – 2021

Sumber: Dinas Pendidikan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026

6) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) merupakan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat menurut jenjang pendidikan tersebut. Angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Tangerang tahun 2021 adalah 0,03% dan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018.

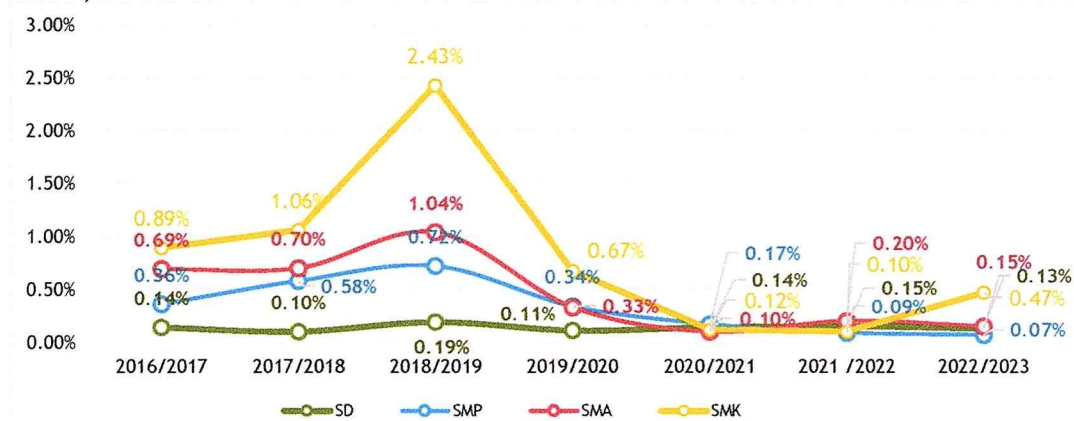


Gambar 2.71

Angka Putus Sekolah Kabupaten Tangerang (%) Tahun 2018 – 2021

Sumber: Dinas Pendidikan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026

Menurut data dari Kemendikbud dengan membandingkan siswa yang putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu berikut merupakan angka putus sekolah Kabupaten Tangerang pada tahun ajaran 2016/2017 hingga tahun ajaran 2022/2023

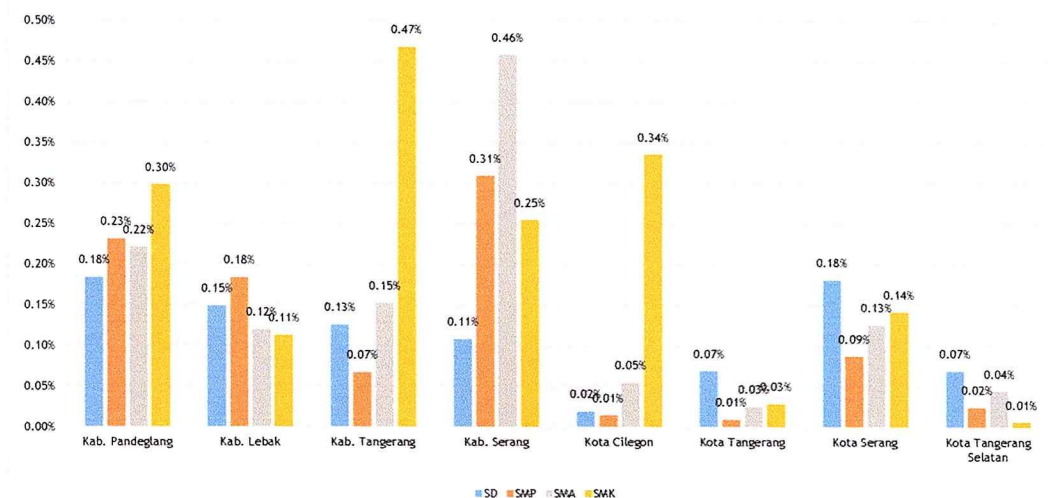


Gambar 2.72

Angka Putus Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun Ajaran 2016/2017 hingga 2022/2023

Sumber : Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Pada tahun 2022/2023 Kabupaten Tangerang memiliki angka putus sekolah SMK paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten.



Gambar 2.73

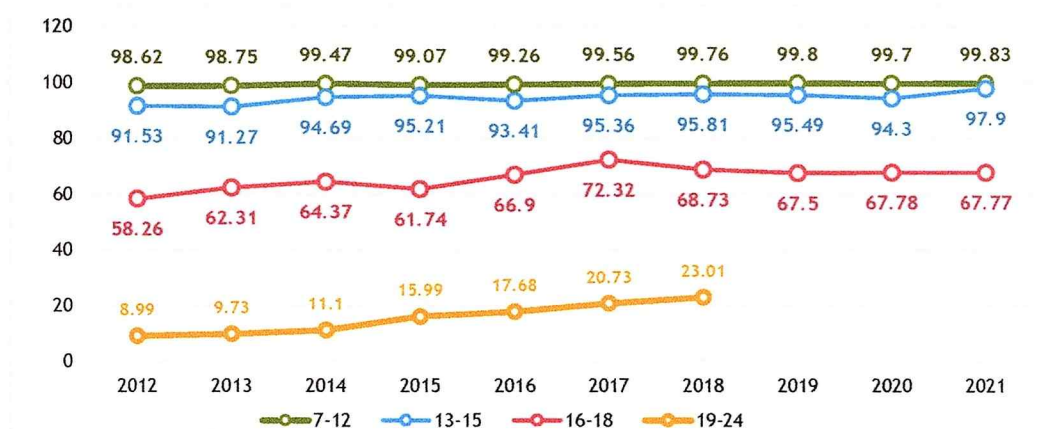
Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun Ajaran 2022/2023

Sumber : Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Menurut grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Putus Sekolah SMK di Kabupaten Tangerang paling tinggi dan APS SMA tertinggi ketiga di Provinsi Banten pada tahun ajaran 2022/2023. Sementara itu, angka putus SD di Kabupaten Tangerang juga masih berada di atas capaian provinsi.

7) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Partisipasi Sekolah berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Berikut adalah angka partisipasi sekolah di Kabupaten Tangerang Tahun 2012 – 2021.



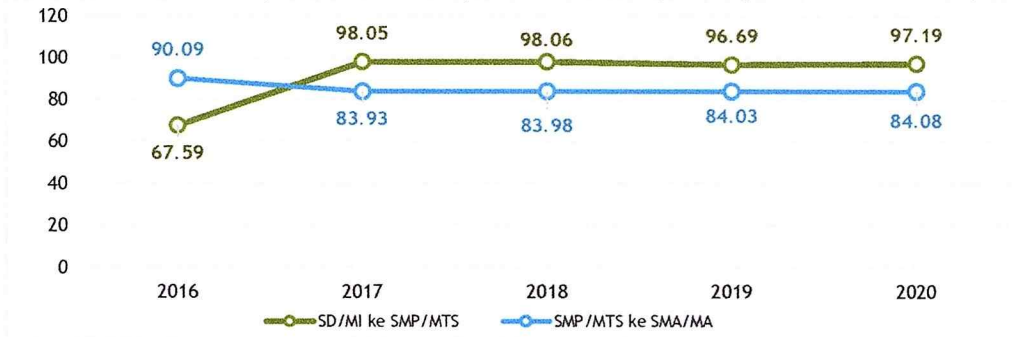
Gambar 2.74

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tangerang Menurut Usia Tahun 2012 – 2021

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

8) Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan digunakan untuk menggambarkan banyaknya siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dibagi menjadi dua, yaitu melanjutkan pendidikan ke SMP/ sederajat serta melanjutkan pendidikan ke SMA/ sederajat. Angka Melanjutkan (AM) adalah Perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 7 atau 10 dengan jumlah lulusan pada tingkat 6 atau 9, dinyatakan dalam persentase. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Tangerang sebesar 97,19%. Sedangkan, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 84,08%.



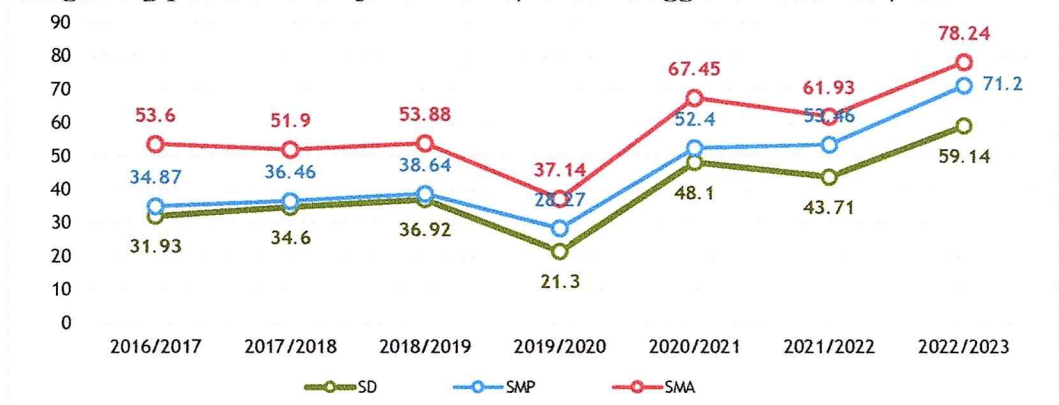
Gambar 2.75

Angka Melanjutkan Sekolah (%) Kabupaten Tangerang Tahun 2016 – 2020

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

9) Kondisi Bangunan Pendidikan

Kualitas fasilitas pendidikan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Kondisi ruang kelas untuk jenjang sekolah dasar/ sederajat dan sekolah menengah pertama/ sederajat di Kabupaten Tangerang masih banyak yang mengalami kerusakan. Berikut adalah persentase kondisi kelas dengan kondisi bangunan baik menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Tangerang pada tahun ajaran 2016/2017 hingga tahun 2022/2023.



Gambar 2.76

Persentase Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kabupaten Tangerang Tahun Ajaran 2016/2017 hingga Tahun Ajaran 2022/2023

Sumber: Statistik Pendidikan Kemendikbud, 2023

Menurut data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kualitas bangunan kelas di tiap jenjang pendidikan dengan tren yang serupa. Berikut rincian kondisi bangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022.

Tabel 2. 27
Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Jenis Sarpras	SD		SMP		Jumlah
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
Ruang Kelas					
Kondisi Baik	4.055	2.289	1.292	1.663	9.299
Kondisi Rusak Ringan	2.313	850	647	1.167	4.977
Kondisi Rusak Sedang	1.022		123		1.145
Kondisi Rusak Berat	455		37		492
Total	7.845	3.139	2.099	2.830	15.913

Sumber : Dinas Pendidikan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2026

Berdasarkan data masih terdapat 42% ruang kelas SD dan SMP yang memiliki kondisi rusak. Sementara itu, dengan kondisi rusak berat sebanyak 3,1% dari seluruh ruang kelas SD dan SMP.

10) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru per 1.000 murid pendidikan dasar. Rasio guru terhadap murid digunakan untuk melihat besaran beban mengajar guru. Berikut merupakan rasio guru terhadap murid di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 28
Rasio Guru/Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020

Uraian	Rasio Guru/Murid		
	2018	2019	2020
Pendidikan Dasar	0,003	0,004	0,004
Pendidikan Menengah	0,003	0,004	0,004

Sumber: Dinas Pendidikan dalam Dokumen RPJMD 2019-2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, standar rasio guru terhadap murid sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama adalah 1:20 sementara rasio guru terhadap murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Sanawiah (MTs) adalah 1:15. Rasio ini berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mempertimbangkan beban pengajaran yang dilakukan oleh guru. Berikut merupakan perbandingan guru terhadap murid menurut kategori Pendidikan.

Tabel 2. 29
Perbandingan Guru dan Murid Menurut Jenis Pendidikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021

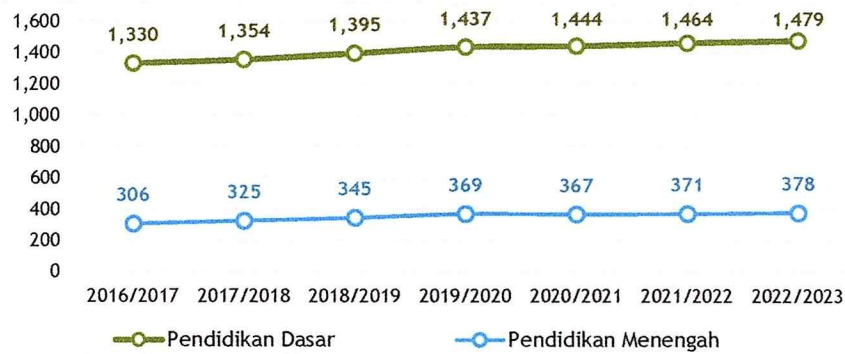
Uraian	Rasio Guru/Murid				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pendidikan Dasar	1:24	1:24	1:22	1:21	1:21
SD	1:25	1:25	1:24	1:22	1:24
MI	1:19	1:19	1:19	1:19	1:17
SMP	1:25	1:25	1:23	1:22	1:22
MTS	1:15	1:12	1:12	1:12	1:10

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka 2018-2022 (diolah)

Dalam rentang tahun 2017 hingga 2021 rasio guru terhadap murid di Kabupaten Tangerang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk pendidikan dasar, SD, dan SMP.

11) Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah perbandingan jumlah sekolah dengan 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar adalah perbandingan antara jumlah SD dan SMP dibandingkan dengan 10.000 penduduk berusia 7-12 dan 13 – 15 tahun sedangkan untuk pendidikan menengah adalah perbandingan SMA dan SMK dibandingkan dengan 10.000 penduduk usia 16-19 tahun. Indikator ini digunakan untuk analisis kemampuan fasilitas sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah. Semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah, maka semakin baik kesempatan untuk bersekolah. Berikut merupakan rincian jumlah sekolah untuk pendidikan dasar yaitu SD dan SMP serta pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK.



Gambar 2.77

Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Tangerang Tahun Ajaran 2016/2017 hingga Tahun Ajaran 2022/2023

Sumber: Statistik Pendidikan Kemendikbud

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah sekolah di Kabupaten Tangerang terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data di bawah dapat dilihat bahwa terjadi penurunan rasio. Rasio ketersediaan sekolah yang semakin tinggi berarti semakin banyak sekolah yang dapat melayani jumlah penduduk. Rincian untuk capaian rasio dapat dilihat dari gambar berikut:



*data yang digunakan adalah jumlah sekolah saat tahun ajaran 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022

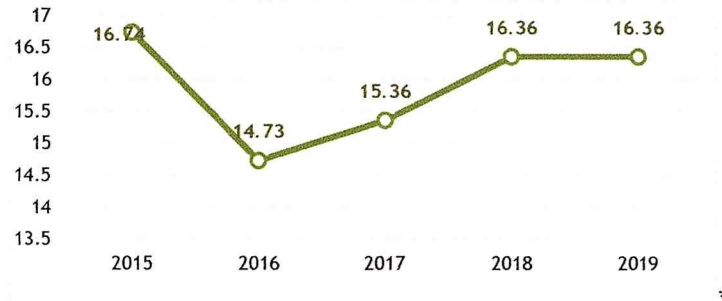
Gambar 2.78

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

Sumber: Statistik Pendidikan Kemendikbud dan Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang

12) Proporsi Murid Kelas I Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar didapatkan dengan menghitung persentase antara banyaknya lulusan SD dengan banyaknya penduduk usia 12 tahun. Menurut grafik di bawah terlihat terdapat peningkatan proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan pendidikan dasar. Hal ini akan mempengaruhi capaian kualitas pendidikan Kabupaten Tangerang karena semakin banyak murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar menunjukkan keberhasilan mengikuti pendidikan dasar.



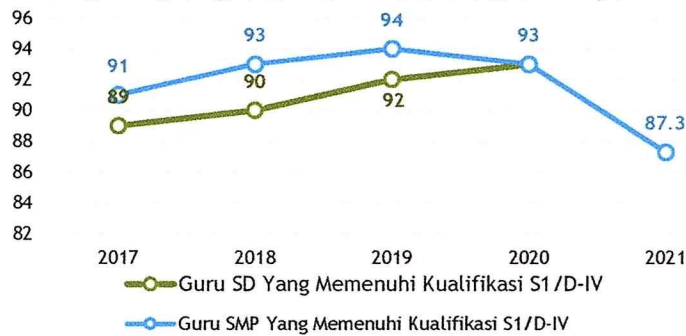
Gambar 2.79

Proporsi Murid Kelas I yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang (%) Tahun 2015-2019

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023

13) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru sebagai pendidik diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik didapatkan melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV didapat dengan menghitung persentase antara guru dengan lulusan minimal S1 dengan seluruh guru yang ada di jenjang pendidikan tertentu. Berikut merupakan rincian persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.



Gambar 2.80

Persentase Guru Sekolah Dasar (SD) dan Persentase Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021

Sumber: Dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Berdasarkan data di atas persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV cukup tinggi dan mengalami peningkatan tiap tahunnya untuk guru sekolah dasar dan mengalami penurunan untuk guru sekolah menengah pertama. Pada tahun 2021 di Provinsi Banten persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah 97% sehingga capaian Kabupaten Tangerang pada angka ini masih lebih rendah daripada rata-rata provinsi.

B. Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi

Salah satu indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah. Kabupaten Tangerang adalah kabupaten/kota dengan jumlah kematian bayi paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 227 kasus.

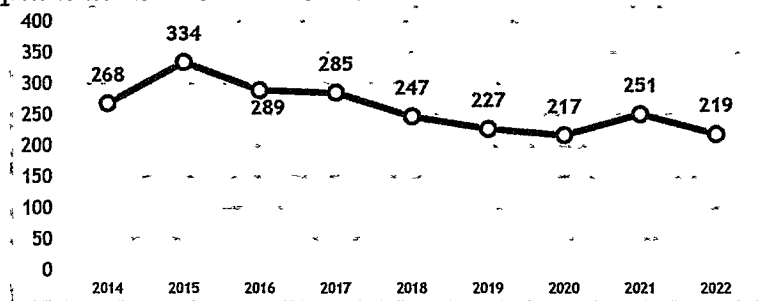
Tabel 2. 30

Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2017-2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Bayi			
	2017	2018	2019	2020
Kab Pandeglang	32	N/A	33	22
Kab Lebak	N/A	100	98	96
Kab Tangerang	227	217	251	227
Kab Serang	246	228	30	50
Kota Tangerang	54	49	44	44
Kota Cilegon	18	36	20	23
Kota Serang	22	21	28	N/A
Kota Tangerang Selatan	48	60	47	19
Provinsi Banten	437	523	316	505

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten 2018-2021 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026

Berikut merupakan grafik jumlah kejadian kematian bayi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 – 2022.

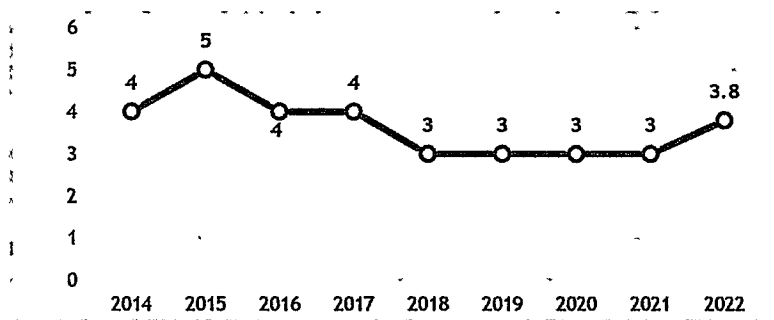


Gambar 2.81

Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022 dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2026

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah kasus kejadian kematian bayi di Kabupaten Tangerang. Pada diagram di atas dapat dilihat bahwa terdapat tren penurunan jumlah kematian bayi dari tahun 2015 hingga 2020. Salah satu faktor yang dapat berkontribusi pada tren ini adalah adanya peningkatan jumlah fasilitas layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Sedangkan angka kematian bayi di Kabupaten Tangerang dapat dilihat di gambar berikut.



Gambar 2.82

Angka Kematian Bayi per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022 dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 20124-2026

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berupaya untuk mengatasi isu kematian ibu dan bayi mengeluarkan regulasi kebijakan melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 128 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan maternal dan neonatal di Kabupaten Tangerang. Peraturan itu disebut memiliki tujuan untuk menciptakan layanan fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak yang lebih memenuhi tata kelola klinis yang sesuai standar. Penyebab kematian bayi pada tahun 2014 hingga tahun 2020 dapat ditemukan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 31

Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 - 2020

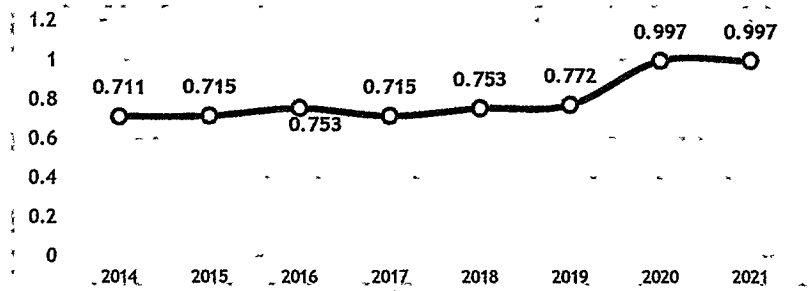
No	Penyebab Kematian Bayi	Jumlah (dalam jiwa)						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	BBLR	127	195	138	120	122	42	84
2	Asfiksia	81	68	65	70	42	67	50
3	Tetanus	2	3	2	3	2	1	1
4	Sepsis	13	22	23	22	16	39	24
5	Kelainan konginetal	22	21	26	49	37	20	34
6	Ikterus	1			1	1	2	1
7	Perdarahan intrakranial				1			
8	Pneumonia	4			2	4	2	
9	Diare	1			4	2	0	
10	Lain-lain	17	25	35	13	21	54	9
	Jumlah	268	334	289	285	247	227	203

Sumber: Kesga -Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2020 dalam Dokumen RPJMD 2019-2023 Kabupaten Tangerang

Penyebab kematian yang paling banyak ditemukan di kasus kematian bayi di Kabupaten Tangerang adalah kondisi BBLR atau bayi berat lahir rendah. Pendampingan terhadap ibu saat hamil perlu ditingkatkan untuk menekan angka kematian bayi.

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi menggambarkan banyaknya bayi yang hidup dalam setiap 1000 kelahiran. Dibawah ini merupakan grafik angka kelangsungan hidup bayi Kabupaten Tangerang tahun 2014-2021. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan kenaikan angka kelangsungan hidup bayi dan pada tahun 2021 menyentuh angka 0,997.



Gambar 2.83

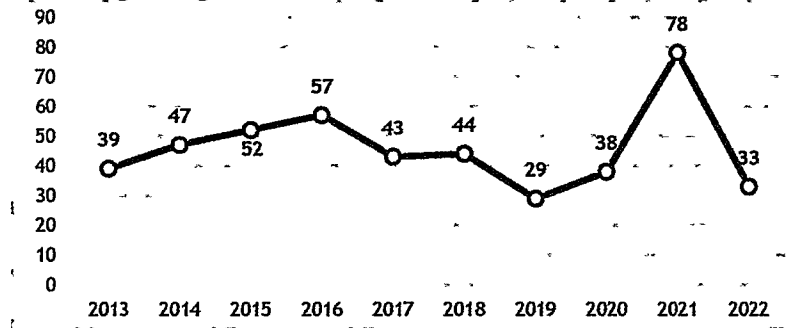
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

3) Angka Kematian Ibu

Salah satu indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan sampai dengan pasca persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri.

Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Kabupaten Tangerang adalah kabupaten/kota dengan jumlah kasus kematian ibu tertinggi Tahun 2021 di Provinsi Banten dengan jumlah 78 kasus. Berikut adalah grafik jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Tangerang.

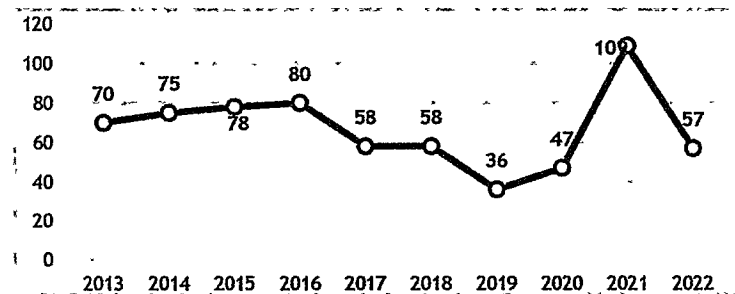


Gambar 2.84

Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2023

Berikut adalah grafik angka kematian ibu di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.85
 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2022
 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2023

Angka kematian ibu tersebar di berbagai beberapa kecamatan di Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 32
 Angka Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
 Tahun 2019 – 2021

No	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Balaraja	99,9	67,1	75,7
2	Jayanti	0	0	414,7
3	Tigaraksa	27,9	25	291,5
4	Jambe	391,8	96,2	298,5
5	Cisoka	0	92,7	105,9
6	Kresek	74,7	72,5	159,2
7	Kronjo	72,4	73,6	166,9
8	Mauk	108	108,9	0
9	Kemiri	0	187,3	218,8
10	Sukadiri	0	0	0
11	Rajeg	47,6	145	104,2
12	Pasar Kemis	0	12,2	57,3
13	Teluknaga	0	27,7	31,3
14	Kosambi	0	0	61,2
15	Pakuhaji	40	0	89,4
16	Sepatan	0	37,2	0
17	Curug	0	82,4	45,7
18	Cikupa	62,2	63,1	121
19	Panongan	29,8	29,9	132,9
20	Legok	73,9	73,4	437,9
21	Pagedangan	0	36,9	106
22	Cisauk	49,8	0	0
23	Sukamulya	0	61,3	0
24	Kelapa Dua	38,6	0	64,5
25	Sindang Jaya	48,3	55,4	52,8
26	Sepatan Timur	0	0	52,7
27	Solear	46,1	139,6	161,2
28	Gunung Kaler	175,1	83,8	196,3
29	Mekar Baru	0	0	0
Kabupaten Tangerang		36,5	49	109,4

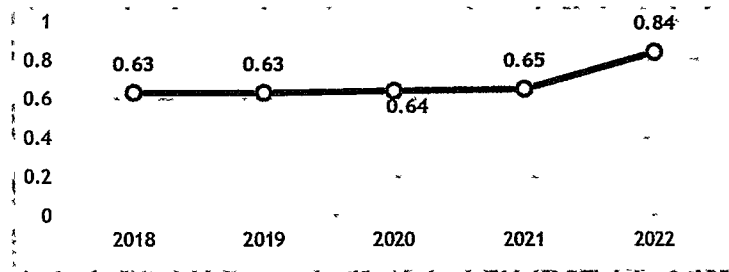
Sumber: Dinas Kesehatan, 2022 dalam Website Open Data Kabupaten Tangerang

Berdasarkan data AKI di tingkat kecamatan di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Legok, Kecamatan Jayanti, dan Kecamatan Jambe adalah tiga kecamatan dengan angka kematian ibu tertinggi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021. Pemerintah nasional menetapkan target penurunan Angka Kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan sudah mencapai target yang ditentukan. Akan tetapi, terdapat beberapa kecamatan masih belum

mencapai target tersebut yaitu Kecamatan Legok, Jayanti, Jambe, Tigaraksa, Kronjo, Kemiri, dan Gunung Kaler.

4) Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya lima program prioritas (KIA, KB, Gizi, Imunisasi, Penanggulangan Diare, dan ISPA) dengan tujuan mempercepat penurunan angka kematian bayi dan ibu.



Gambar 2.86

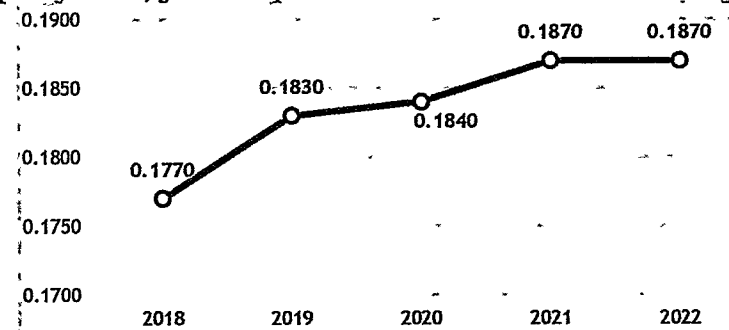
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Tangerang Tahun 2018 -2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang di Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Rasio posyandu per satuan balita merupakan jumlah posyandu untuk setiap 100 orang balita. Pada tahun 2022 telah terbentuk 2.341 posyandu di Kabupaten Tangerang, dengan jumlah balita 284.083 jiwa. Menurut Departemen Kesehatan RI (2006), idealnya satu posyandu adalah melayani \pm 100 balita. Maka di tahun 2022, 1 posyandu melayani \pm 121 balita, artinya rasio posyandu per satuan balita sebesar 0,84 (dari angka ideal 1). Rasio tersebut belum mencapai angka ideal.

5) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1000 Penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu per satuan penduduk adalah ketersediaan layanan puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu untuk setiap 1000 orang penduduk. Seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang sudah memiliki puskesmas, bahkan di kecamatan telah memiliki 2 puskesmas dengan total sebanyak 44 unit. Jumlah ini terdiri dari puskesmas rawat inap 37 unit dan non rawat inap 7 unit. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat kesehatan Masyarakat, puskesmas harus didirikan di masing-masing kecamatan. Meskipun begitu, pada kondisi tertentu dalam satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu kecamatan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas.



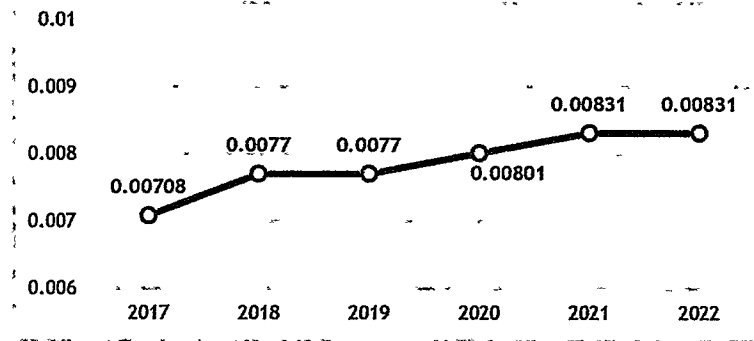
Gambar 2.87
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk
Kabupaten Tangerang Tahun 2018 -2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan total jumlah unit adalah 570 unit.

6) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah ketersediaan rumah sakit untuk setiap 1000 orang penduduk. Jumlah rumah sakit dan rasio ketersediaannya per 1000 penduduk di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.88

Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2017 -2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang di Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Kabupaten Tangerang memiliki rumah sakit sejumlah 20 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 27 rumah sakit pada tahun 2023 dengan 21 rumah sakit umum dan 6 rumah sakit khusus. Kepemilikan dari rumah sakit tersebut adalah 3 unit dimiliki oleh pemerintah daerah, 18 unit milik swasta serta 6 unit rumah sakit khusus seluruhnya dimiliki oleh pihak swasta. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah 0,00831 yang berarti satu rumah sakit melayani kurang lebih 124.000 penduduk di Tahun 2022 hal ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 33

Jumlah Rumah Sakit dan Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah RSU Pemerintah	2	2	2	2	3	3
Jumlah Seluruh Rumah Sakit	19	19	20	23	24	23
Jumlah Penduduk (jiwa)	3.157.780	3.264.776	3.362.720	3.477.495	3.584.770	3.245.619
Perbandingan jumlah rumah sakit dan jumlah penduduk	1 : 150.370	1 : 155.466	1 : 152.851	1:151.195	1:149.365	1:162.281
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	0,00602	0,00582	0,00595	0,00661	0,00669	0,00709

Sumber : Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPJMD 2019 – 2023

7) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan jumlah ketersediaan dokter untuk setiap 1000 orang penduduk. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah dokter dengan rasio ketersediaannya:

Tabel 2. 34

Rasio Dokter Per Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Dokter (spesialis dan umum) per jumlah penduduk	1 : 4.687	1 : 8.515	1 : 3.414	1 : 3.484	1 : 1.727	1 : 1.942
Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi Spesialis) per jumlah penduduk	1 : 29.470	1 : 18.671	1 : 20.139	1 : 20.883	1 : 17.392	1 : 20.109
Rasio Dokter per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	0,21	0,12	0,29	0,29	0,58	0,51
Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	0,03	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
Rasio dokter per 100.000 penduduk	21,34	11,74	29,29	28, 2170	57,9	51,49
Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	3,39	5,36	4,97	4,79	5,75	4,97

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022 (diolah)

Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang memiliki jumlah dokter paling banyak yaitu 1.942 dokter dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2021. Menurut *World Health Organization*, kondisi ideal suatu wilayah adalah ketika rasio dokter per satuan penduduk adalah 1:1.000 yang berarti 1 dokter melayani 1.000 penduduk. Kabupaten Tangerang belum memenuhi standar dengan rasio 1 dokter melayani kurang lebih 1.942 penduduk pada tahun 2021. Namun rasio ini membaik dibandingkan dengan tahun 2016. Di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui keputusan menteri menetapkan target rasio dokter per 100.000 penduduk pada tahun 2019 sebanyak 45 sementara untuk tahun 2025 sebanyak 50. Berdasarkan keputusan tersebut, Kabupaten Tangerang telah mencapai target dengan rasio dokter per 100.000 penduduk sebesar 51,49.

8) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk berguna untuk menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan untuk setiap 1000 orang penduduk. Rasio ini juga berguna untuk mengevaluasi cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi penduduk. Berikut data yang tersedia merupakan rasio tenaga medis per 100.000 penduduk di Kabupaten Tangerang:

Tabel 2. 35

Rasio Tenaga Medis di Kabupaten Tangerang Tahun 2016 - 2020

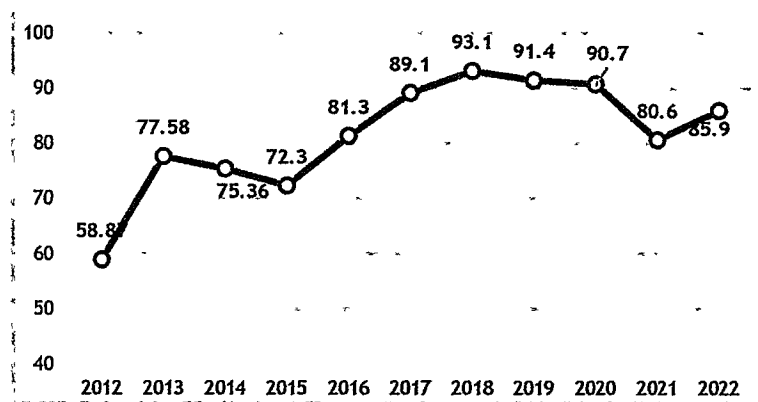
Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Tenaga medis bidan/ 100.000 penduduk	44,98	N/A	73,95	46,33	35,65
Rasio tenaga medis perawat/ 100.000 penduduk	47,62	N/A	61,57	60,46	91,32

Sumber: Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPJMD 2019-2023

Pada tahun 2020, rasio tenaga medis Kabupaten Tangerang adalah 91,32 untuk perawat dan 35,65 untuk bidan. Angka tersebut menggambarkan jumlah tenaga medis yang melayani 100.000 penduduk adalah 35 tenaga medis bidan dan 91 perawat pada tahun 2020. Menurut sasaran strategis yang diuraikan Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 pada tahun 2019 diharapkan ketersediaan perawat adalah sejumlah 158 perawat per 100.000 penduduk dan 75 bidan per 100.000 penduduk. Capaian rasio di Kabupaten Tangerang hingga tahun 2020 masih belum mencapai sasaran strategis tersebut.

9) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah cakupan ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di wilayah Kabupaten Tangerang pada tahun 2017-2022 digambarkan pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.89

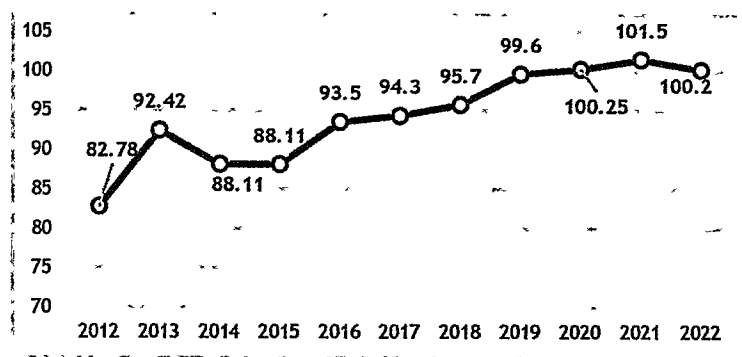
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022(%)

Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan 2019-2023

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dan kemudian meningkat pada tahun 2022. Cakupan ini meningkat pada tahun 2022 dibandingkan dengan pada tahun 2012. Pada tahun 2021, Kabupaten Tangerang memiliki jumlah kasus komplikasi kebidanan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, sehingga peningkatan kapasitas penanganan harus ditingkatkan.

10) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan persalinan merupakan cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, di suatu wilayah kerja dalam waktu tertentu. Meningkatnya cakupan pertolongan ibu bersalin dengan bantuan tenaga kesehatan yang kompeten merupakan salah satu upaya untuk menurunkan AKI dan AKB. Dari data dibawah ini menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Tangerang mengalami tren peningkatan hingga tahun 2021 namun mengalami penurunan di tahun 2022.



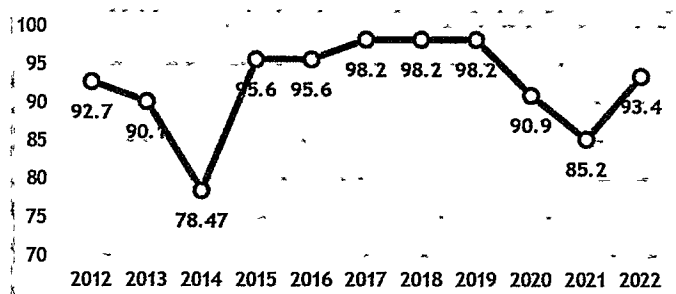
Gambar 2.90

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 (%)

Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan 2019-2023

11) Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Desa atau kelurahan *Universal Child Immunization* merupakan keadaan tercapainya imunisasi dasar lengkap pada semua bayi (anak di bawah umur 1 tahun). Setiap desa diharapkan mampu mencapai minimal 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Cakupan desa atau kelurahan UCI merupakan indikator dari keberhasilan program imunisasi. Adanya imunisasi dasar lengkap bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*). Selain itu imunisasi merupakan intervensi kesehatan yang paling murah, karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit.



Gambar 2.91

Cakupan Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 (%)

Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan 2019-2023

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi tren cakupan yang meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2018 kemudian menurun hingga tahun 2021 dan kembali ke nilai yang lebih tinggi di tahun 2022 daripada tahun 2012. Sejak tahun 2020, istilah *Universal Child Immunization* (UCI) tidak lagi digunakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan untuk periode 2020-2024. Saat ini, ukuran yang digunakan adalah persentase bayi yang berusia 0-11 bulan yang telah menerima Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan periode 2020-2024.

12) Imunisasi Dasar Bayi

Program Imunisasi merupakan salah satu upaya intervensi bidang kesehatan untuk melindungi penduduk dari penyakit tertentu. Adanya imunisasi dasar lengkap bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok

(*herd immunity*). Selain itu imunisasi merupakan intervensi kesehatan yang paling murah, karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit. Imunisasi dasar lengkap perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sejak balita. Sistem kekebalan tubuh yang terbentuk dengan baik mampu mengurangi risiko terpaparnya penyakit dengan gejala yang lebih serius. Dengan begitu usia hidup dapat meningkat. Imunisasi dasar lengkap terdiri dari vaksin hepatitis B sekali, vaksin BCG sekali, vaksin DPT-HiB tiga kali, OPV empat kali + 1 IPV atau IPV tiga kali dan campak sekali.

Tabel 2. 36
Cakupan Imunisasi Dasar pada bayi 0-11 bulan di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 (%)

No.	Jenis Imunisasi	Cakupan (%)							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	BCG	97,7	91,3	97,2	104,7	101,8	107,5	99,66	96,6
2	Hepatitis BO	93,6	92,1	94,9	97	99,7	106,7	100,52	102,3
3	DPT-HB III	96,7	98,8	96,4	102,6	99,8	100,9	108	95,6
4	Polio IV	96,6	92,4	96,1	103,3	101,1	100,9	100,52	95,6
5	Campak	95,5	86,1	95,5	101,9	89,9	100	N/A	96,5

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2020 dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tangerang (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa cakupan dari semua jenis imunisasi cukup tinggi dan beberapa mengalami kenaikan.

Tabel 2. 37
Cakupan Imunisasi dasar pada Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2015 - 2020 (%)

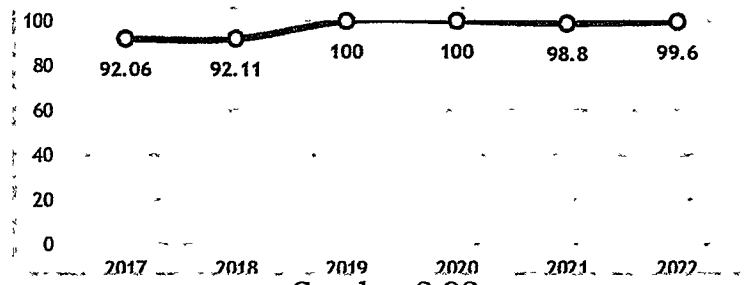
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Cakupan (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5 Antigen	93,5	92,2	93,4	94,3	98,5	94,7

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2020

Capaian dari program imunisasi dapat diamati melalui pencapaian indikator imunisasi dasar yang komprehensif. Pada tahun 2020, tingkat pencapaian imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Tangerang mencapai 94,7%. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan angka pada tahun 2019 yang mencapai 98,5%, hal ini terjadi karena dampak pandemi COVID-19.

13) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan didapatkan dengan menghitung persentase antara jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama.



Gambar 2.92

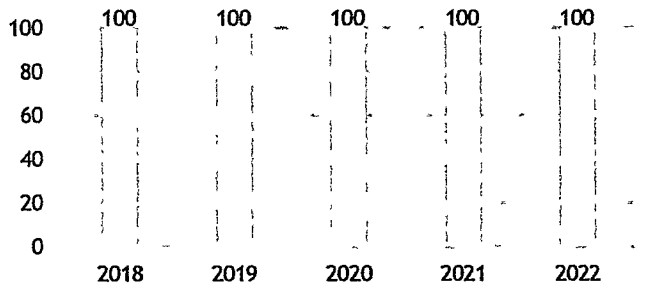
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022 (%)

Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan 2019-2023

Berdasarkan data di atas, cakupan pelayanan meningkat dan hampir mencapai 100%. Maka dari itu, capaian tersebut harus didorong hingga 100% melalui peningkatan layanan kesehatan dan upaya penyuluhan gizi bagi ibu dan balita.

14) **Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**

Demam Berdarah *Dengue* (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *Dengue* dan ditularkan oleh vektor nyamuk *Aedes Aegypti*. Penyakit ini sebagian besar menyerang anak berumur <15 tahun, namun dapat juga menyerang orang dewasa. Indikator yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan penyakit DBD adalah *incident rate* atau angka kesakitan dan *case fatality rate* atau proporsi kematian pada kasus DBD.



Gambar 2.93

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)

Sumber: Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD 2023-2026 Kabupaten Tangerang

Pada gambar diatas terlihat bahwa cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100% di tahun 2018 hingga 2022.

15) **Penderita Diare Yang Ditangani**

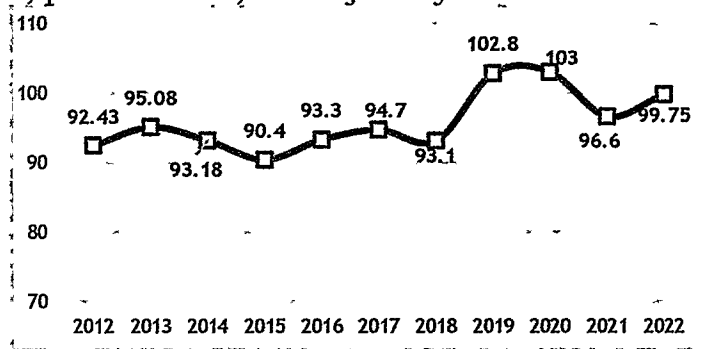
Penderita diare yang ditangani dihitung dari persentase jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama. Menurut data dari dinas Kesehatan di bawah seluruh penderita diare telah ditangani 100% dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

16) **Angka Kejadian Malaria**

Penyakit Malaria adalah suatu jenis infeksi menular yang tersebar melalui gigitan nyamuk. Pada tahun 2018 – 2022 tidak ditemukan kejadian malaria di Kabupaten Tangerang menurut data dari Dinas Kesehatan. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang telah bebas dari kejadian malaria.

17) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merujuk pada persentase bayi yang menerima perawatan kesehatan sesuai dengan standar yang diberikan oleh dokter, bidan, atau perawat dengan kompetensi klinis di suatu wilayah kerja setidaknya sebanyak 4 kali dalam periode tertentu. Kunjungan bayi ini mencakup pelayanan kesehatan rutin seperti tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI eksklusif dan dini, serta pencegahan infeksi melalui perawatan mata, tali pusat, kulit, dan imunisasi. Cakupan kunjungan bayi ini mencakup bayi yang berusia antara 29 hari hingga 11 bulan, dan dapat dilakukan di berbagai tempat seperti sarana pelayanan kesehatan (seperti polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin, dan rumah sakit), atau melalui kunjungan petugas ke rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan, dan sejenisnya.



Gambar 2.94

Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 (%)

Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018, RPD Kabupaten Tangerang 2023-2026, dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Cakupan kunjungan bayi cenderung fluktuatif pada 10 tahun terakhir dengan capaian terakhir mendekati 100 persen pada tahun 2022. Peningkatan cakupan kunjungan bayi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan bayi.

18) Cakupan Puskesmas

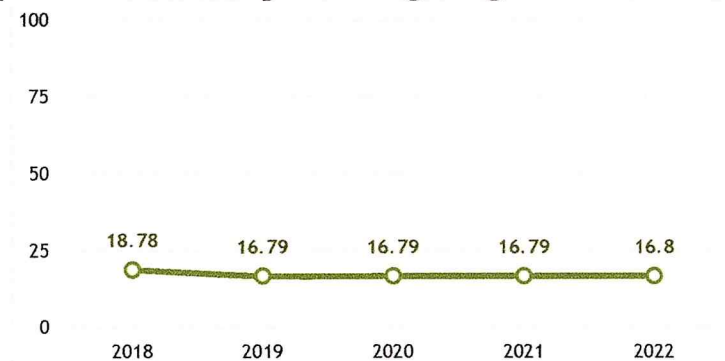
Cakupan puskesmas merupakan persentase perbandingan antara jumlah puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Peningkatan cakupan puskesmas perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap layanan Kesehatan. Sejak tahun 2018, jumlah puskesmas menurun menjadi sejumlah 44 unit di tahun 2022, akan tetapi cakupan puskesmas telah mencapai 100%. Berikut adalah rincian cakupan puskesmas pada tahun 2018-2023.



Gambar 2.95
Cakupan Puskesmas (%) Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

19) Cakupan Puskesmas Pembantu

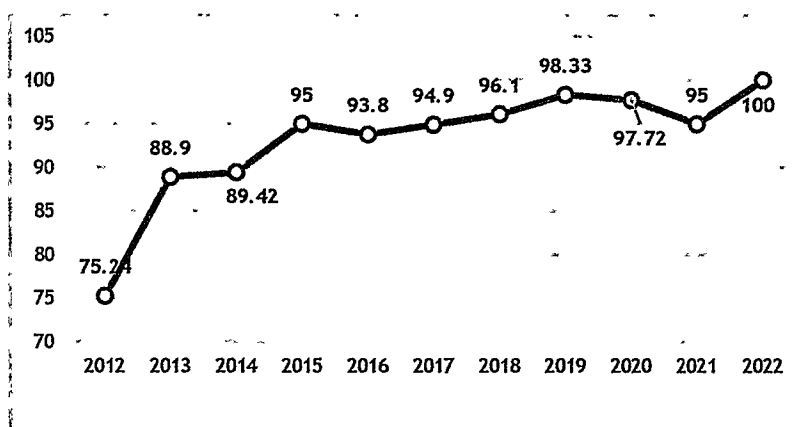
Cakupan puskesmas pembantu merupakan persentase perbandingan antara jumlah puskesmas pembantu terhadap jumlah seluruh desa. Cakupan puskesmas pembantu merujuk pada jumlah penduduk atau wilayah yang mendapat pelayanan dari seorang tenaga kesehatan yang bekerja sama dengan dokter untuk melaksanakan tugas medis di puskesmas. Cakupan puskesmas pembantu cenderung stagnan dalam 4 tahun terakhir yang dapat disebabkan kecenderungan jumlah petugas yang tidak bertambah. Grafik di bawah merupakan persentase cakupan pelayanan puskesmas pembantu di Kabupaten Tangerang Tahun 2018 – 2022.



Gambar 2.96
Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022 (%)
Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

20) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (Kunjungan Keempat)

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 merupakan persentase perbandingan antara jumlah ibu hamil yang memperoleh antenatal K4 (4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan) terhadap jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini penting untuk mengukur upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sudah mencapai 100 persen pada tahun 2022. Berikut merupakan grafik perkembangan cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2012 – 2022.



Gambar 2.97

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 (%)

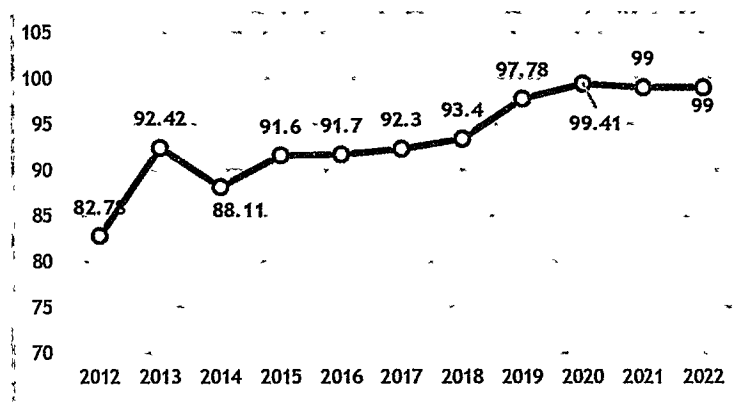
Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan RPD Kabupaten Tangerang 2023-2026

21) Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang- kurangnya tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan (Kemenkes RI, 2017). Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal 3 kali dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. KF 1 : Kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam sampai dengan 3 hari setelah persalinan
2. KF 2 : Kunjungan nifas kedua dalam waktu 2 minggu setelah persalinan (8- 14 hari)
3. KF 3 : Kunjungan nifas ketiga dalam waktu 6 minggu setelah persalinan (36-42 hari)

Berikut adalah capaian pelayanan nifas di Kabupaten Tangerang pada tahun tahun 2012 – 2022.



Gambar 2.98

Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 (%)

Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan RPD Kabupaten Tangerang 2023-2026

Pelayanan nifas meningkat dalam kurun waktu sepuluh waktu terakhir dengan 99 persen nifas sudah terlayani. Cakupan pelayanan ini juga memiliki pencapaian dengan tren yang cenderung meningkat tiap tahunnya.

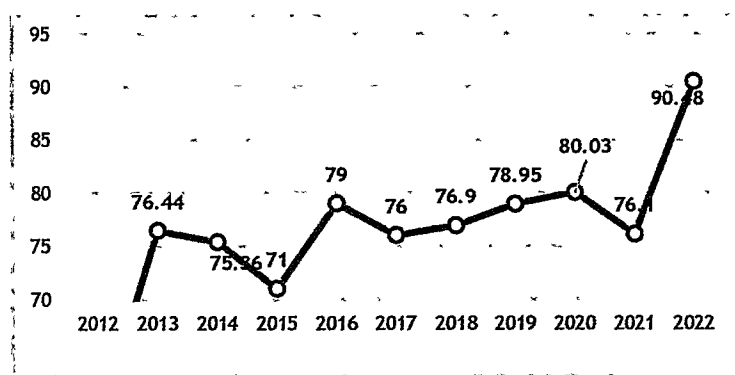
22) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus adalah bayi yang baru lahir 28 hari pertama kehidupan (Rudolph, 2015). Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat lahir < 2.500 gram), sindrom gangguan pernafasan, dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).

Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbesar adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi. Komplikasi ini sebetulnya dapat dicegah dan ditangani. Namun terkendala oleh akses ke pelayanan kesehatan, keadaan sosial ekonomi, sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik, terlambatnya deteksi dini dan kesadaran orang tua untuk mencari pertolongan kesehatan.

Penanganan neonatal dengan komplikasi adalah penanganan terhadap neonatal sakit dan atau neonatal dengan kelainan atau komplikasi/keawatdaruratan yang mendapat pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat) terlatih baik di rumah, sarana pelayanan kesehatan dasar maupun sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pelayanan sesuai standar antara lain sesuai dengan standar MTBM, manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, manajemen Bayi Berat Lahir Rendah, pedoman pelayanan neonatal esensial di tingkat pelayanan kesehatan dasar, PONEK, PONEK atau standar operasional pelayanan lainnya.

Cakupan penanganan neonatal dengan komplikasi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 mengalami peningkatan paling tinggi pada tahun 2021-2022 menjadi sebesar 90,48%. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani merupakan neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter dan bidan di sarana pelayanan kesehatan. Perhitungan sasaran neonatus dengan komplikasi dihitung berdasarkan 15 persen dari jumlah bayi baru lahir. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi. Peningkatan cakupan paling tinggi terjadi pada tahun 2021-2022.



Gambar 2.99

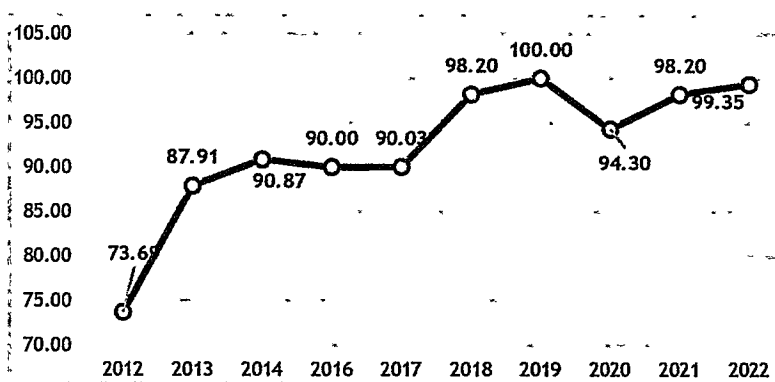
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan RPD Kabupaten Tangerang 2023-2026

23) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Anak balita adalah anak berumur 12-59 bulan. Setiap anak umur 12-59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan,

minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per tinggi/panjang badan (BB/TB). Cakupan pelayanan anak balita adalah persentase atau proporsi anak-anak yang berusia antara 1 hingga 5 tahun yang menerima layanan kesehatan yang diperlukan, termasuk di dalamnya pelayanan imunisasi, pemeriksaan kesehatan penyaringan (skrining), dan perawatan untuk masalah kesehatan yang mungkin terjadi. Maksud dari pencapaian cakupan anak balita adalah untuk menjamin bahwa anak-anak balita memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan yang sesuai dan efektif, sambil membantu mengawasi pertumbuhan serta perkembangan mereka. Ini juga berkontribusi dalam menilai persyaratan akan tenaga medis dan sumber daya lain yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang cocok dan bermanfaat bagi anak-anak balita.



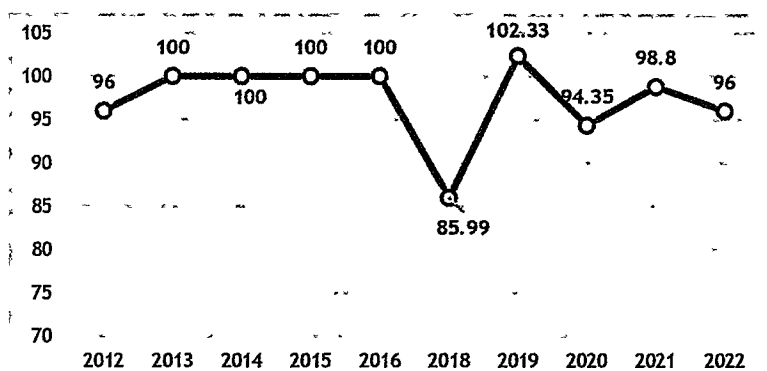
Gambar 2.100

Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022 (%)

Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan RPD Kabupaten Tangerang 2023-2026

24) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin merupakan perbandingan antara jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 terhadap jumlah seluruh masyarakat miskin. Berikut merupakan capaian pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang:



Gambar 2.101

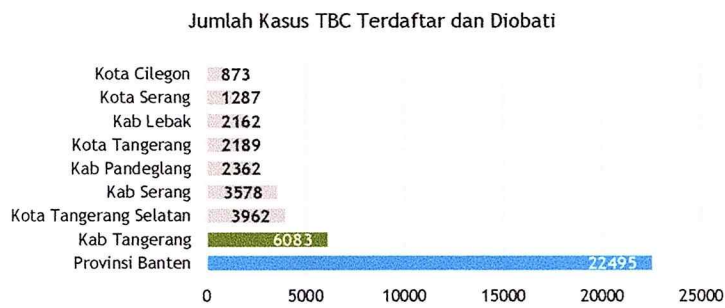
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

Sumber: Dinas Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 dan RPD Kabupaten Tangerang 2023-2026

Angka pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang adalah fluktuatif dengan capaian yang sama pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2012.

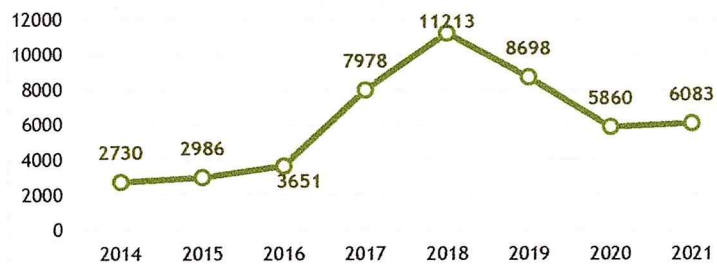
25) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium Tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang bagian paru-paru manusia, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Sumber penularan adalah pasien TB BTA positif. Untuk mengetahui capaian daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis adalah melalui Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA atau *Case Detection Rate* dan *Treatment Success Rate*. Indikator lain adalah Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk); tingkat kematian karena Tuberkulosis per 100.000 penduduk (*case fatality rate*); Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS; dan Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS.



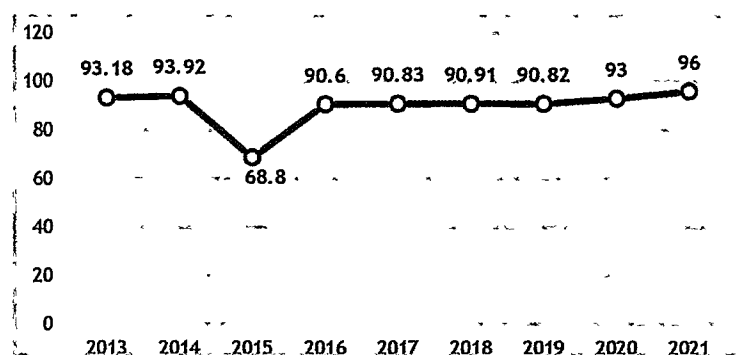
Gambar 2.102
Perbandingan Jumlah Kasus TBC Terdaftar dan Diobati Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2021

Jumlah kasus TBC terbanyak di Provinsi Banten berada di Kabupaten Tangerang (27,04%). Jumlah kasus TBC di Kabupaten Tangerang yang tercatat dan diobati pada tahun 2021 adalah sejumlah 6.083 dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian Jumlah Kasus Tuberkulosis Tercatat dan Diobati di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 – 2021.



Gambar 2.103
Jumlah Kasus Tuberkulosis Tercatat dan Diobati di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 – 2021
Sumber: Bid P2P Dinas Kesehatan dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Gambar di atas menunjukkan peningkatan kasus TBC di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Angka kesembuhan dan keberhasilan pengobatan tuberkulosis menunjukkan *treatment success rate* dari penderita TBC di Kabupaten Tangerang. Berikut rincian Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB (%) Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021



Gambar 2.104

Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB (%) Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021

Sumber: Bid P2P Dinas Kesehatan dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

26) HIV dan AIDS

Prevalensi HIV/AIDS merupakan persentase jumlah pasien HIV/AIDS terhadap jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Tabel di bawah ini menunjukkan kasus penyakit HIV/AIDS tahun 2017-2021 menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten. Menurut tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah penambahan kasus baru dan kasus kumulatif penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang adalah paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten di tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini harus menjadi perhatian karena salah satu target Indonesia yang ditetapkan Kementerian Kesehatan adalah menuju *three zero* HIV/AIDS 2030 yakni nol kasus infeksi baru HIV, nol kasus kematian terkait AIDS dan nol stigma-diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Berikut merupakan rincian penambahan kasus baru dan kasus kumulatif HIV/AIDS di Provinsi Banten.

Tabel 2. 38

Jumlah Penambahan Kasus Baru dan Kasus Kumulatif Penyakit HIV/AIDS Tahun 2017-2021

Kabupaten Kota	Jumlah Penambahan Kasus Baru dan Kasus Kumulatif Penyakit HIV/AIDS						
	2017	2018	2019	2020		2021	
				(+)	Kumulatif	(+)	Kumulatif
Kabupaten Pandeglang	166	173	175	37	212	8	220
Kabupaten Lebak	124	133	139	89	228	40	268
Kabupaten Tangerang	413	480	532	618	1150	88	1238
Kabupaten Serang	213	245	245	76	321	24	345
Kota Tangerang	186	209	627	386	1013	56	1069
Kota Cilegon	512	567	209	80	289	19	308
Kota Serang	145	156	183	54	237	10	247
Kota Tangerang Selatan	180	183	163	194	357	26	383
Provinsi Banten	1939	2146	2273	1534	3807	271	4078

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka Tahun 2018-2022 (diolah)

Prevalensi penderita HIV/AIDS adalah jumlah penderita HIV/AIDS dibandingkan dengan total jumlah populasi di wilayah tersebut pada kurun waktu tertentu. Prevalensi ini menjadi indikator kualitas Kesehatan masyarakat. Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan prevalensi tiap Berikut merupakan rincian prevalensi HIV/AIDS menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2021.

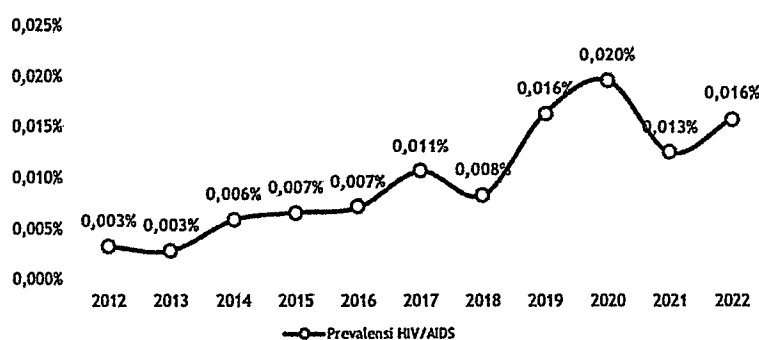
Tabel 2. 39

Prevalensi HIV/AIDS dari Populasi menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Prevalensi HIV/AIDS dari Populasi (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021

Kabupaten Pandeglang	0,014%	0,014%	0,014%	0,017%	0,017%
Kabupaten Lebak	0,010%	0,010%	0,011%	0,016%	0,019%
Kabupaten Tangerang	0,012%	0,013%	0,014%	0,035%	0,038%
Kabupaten Serang	0,014%	0,016%	0,016%	0,020%	0,021%
Kota Tangerang	0,009%	0,010%	0,028%	0,053%	0,056%
Kota Cilegon	0,120%	0,131%	0,048%	0,066%	0,070%
Kota Serang	0,022%	0,023%	0,027%	0,034%	0,035%
Kota Tangerang Selatan	0,011%	0,011%	0,009%	0,026%	0,028%
Provinsi Banten	0,016%	0,017%	0,018%	0,032%	0,034%

Sumber: Hasil olahan, 2023



Gambar 2.105

Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

Sumber : Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2026, diolah

27) Universal Health Coverage

Data yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan hingga akhir Desember 2023, menunjukkan bahwa dari total penduduk Kabupaten Tangerang yang mencapai 3.286.420 jiwa, sekitar 100,26% atau sekitar 3.295.194 jiwa telah bergabung sebagai peserta dalam Program JKN KIS/BPJS Kesehatan (RKPD Kabupaten Tangerang). Jumlah cakupan yang melebihi persentase maksimal (100%) termasuk data-data yang belum dimutasi atau dihapus dan saat ini sedang dalam proses pembaharuan database.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga yang dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Indikator ini digunakan untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik di perkotaan maupun perdesaan. Angka yang tercatat dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

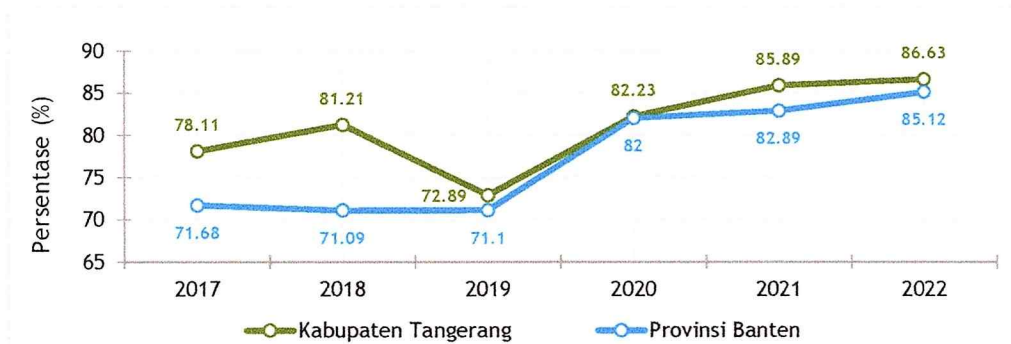
Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan yang baik dalam pemenuhan akses sanitasi layak bagi rumah tangga. Dengan angka persentase sebesar 86,63% pada tahun 2022, Kabupaten Tangerang sudah berada di atas angka persentase Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan hampir semua rumah tangga di Kabupaten Tangerang sudah terlayani oleh

fasilitas sanitasi yang layak. Upaya pemerintah di masa mendatang adalah bagaimana pemerintah dapat meningkatkan layanan rumah tangga secara penuh (100%).

Tabel 2. 40
 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Pandeglang	15,23	23,42	19,89	50,15	49,11	62,14
Kabupaten Lebak	23,90	20,07	32,39	63,35	56,82	67,40
Kabupaten Tangerang	78,11	81,21	72,89	82,23	85,89	86,63
Kabupaten Serang	66,99	59,42	59,50	77,57	80,34	82,38
Kota Tangerang	93,26	93,77	95,40	95,10	94,94	94,43
Kota Cilegon	91,77	90,72	95,17	94,38	97,07	87,72
Kota Serang	77,07	78,15	81,99	87,34	90,76	91,55
Kota Tangerang Selatan	96,56	94,68	97,30	97,45	98,84	97,56
Provinsi Banten	71,68	71,09	71,10	82,00	82,89	85,12

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka, 2023



Gambar 2.106

Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

2) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, definisi irigasi disebutkan sebagai usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M.2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi beserta Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi daerah. Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam menjaga kualitas sistem irigasi daerah. Pada tahun 2020, tercatat hanya ada 6,05% irigasi kabupaten yang berada dalam kondisi baik. Persentase ini kemudian meningkat pesat menjadi 27,7% pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 69,94% pada tahun 2022.

Tabel 2. 41
 Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2022

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	6,05%	27,70%	69,94%

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

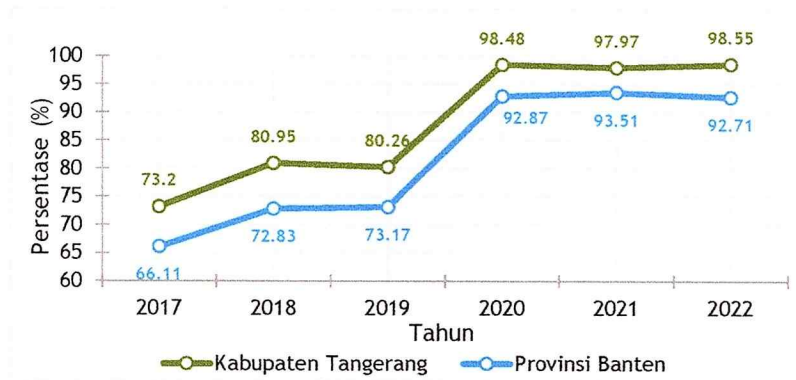
- 3) Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak
- Menurut Badan Pusat Statistik, air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur, dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.
- Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan yang sejalan dengan Provinsi Banten dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Dengan persentase sebesar 98,55 pada tahun 2022, Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga dalam pemenuhan air minum layak di Provinsi Banten setelah Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang Selatan. Dengan hasil angka tersebut diketahui hampir semua rumah tangga di Kabupaten Tangerang sudah terlayani oleh fasilitas sanitasi yang layak. Upaya pemerintah di masa mendatang adalah bagaimana pemerintah dapat meningkatkan layanan rumah tangga terhadap air minum layak secara penuh (100%).

Tabel 2. 42

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Pandeglang	39,50	41,93	45,96	75,83	82,01	77,27
Kabupaten Lebak	35,38	44,09	37,97	73,49	73,32	73,27
Kabupaten Tangerang	73,20	80,95	80,26	98,48	97,97	98,55
Kabupaten Serang	59,20	65,73	68,34	89,95	92,33	91,91
Kota Tangerang	78,93	88,64	89,60	98,37	98,00	95,58
Kota Cilegon	80,85	83,23	88,85	94,98	98,72	99,08
Kota Serang	70,92	71,97	80,96	99,10	98,38	97,61
Kota Tangerang Selatan	77,46	81,85	78,33	99,08	99,22	98,64
Provinsi Banten	66,11	72,83	73,17	92,87	93,51	92,71

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka, 2023



Gambar 2.107

Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Air Minum Layak Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka, 2023

- 4) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB
 Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan penting dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam suatu wilayah. Amanat Undang-Undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa luasan ruang terbuka hijau adalah minimal 30% dari luas wilayah, meliputi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Rasio RTH per satuan wilayah beserta hak-haknya memperlihatkan seberapa besar pemerintah dapat memenuhi minimal kebutuhan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Kabupaten Tangerang sendiri saat ini telah memenuhi sekitar 17,05% rasio ruang terbuka pada tahun 2021. Angka ini meningkat dari 3 tahun sebelumnya yang hanya mencapai 13% pada tahun 2018. Pemerintah perlu meningkatkan kebutuhan ruang terbuka hijau masyarakat sehingga menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah.

Tabel 2. 43

Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB	13	16,61	16,61	17,05

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

- 5) Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebuah perizinan yang harus diajukan dan dimiliki oleh pemilik resmi bangunan untuk mendirikan dan mengolah bangunan sesuai dengan berbagai persyaratan tertentu. Rasio bangunan ber-IMB per jumlah bangunan menunjukkan seberapa banyak bangunan yang sudah memiliki izin terbangun di suatu wilayah. Apabila rasio daerah mencapai 100%, maka dapat diketahui bahwa seluruh bangunan yang terbangun di daerah sudah memiliki izin terbangun. Kabupaten Tangerang telah mencapai rasio sebesar 99,35% pada tahun 2022. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang mengalami stagnansi di angka 99,11%.

Tabel 2. 44

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan					

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan (%)	99,11	99,11	99,11	99,11	99,35
--	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

6) Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW memperlihatkan seberapa besar realisasi RTRW yang dibandingkan dengan rencana peruntukannya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan dengan berbagai persyaratan dan tujuan tertentu. Nilai ketaatan memperlihatkan bagaimana keseuaian realisasi pembangunan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kabupaten Tangerang memiliki capaian dengan nilai 85-90 ketaatan terhadap dokumen RTRW-nya.

Tabel 2. 45
Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ketaatan Terhadap RTRW	90	85	90	90	90

Sumber: opendata.tangerangkabupatengo.id, 2023

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rasio Rumah Layak Huni

Menurut Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2019, rumah tangga yang diklasifikasikan sebagai hunian/rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni yang dinilai dari 4 (empat) kriteria, yaitu:

- a. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (*sufficient living space*)
- b. Memiliki akses terhadap air minum layak
- c. Memiliki akses terhadap sanitasi layak
- d. Ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/ seng/kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok/plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit/keramik/parket/vinyl/karpet/ubin/tegel/teraso/kayu/papan/semén/bata merah.

Angka rumah layak huni di Kabupaten Tangerang menjadi urusan yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2020 diketahui hanya ada 63% rumah layak huni, yang kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sekitar 71%. Tren peningkatan ini harus dipertahankan demi mencapai target 100% rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 46
Persentase Kelayakan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2021

Kabupaten / kota	Status Perumahan									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Laya k Huni	Tidak Laya k Huni	Laya k Huni	Tidak Laya k Huni	Laya k Huni	Tidak Laya k Huni	Laya k Huni	Tidak Laya k Huni	Laya k Huni	Tidak Laya k Huni
Kabupaten Pandeglang	82,58	0,43	90,00	0,28	90,33	9,67	27,53	72,47	29,88	70,12
Kabupaten Lebak	85,17	0,08	90,29	0,83	89,52	10,48	40,57	59,43	34,89	65,11
Kabupaten Tangerang	97,46	0,00	98,56	0,55	98,17	1,83	63,38	36,62	71,80	28,20

Kabupaten / kota	Status Perumahan									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Laya k Huni	Tidak Laya k Huni	Laya k Huni	Tidak Laya k Huni	Laya k Huni	Tidak Laya k Huni	Laya k Huni	Tidak Laya k Huni	Laya k Huni	Tidak Laya k Huni
Kabupaten Serang	92,73	0,11	96,97	0,00	96,08	3,92	64,00	36,00	70,02	29,98
Kota Tangerang	99,38	0,00	99,32	0,00	99,53	0,47	44,05	55,95	51,57	48,43
Kota Cilegon	99,42	0,00	99,61	0,00	99,90	0,10	82,93	17,07	88,42	11,58
Kota Serang	97,72	0,15	98,67	0,00	97,90	2,10	80,67	19,33	84,05	15,95
Kota Tangerang Selatan	99,89	0,00	99,68	0,00	99,44	0,56	67,56	32,44	68,73	31,27
Provinsi Banten	94,94	0,07	97,01	0,18	96,80	3,20	56,21	43,79	60,78	39,22

Sumber: Statistik Perumahan Provinsi Banten 2017 hingga 2021

Rumah layak huni di Kabupaten Tangerang selalu meningkat dari 2017 menuju 2019. Kemudian angka ini turun dengan pesat menjadi 63,38% pada tahun 2020 sebelum naik kembali pada tahun 2021 dengan angka 71,80%. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Tangerang di posisi ketiga persentase rumah layak huni di Provinsi Banten. Turunnya angka persentase pada tahun 2019-2020 diasumsikan terjadi karena adanya perubahan metode pengukuran dan klasifikasi rumah layak huni.

2) Persentase Areal Kawasan Kumuh

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pencegahan, penanganan, dan pengendalian kawasan permukiman kumuh menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menciptakan ruang hidup dan tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat.

Tabel 2. 47

Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kawasan Kumuh	13,30%	30,71%	30,16%	29,66%		41,22%

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026; Open data Kabupaten Tangerang

Pada kurun waktu tahun 2018 hingga 2020, persentase kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang mengalami perubahan yang cukup besar. Persentase luasan kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 tercatat sebesar 13,3% dan meningkat cukup tajam pada tahun 2019 menjadi 30,71%. Namun, angka ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 30,16% dan menjadi 29,66% pada tahun 2021. Pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan luasan permukiman kumuh hingga 41,22%.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dijabarkan melalui beberapa indikator: cakupan petugas perlindungan masyarakat, tingkat penyelesaian pelanggaran K3, cakupan pelayanan bencana kebakaran, tingkat waktu tanggap daerah layanan manajemen kebakaran, dan persentase penegakan perda. Indikator utama pada urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah Indeks Ketentraman dan Ketertiban. Capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah 2,02. Capaian tersebut meningkat 0,99 dari tahun 2017 yang capaian indeksnya adalah 1,03.

1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Cakupan petugas perlindungan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan petugas linmas di masing-masing kecamatan. Pada tahun 2019 sampai tahun 2021, cakupan perlindungan masyarakat Kabupaten Tangerang adalah 90%. Perolehan angka tersebut disebabkan karena Kecamatan Pasar Kemis, Panongan, dan Gunung Kaler tidak memiliki petugas linmas. Saat tahun berikutnya (tahun 2022), tiga kecamatan tersebut telah memiliki petugas linmas, sehingga cakupan pelayanan petugas linmas menjadi 100%.



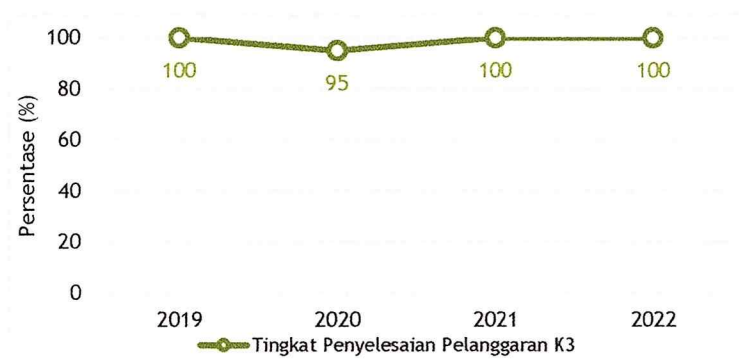
Gambar 2.108

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang

2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Tangerang setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai tahun 2022 semuanya adalah 100%, kecuali di tahun 2020 (95%). Data tersebut bersumber dari LKPJ Bupati Kabupaten Tangerang dan Opendata Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.109

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Tangerang dan Opendata Kabupaten Tangerang

3) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran di Kabupaten Tangerang hampir terjadi setiap tahunnya. Data dari Opendata Kabupaten Tangerang memperlihatkan bahwa kasus kebakaran di setiap kecamatan berhasil dipadamkan yang artinya cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah 100%.



Gambar 2.110

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang

4) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen Kebakaran

Waktu yang dianggap tanggap dalam menyelesaikan kasus kebakaran adalah maksimal 15 menit. Dari semua kasus kebakaran yang tertangani tidak semuanya dapat ditangani dalam kurun waktu 15 menit. Tingkat waktu tanggap/persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit pada tahun 2019 adalah 0,08%. Hal tersebut terjadi karena banyaknya kasus kebakaran di tahun tersebut. Dua tahun berikutnya, waktu tanggap meningkat menjadi 100%.

Tabel 2. 48

Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen Kebakaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
Jumlah Kasus Kebakaran (a)	304	86	46
Jumlah Kasus Kebakaran yang tertangani dalam Waktu Maksimal 15 menit (b)	23	24	46
Tingkat waktu tanggap (response time rate) ((b)/(a)) (%)	0,08	28	100

Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang

5) Persentase Penegakan Perda

Perda yang telah disahkan tentunya harus ditegakan. Persentase penegakan Perda di Kabupaten Tangerang setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai tahun 2022 adalah 100%, kecuali di tahun 2020 (75%).



Gambar 2.111

Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

Sumber: LKPJ Bupati Tangerang Tahun 2019-2022

F. Sosial

Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

1) Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial adalah persentase dari total jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang menerima bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga swasta. Bantuan sosial adalah bantuan finansial atau non-finansial yang diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Berikut adalah data capaian penanganan PPKS di Kabupaten Tangerang tahun 2017 - 2021.

Tabel 2. 49
Capaian Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tangerang Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100.219	100.219	102.533	89.647	216.447
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang seharusnya menerima bantuan sosial	42.700	129.470	131.555	172.370	549.619
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	41.079	122.858	127.343	124.841	21.396
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	96%	95%	97%	72%	4%
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang seharusnya menerima bantuan sosial	42.700	129.470	131.555	172.370	549.619
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima bantuan sosial	41.079	122.858	127.343	124.841	427.486
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang seharusnya menerima bantuan sosial yang menerima bantuan sosial	96%	95%	97%	72%	78%

Sumber: Data Sektoral Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam Buku Statistik Sektoral dan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2025

Capaian dari Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2017 namun trennya fluktuatif. Sedangkan presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 yaitu hanya 4% dari PPKS yang tertangani sedangkan pada saat yang sama jumlah PPKS cenderung meningkat tiap tahunnya. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta upaya pemulihan

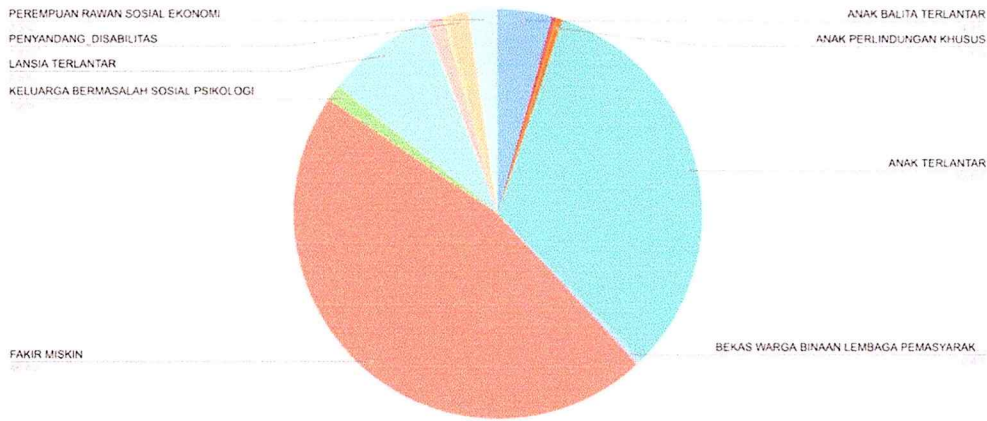
sosial dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Berikut merupakan sebaran PPKS di Kabupaten Tangerang menurut kecamatan di tahun 2021.

Tabel 2. 50
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Persentase Jumlah PPKS Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah PPKS	Persentase
Balaraja	4.782	2,52%
Cikupa	2.292	1,21%
Cisauk	4.135	2,18%
Cisoka	8.684	4,57%
Curug	1.726	0,91%
Gunung Kaler	8.994	4,73%
Jambe	3.775	1,99%
Jayanti	4.182	2,20%
Kelapa Dua	1.013	0,53%
Kemiri	8.327	4,38%
Kosambi	6.582	3,46%
Kresiek	6.257	3,29%
Kronjo	8.172	4,30%
Legok	5.767	3,03%
Mauk	7.904	4,16%
Mekar Baru	8.416	4,43%
Mekarbaru	403	0,21%
Pagedangan	4.166	2,19%
Pakuhaji	14.343	7,54%
Panongan	4.378	2,30%
Pasar Kemis	3.607	1,90%
Pasarkemis	251	0,13%
Rajeg	12.860	6,76%
Sepatan	4.722	2,48%
Sepatan Timur	7.631	4,01%
Sindang Jaya	7.168	3,77%
Sindangjaya	371	0,20%
Solear	7.795	4,10%
Sukadiri	4.200	2,21%
Sukamulya	7.006	3,69%
Teluknaga	12.992	6,83%
Tigaraksa	7.207	3,79%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga, dan Rajeg adalah kecamatan dengan cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) paling tinggi yaitu lebih dari 5% dari total PPKS dengan jumlah PPKS paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Sedangkan berikut adalah rincian persentase dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menurut kategori PPKS.



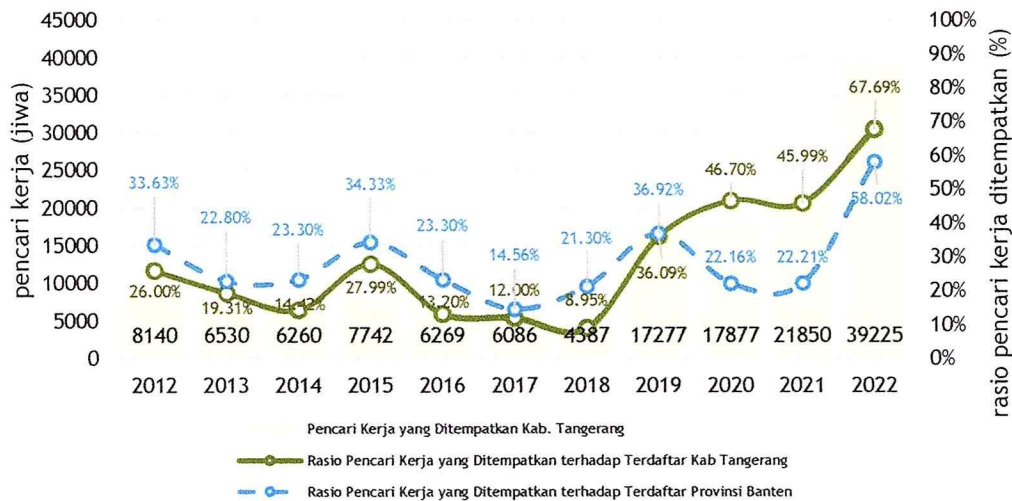
Gambar 2.112
 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Kategori PPKS di Kabupaten Tangerang Tahun 2021
 Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Berdasarkan grafik di bawah ini, dapat dilihat bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kategori keluarga fakir miskin mendominasi di Kabupaten Tangerang dengan meliputi 46,4% dari total PPKS yang ada kemudian diikuti dengan anak terlantar di angka 32,5%. Penanganan anak terlantar perlu untuk ditingkatkan karena akan berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak terhadap anak.

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1) Pencari kerja yang ditempatkan



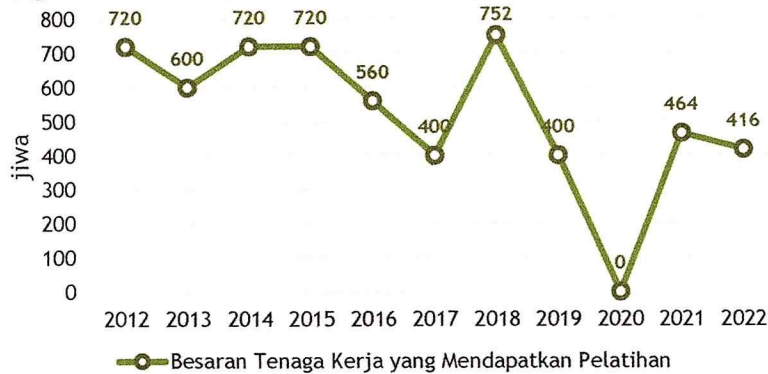
Gambar 2.113
 Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Tangerang dan Perbandingan Rasio Pencari Kerja Ditempatkan terhadap Terdaftar di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022
 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Diagram di atas menunjukkan pencari kerja yang ditempatkan dan rasio pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2021 di

mana pencari kerja di Kabupaten Tangerang yang ditempatkan sebesar 39.225 jiwa dengan rasio ditempatkan sebesar 67,69%. Capaian tersebut di atas Provinsi Banten dengan rasio pencari kerja yang ditempatkan sebesar 58,02%.

2) Kesejahteraan dan Kompetensi Tenaga Kerja

Jaminan kesejahteraan dan pelatihan kompetensi tenaga kerja berperan penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang (2017), jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2016 sebanyak 180.851 orang atau 34,85% dari total tenaga kerja yang ada sebanyak 518.876 orang.



Gambar 2.114

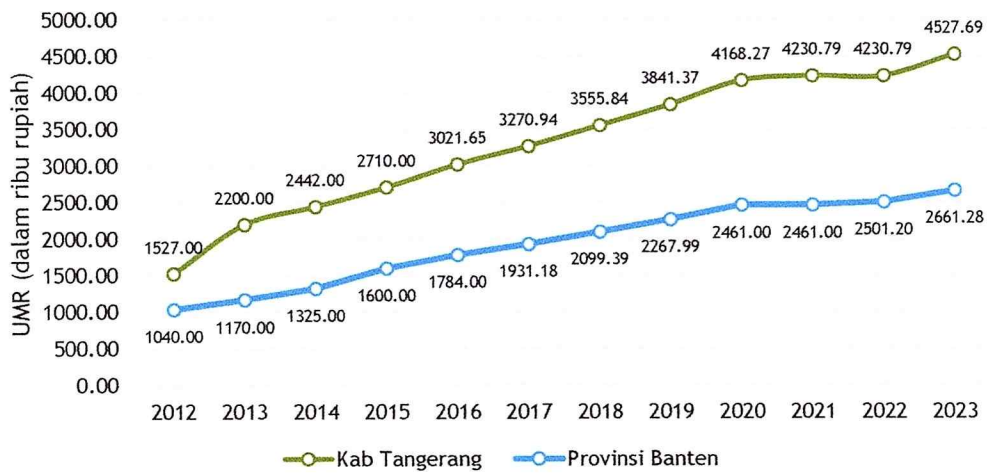
Besaran Tenga Kerja yang Dilatih di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2019

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang (diolah)

Jumlah tenaga kerja yang dilatih pada tahun 2019 sebesar 400 orang. Capaian tersebut menurun dari tahun 2018 yang sebesar 752 orang. Capaian pada tahun 2022, tenaga kerja yang dilatih sebesar 416 orang. Maka dari itu diperlukan strategi untuk meningkatkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan.

3) Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan standar minimum oleh para pengusaha dalam pemberian upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Standar UMR ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi wilayah dan ketenagakerjaan, seperti tingkat inflasi, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya.



Gambar 2.115
Perbandingan Upah Minimum Regional Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar di atas menunjukkan perbandingan UMR Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2023, UMR Kabupaten Tangerang sebesar Rp4.527.689 dan lebih tinggi dibanding UMR Provinsi Banten yang sebesar Rp2.661.280. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Tangerang menjadi tertinggi keempat setelah Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

4) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kualitas ketenagakerjaan yang diukur melalui perbandingan jumlah lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk per 10.000 penduduk.



Gambar 2.116

Angkatan Kerja Tamat Perguruan Tinggi dan Rasio Lulusan Perguruan Tinggi per 10.000 penduduk di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2018-2022

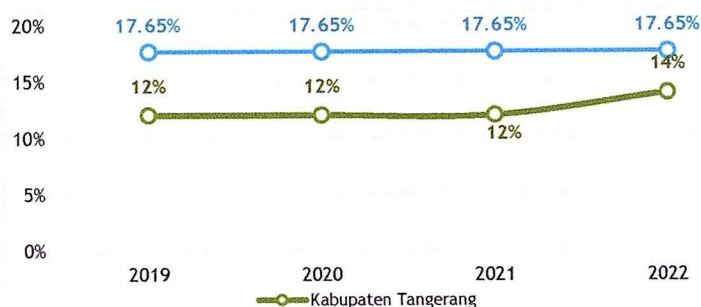
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Gambar di atas menunjukkan jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tamat perguruan tinggi serta rasio lulusan perguruan tinggi per 10.000 penduduk di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten tahun 2019-2022. Pada tahun 2022, rasio lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang mencapai 677,61 tiap 10.000 penduduk dan capaian ini lebih rendah dibanding Provinsi Banten yang mencapai 726,46 tiap 10.000 penduduk.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Partisipasi perempuan dalam komposisi parlemen merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai partisipasi perempuan dalam arena politik. Kehadiran aktif perempuan dalam ranah politik diharapkan dapat mendorong pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, dan upaya pembangunan yang lebih peka terhadap isu gender serta mengedepankan perlindungan anak.



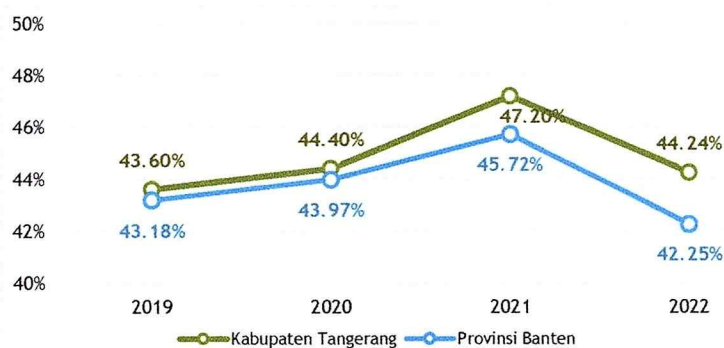
Gambar 2.117

Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

2) Keterlibatan Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan

Salah satu dimensi penyusun indeks pemberdayaan gender adalah pengambilan keputusan. Dimensi tersebut menggunakan indikator proporsi manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Salah satu dimensi penyusun indeks pemberdayaan gender adalah pengambilan keputusan. Dimensi tersebut menggunakan indikator proporsi manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Proporsi perempuan yang berperan aktif sebagai pengambil keputusan di Kabupaten Tangerang terus meningkat dari 43,6% pada tahun 2019 ke 47,2% pada tahun 2021 kemudian menurun pada tahun 2022 di angka 44,24%.



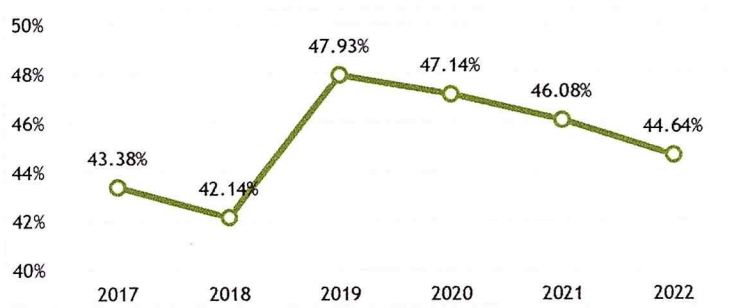
Gambar 2.118

Proporsi Posisi Manajer, Administrasi, Profesional, dan Teknisi Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2022

Sumber : BPS kabupaten Tangerang

3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan digunakan untuk mengukur keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Pembangunan sumber daya manusia juga berkaitan dengan peningkatan peran perempuan dalam bidang ketenagakerjaan karena perempuan dan laki – laki memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian seperti laki-laki (Melis, 2017). TPAK Perempuan menunjukkan kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi dan gambaran kesempatan kerja bagi perempuan. Berikut adalah rincian TPAK Perempuan di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.119

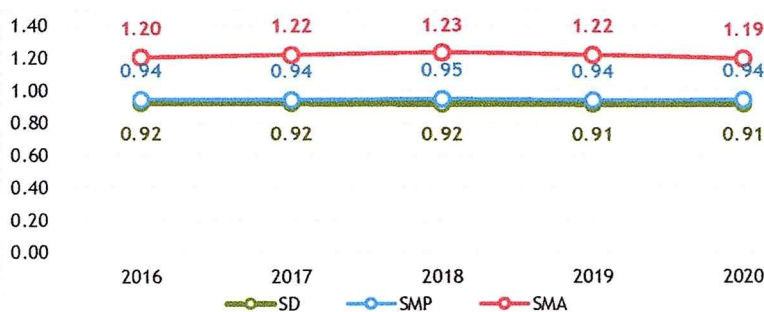
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka

TPAK Perempuan di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 dengan partisipasi yang cukup rendah yaitu di bawah angka 50%. Hal ini dapat berkaitan dengan pilihan perempuan untuk tidak bekerja atau kesempatan kerja perempuan yang masih kurang. Tingkat partisipasi perempuan di angkatan kerja juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan peningkatan pendidikan perempuan dan kesetaraan gender dalam dunia kerja. Sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan partisipasi kerja oleh perempuan baik dari segi ketenagakerjaan, pendidikan, maupun kesetaraan gender.

4) Rasio APM Perempuan/Laki-laki menurut Jenjang Pendidikan

Rasio Angka Partisipasi Murni Perempuan Terhadap Laki – laki menurut jenjang pendidikan menunjukkan perbedaan partisipasi pendidikan oleh perempuan dan laki – laki. Pengukuran kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan dapat dilihat dari rasio APM, yang mencerminkan peluang pendidikan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan manusia. Mengurangi ketidaksetaraan gender di semua tingkatan pendidikan akan meningkatkan posisi dan potensi baik perempuan maupun laki-laki. Berikut merupakan rincian rasio APM perempuan terhadap laki – laki di tingkat SD, SMP, dan SMA pada tahun 2016-2020.



Gambar 2.120

Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Rasio APM perempuan dan laki – laki cenderung sama pada tahun 2016 – 2020 dengan APM perempuan lebih tinggi daripada laki – laki di tingkatan SMP dan SMA dengan perbedaan yang cukup tinggi daripada jenjang pendidikan lainnya. Rasio cenderung mendekati angka satu berarti partisipasi pendidikan dan kesempatan pendidikan oleh perempuan dan laki – laki cukup setara.

C. Pangan

Salah satu tolok ukur keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah optimalnya status gizi masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Status gizi dapat dipengaruhi beberapa aspek seperti produksi pangan, distribusi, dan konsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2017, terdapat 5 pilar utama perbaikan gizi masyarakat, yaitu:

- Perbaikan gizi masyarakat
- Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam
- Mutu dan keamanan pangan
- Perilaku hidup bersih dan sehat
- Koordinasi pembangunan pangan dan gizi

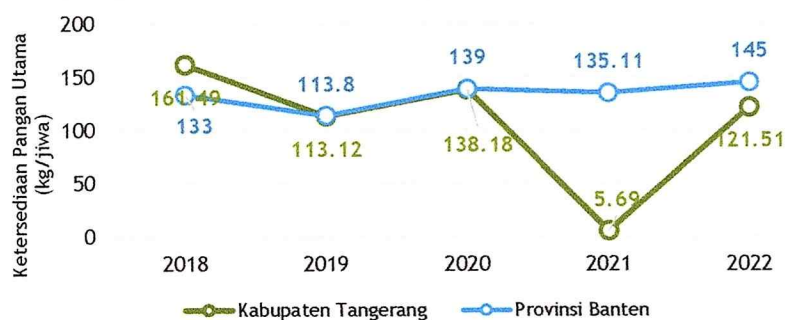
1) Ketersediaan Pangan

Ketersediaan Pangan merupakan kondisi ketersediaan Pangan yang berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak mampu memenuhi kebutuhan. Nilai ketersediaan pangan utama diketahui dari perbandingan antara rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun dengan jumlah penduduk.

Tabel 2. 51
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata jumlah ketersediaan pangan (kg)	596.351.000	429.941.000	448.491.000	18.725.000	407.362.000
Jumlah Penduduk (jiwa)	3.692.693	3.800.787	3.245.619	3.293.533	3.352.472
Ketersediaan Pangan Utama (kg/jiwa)	161,4949	113,1189	138,1835	5,685384	121,5109

Sumber: Hasil Olahan, 2023



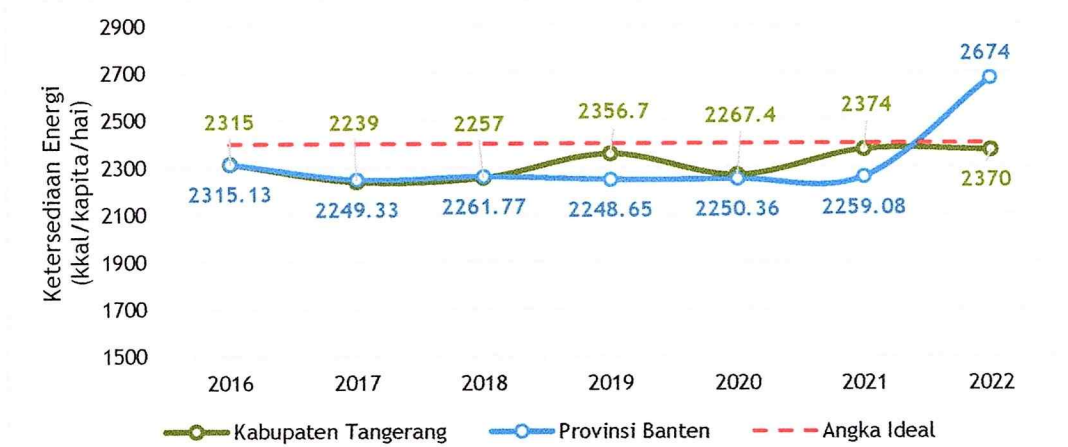
Gambar 2.121
Perbandingan Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2018-2022

Sumber: Hasil Olahan, 2023

Dalam 5 tahun terakhir, ketersediaan pangan di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan terutama secara drastis di tahun 2021 sebesar 429.766 ton dari tahun sebelumnya. Hal ini kemudian memengaruhi nilai ketersediaan pangan utama yang juga mengalami penurunan sebesar 132,49 kg/jiwa pada tahun 2021. Angka penurunan yang drastis berkaitan dengan anomali musim yang memengaruhi produktivitas pangan.

2) Ketersediaan Energi dan Protein Masyarakat

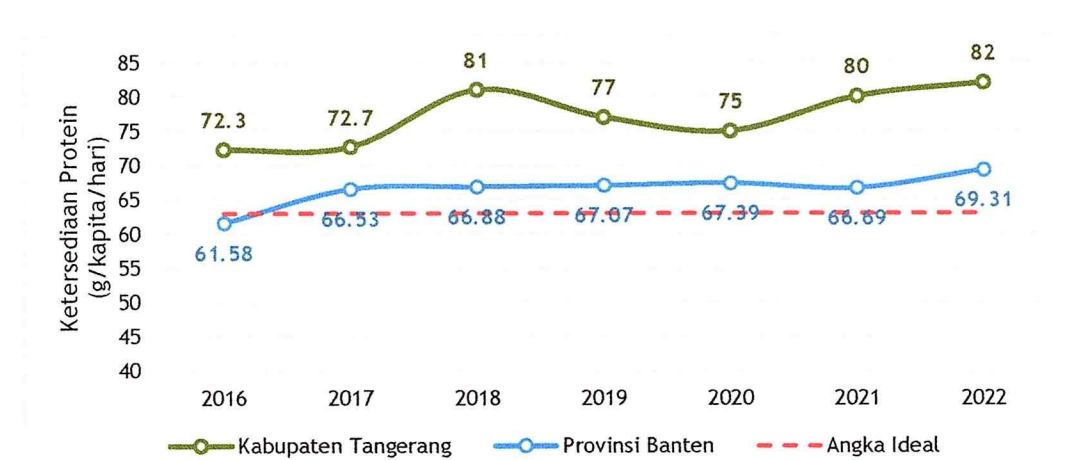
Ketersediaan energi dan protein merupakan jumlah pangan tersedia di pasar yang dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kkal/kapita/hari, protein per g/kapita/hari, serta lemak per g/kapita/hari. Angka ketersediaan ini menggambarkan energi dan protein yang dikonsumsi oleh masyarakat.



Gambar 2.122

Perbandingan Nilai Ketersediaan Energi Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2016-2022

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dan BPS Provinsi Banten 2016-2022



Gambar 2.123

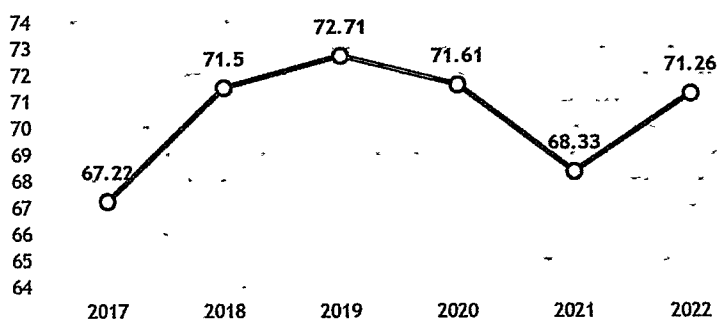
Perbandingan Nilai Ketersediaan Protein Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2016-2022

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dan BPS Provinsi Banten 2016-2022

Dalam beberapa tahun terakhir, kedua grafik tersebut menunjukkan angka yang bersifat fluktuatif. Angka ketersediaan energi di Kabupaten Tangerang memiliki kecenderungan naik yang cukup signifikan meskipun terjadi penurunan di tahun 2022 sebesar 4 kkal/kapita/hari. Nilai tersebut terhitung lebih kecil dibanding penurunan di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, angka ketersediaan protein di Kabupaten Tangerang juga memiliki kecenderungan naik meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2019 dan 2020 sebesar masing-masing 4 g/kapita/hari dan 2 g/kapita per hari. Kecenderungan peningkatan nilai tersebut menunjukkan bahwa keterjangkauan masyarakat terhadap pangan meningkat. Meskipun telah terjadi kecenderungan meningkat, angka ketersediaan energi di Kabupaten Tangerang masih berada di bawah nilai ideal angka ketersediaan energi

sebesar 2400 kkal/kapita/hari. Sementara itu, angka ketersediaan protein di Kabupaten Tangerang sudah lebih besar dari nilai ideal ketersediaan protein sebesar 63 gram/kapita/hari.

Angka ketersediaan protein Kabupaten Tangerang kemudian mempengaruhi rata-rata konsumsi protein yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selama 6 tahun terakhir, angka rata-rata konsumsi protein cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan konsumsi sebesar masing-masing 1,1 dan 3,28 gram/kapita/hari.



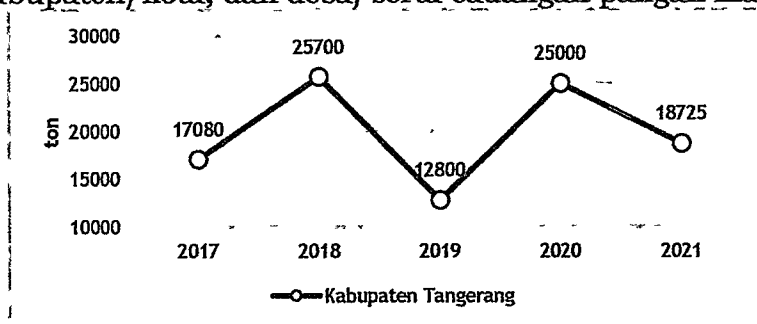
Gambar 2.124

Rata-Rata Konsumsi Protein di Kabupaten Tangerang tahun 2017-2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022

3) Penguatan Cadangan Pangan

Penguatan cadangan pangan merupakan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kuantitas stok pangan di suatu wilayah dengan menghitung jumlah cadangan pangan dan membaginya dengan 100. Cadangan pangan dihitung menggunakan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras perkapita pertahun, dan proporsi terhadap cadangan beras nasional. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa) serta cadangan pangan masyarakat.



Gambar 2.125

Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021

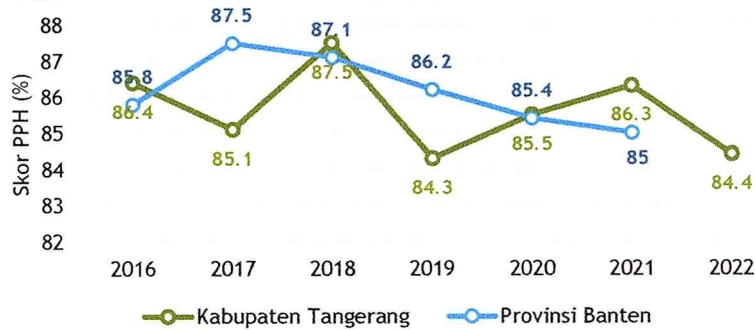
Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, penguatan cadangan pangan di Kabupaten Tangerang bersifat sangat fluktuatif. Terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2018 sebesar 8620 ton. Kemudian, dalam rentang 2019-2021, angka tersebut mengalami fluktuasi yang cukup drastis. Hal ini diasumsikan terjadi karena situasi Covid-19 yang terjadi dalam kurun waktu 2019 hingga 2021.

4) Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* merupakan susunan keragaman pangan berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan pangan serta konsumsi pangan. Skor PPH dapat digunakan sebagai instrumen dalam menilai situasi

konsumsi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah yang membantu penyusunan rencana kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan pertimbangan aspek sosial, ekonomi, budaya serta preferensi konsumsi pangan oleh masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat menjadi acuan dalam menentukan sasaran perencanaan dan evaluasi penyediaan, khususnya produksi pangan.



Gambar 2.126

Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2016-2022

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dan BPS Provinsi Banten 2016-2022

Dalam enam tahun terakhir, skor pola pangan harapan di Kabupaten Tangerang memiliki dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2019, skor PPH mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya sebesar 3,2%, dari 87,5% menjadi 84,3%. Angka tersebut kemudian terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi sebesar 86,3%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa angka kecukupan gizi masyarakat menurun dan belum memiliki pertumbuhan yang stabil. Kemudian, skor PPH kembali mengalami penurunan di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan standar perhitungan dari Badan Pangan Nasional. Meskipun angkanya tidak memiliki selisih yang cukup jauh dengan Provinsi Banten, skor PPH Kabupaten Tangerang masih berada di bawah target nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), target skor PPH adalah 95,2%. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman.

5) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan kegiatan terpadu yang dilakukan sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pangan segar yang aman dikonsumsi oleh masyarakat tanpa adanya risiko bahaya dari cemaran kimia maupun mikroba. Dengan adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dapat meminimalisir hal yang dapat mengganggu, merugikan, membawa dampak negatif bagi kesehatan, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya sehingga dapat mendukung perkembangan kesehatan serta kecerdasan masyarakat.



Gambar 2.127
Persentase Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022
Sumber: LKPJ AMJ 2013 2018 Bupati Tangerang kepada DPRD Kabupaten Tangerang, 2018; DPKP, 2022 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, dalam 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Tangerang. Selain itu, sejak tahun 2018 pelaksanaannya telah dilakukan secara optimal dan konsisten.

D. Lingkungan Hidup

1) Kondisi Lingkungan Hidup

Wilayah Kabupaten Tangerang dilalui oleh beberapa sungai besar yaitu Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, Sungai Cimanceuri, dan Sungai Cirarab. Kualitas sungai-sungai tersebut dipengaruhi oleh aktivitas sektor permukiman, industri, pertanian, dan berbagai aktivitas lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang tahun 2018 bahwa Sungai Cimanceuri mempunyai status 2 titik cemar ringan, 7 titik cemar sedang dan 2 titik cemar berat. Selain itu, Sungai Cidurian mempunyai status 3 titik cemar sedang dan 1 titik cemar berat, serta Sungai Cisadane mempunyai status 4 titik cemar ringan, 6 titik cemar sedang dan 1 titik cemar berat. Kondisi air sungai ini juga mempengaruhi kuantitas air baku bagi penyediaan air minum untuk masyarakat. Maka dari itu diperlukan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sungai dalam menjaga kualitas ekosistem dan ketersediaan air di Kabupaten Tangerang.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana indeks ini digunakan secara nasional dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komponen IKLH ini meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).



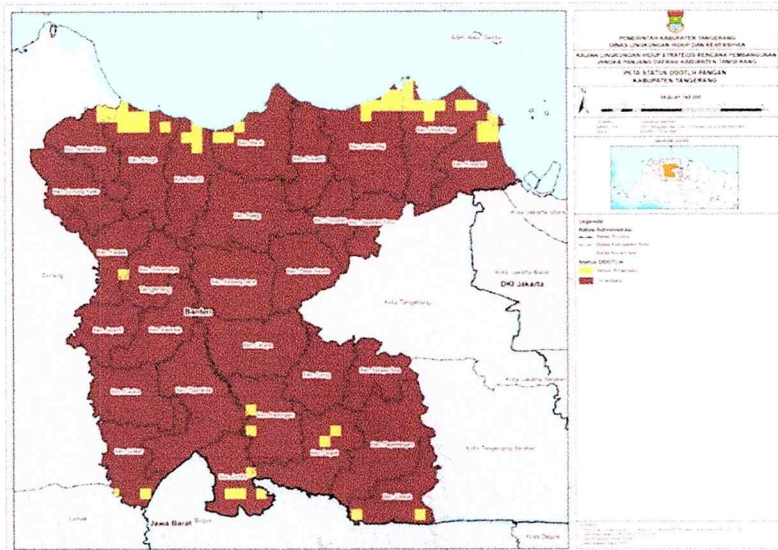
Gambar 2.128
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014-2022
Sumber: Buku IKLH Menteri KLHK 2015, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022, RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, dan Tangerang Satu Data (diolah)

Pada tahun 2022, capaian IKLH Kabupaten Tangerang sebesar 55,8 (kategori sedang) dengan komponen IKU sebesar 71,06 (kategori baik), IKA sebesar 58,89 (kategori sedang), dan IKL sebesar 22,67 (kategori sangat kurang). Masih rendahnya capaian IKL perlu mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan. Berdasarkan dokumen Profil IKLH 2022, dijabarkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan capaian IKLH

Kabupaten Tangerang yaitu peningkatan pemantauan kualitas udara, meningkatkan pelayanan IPAL domestik dan industri, pemeliharaan tanaman mangrove, dan lain sebagainya.

2) Daya Dukung dan Daya Tampung

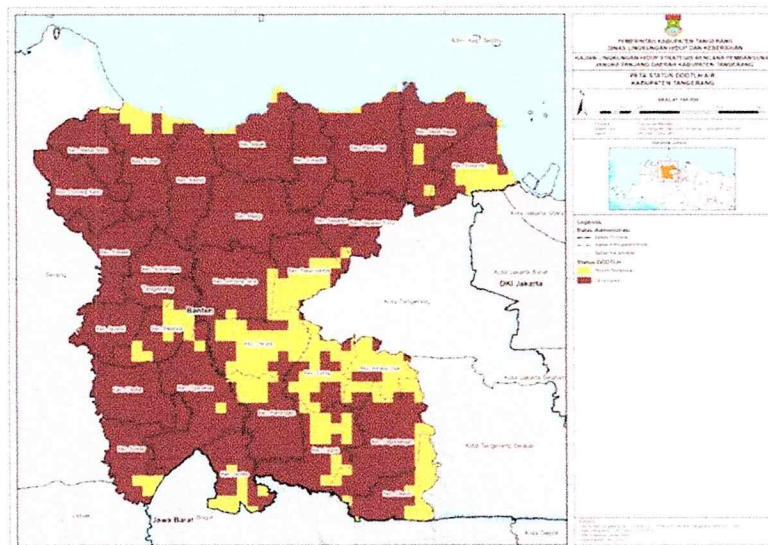
Berdasarkan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung merupakan kemampuan dari lingkungan hidup dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup. Sementara itu, daya tampung merupakan kemampuan lingkungan hidup dalam menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Substansi D3TLH tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi dasar dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah. Dalam KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045 dijabarkan kapasitas daya dukung dan daya tampung penyediaan pangan dan air di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.129

Peta Status DDDTLH Pangan Kabupaten Tangerang

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045



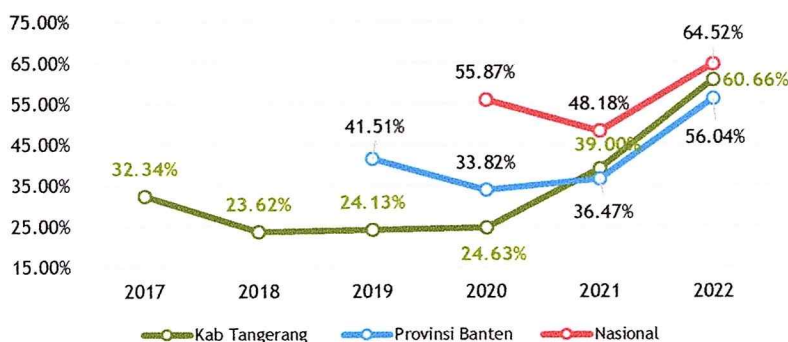
Gambar 2.130

Peta Status DDDTLH Air Kabupaten Tangerang

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045

Kabupaten Tangerang saat ini memiliki status daya dukung dan daya tampung lahan sebesar 4% belum terlampaui, sementara 96% lahan terlampaui. Sementara itu, dalam penyediaan air di Kabupaten Tangerang saat ini terdapat 17% lahan belum terlampaui, sementara 83% lahan terlampaui, artinya pada 84.338,35 Ha merupakan lahan dengan kategori krisis air.

3) Cakupan pelayanan persampahan



Gambar 2.131

Perbandingan Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2017-2022

Sumber: Website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Dalam pengelolaan timbulan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Berdasarkan data di atas, pada tahun 2022, capaian persentase timbulan sampah yang dikelola Kabupaten Tangerang sebesar 60,66% dengan timbulan sampah sebesar 841.497,68 ton, timbulan yang terkelola sebesar 510.448,98 ton, dan daur ulang sampah sebesar 11.858,98 ton. Capaian ini lebih tinggi dibanding Provinsi Banten yang sebesar 56,04%, tetapi masih di bawah nasional dengan capaian 64,52%. Di bawah ini merupakan fasilitas pengelolaan persampahan di Kabupaten Tangerang berdasarkan data KLHK (2022).

Tabel 2. 52

Fasilitas Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (unit)	Timbulan Sampah yang Dikelola (ton/tahun)
Bank Sampah	102	732,46
TPST 3R	36	22.985,58
TPA (TPA Jatiwaringin)	1	498.590,00
Jumlah		522.308,04

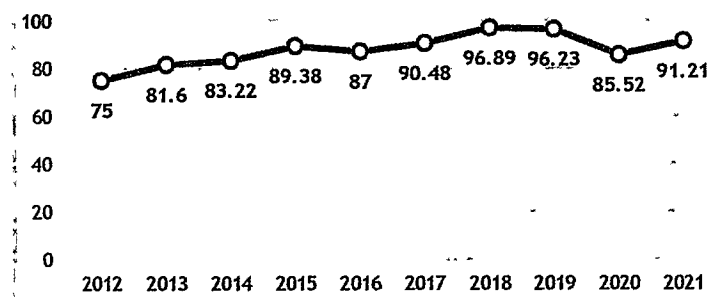
Sumber: Website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Dalam dokumen KLHS RPPD Kabupaten Tangerang dijelaskan bahwa rendahnya jumlah sampah yang ditangani disebabkan oleh minimnya infrastruktur pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Statistik Sektorial Kabupaten Tangerang, jumlah areal pengelolaan sampah (tahun 2017-2019) stagnan pada angka 941 km². Sementara itu dari sisi armada sampah yang dapat mengangkut 2.925 ton/hari atau 51% dari total sampah yang ada. Maka dari itu diperlukan langkah dalam penanganan sampah dari tingkat rumah tangga, TPS 3R, hingga layanan persampahan skala regional yaitu TPA.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Rasio Kepemilikan KTP

Rasio penduduk dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) per unit penduduk merupakan perbandingan antara jumlah individu yang memiliki KTP dengan jumlah total penduduk dalam suatu area tertentu. Rasio ini berfungsi sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana KTP telah menyebar di wilayah tersebut. Tingkat penyebaran yang tinggi mencerminkan kesuksesan pemerintah dalam menyelenggarakan penerbitan KTP serta memastikan kepemilikan KTP oleh masyarakat.



Gambar 2.132

Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2012 – 2021

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Tangerang, 2023

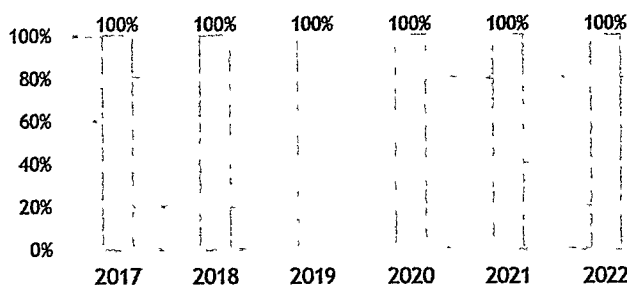
Data grafik di atas mencerminkan tingkat penetrasi KTP di Kabupaten Tangerang. Rasio penduduk yang ber- KTP di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat menunjukkan Kabupaten memfasilitasi penerbitan dan kepemilikan KTP oleh masyarakat. Meskipun demikian, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini dapat terkait dengan dampak pandemi COVID-19. Peningkatan yang signifikan kembali terlihat pada tahun 2021 dengan angka penetrasi mencapai 91,21%, mengindikasikan perbaikan fasilitasi penerbitan KTP bagi penduduk.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Persentase PKK Aktif

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan sebuah organisasi sosial yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut serta dalam upaya pembangunan di Indonesia. Persentase partisipasi aktif dalam PKK mencerminkan efektivitas dari program ini. Tingkat partisipasi yang tinggi mengindikasikan berhasilnya program PKK serta antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan peran organisasi ini dalam memberdayakan perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Di sisi lain, tingkat partisipasi yang rendah menggambarkan adanya tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan program, atau mungkin ada kendala yang menghalangi masyarakat untuk mengambil manfaat dari layanan yang diberikan oleh PKK.

Kabupaten Tangerang memiliki 274 PKK dan tidak ada peningkatan jumlah PKK setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Namun persentase PKK yang aktif adalah 100% dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa semua unit organisasi PKK di wilayah tersebut aktif dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta aktif berperan dalam berbagai inisiatif pembangunan.



Gambar 2.133

Persentase PKK Aktif di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022

Sumber: DPMPD 2022

2) Persentase Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) aktif adalah pusat pelayanan kesehatan primer yang secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan utama setiap bulan, seperti pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare, serta Keluarga Berencana (KB), dengan tingkat cakupan minimal 50% untuk masing-masing layanan tersebut. Selain itu, posyandu ini juga melaksanakan kegiatan tambahan sebagai bagian dari komitmennya. Tingkat kinerja Posyandu aktif diukur melalui persentase keterlibatan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Angka yang tinggi dalam persentase posyandu aktif mengindikasikan bahwa posyandu berfungsi secara efektif dan masyarakat secara optimal memanfaatkan layanan yang disediakan di dalamnya.

Tabel 2. 53

Jumlah Posyandu dan Posyandu Aktif di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022

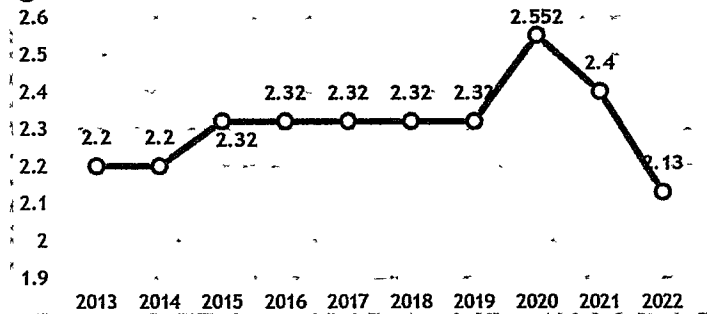
Indikator	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Posyandu (Unit)	2.181	2.207	2.241	2.173	2.279	2.233	2.233	2.331	2.380	2.341
Posyandu Aktif (Unit)	677	1.191	969	1.084	1.167	2.093	2.093	1.263	1.180	1.310
Persentase Posyandu Aktif (%)	31,04	53,96	43,23	49,88	51,21	93,73	93,73	52,7	49,57	55,96

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2023

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)

Angka kelahiran total merupakan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya. Angka kelahiran total digunakan sebagai indikator keberhasilan program KB, membantu pengambilan kebijakan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.



Gambar 2.134

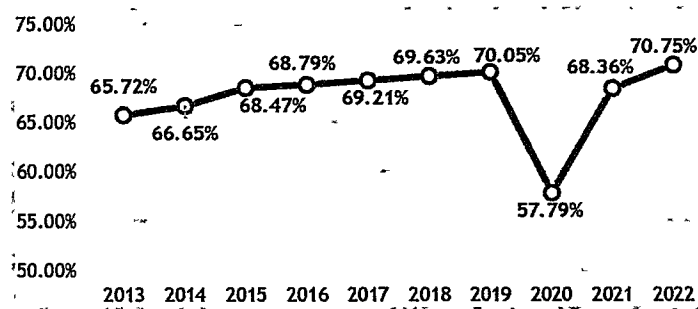
Angka Kelahiran Total Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2022

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Kabupaten Tangerang, 2023

Dari grafik di atas didapatkan rata-rata wanita usia 15 hingga 49 tahun di Kabupaten Tangerang memiliki 2-3 anak selama masa usia suburnya. Selama kurun waktu 9 tahun total *fertility rate* cenderung stagnan dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan mencapai angka terendahnya pada tahun 2022.

2) Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif atau *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan pengendalian penduduk. Cakupan peserta KB aktif dihitung dari perbandingan antara angka peserta KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur.



Gambar 2.135

Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun

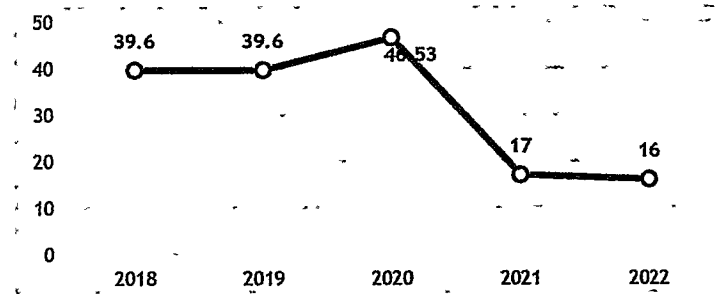
di Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2022

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Kabupaten Tangerang, 2022

Cakupan peserta KB Aktif di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat pada tahun 2013 hingga tahun 2019 dan kemudian menurun pada tahun 2020 dan membaik pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dapat disebabkan oleh pandemi. Cakupan peserta KB Aktif mengalami peningkatan sebesar 7,65%.

3) *Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15 – 19*

Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 merupakan banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 perempuan pada kelompok umur 15-49 tahun. ASFR 15-19 diperoleh dari jumlah remaja perempuan melahirkan di usia 15-19 tahun dibandingkan dengan 1.000 perempuan yang berusia 15-19 tahun di Kabupaten Tangerang. Angka ini menjadi salah satu indikator penting kesehatan reproduksi dan memberikan informasi tentang tingkat pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Di Indonesia, angka kelahiran remaja masih tinggi. Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada tahun 2020 sekitar 27% dari total kelahiran adalah pada remaja. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan stigma yang mempengaruhi tingkat kehamilan pada remaja. Capaian Kabupaten Tangerang dalam angka tersebut adalah sebagai berikut.

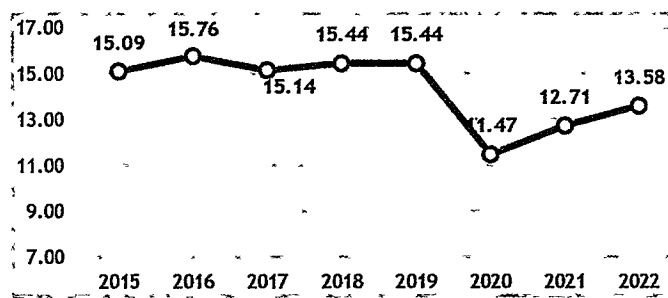


Gambar 2.136
ASFR 15-19 Kabupaten Tangerang Tahun 2018 – 2022
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Berdasarkan gambar di atas, diketahui persentase kelahiran pada usia remaja 15-19 tahun masih tergolong tinggi pada tahun 2020 yaitu mencapai 46,53 kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok usia remaja. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 16 kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok usia remaja pada tahun 2022. Terdapat kendala seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan stigma yang mempengaruhi angka kejadian kehamilan pada remaja. Kurangnya optimalnya promosi dan peningkatan layanan keluarga berencana menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan tingginya angka kelahiran remaja.

4) Unmet Need KB

Unmet need KB merupakan pasangan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi adalah persentase pasangan usia subur (wanita dan pria berusia 15-49 tahun) yang ingin membatasi atau memutuskan kehamilan, tetapi belum memiliki akses atau belum menggunakan layanan keluarga berencana. Unmet need merupakan indikator penting untuk mengukur keterbatasan akses layanan keluarga berencana dan memahami kebutuhan dan permintaan masyarakat. Tingginya unmet need dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses layanan, stigma, dan kendala ekonomi.



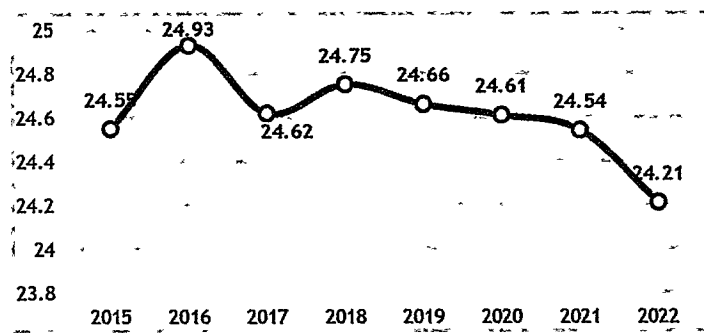
Gambar 2.137
Unmet Need Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2022 (%)
Sumber : DPPKB, 2023

Persentase Unmet Need KB mengalami penurunan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan 7 tahun sebelumnya pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses bagi PUS yang tadinya tidak terlayani KB padahal ingin ber-KB. Unmet need pada tahun 2022 mencapai 13,58%. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 13,58% atau sekitar 502.606 PUS yang memiliki keinginan untuk ber-KB namun belum mendapatkan layanan yang memadai dikarenakan kendala dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Angka ini mengindikasikan bahwa program keluarga

berencana belum sepenuhnya mencapai semua segmen masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat mengupayakan fasilitasi akses bagi pasangan usia subur yang ingin mengendalikan kehamilan di Kabupaten Tangerang.

5) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah pemakaian alat kontrasepsi yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti suntik, implan, dan IUD (*Intra Uterine Device*). MKJP memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan memerlukan pemasangan yang hanya dilakukan sekali saja, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pasangan usia subur untuk membatasi kehamilan tanpa harus khawatir dan memikirkan penggunaan setiap hari. Di Indonesia, pemakaian MKJP masih terbilang rendah, sekitar 20% dari seluruh pengguna kontrasepsi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya informasi, keterbatasan akses, dan stigma yang terkait dengan pemakaian kontrasepsi jangka panjang.



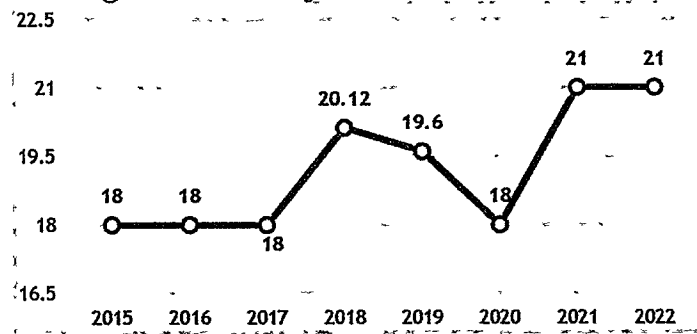
Gambar 2.138

Persentase Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2022 (%)

Sumber : DPPKB, 2023

6) Rata – rata Usia Kawin Pertama oleh Perempuan

Usia kawin pertama menjadi salah satu indikator yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan menekan laju pertumbuhan. Hubungan usia kawin pertama dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda usia kawin pertama, maka masa reproduksinya akan semakin panjang atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Berdasarkan data World Bank pada tahun 2020, rata-rata usia kawin pertama wanita di Indonesia adalah 22.7 tahun. Namun, perlu dicatat bahwa data ini dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi di suatu negara atau wilayah.



Gambar 2.139

Rata – Rata Usia Kawin Pertama Perempuan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2022 (Tahun)

Sumber : DPPKB, 2023

Grafik di atas menggambarkan perubahan usia rata-rata pernikahan pertama wanita di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data yang diberikan, terlihat bahwa usia rata-rata pernikahan pertama wanita di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, usia rata-rata pernikahan pertama wanita mencapai 21 tahun. Penyebab dari tren ini melibatkan beberapa faktor, termasuk peningkatan jumlah wanita yang mengejar pendidikan tinggi, yang kemudian membuat mereka lebih cenderung untuk menunda pernikahan. Banyak wanita yang ingin mengembangkan karier sebelum memutuskan untuk menikah, dan adanya perubahan nilai-nilai sosial juga turut memengaruhi keputusan untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Faktor lain yang ikut memainkan peran adalah ketidakpastian ekonomi yang mendorong mereka untuk lebih memilih menunda atau bahkan tidak menikah dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.

H. Perhubungan

1) Rasio Ijin Trayek

Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri dari jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, dan jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil/bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan, lintasan, dan jadwal yang tetap. Rasio ijin trayek memperlihatkan seberapa besar jumlah trayek yang tersedia dengan jumlah penduduk suatu daerah. Rasio ijin trayek Kabupaten Tangerang diperlihatkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 54
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020

Variabel	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Ijin Trayek	2.083	3.445	1.408
Jumlah Penduduk	3.692.693	3.800.787	3.245.619
Rasio	5,64	9,06	4,34

Sumber: opendata.tangerangkabupatengo.id/; Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2023 (diolah)

2) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji KIR Angkutan umum memperlihatkan berapa jumlah angkutan yang sudah layak untuk dimanfaatkan di jalan raya. Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 53, pengujian ini bersifat wajib bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Pengujian berkala ini meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan dan pengesahan hasil uji. Jumlah uji KIR angkutan umum Kabupaten Tangerang diperlihatkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 55
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2021 dan 2022

Jenis Angkutan	Jenis Kendaraan	Tahun			
		2021		2022	
		Jumlah Kendaraan	Jumlah Uji KIR	Jumlah Kendaraan	Jumlah Uji KIR
Mobil Penumpang	Angkutan Kota	69.754	913	69.758	102
	Taksi	3.876	34	3.876	646
	Mobil Belajar	84	-	84	-
Mobil Bis	Miri	-	-	-	-

Jenis Angkutan	Jenis Kendaraan	Tahun			
		2021		2022	
		Jumlah Kendaraan	Jumlah Uji KIR	Jumlah Kendaraan	Jumlah Uji KIR
	<i>Micro</i>	12.405	562	36.798	788
	<i>Bis</i>	2.113	103	3.338	216
Mobil Barang	<i>Light Truck</i>	141.795	23.485	147.690	25.020
	<i>TR Head</i>	1.590	187	1.990	16
	<i>Pickup</i>	456.608	23.464	479.336	23.960
	<i>Truck</i>	141.795	7018	254.661	7.107
	Jumlah	830.020	55.766	997.531	57.885

Sumber: opendata.tangerangkabupaten.go.id, 2023

3) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kabupaten Tangerang memiliki sebuah bandara, dua (2) pelabuhan dan dermaga, serta dua (2) terminal bus. Satu-satunya bandar udara di Kabupaten Tangerang adalah Bandar Udara Budiarto yang terletak di Kecamatan Curug. Bandar udara Budiarto diklasifikasikan sebagai bandar udara kelas I pada tahun 2014. Bandara ini merupakan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda yang difungsikan menjadikan tempat pendidikan penerbangan bernama “Akademi Penerbangan Indonesia” (API), yang merupakan pusat pendidikan penerbangan terbesar di Asia Tenggara. Lokasi ini digunakan oleh para penerbang (pilot), teknisi, dan petugas operasi penerbangan termasuk beberapa penerbangan dari Negara tetangga. Nama “Bandar Udara Budiarto” sendiri ditetapkan sejak tahun 1967, disematkan sebagai penghargaan terhadap Bapak Budiarto (Direktur API ke IV) yang gugur di Manila-Filipina.

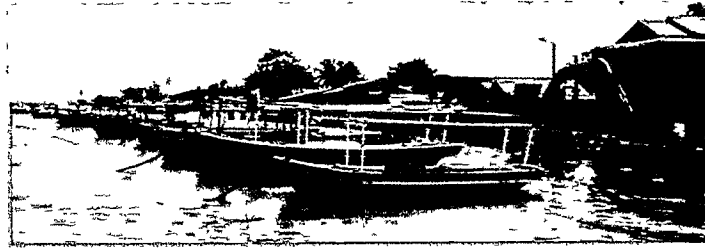


Gambar 2.140

Pintu Masuk Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto

Sumber: upbubudiarto.id, 2023

Kabupaten Tangerang memiliki dua (2) buah pelabuhan yaitu Pelabuhan Tanjung Pasir yang terletak di Kecamatan Teluknaga dan Pelabuhan Cituis yang terletak di Kecamatan Pakuhaji. Selain itu, terdapat juga sebuah dermaga di Kecamatan Kronjo yang menjadi lokasi pelelangan ikan. Pelabuhan Tanjung Pasir melayani berbagai keperluan mulai dari pengiriman barang, tempat pelelangan ikan, hingga layanan pariwisata menuju kawasan wisata Kepulauan Seribu. Sementara pelabuhan Cituis merupakan kawasan perkampungan nelayan dan menjadi pusat labuh kapal perikanan di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.141
Dermaga Kapal Pelabuhan Tanjung Pasir
Sumber: Tempo, 2018

Sebagai fasilitas transportasi darat, Kabupaten Tangerang menyediakan 2 terminal bus tipe C yaitu Terminal Kampung Melayu dan Terminal Balaraja. Terminal ini menjadi tempat pemberhentian bagi bus bagi kawasan Jabodetabek dan Provinsi Banten. Selain itu, terdapat juga terminal shuttle bus yang terletak di kawasan Lippo Karawaci.

I. Komunikasi dan Informatika

Dalam menjalankan pemerintahan, terutama pada urusan komunikasi dan informatika, pemerintah daerah perlu melakukan digitalisasi agar dapat mewujudkan kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat digunakan untuk mengukur usaha pemerintah mencapai digitalisasi yang baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, capaian Indeks SPBE Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah 2,66 dengan predikat “baik”. Meskipun sama-sama berpredikat “baik”, nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 yang memiliki capaian 2,99. Selain Indeks SPBE, indikator lain pada urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut.

1) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi daerah di Kabupaten Tangerang diperlihatkan oleh jumlah desa yang terlayani oleh jaringan komunikasi dan jumlah kecamatan yang terlayani oleh menara BTS. Apabila dilihat dari jumlah desa yang terlayani oleh jaringan komunikasi, diketahui bahwa daerah telah menunjukkan capaian yang optimal karena sebanyak 246 desa atau 100% desa di Kabupaten Tangerang sudah terlayani oleh jaringan komunikasi. Sebagai dukungan jaringan telekomunikasi, infrastruktur seperti menara BTS juga sudah dibangun di seluruh 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Jumlah menara menurut kecamatan ditampilkan oleh tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 56
Jumlah Menara BTS Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Tahun		Kecamatan	Tahun	
	2020	2021		2020	2021
Balaraja	65	65	Mekar Baru	13	13
Cikupa	163	163	Pagedangan	104	104
Cisauk	61	61	Pakuhaji	24	24
Cisoka	35	35	Panongan	49	49
Curug	126	126	Pasar Kemis	84	84

Kecamatan	Tahun		Kecamatan	Tahun	
	2020	2021		2020	2021
Gunung Kaler	11	11	Rajeg	44	44
Jambe	18	18	Sepatan	46	46
Jayanti	22	22	Sepatan Timur	16	16
Kelapa Dua	88	88	Sindang Jaya	30	30
Kemiri	16	16	Solear	13	13
Kosambi	52	52	Sukadiri	16	16
Kresek	28	28	Sukamulya	12	12
Kronjo	18	18	Teluknaga	58	58
Legok	47	47	Tigaraksa	81	81
Mauk	31	31			

Sumber: *opendata.tangerangKabupatengo.id*, 2023

2) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Pengguna internet terbanyak ada di Kota Tangerang Selatan dengan angka 79,17% sedangkan Kabupaten Pandeglang menjadi kabupaten dengan pengguna akses internet paling sedikit dengan hanya 34,65% penduduk. Kabupaten Tangerang sendiri memperlihatkan tren yang positif dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2020. Dalam hal ini, pengguna internet di Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga terbanyak di Provinsi Banten di bawah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2. 57

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen) Tahun 2017-2020

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Pandeglang	17,64	22,71	30,62	34,65
Kabupaten Lebak	13,78	24,67	28,72	35,29
Kabupaten Tangerang	35,53	50,33	58,67	58,49
Kabupaten Serang	25,34	33,79	47,47	45,85
Kota Tangerang	51,49	63,32	71,49	76,03
Kota Cilegon	41,27	53,53	58,75	66,12
Kota Serang	36,15	41,26	51,98	57,91
Kota Tangerang Selatan	66,84	72,03	78,35	79,17
Provinsi Banten	37,46	47,90	56,25	58,63

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Banten*

J. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1) Jumlah Koperasi Aktif

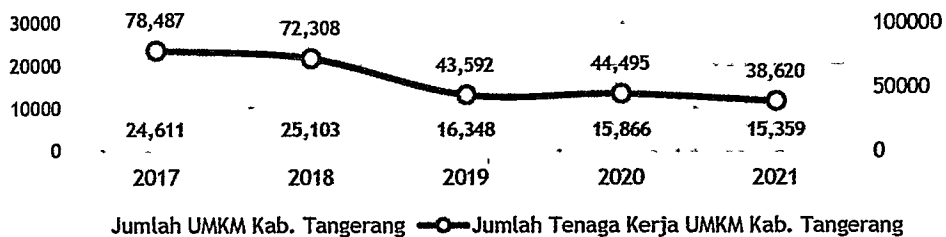


Gambar 2.142
Jumlah Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten
Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Persentase koperasi aktif menunjukkan kinerja eksistensi, layanan, dan produktivitas koperasi. Gambar di atas menunjukkan jumlah dan persentase koperasi aktif di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2022, koperasi di Kabupaten Tangerang sebesar 1.587 unit koperasi dan yang aktif hanya 566 unit koperasi (atau 35,7% dari total unit usaha koperasi). Jika dilihat berdasarkan kecamatan di Kabupaten Tangerang, kecamatan dengan koperasi aktif terbanyak yaitu (1) Kecamatan Cikupa sebanyak 45 unit koperasi; (2) Kecamatan Kelapa Dua sebanyak 43 unit koperasi; dan (3) Kecamatan Tigaraksa sebanyak 42 unit koperasi. Berdasarkan publikasi Bappeda Kabupaten Tangerang (2024)², jumlah koperasi yang mendapatkan pembiayaan tahun 2023 sebanyak 65 unit koperasi atau 11,48% dari jumlah koperasi di Kabupaten Tangerang.

2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Gambar di bawah menunjukkan jumlah usaha dan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Tangerang berdasarkan data Provinsi Banten dalam Angka. Dalam lima tahun terakhir terlihat adanya penurunan jumlah usaha dan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2021 sebesar 15.359 unit usaha dengan penurunan 3,20% dari tahun 2020. Namun, berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang (*website open data*) jumlah usaha mikro kecil tahun 2021 mencapai 25.918 unit usaha. Berdasarkan data tersebut kecamatan dengan jumlah UMK terbanyak yaitu (1) Kecamatan Teluknaga sebanyak 1.833 unit usaha (7,07% dari total UMK); (2) Kecamatan Mauk sebanyak 1.701 unit usaha (6,56% dari total UMK); (3) Kecamatan Cikupa sebanyak 1.638 unit usaha (6,32% dari total UMK). Berdasarkan publikasi Bappeda Kabupaten Tangerang (2024)³, jumlah UMKM yang mendapatkan pembiayaan tahun 2023 mencapai 22,20%.



Gambar 2.143
Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja UMKM di Kabupaten Tangerang Tahun
2017-2021
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dijabarkan bahwa permasalahan di bidang koperasi dan UMKM adalah belum optimalnya aspek permodalan dan promosi. Belum optimalnya koordinasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk permodalan UKM mengakibatkan pemanfaatan dana modal belum efisien.

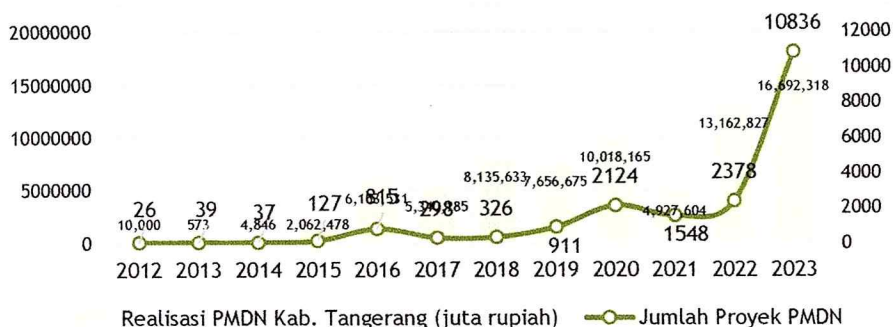
² Bappeda Kabupaten Tangerang (2024). Capaian Pembangunan Kabupaten Tangerang

³ Bappeda Kabupaten Tangerang (2024). Capaian Pembangunan Kabupaten Tangerang

K. Penanaman Modal

1) Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dalam penanaman modal kegiatan berusaha terbagi menjadi dua status permodalan, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.



Gambar 2.144

Realisasi PMDN dan Jumlah Proyek PMDN di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2023

Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, realisasi dan jumlah proyek PMDN di Kabupaten Tangerang dalam 10 tahun terakhir cenderung meningkat dan meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan tahun 2020-2021 sebagai dampak dari pandemi, namun dapat kembali membaik pada tahun 2022 dan 2023.



Gambar 2.145

Realisasi PMDN dan Rasio Serapan Tenaga Kerja PMDN di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, serapan tenaga kerja Kabupaten Tangerang cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten. Akan tetapi, serapan tenaga kerja Indonesia terhadap proyek PMDN cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Maka dari itu diperlukan strategi untuk optimalisasi kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing tenaga kerja.

2) Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal

asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.



Gambar 2.146

Realisasi PMA dan Jumlah Proyek PMA di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2023

Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, dalam 10 tahun terakhir realisasi PMA Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif dimana periode peningkatan signifikan pada tahun 2016-2018 dan menurun dalam tiga tahun terakhir. Sementara itu, jumlah proyek PMA mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018-2020 lalu menurun dalam dua tahun terakhir dan kembali meningkat pesat pada tahun 2023.



Gambar 2.147

Realisasi PMA dan Rasio Serapan Tenaga Kerja PMA di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2018-2022

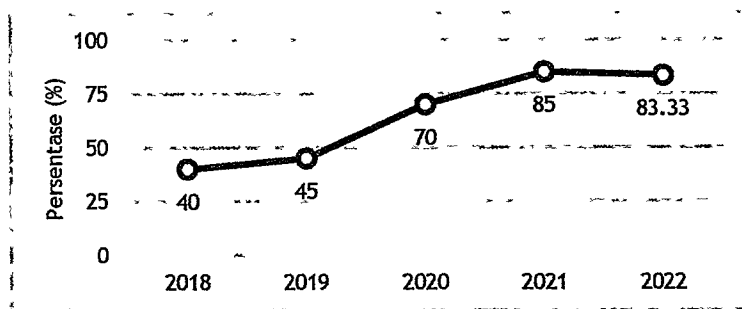
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, dalam lima tahun terakhir rasio serapan tenaga kerja indonesia PMA cenderung fluktuatif dan peningkatan signifikan pada tahun 2020-2021. Sementara itu rasio serapan tenaga kerja proyek PMA Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 sebesar 10,03 yang mampu menyerap jumlah tenaga kerja 9.026 orang dengan 900 proyek PMA.

L. Kepemudaan dan Olahraga

1) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Indikator persentase organisasi pemuda yang aktif memberikan gambaran seberapa besar keaktifan organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Tangerang. Organisasi pemuda dapat diberdayakan untuk mendukung pembangunan daerah. Semakin besar persentasenya, maka peluang dalam mendukung pembangunan daerah semakin besar.



Gambar 2.148

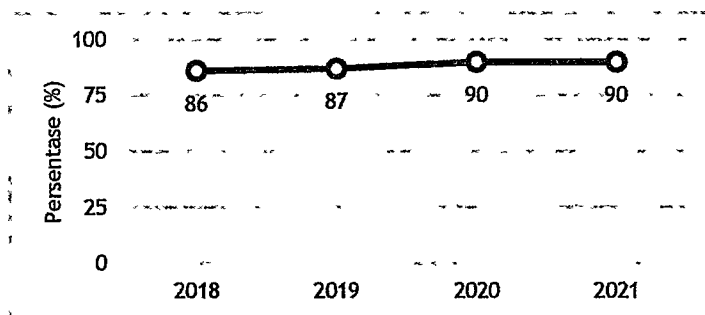
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2018-2022

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Dari gambar di atas, organisasi pemuda di Kabupaten Tangerang yang aktif dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami tren yang meningkat, dari 40% menjadi 83,33%. Untuk kedepannya, angka yang cukup besar ini dapat dikelola pemerintah agar dapat mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang.

2) Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet muda, serta mendukung peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional. Dalam pengembangan olahraga, cakupan pembinaan olahraga ini penting untuk mengembangkan atlet muda yang berprestasi dan menciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan olahraga di tingkat nasional. Cakupan pembinaan olahraga mencakup beberapa aspek seperti pelatihan atlet muda, pengembangan program pelatihan fisik, hingga pemberian fasilitas olahraga yang memadai dan dukungan finansial.



Gambar 2.149

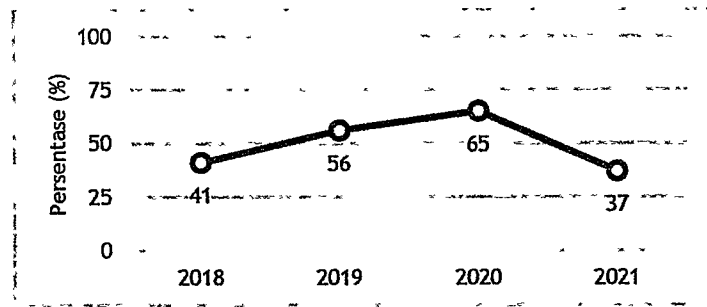
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang

Berdasarkan gambar di atas, cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2022 yang mencapai angka 90%. Angka tersebut dibentuk beberapa faktor seperti mulai dilaksanakannya berbagai pelatihan pembentukan atlet, penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan berbagai kompetisi lokal. Keseriusan pemerintah dalam membina olahraga di Kabupaten Tangerang diharapkan dapat berjalan konsisten dan memberikan hasil terbaik bagi sektor olahraga di Kabupaten Tangerang.

3) Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Pembina atau pelatih olahraga yang kompeten dapat membentuk atlet-atlet yang kompeten pula. Sertifikat pelatih olahraga menjadi alat untuk mem-verifikasi kekompetenan tersebut.



Gambar 2.150

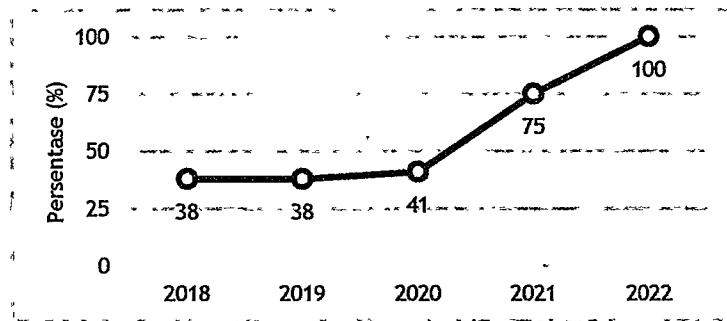
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang

Gambar di atas menunjukkan tren cakupan pelatih bersertifikasi yang meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Namun, di tahun 2021 cakupan tersebut mengalami penurunan drastis (65% di tahun 2020 menjadi 37% di tahun berikutnya).

4) Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda meliputi berbagai hal yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet muda serta mendukung peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah. Dalam pengembangan olahraga, cakupan pembinaan atlet muda ini sangat penting untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan olahraga di tingkat daerah serta mencetak atlet muda yang berprestasi.



Gambar 2.151

Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Grafik di atas menunjukkan angka cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data di atas, cakupan pembinaan atlet muda mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 angka cakupan pembinaan atlet muda mencapai 100%. angka tersebut menunjukkan bahwa pembinaan atlet muda mulai diperhatikan oleh pemerintah. Pembinaan atlet muda yang bermuara pada terciptanya atlet berbakat daerah yang berprestasi.

5) Prestasi Olahraga

Muara dari upaya pengelolaan urusan olahraga adalah prestasi. Prestasi yang terus meningkat menunjukkan bahwa urusan olahraga dikelola dengan baik. Prestasi dapat dinilai dari jumlah atle berprestasi dan jumlah prestasi olahraga



Gambar 2.152

Jumlah Atlet Berprestasi dan Prestasi Olahraga Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang dan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Grafik di atas menunjukkan jumlah atlet berprestasi dan jumlah prestasi olahraga di Kabupaten Tangerang. Jumlah prestasi mengalami penurunan pada tahun. Hal tersebut dikarenakan banyak kegiatan pembinaan olahraga yang mulai dirintis kembali setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang lalu. Pada tahun 2022 telah banyak prestasi yang diraih seiring dengan mulai normalnya berbagai kompetisi olahraga. Namun dari jumlah tersebut, hanya terdapat 22 prestasi yang bertingkat nasional (Opendata Kabupaten Tangerang, 2023).

M. Statistik

1) Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Sistem data dan statistik yang terintegrasi dimaksudkan untuk memudahkan publik dalam mendapatkan dan mengetahui segala informasi mengenai daerah. Pada saat ini, Kabupaten Tangerang memiliki sebuah laman integrasi data, yaitu Kabupaten Tangerang *Open Data*. Kabupaten Tangerang *Open Data* yang dapat diakses melalui alamat *opendata.tangerangKabupatengo.id* ini merupakan laman open data terintegrasi dengan fasilitas Portal Satu Data Nasional Indonesia yang menampilkan data dalam bentuk tabel, grafik, dan peta. Kedua laman tersebut diciptakan sebagai pintu data publik daerah sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui, memperoleh, dan mempelajari informasi. Tersedianya akses satu atap terhadap data pemerintah kepada publik bermanfaat untuk mengkomunikasikan data dan analisis pemerintah melalui visualisasi dan artikel, menciptakan nilai dengan mendorong pengembangan aplikasi, serta memfasilitasi analisis dan penelitian (*opendata.tangerangKabupatengo.id*, 2023).



Gambar 2.153

Laman Muka Kabupaten Tangerang Open Data

Sumber: *opendata.tangerangKabupatengo.id*, 2023

2) Buku Kabupaten Dalam Angka

Kabupaten Tangerang telah mempublikasikan dokumen statistik Kabupaten Tangerang dalam Angka Tahun 2023 pada 28 Februari 2023 lalu. Kabupaten Tangerang Dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini menyajikan data dari berbagai bidang yang bersumber dari sensus/survei BPS maupun data dari instansi lain, yang diharapkan dapat membantu dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Tangerang. Apabila ditelusuri melalui laman badan pusat statistik, terdapat 12 dokumen Kabupaten Tangerang Dalam Angka yang sudah dipublikasikan, mulai dari tahun 2006, lalu dilanjutkan dengan tahun 2009 hingga tahun 2023 secara berurutan.



Gambar 2.154

Dokumen Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2006 dan 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang

3) Buku PDRB

Dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tangerang dipublikasikan ke dalam 2 jenis dokumen yaitu Buku PDRB menurut Lapangan Usaha dan Buku PDRB menurut Pengeluaran. Dokumen terbaru yang dapat ditemukan di laman BPS memuat informasi statistik PDRB pada tahun 2014-2018, yang mana kedua dokumen dipublikasikan pada tahun 2019 lalu.



Gambar 2.155

Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tangerang Menurut Pengeluaran dan Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

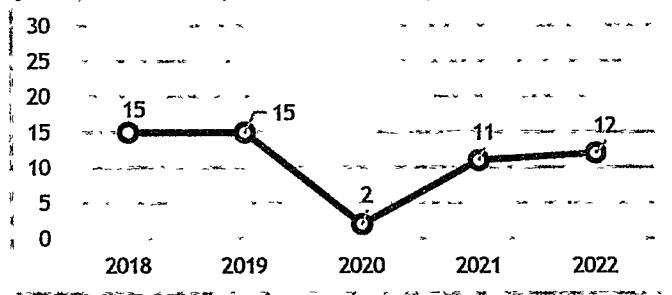
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

N. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil dinamika kehidupan yang ada di masyarakat. Hasil kebudayaan dari zaman dahulu cenderung dipertahankan karena memiliki nilai tersendiri dan sebagian di antaranya masih relevan dengan zama sekarang. Oleh karena itu beberapa hal yang dapat dijadikan indikator dalam urusan kebudayaan adalah penyelenggaraan festival seni budaya dan pelestarian wujud-wujud kebudayaan.

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Festival seni budaya merupakan wujud apresiasi pada kebudayaan. Dengan mengapresiasi seni dan budaya, maka aktor-aktor yang ada di dalamnya dapat berperan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.



Gambar 2.156

Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Festival seni dan budaya di Kabupaten Tangerang selalu diselenggarakan setiap tahun. Walaupun masih berjumlah belasan, penyelenggaraan dengan skala besar seperti festival dapat dinilai cukup banyak dalam satu tahun. Tahun 2020 dengan penyelenggaraan festival seni dan budaya yang hanya berjumlah 2 disebabkan oleh adanya anomali kehidupan bermasyarakat, yaitu pandemi Covid-19.

2) Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Wujud-wujud kebudayaan masa lalu yang masih ada hingga saat ini dapat merepresentasikan identitas masyarakat dan karakteristik pengetahuan yang khusus. Oleh karena itu, beberapa dari wujud-wujud kebudayaan tersebut perlu dilestarikan.

Tabel 2. 58

Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Tangerang yang Dilestarikan Tahun 2018-2021

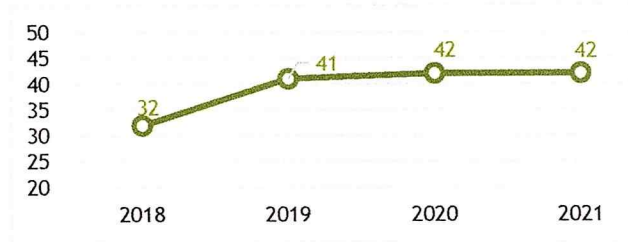
Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah (a)	90	102	113	121
Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (b)	90	102	113	121
Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan ((b)/(a)) (%)	100	100	100	100

Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang dan Profil Statistik Kabupaten Tangerang

Pada tahun 2021 Kabupaten Tangerang memiliki 121 benda, situs, dan kawasan cagar budaya. Mengalami peningkatan 34% dari tahun 2018. Setiap

tahunnya semua benda, situs, dan kawasan tersebut berhasil dilestarikan terus menerus.

3) Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi
Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan revitalisasi dan inventarisasi pada sejumlah karya budaya. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021, karya budaya yang telah direvitalisasi dan diinventarisasi terus meningkat dari 32 karya budaya sampai 42 karya budaya.



Gambar 2.157

Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

Sumber: Profil Statistik Kabupaten Tangerang

O. Perpustakaan

Perpustakaan adalah tempat disimpannya buku-buku dan sumber bacaan. Pengelolaan perpustakaan yang baik dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi dan membaca. Hal tersebut dapat membantu pembangunan daerah melalui tambahan pengetahuan kepada masyarakat yang membaca.

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Setiap tahunnya perpustakaan daerah Kabupaten Tangerang selalu menerima kunjungan. Kunjungan selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.158

Jumlah Kunjungan Perpustakaan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

Jumlah kunjungan terbanyak terjadi tahun 2019 dengan jumlah kunjungan 334.707 pengunjung. Angka tersebut mengalami peningkatan pesat dari 6 tahun sebelumnya. Tiga tahun berikutnya jumlah kunjungan menurun drastis mendekati jumlah kunjungan tahun 2013. Saat ini teknologi telah banyak menyediakan sarana membaca secara online, oleh karena itu perlu strategi baru untuk dapat mendata masyarakat yang mengunjungi perpustakaan secara *offline* dan *online*.

2) Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku yang banyak menandakan semakin banyaknya bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan. Pada tahun 2022, jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang adalah 57.979 judul buku (mengalami peningkatan dari tahun 2020).



Gambar 2.159

Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2022

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

3) Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Satu bahan bacaan mungkin sekali untuk akan dibaca oleh lebih dari satu orang pada saat yang sama. Oleh karena itu jumlah buku dari satu judul buku juga perlu untuk didata.



Gambar 2.160

Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang dan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Seiring meningkatnya jumlah koleksi judul buku, jumlah buku di perpustakaan daerah juga terus meningkat. Pada tahun 2022 jumlah buku yang ada di perpustakaan daerah Kabupaten Tangerang adalah 112.881 buku. Banyaknya jumlah buku setiap tahunnya adalah hampir dua kali lipat dari jumlah koleksi judul buku.

4) Rasio Jumlah Perpustakaan per Satuan Penduduk

Pada tahun 2022, jumlah perpustakaan terakreditasi di Kabupaten Tangerang adalah 20 perpustakaan. Jumlah tersebut berada di urutan ketiga di Provinsi Banten setelah Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan. Namun, jumlah tersebut perlu dibandingkan dengan jumlah penduduknya agar terlihat daerah mana yang terlalu banyak peruntukan layanan bagi 1 perpustakaan.

Tabel 2. 59

Rasio Jumlah Perpustakaan Terakreditasi per Satuan Penduduk Provinsi Banten Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Terakreditasi	Jumlah Penduduk	Rasio
Kabupaten Serang	62	1.678.915	1 : 27.079

Kota Cilegon	15	450.271	1 : 30.018
Kota Tangerang Selatan	39	1.378.466	1 : 35.345
Kota Serang	14	720.362	1 : 51.454
Kota Tangerang	20	1.930.556	1 : 96.528
Kabupaten Lebak	9	1.433.853	1 : 159.317
Kabupaten Pandeglang	7	1.307.090	1 : 186.727
Kabupaten Tangerang	8	3.352.472	1 : 419.059
Provinsi Banten	174	12.251.985	1 : 70.414

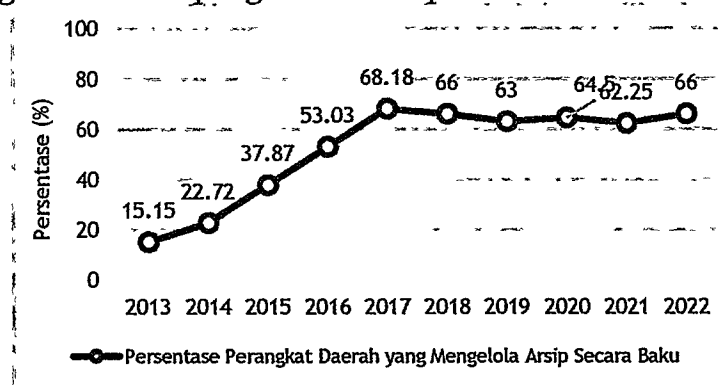
Sumber: Perpustakaan Nasional, 2023

Peruntukan layanan terbanyak bagi satu perpustakaan di Provinsi Banten berada di Kabupaten Tangerang dengan layanan 70.414 penduduk untuk 1 perpustakaan. Hal ini merupakan kondisi yang kurang baik karena terlalu banyak penduduk yang perlu dilayani 1 perpustakaan.

P. Kearsipan

1) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pengelolaan arsip secara baku merujuk pada proses atau sistematisasi yang konsisten dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dengan mengikuti standar atau pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas, keamanan dan aksesibilitas arsip dalam jangka waktu yang lama. Standar-standar tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis arsip dan kebutuhan organisasi atau instansi yang melakukan pengelolaan arsip.



Gambar 2.161

Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

Pada tahun 2022, persentase perangkat daerah yang mengelola arsipnya secara baku adalah sebanyak 66%. Angka tersebut meningkat pesat dari tahun 2013 yang besarnya hanya 15,15%. Capaian tertinggi terjadi di tahun 2017 dengan persentase sebesar 68,18%. Masih terdapat 30-40% perangkat daerah yang belum mengelola arsipnya secara baku.

2) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Sumber Daya manusia pengelola kearsipan perlu untuk ditingkatkan agar menunjang dan meningkatkan kualitas kinerja. Tidak tersedianya sumber daya Arsiparis yang kompeten menjadi salah satu permasalahan yang ada di di bidang urusan kearsipan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui program pelatihan SDM pengelola kearsipan agar mampu mengelola arsip sesuai standar dan berkualitas.

Tabel 2. 60
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1	1	1	1	1

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

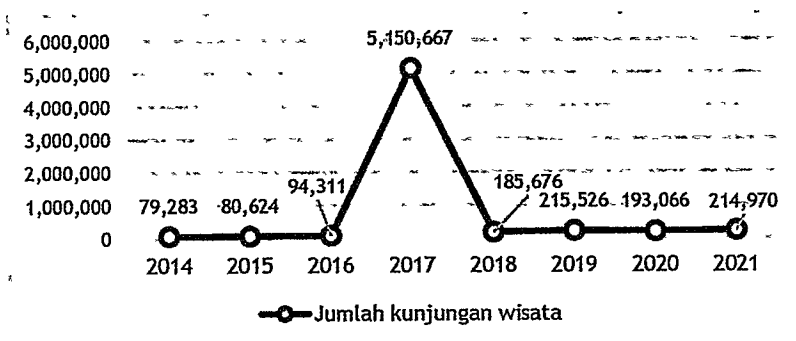
Gambar di atas menunjukkan kegiatan yang diikuti oleh SDM pengelola kearsipan. Berdasarkan grafik di atas kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan selalu diadakan minimal sekali dalam satu tahun untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan. Hal tersebut dilakukan guna menunjang pengelolaan kearsipan yang berkualitas dilingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang.

2.4.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

1) Jumlah Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikmati berbagai keindahan alam, budaya, sejarah atau kegiatan rekreasi lainnya.



Gambar 2.162

Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021

Sumber: RPJM Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Profil Statistik Kabupaten Tangerang

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Tangerang pada tahun pada tahun 2021 adalah 214.970 wisatawan. Angka tersebut meningkat pesat dari tahun 2014 yang hanya terdapat 79.283 wisatawan. Berdasarkan tren tersebut, jumlah kunjungan ke depannya dapat terus meningkat lagi.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Tangerang relatif kecil. Pada tahun 2018, secara berturut-turut, daerah dengan jumlah kunjungan wisata dari yang terbanyak adalah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang.

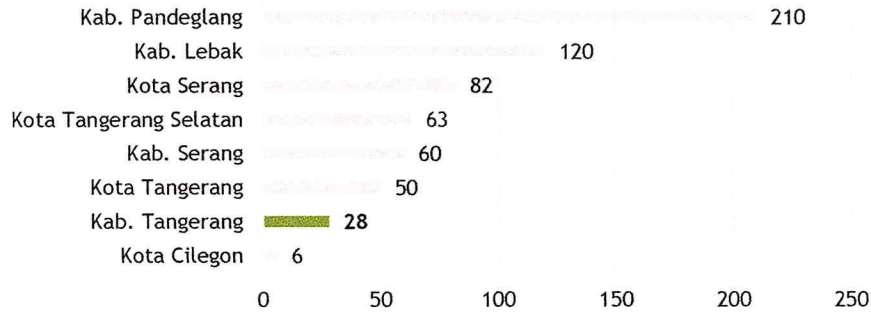
Tabel 2. 61
Jumlah Wisatawan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

Kabupate/Kota	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Total
Kabupaten Pandeglang	2.579	3.102.472	3.105.051

Kabupate/Kota	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Total
Kabupaten Lebak	357	680.102	680.459
Kabupaten Tangerang	28.212	74.085	102.297
Kabupaten Serang	1.470	8.392.828	8.394.298
Kota Tangerang	237.996	1.277.760	1.515.756
Kota Cilegon	46.182	866.772	912.954
Kota Serang	1.215	2.208.570	2.209.785
Kota Tangerang Selatan	8.992	1.379.551	1.388.543
BANTEN	327.003	17.982.140	18.309.143

Sumber: Pariwisata Banten Dalam Angka 2019

Apabila dilihat berdasarkan jumlah objek wisata, jumlah objek wisata di Kabupaten Tangerang memang relative lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Pada tahun 2022, jumlah objek wisata di Kabupaten Tangerang adalah 28 objek wisata (urutan ke-tujuh dari 8 kabupaten/kota).



Gambar 2.163

Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Banten

2) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki peran dalam perekonomian Kabupaten Tangerang. Kunjungan wisatawan, terutama dari luar daerah Kabupaten Tangerang, meningkatkan jumlah uang yang ada di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.164

Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

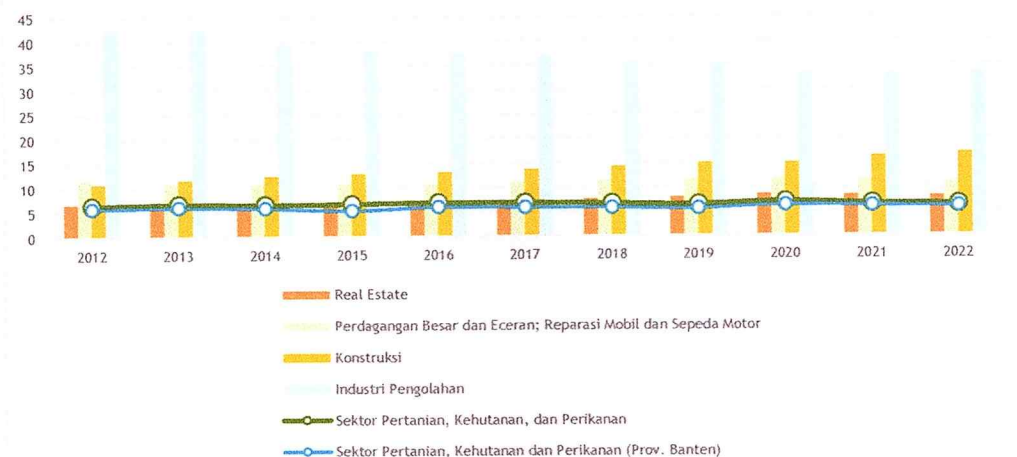
Sumber: Profil Statistik Kabupaten Tangerang

Pada tahun 2022, kontribusi PAD sektor wisata terhadap PAD total adalah 16,35%. Jumlah tersebut terjadi penurunan dari tahun 2019 karena di tahun 2022 merupakan tahun pemulihan dari kondisi pandemic Covid-19.

B. Pertanian

1) Kondisi Pertanian

Dalam 10 tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami tren yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki angka yang lebih kecil dibandingkan sektor dominan seperti industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; serta real estat.

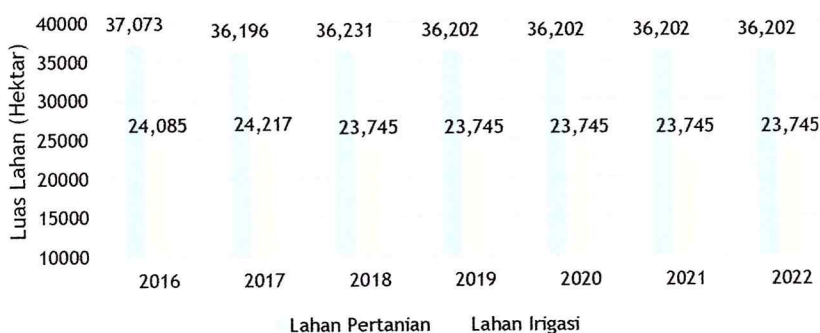


Gambar 2.165

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dibanding Kontribusi Sektor Lain terhadap PDRB di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang 2013-2023

Berdasarkan RTRW Provinsi Banten tahun 2023-2024, Kabupaten Tangerang menjadi salah satu kabupaten yang diarahkan untuk pengembangan kawasan peruntukkan pertanian di Provinsi Banten, bersama dengan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang. Dalam beberapa tahun terakhir, luas lahan pertanian di Kabupaten Tangerang cenderung stagnan, setelah mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 29 hektar. Sementara itu, kecenderungan yang serupa juga terjadi pada luas lahan irigasi yang mengalami penurunan sebesar 472 hektar di tahun 2018 dan bersifat stagnan di tahun berikutnya.



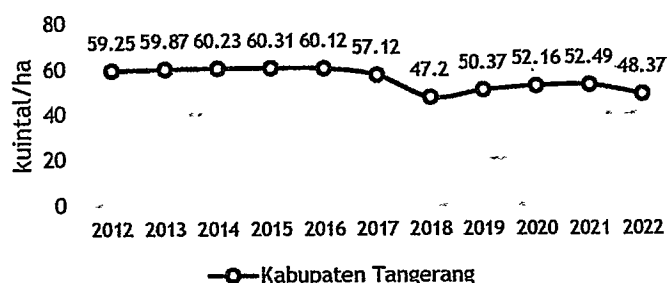
Gambar 2.166

Luas Lahan Pertanian dan Lahan Irigasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten Tahun 2016-2022

2) Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama

Produktivitas pertanian merupakan angka yang menunjukkan kemampuan lahan pertanian dalam memproduksi tanaman tertentu. Angka tersebut didapatkan dari produksi tanaman pertanian pangan dibagi luas areal lahan pertanian. Selama 10 tahun terakhir, angka produktivitas sempat mengalami penurunan secara drastis di tahun 2017 dan 2018 sebesar masing masing 3 kuintal/ha dan 9,92 kuintal/ha. Angka tersebut kemudian naik di tahun-tahun berikutnya meskipun belum melampaui angka tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Selain itu, produktivitas padi sebagai tanaman pangan utama di Kabupaten Tangerang masih berada di bawah beberapa kabupaten di Provinsi Banten. Pada tahun 2021, angka produktivitas padi tertinggi di Provinsi Banten berada di Kota Tangerang sebesar 58,89 kuintal/ha, Kota Serang sebesar 57,27 kuintal/ha, dan Kota Cilegon sebesar 54,05 kuintal/ha. Kabupaten Tangerang menempati posisi keempat tetapi masih berada di atas Provinsi Banten (51 kuintal/hektar).



Gambar 2.167

Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

3) Populasi dan Produksi Peternakan

Produk hasil peternakan merupakan salah satu sumber penyediaan protein hewani selain hasil perikanan. Peternakan merupakan bagian dari pertanian yang terbagi ke dalam kelompok ruminansia besar (sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda), ruminansia kecil (kambing, domba, dan babi), dan unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila). Dalam 10 tahun, jumlah populasi dan produksi kelompok didominasi oleh jenis sapi potong untuk kelompok ruminansia besar serta domba untuk kelompok ruminansia kecil. Sementara itu, secara jumlah produksi total selama 10 tahun, jenis yang mendominasi adalah ayam ras pedaging dengan jumlah populasi terbanyak di tahun 2018. Selain produksi daging, kelompok unggas di Kabupaten Tangerang juga memproduksi telur dengan jumlah terbanyak berasal dari jenis ayam ras petelur.

Tabel 2. 62

Jumlah Populasi Ternak berdasarkan Jenis di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022

Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sapi Potong	41.345	42.283	43.510	35.214	36.143	29.089	25.886	12.100
Sapi Perah	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerbau	9.995	10.109	10.402	7.138	7.345	7.142	8.463	1.707
Kuda	0	0	0	0	34	34	34	34
Kambing	81.902	87.715	90.259	92.849	165.920	143.038	143.589	103.055
Domba	92.053	98.586	101.445	104.357	30.191	35.799	28.441	33.625
Babi	3.795	4.065	4.183	4.303	4.427	7.218	4.425	4.425

Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ayam Buras	2.492.880	2.669.812	2.747.237	2.826.082	1672901	2.838.108	1412947	1412947
Ayam Ras Petelur	2.856.000	2.727.790	5.613.792	4.713.574	6.558.000	0	0	0
Ayam Ras Pedaging	21.808.620	23.356.485	36.076.662	86.621.901	6040780	0	0	0
Itik	391.819	419.628	431.797	431.797	784580	889.139	786010	797100
Itik Manila	78.030	83.568	85.992					

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka 2013-2023

Tabel 2. 63
Jumlah Produksi Daging Ternak berdasarkan Jenis di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

Jenis Ternak	Jumlah Produksi (ton)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sapi Potong	5.665	7.117	7.243	7.967	8.746	8.860	10.415	10.908	1.623	2.016	1.664
Sapi Perah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerbau	1347	116	184	203	187	189	191	183	12	13	183
Kuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kambing	1403	925	528	800	648	656	674	636	559	597	640
Domba	1310	1.247	788	1.453	957	970	996	940	1.530	923	944
Babi	145	165	179	188	182	184	186	178	9	9	180
Ayam Buras	878	1035	1314	5288	1483	1502	877	827	841	1456	853
Ayam Ras Petelur	718	33114	1767	2461	2905	2943	2588	2318	348	2707	2401
Ayam Ras Pedaging	26.785	833	20380	21396	18559	28930	34262	31080	0	0	0
Itik	622	267	205	385	164	166	109	74	99,6	203	103
Itik Manila	n/a	n/a	n/a	51,5	53	54	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka 2013-2023

Tabel 2. 64
Jumlah Produksi Telur Unggas berdasarkan Jenis Ternak di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022

Jenis Ternak	Jumlah Produksi (kg)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ayam Buras	3.194.502	4.442.403	4.528.540	4.646.280	4.170.155	4.128.453	4.087.163	4.522.978
Ayam petelur	26.908.875	36.849.329	36.867.750	37.520.110	35.867.704	35.509.027	n/a	n/a
Itik	3.388.385	3.448.702	3.531.470	3.623.290	3.251.991	2.812.484	3.187.276	3.232.668

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka 2013-2023

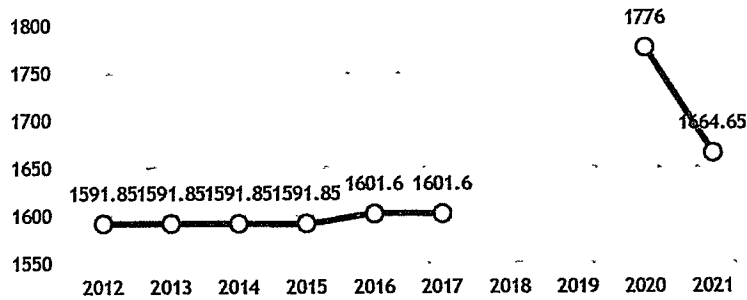
C. Kehutanan

Hutan merupakan wilayah tertentu yang ditumbuhi pepohonan lebat dan jenis tumbuhan lain, yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan secara tetap. Tujuan penetapan tersebut adalah adanya kejelasan mengenai status, letak, dan batas kawasan hutan yang terjamin secara hukum. Kawasan hutan terbagi ke dalam 3 kelompok yaitu Hutan Konservasi, Hutan Produksi, serta Hutan Lindung.

1) Luas Lahan Hutan

Berdasarkan grafik berikut, luas lahan hutan di Kabupaten Tangerang cenderung stabil. Pada tahun 2016, luas lahan hutan meningkat dengan angka relatif kecil sebesar 9,75 hektar. Angka luas lahan hutan kembali naik secara signifikan pada tahun 2020 menjadi 1776 hektar meskipun data pada dua tahun sebelumnya tidak tercatat. Diasumsikan, peningkatan luas pada tahun-tahun tersebut disebabkan adanya upaya restorasi hutan atau pembaharuan data. Namun, luas lahan hutan kembali menurun di tahun

2021 sebesar 111,35 hektar. Penurunan tersebut dikaitkan dengan peningkatan aktivitas masyarakat seiring pemulihan kondisi pascapandemi yang mengakibatkan perubahan guna lahan.



Gambar 2.168

Luas Lahan Hutan di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2021

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

D. Energi dan Sumber Daya Mineral

1) Persentase Jumlah Pelanggan Listrik

Persentase distribusi listrik untuk setiap rumah tangga pada tahun 2021 di Provinsi Banten termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sudah mencapai 99,3% pada tahun 2021. Rasio elektrifikasi memperlihatkan Kabupaten Tangerang sudah mencapai angka 97,31%, berada di posisi kelima di Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang juga menjadi penyumbang terbanyak dalam jumlah rumah tangga belum berlistrik di Provinsi Banten dengan angka 27.132 rumah tangga.

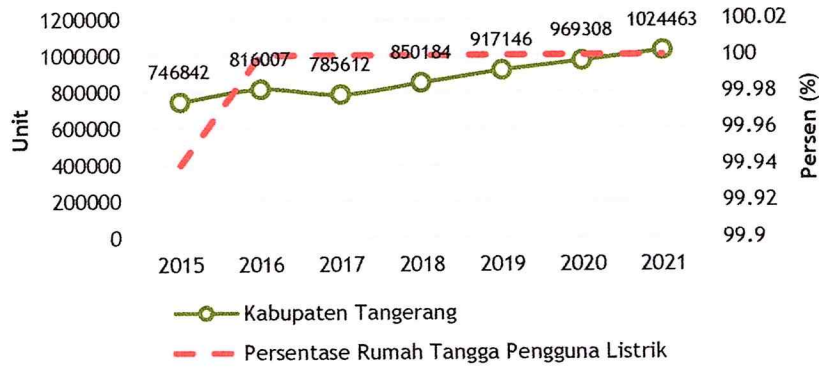
Tabel 2. 65

Persentase Jumlah Pelanggan Listrik di Provinsi Banten Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (PLN)	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik Non PLN	Jumlah Rumah Tangga Belum Berlistrik	Rasio Elektrifikasi (%)
Kab Pandeglang	349.747	2.534	15.687	95,75%
Kab Lebak	360.543	119	23.266	93,81%
Kab Tangerang	980.206	1.062	27.132	97,31%
Kab Serang	451.125	0	15.425	96,66%
Kota Tangerang	577.676	0	40	99,99%
Kota Cilegon	120.682	0	1.167	98,81%
Kota Serang	225.912	1.519	2.449	98,67%
Kota Tangerang Selatan	455.534	0	147	99,97%
Provinsi Banten	3.521.425	5.234	85.313	99,30%

Sumber: Laporan Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2021

Dalam kurun waktu 7 tahun, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah pelanggan listrik Kabupaten Tangerang mencapai 1.024.463 pelanggan. Hal ini memengaruhi angka persentase rumah tangga pengguna listrik yang telah mencapai 100% sejak tahun 2016.

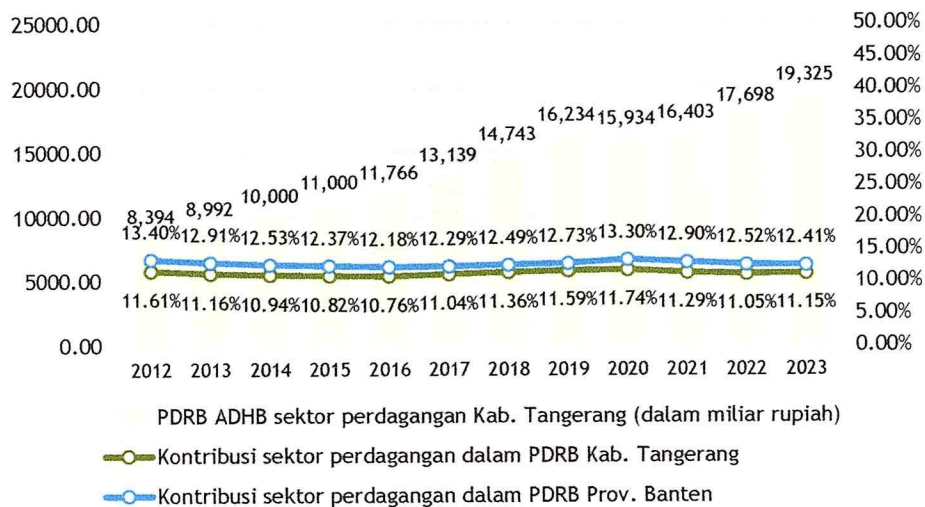


Gambar 2.169
 Jumlah Pelanggan Listrik dan Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
 di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021
 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

E. Perdagangan

1) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

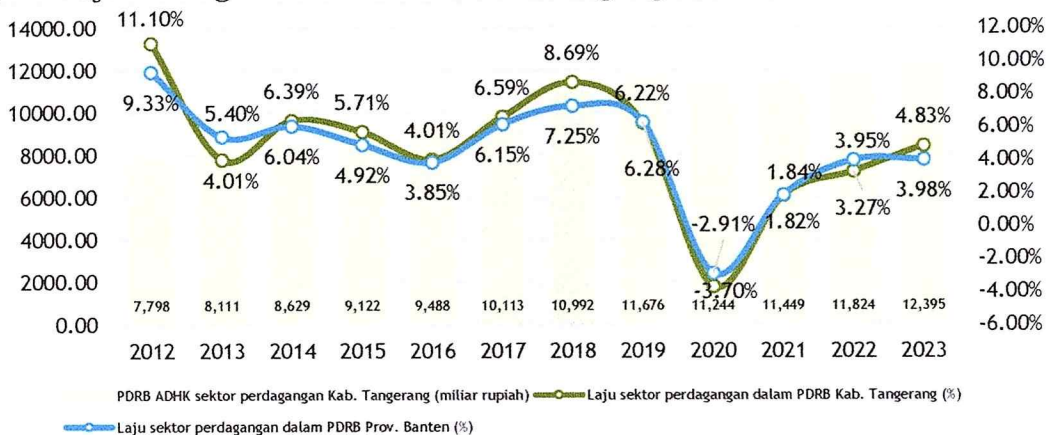
Lapangan usaha perdagangan merupakan salah satu lapangan usaha yang menopang perekonomian Kabupaten Tangerang. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB digunakan untuk melihat performa kinerja dan nilai tambah lapangan usaha perdagangan dalam ekonomi wilayah Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.170
 Persentase Kontribusi PDRB ADHB Lapangan Usaha Perdagangan
 Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2023
 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, PDRB ADHB lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 19.324,82 miliar rupiah dengan persentase kontribusi sebesar 11,15% terhadap PDRB ADHB Kabupaten Tangerang. Sementara itu, kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB ADHB Banten sebesar 12,41%.

2) Laju Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan



Gambar 2.171

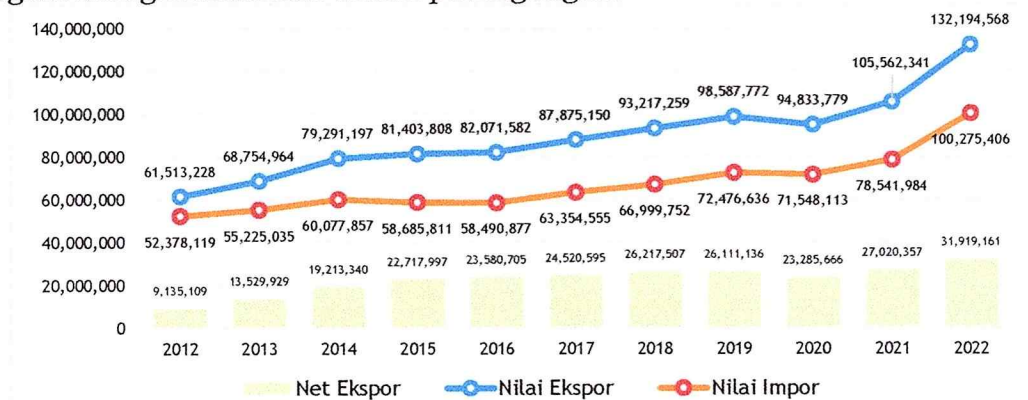
Laju PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, PDRB ADHK lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 12.395,24 miliar rupiah dengan laju 4,83% dari tahun 2022. Capaian laju tersebut lebih rendah dibanding Provinsi Banten yang sebesar 3,98% dari tahun 2022.

3) Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan nilai total ekspor dikurangi nilai total impor dari wilayah tertentu. Nilai ekspor bersih positif mengindikasikan surplus perdagangan, jika sebaliknya nilai ekspor bersih negatif mengindikasikan defisit perdagangan.



Gambar 2.172

Nilai Ekspor, Nilai Impor, Nilai Net Ekspor PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Berdasarkan grafik di atas bahwa pada tahun 2022, nilai net ekspor Kabupaten Tangerang mencapai 31.919,16 miliar rupiah dengan nilai ekspor mencapai 132.194,57 miliar rupiah dan nilai impor mencapai 100.275,41 miliar rupiah. Berdasarkan tren dalam 10 tahun terakhir, net ekspor Kabupaten Tangerang cenderung meningkat kecuali tahun 2019-2020 sebagai dampak dari pandemi.

Tabel 2. 66

Ekspor Bersih Perdagangan Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020

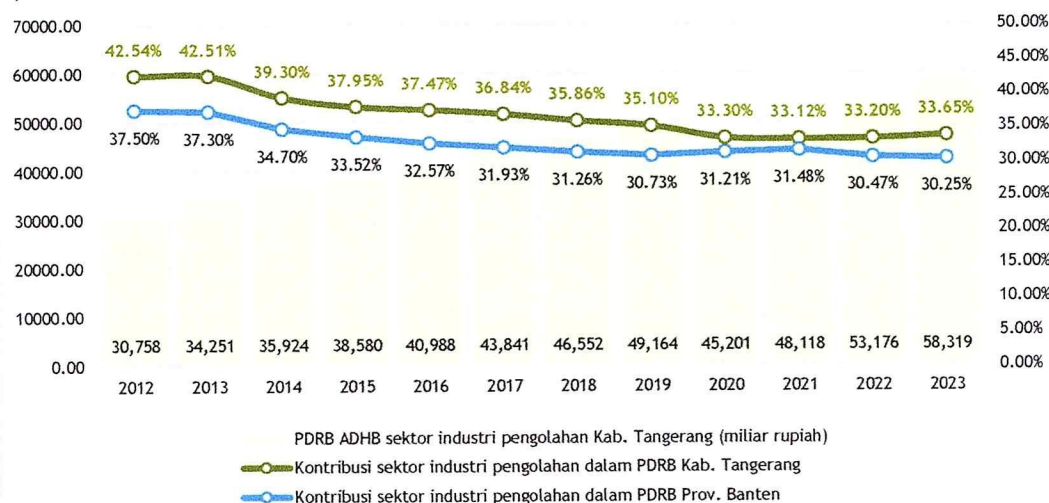
Jenis Usaha	Tahun		
	2018	2019	2020
(64) ALAS KAKI	64.558.677.087	49.666.470.634	36.606.634.539
(03) MOLUSKA	4.176.966.300	5.533.883.108	9.933.618.018
(52) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) Kain Tenun	892.010.264	5.788.514	7.613.624.974
(39) BARANG PLASTIK	2.100.354.359	1.583.599.265	4.247.208.005
(94) LAMPU	87.651.897	1.748.433.295	3.857.216.465
(61) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) Kapas	8.886.933.863	7.170.846.616	3.410.322.098
(72) LOGAM TIDAK MULIA DAN PRODUKNYA	106.717.379	1.379.631.499	1.473.238.391
(33) KOSMETIK	156.986.393	214.850.802	1.374.400.930
(74) TEMBAGA DAN PRODUKNYA	581.311.018	1.466.115.353	1.364.168.763
(69) PRODUK KERAMIK	1.347.674.443	1.172.879.500	1.295.786.513
(44) KAYU OLAHAN	1.797.744.854	1.560.161.027	1.235.183.375
(19) MAKANAN OLAHAN	924.479.527	981.231.185	1.109.715.227
(42) BARANG DARI USUS	81.959.486	1.798.937.618	1.087.139.365
(87) KENDARAAN SELAIN YANG BERGERAK DIATAS REL DAN BAGIANNYA	1.217.021.156	1.358.602.736	970.468.267
(62) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) Wol kapas serat	2.706.688.470	2.713.970.206	894.275.840
(85) MESIN DAN PERALATAN ELEKTRIS	555.688.346	366.334.253	786.516.689
(70) GELAS	1.006.193.882	779.380.495	640.683.253
(96) TERMOS	248.326.998	246.710.201	226.585.059
(95) MAINAN DAN PERALATAN OLAH RAGA	401.036.343	581.495.478	222.966.185
(55) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) Nilon. Polyester	252.619.901	101.441.186	60.864.994
	92.087.041.966	80.430.762.971	78.410.616.950

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang

Tabel diatas merupakan rincian ekspor bersih perdagangan menurut jenis usaha di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2022, jenis usaha dengan kontribusi terbesar dalam ekspor bersih perdagangan adalah (1) jenis usaha alas kaki yaitu sebesar 36,1 miliar rupiah (46,69%); (2) jenis usaha moluska yaitu sebesar 9,9 miliar rupiah (12,67%); dan (3) jenis usaha tekstil dan produk tekstil yaitu sebesar 7,6 miliar rupiah (9,71%).

F. Perindustrian

1) Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB



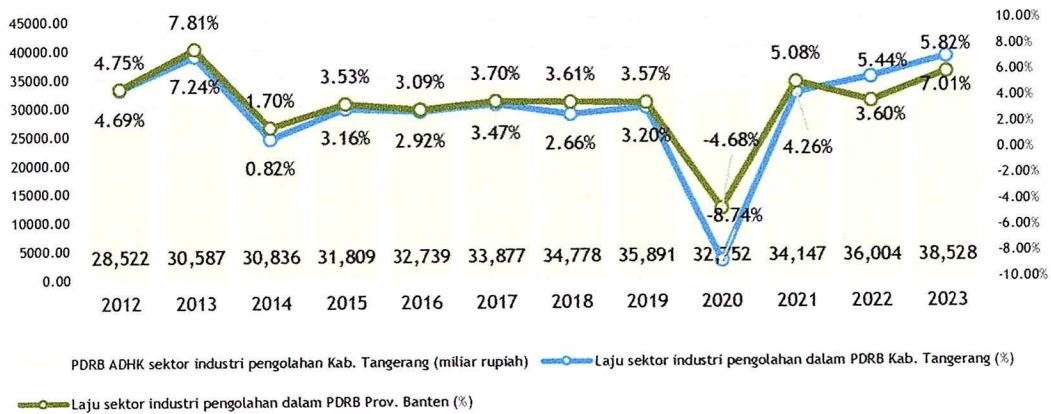
Gambar 2.173

Persentase Kontribusi PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas bahwa pada tahun 2023 PDRB ADHB lapangan usaha industri pengolahan Kabupaten Tangerang mencapai 58.319,19 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 33,65% terhadap PDRB ADHB Kabupaten Tangerang. Berdasarkan tren dalam 10 tahun terakhir, kontribusi lapangan usaha industri pengolahan cenderung menurun. Hal ini disebabkan adanya perubahan struktur ekonomi Kabupaten Tangerang yang mengarah pada sektor tersier (jasa).

2) Laju peningkatan PDRB Sektor Industri Pengolahan



Gambar 2.174

Laju PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2012-2023
 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan grafik di atas bahwa pada tahun 2023, PDRB ADHK lapangan usaha industri pengolahan Kabupaten Tangerang mencapai 38.528,02 miliar rupiah dengan laju peningkatan 7,01% dari tahun 2022. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding Provinsi Banten yang sebesar 5,82% tahun 2022-2023. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 bahwa permasalahan sektor perindustrian adalah kinerja dan daya saing produk industri yang belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan relokasi industri ke wilayah lain, ekonomi lokal yang belum berkembang, kelembagaan ekonomi yang lemah, serta dampak dari pandemi.

3) Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan dari bina kelompok pengrajin adalah untuk membantu para anggotanya dalam meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan mereka melalui kerjasama dan akses ke berbagai sumber daya yang berkualitas.



Gambar 2.175

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021
 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang 2024-2016 (diolah)

Berdasarkan gambar diatas bahwa cakupan dari bina kelompok pengrajin Kabupaten Tangerang dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Maka dari itu, diperlukan strategi optimalisasi pembinaan pelaku kelompok pengrajin.

G. Transmigrasi

Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang memiliki Program Transmigrasi Regional yang dinaungi oleh Dinas Tenaga Kerja urusan Transmigrasi. Kegiatan transmigrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan penduduk. Tabel dibawah ini merupakan jumlah dan lokasi penempatan transmigrasi.

Tabel 2. 67
Jumlah Transmigran Berdasarkan Daerah Penempatan Tahun 2015-2018

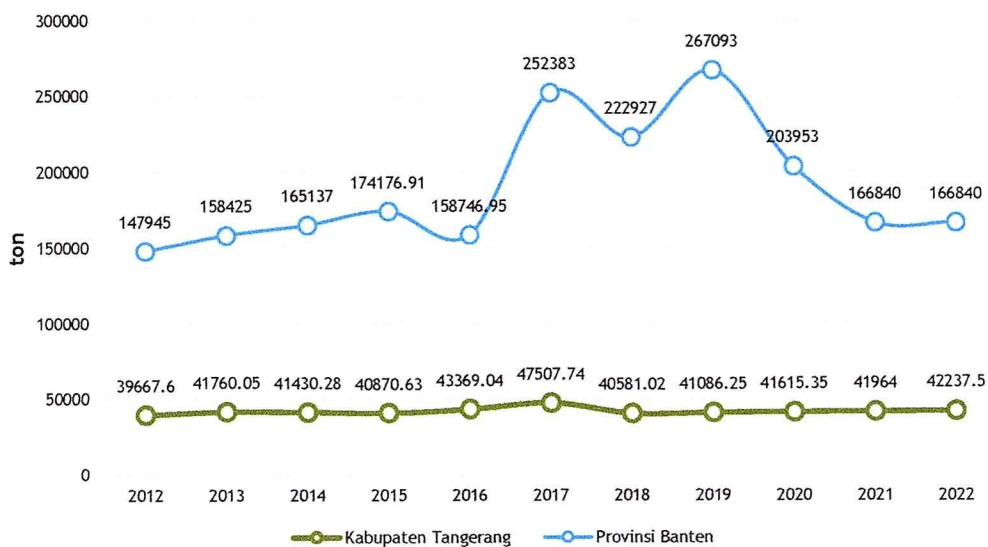
Daerah Penempatan	Jumlah		Keterangan
	KK	Jiwa	
UPT Tokala Atas Ds. Tokala Atas Kec Bungku Utara Kab, Morowali Utara Sulawesi Tengah	25	86	Tahun 2015
UPT Tokala Atas Ds. Tokala Atas Kec Bungku Utara Kab, Morowali Utara Sulawesi Tengah	10	40	Tahun 2016
UPT Kabera Ds. Bahoe Reko-Reko Kec Bungku Barat Kab Morowali Sulawesi Tengah	5	22	Tahun 2017
UPT Janja Kawasan Basidondo Ds. Janja Kec. Lampasio Kabupaten Toi-Toli Sulawesi Tengah	5	21	Tahun 2018
Jumlah	45	168	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabpten Tangerang dalam Dokumen Renstra Tahun 2019-2023

H. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah bagian dari industri yang termasuk di dalamnya kegiatan mendapatkan dan mengolah hasil laut dan air tawar di antara ikan, udang, dan hasil perikanan lain. Hasil produksi perikanan berasal dari kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum, serta kegiatan budidaya di tambak, kolam, sawah, jaring apung maupun budidaya laut. Perikanan tidak hanya berkontribusi sebagai sumber protein masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian.



Gambar 2.176
 Produksi Perikanan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun
 2012-2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Provinsi Banten Tahun 2012-2022

Produksi perikanan di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan sebesar hampir dua kali lipat di tahun 2017, sebesar 68014,48 ton. Namun, di tahun-tahun berikutnya angka tersebut mengalami penurunan dan mulai tahun 2020 terjadi pertumbuhan dengan angka yang tidak signifikan.

Produksi perikanan di Kabupaten Tangerang juga dikelompokkan berdasarkan jenis ikan sesuai lokasi tangkap. Meskipun data yang tersedia tidak lengkap selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data, terdapat beberapa jenis ikan yang berpotensi menjadi komoditas unggulan. Jenis ikan budidaya dan ikan perairan umum dengan angka produksi yang besar setiap tahunnya adalah bandeng, mujair, dan lele. Sementara itu, komoditi ikan laut dengan jumlah produksi tahunan yang tinggi di Kabupaten Tangerang adalah teri, kembang, kerang darah, selar, dan kerang bulu.

Tabel 2. 68
 Produksi Ikan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Ikan sesuai
 Lokasi Budidaya Tahun 2012-2022

Jenis Ikan	Jumlah Produksi (ton)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tambak (Air Payau)											
Bandeng	5659	6234,9	6402,9	6381		7697,63	7899,33	7555,84	7115,31		7409,3
Belanak	529,5	481	481	184,4		174,7	181,24	212,4	215,99		212,75
Udang Windu	17,7	24,8	26,7	25,1		30,54	33,34	31,71	27,35		26,51
Udang Putih	331	370,8	477	463		378,48	390,13	155,5	157,99		260,38
Udang Api Api	394	440,1	458,5	463,9		418,6	431,47	393,5	358,79		260,38
Mujair	1775	1953,5	1722	1671		2159,75	2097,35	2764,4	2743,2		2762,43
Udang Vaname/ Udang Lainnya	8,9	58,2	55,2	72,8		103,1	60,56	17,9	16,3		
Kerang Hijau											
Kerapu	5,5	13	13,4	14,6		24,5	27,11	26,33	26,76		21,98
Rumput Laut	140,8	576300	948,4	905		829,14	851,47	972,16	962,86		1014,52
Kakap						4,5	6,62	7,53	8,21		7,96
Kolam											
Mujair	595	628,5	593,5	586,4		614,6	549,64	652,81	845,69		822,41
Ikan Lainnya	68										
Mas	126	71,8	74,8	88,3		73,66	77,26	79,03	80,13		73,52
Nila	75	131	204,3	178,8		164,29	170,35	153,57	140,53		136,71
Patin	43	60	60	54,3		70,64	74,28	84,63	40,21		39,28
Gurame	3160	54	54	54,7		57,1	60,37	66,41	54,3		52,9
Lele		3867	4156,3	3852,2		6312,66	6439	6500,21	7318,79		7370,62
Jaring Apung											
Mujair				100		182,9	164	147	260		133,63
Ikan Lainnya											
Mas	708	125	67	66		71,6	73,4	73,77	84,69		73,43
Nila	1160	395	288	274,1		416,8	299	392,65	256,04		394,49
Budidaya Laut											
Kerang Hijau	3052,2			4848		6679,76	16147,3				
Nilem	3358										

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka Tahun 2012-2023

Tabel 2. 69
Produksi Ikan Perairan Umum di Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Ikan Tahun 2012-2022

Jenis Ikan	Jumlah Produksi (ton)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujair/Nil	32,42	23,04	37,32	27,85		25,36	18,86				
Ikan Lainnya	15,82	11,67	28,8	15,98				51,85	36,3		
Lele	24,58	14,69	22,6	17,95		16	14,36	56,15	30,77		
Tawes	10,77	7,02	11,37	8,94		6,5	6,93	45,09			
Gabus	9,86	7,5	11,15	8,9		8	7,91	22,54	12,92		
Sepat Siam	8,76	4,97	8,05	6,86		5,5	5,48	32,35	7,91		
Udang Lainnya	5,69	4,46	7,23	5,73		5,7	4,19				
Nilem							11,98				

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka Tahun 2012-2023

Tabel 2. 70
Produksi Ikan Laut di Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Ikan Tahun 2012-2022

Jenis Ikan	Jumlah Produksi (ton)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Peperek	660	655	2094,5	360		625	537,8	487,33	491,22		521
Manyung	1026	1085	285,7	1982		1100	950,9	860,93	870,04		879
Biji Nangka	432	432	1715,2	36,8		465	388,5	363,11	366,33		370
Bambang an	0	627,5	116,5			650	583,2	489,58	495,38		501
Kerapu	409	449	453,2	853,3		500	401,4	364,8	368,41		372
Kakap	310	288	249,6	263,6		305	254,8	235,89	239,36		242
Kurisi	385	258	711,7	517,5		270	236,6	213,59	216,47		219
Ekor Kuning	876	935,5	199,1	736,3		955	1033	916,21	926,24		936
Tiga Waja	270	316	616,2	80,8		220	300,2	257,44	260,18		263
Cucut	469	500	277,2	338,4		575,8	523,8	432,62	437,1		442
Pari	451	452	452,7	368,6		462	391,8	364,61	368,41		372
Selar	1452	1551	304,4	1815		1562	1672,5	2081,61	210,22		212
Kuwe	580	594	306,1	304,8		602	523,8	473,09	478,73		484
Tetengkek	638	628,5	387,2	309,8		619,9	755,1	999,02	1009,49		1020
Belanak	388	401	76,7	223,2		515,2	480,3	428,87	432,94		438
Teri	1610	1590	441,1	999,6		1457	1650,3	1761,21	1779,62		1799
Japuh	280	322	271,4	434,4		335	309,4	269,24	272,67		276
Tembang	477	485	1329,9	329,8		480	475,5	468,97	474,57		480
Kembung	1072	1120	2882,6	2163,7		1186	1179,3	1113,87	1126,05		1138
Tenggiri	902	906	266,8	903,6		909	806	722,1	730,58		738
Layur	613	635	236,9	381		612,9	548,9	498,76	503,71		509
Ikan Lainnya	783	783	177,8	865,2		702	850,6	983,33	2033,56		2055
Rajungan	663	568	219,8	3509,9		570	640,8	477,4	482,89		488

Jenis Ikan	Jumlah Produksi (ton)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udang Putih	588	541	1439,1	3,8		455	553,4	473,47	478,73		484
Udang Lainnya	650	614		149,8		655	538,5	486,58	1323,79		1338
Kerang Bulu	1386	1423	312	275		1035	1416,1	1604,58	1471,57		1487
Kerang Darah	1418	1665		444,5		1605	1510,2	1513,71	1529,85		1546
Cumi	903	956	408,5	946		1078	1112,4	1246,59	1436,19		1451

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka Tahun 2012-2023

2) Luas Lahan Perikanan

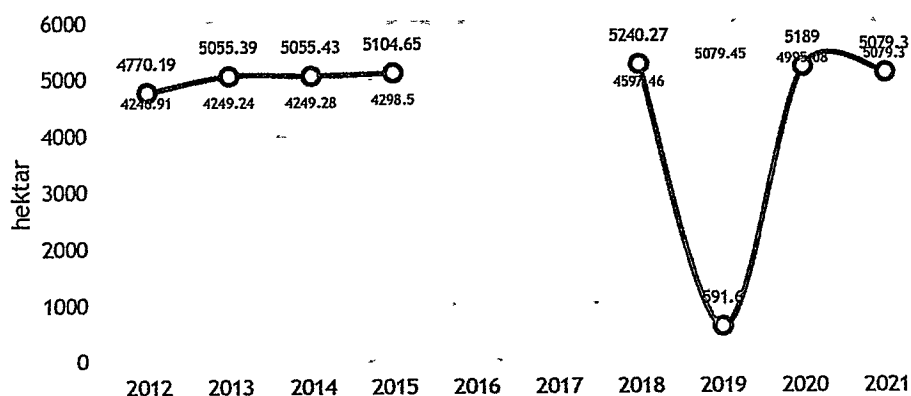
Secara umum, lahan perikanan di Kabupaten Tangerang terbagi ke dalam 2 jenis berdasarkan jenis usaha perikanan, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap dilakukan di area laut dengan garis pantai sepanjang 51,2 km, dan area perairan umum seperti rawa, situ, bekas galian pasir, maupun sungai. Sementara itu, perikanan budidaya dilakukan di area tambak, kolam, sawah, jaring apung, dan budidaya laut.

Tabel 2. 71

Luas Lahan Perikanan berdasarkan Jenis Usaha Perikanan di Kabupaten Tangerang tahun 2012-2022

Jenis Usaha Perikanan	Luas Lahan Perikanan (hektar)									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perikanan Tangkap										
Laut	-	-	-	-	N/A	51,2	51,2	51,2	51,2	-
Perairan Umum (Rawa & Situ, Bekas Galian Pasir, Sungai)	555,88	806,15	806,15	806,15	N/A	193,997	591,6	591,6	193,9	-
Perikanan Budidaya										
Tambak	4115,9	4115,93	4115,93	4115,93	N/A	-	4466,5	-	4466,5	4466,5
Kolam	131,01	130,97	131,01	130,97	N/A	-	130,97	-	130,97	130,9
Sawah	-	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-
Japung	-	0,74	0,74	50	N/A	-	-	-	397,617	481,981
Budidaya Laut	-	1,6	1,6	1,6	N/A	-	-	-	-	-
Jumlah	4770,19	5055,39	5055,43	5104,65	N/A	N/A	5240,27	591,6	5189	5079,3

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2013-2022 (diolah)



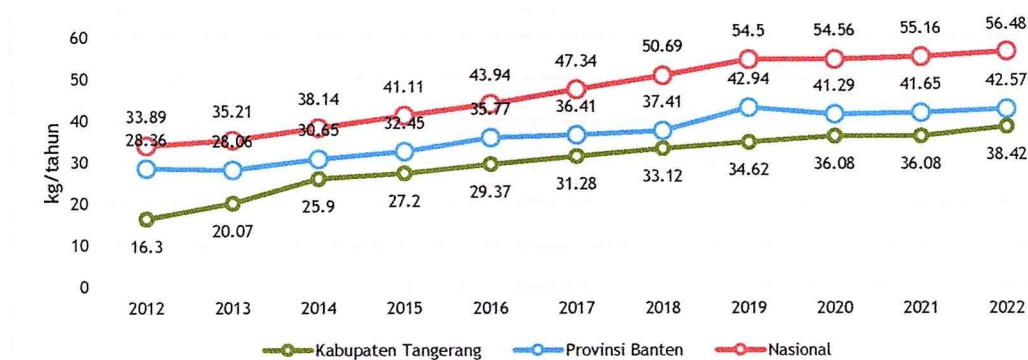
Gambar 2.177
Luas Lahan Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Tangerang
Tahun 2012-2021

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2013-2022 (diolah)

Luas lahan perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012 hingga 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 tidak ditemukan data yang mencatat luas lahan perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Sementara itu di tahun 2019 terjadi penurunan luas lahan perikanan yang sangat drastis karena tidak tercatatnya luas lahan perikanan budidaya. Kemudian di tahun 2020 angka luas lahan perikanan kembali naik dan cenderung stabil hingga tahun 2021.

3) Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun

Angka konsumsi ikan adalah nilai konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam kg per-kapita setiap tahun. Dalam 10 tahun, angka konsumsi ikan di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat juga naik. Namun, nilainya masih cukup jauh di bawah angka konsumsi ikan Provinsi Banten maupun target konsumsi ikan nasional sebesar 62,5 kg perkapita/tahun.



Gambar 2.178

Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2012-2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, Kementerian Kelautan dan Perikanan

4) Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Bina Kelompok Nelayan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam membantu dan memfasilitasi pengembangan kelompok masyarakat nelayan tradisional maupun modern, dengan tujuan mendapatkan manfaat dan penguatan posisi di pasar.



Gambar 2.179

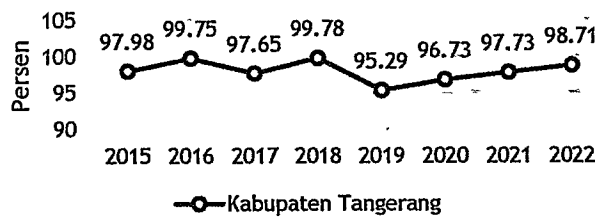
Cakupan Kelompok Bina Nelayan di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

Berdasarkan grafik di atas, cakupan bina nelayan bersifat fluktuatif dengan kecenderungan mengalami penurunan, terutama pada tahun 2014 dengan nilai 0% dan tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 22,71%. Pada tahun 2020, angka tersebut juga mengalami penurunan menjadi sebesar 24,07%. Hingga tahun 2022, peningkatan cakupan kelompok bina nelayan di Kabupaten Tangerang belum mampu mencapai angka tertinggi yang di tahun 2015. Penurunan tersebut menunjukkan melemahnya upaya yang dilakukan berkaitan dengan kesejahteraan nelayan.

5) Proporsi Tangkapan Ikan Produksi

Menurut Badan Pusat Statistik, proporsi tangkapan yang berada dalam batasan biologis aman merupakan persentase perbandingan antara jumlah total tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama. Batasan biologis aman adalah proporsi tangkapan ikan <100%. Sementara, angka tangkapan yang diperbolehkan per tahun sebesar 80% dari jumlah tangkapan lestari (*maximum sustainable yield – MSY*).



Gambar 2.180

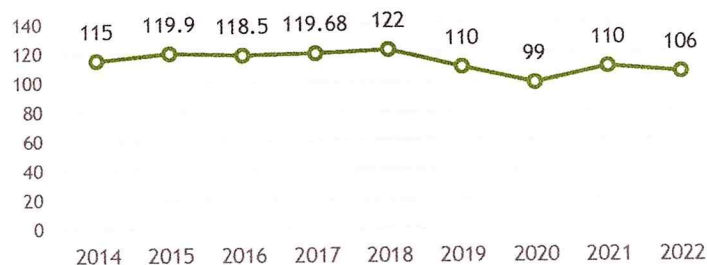
Proporsi Tangkapan Ikan Produksi di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

Berdasarkan grafik di atas, dalam kurun waktu 2015 hingga 2022, proporsi tangkapan ikan bersifat fluktuatif dengan rentang nilai perubahan yang cenderung kecil dan masih relatif stabil. Nilai yang cukup stabil menunjukkan bahwa telah ada upaya dan kesadaran mengenai kegiatan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan maupun penurunan yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang bersifat alami seperti perubahan lingkungan, perubahan suhu perairan, maupun interaksi antar spesies.

6) Nilai Tukar Nelayan

Nilai tukar nelayan merupakan persentase perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan. Angka yang ditunjukkan menjadi alar ukur kesejahteraan nelayan, dengan nilai yang rendah mengindikasikan bahwa sektor perikanan belum mampu menjadi sumber penghasilan berkelanjutan. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tukar nelayan adalah peningkatan aksesibilitas nelayan terhadap pasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas produk.



Gambar 2.181

Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

Data di atas menunjukkan adanya fluktuasi nilai tukar nelayan di Kabupaten Tangerang selama 8 tahun. Di tahun 2014 hingga 2018, terjadi peningkatan angka nilai tukar nelayan. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan permintaan dan harga ikan. Namun, di tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan drastis sebesar masing-masing 12 dan 11, yang diasumsikan terjadi akibat adanya Covid-19, fluktuasi harga komoditas, perubahan permintaan, maupun faktor ekonomi lain. Sejak tahun 2021, angka nilai tukar nelayan kembali naik dan cukup stabil, menunjukkan telah adanya upaya untuk memulihkan kondisi sebelumnya.

7) Armada Penangkapan Ikan

Armada penangkapan ikan merupakan sarana yang digunakan nelayan/rumah tangga perikanan dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan. Jenis armada yang terdapat di Kabupaten Tangerang adalah kapal motor dengan beberapa jenis yaitu kapal motor <5 GT (*gross-tonnage*), kapal motor 5-10 GT, dan kapal motor >10 GT. Dari tahun ke tahun, jenis kapal motor yang mendominasi sebagai armada penangkapan ikan adalah kapal motor <5 GT.



Gambar 2.182

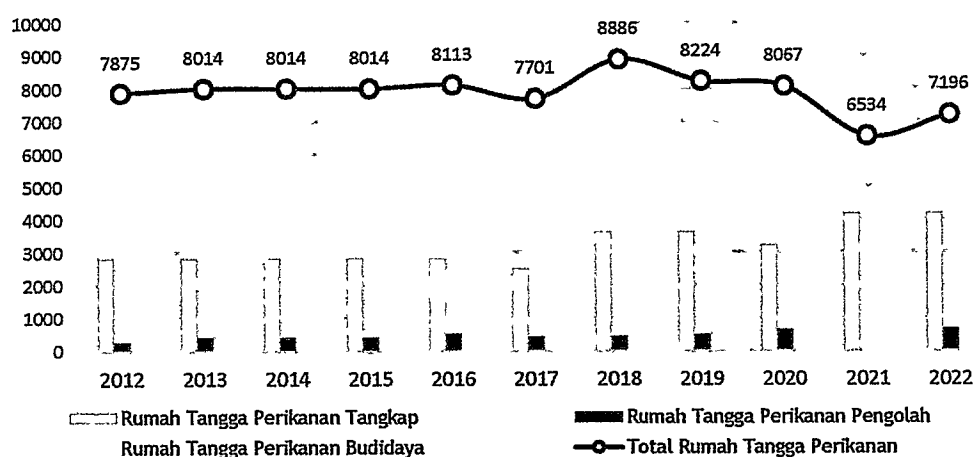
Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

Pada tahun 2012-2015 terjadi peningkatan jumlah armada penangkapan ikan dari 2.671 unit hingga mencapai 3.467 unit kapal. Hal ini diasumsikan memiliki hubungan paralel dengan tingkat konsumsi ikan dan permintaan yang naik di tahun-tahun tersebut. Di tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan jumlah unit cukup sebesar masing-masing 751 unit dan 379 unit. Namun, mulai tahun 2018, jumlah kapal kembali naik dan bersifat stabil.

8) Rumah Tangga Perikanan

Rumah tangga perikanan adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan budidaya/binatang air/tanaman air dengan tujuan mendapatkan profit melalui penjualan sebagian/seluruh hasilnya.



Gambar 2.183

Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2022

Jumlah rumah tangga perikanan di Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif. Pada rentang 2012 hingga 2016, terjadi peningkatan jumlah rumah tangga perikanan dengan jumlah yang kecil. Kemudian di tahun 2017, angka tersebut mengalami fluktuasi yang signifikan hingga tahun 2022. Hal tersebut diasumsikan terjadi karena perubahan preferensi pekerjaan oleh masyarakat, perubahan ekonomi, maupun adanya perluasan sektor lain yang dinilai lebih prospektif. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perikanan di Kabupaten Tangerang memiliki nilai yang sangat kecil, sebesar 4,9%, bersama dengan bidang pertanian dan kehutanan.

2.4.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang

A. Tata Kelola Pemerintahan

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan suatu penilaian atas upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pada tahun 2022, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang adalah 62,74 dengan kategori BB/baik, perlu sedikit perbaikan. Nilai tersebut meningkat 7% dari tahun 2020 yang capaian IRB-nya adalah 58,39 dengan predikat CC/Cukup memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.

Tabel 2. 72

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2021	Nilai Tahun 2022
A	Komponen Pengungkit				
	I. Pemenuhan	20	9,37	10,29	11,16
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10	7,26	3,97	6,88
	III. Reform	30	11,11	14,17	14,79

telah ditetapkan dengan Perda										
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

- 2) **Konsistensi Penjabaran Dokumen Perencanaan**
 Perencanaan pembangunan memiliki sistem hierarki tertentu. Hierarki tersebut dapat dilihat dari skala dan rentang tahun perencanaannya. Dengan adanya hierarki tersebut maka perencanaan yang hierarkinya ada di bawah harus memiliki kekonsistensi terhadap hierarki perencanaan lain di atasnya.

Tabel 2. 74
 Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD	99,07%	100%	100%	91,87%	95,12%
Konsistensi Program RKPD dalam APBD	99,07%	100%	100%	91,87%	95,12%

Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026 (diolah)

Berdasarkan data diatas bahwa Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD serta program RKPD dalam APBD pada tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif dan di atas 90%. Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh kegiatan mandatori seperti DAK yang banyak menggunakan program diluar yang sudah dialokasikan pada RKPD, adanya kebijakan dalam penganggaran yang baru muncul pada saat terbitnya Pedoman Penyusunan APBD tahun bersangkutan, serta adanya kegiatan mandatori seperti DAK yang sudah ditentukan sub kegiatan, kegiatan dan programnya sehingga menyesuaikan dengan yang telah disusun dalam RKPD.

C. **Keuangan**

Urusan keuangan dapat dinilai dari nilai SAKIP dan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF). Penilaian SAKIP bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) (Kemenpan RB, 2023). Sementara itu, IKF digunakan untuk menilai tingkat kemandirian daerah dalam menyuplai fiscal (sumber keuangannya) sendiri.

Pada tahun 2022, nilai SAKIP Kabupaten Tangerang adalah 72,52 (meningkat 17% dari tahun 2018). Nilai tersebut berpredikat BB (sangat baik) yang mengartikan bahwa dua dari tiga unit kerja pemerintahan telah memiliki akuntabilitas yang sangat baik. Di tahun yang sama, capaian Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Tangerang adalah 0,505. Nilai tersebut berada pada predikat mandiri ($0,50 \leq IKF < 0,75$). Selain dua indikator tersebut, terdapat indikator lain yang digunakan dalam meninjau urusan keuangan.

1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk menilai pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah, diperlukan penilaian dan/atau opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK menjadi salah satu parameter kualitas pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga maupun di level pemerintah daerah. Berdasarkan capaian indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan pada tahun 2013-2022 selalu WTP.

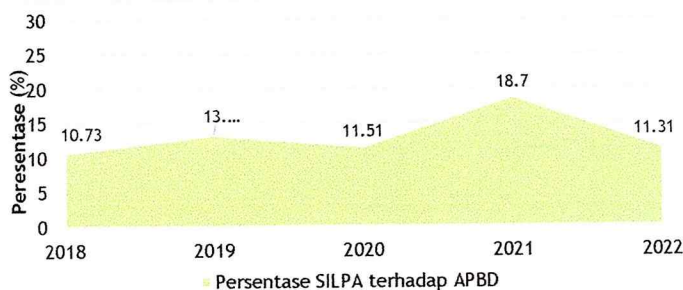
Tabel 2. 75
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022

Indikator	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

2) Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam anggaran. Persentase SILPA terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menunjukkan seberapa besar sisa anggaran pemerintah setelah penerimaan dan pengeluaran dikurangi.



Gambar 2.184
Persentase SILPA terhadap APBD Tahun 2018-2022
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Gambar diatas menunjukkan grafik persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tangerang tahun 2018-2022. Berdasarkan gambar diatas bahwa persentase SILPA terhadap APBD dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif dan menurun dari tahun 2021-2022.

3) Persentase Belanja Pendidikan dan Kesehatan

Urusan-urusan tertentu dalam perencanaan daerah telah memiliki arahan penganggaran minimal. Anggaran belanja pendidikan adalah minimal 20% dan anggaran belanja kesehatan adalah minimal 10%.

Tabel 2. 76
Indikator Kinerja Daerah Urusan Keuangan Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023

Keterangan	Tahun
------------	-------

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Belanja Pendidikan (20%)	22,31	21,82	23,05	22,46	22,77	25,20
Persentase Belanja Kesehatan (10%)	18,49	20,95	20,59	21,11	21,27	22,86
Persentase Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (0,16%)	0,08	0,07	0,01	0,16	0,07	0,10
Persentase Belanja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (0,50%)	0,47	0,52	0,37	0,43	0,50	0,52

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang Periode Tahun 2018-2023

Berdasarkan data di atas, persentase belanja pendidikan dalam enam tahun terakhir selalu di atas *mandatory spending* (20%). Belanja kesehatan Kabupaten Tangerang, walaupun mengalami tren yang fluktuatif, selama enam tahun terakhir telah memenuhi arahan alokasi minimal (10%). Alokasi Belanja Pendidikan dan pelatihan pegawai pemerintah Kabupaten Tangerang pada tahun anggaran 2022 dan 2023 belum memenuhi anggaran minimal (0,16%) dari Belanja APBD. Alokasi belanja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 dan 2023 telah memenuhi *mandatory spending* (0,50%).

4) Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung



Gambar 2.185
Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Analisis proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung bertujuan untuk melihat manajemen keuangan internal pemerintah daerah dalam pengendalian biaya dan anggaran. Dalam 10 tahun terakhir, tren menunjukkan bahwa rasio belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung.

5) Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota, dan Desa

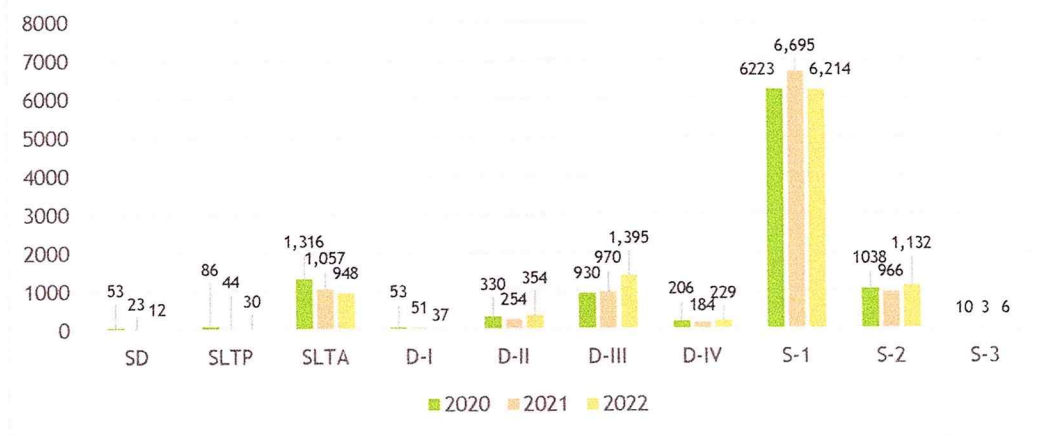
Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah. Grafik di bawah menunjukkan bahwa persentase belanja bagi hasil kabupaten/kota cenderung meningkat namun menurun di tahun 2018-2019.



Gambar 2.186
 Persentase Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota, dan Desa di Kabupaten
 Tangerang Tahun 2013-2019
 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

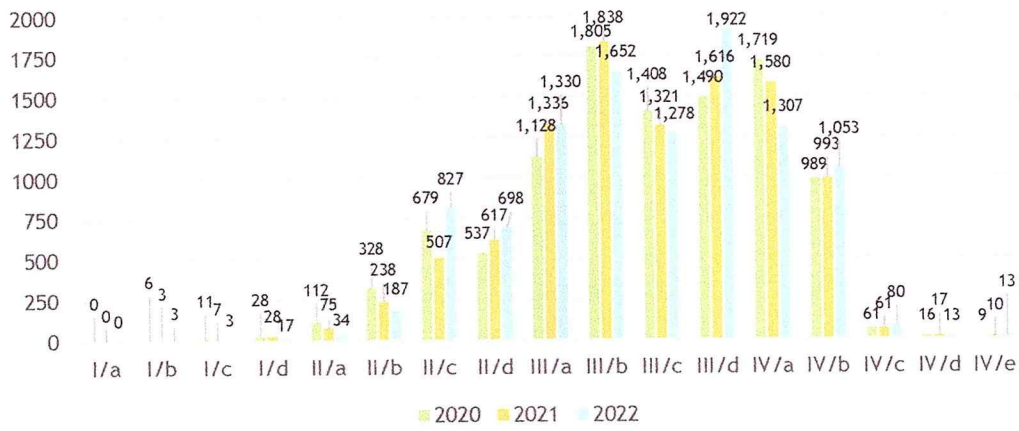
D. Kepegawaian

Faktor pendukung yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sumber daya manusia aparatur pemerintah. Kualitas SDM aparatur menjadi hal penting dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah.



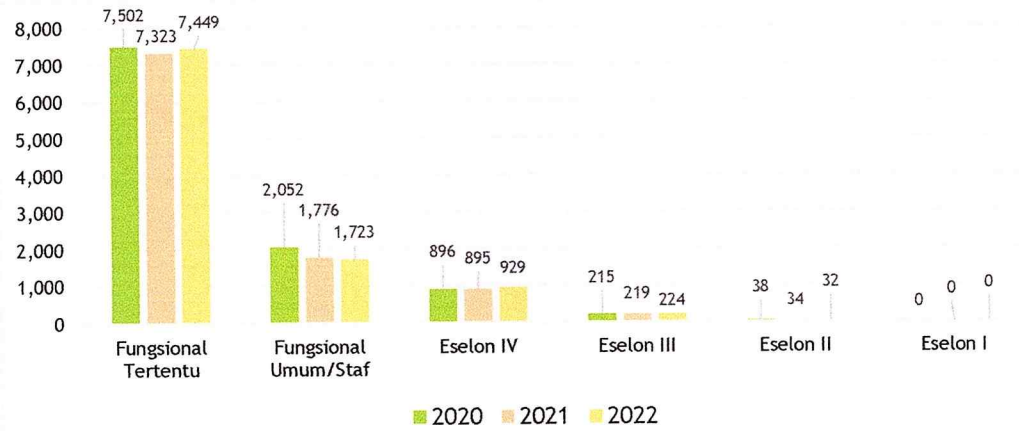
Gambar 2.187
 ASN Kabupaten Tangerang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2022
 Sumber: Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2023

Gambar di atas merupakan grafik ASN menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan ASN didominasi oleh jenjang pendidikan S-1 yaitu sebanyak 6.124 ASN pada tahun 2022.



Gambar 2.188
ASN Kabupaten Tangerang Menurut Golongan Tahun 2020-2022
Sumber: Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2023

Gambar di atas merupakan grafik ASN di Kabupaten Tangerang menurut golongan. Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa setiap tahunnya ASN Kabupaten Tangerang didominasi oleh ASN golongan III/b, III/d, dan IV/a.



Gambar 2.189
ASN Kabupaten Tangerang Menurut Jabatan Tahun 2020-2022
Sumber: Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2023

Gambar di atas merupakan grafik ASN di Kabupaten Tangerang menurut jabatan. Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa setiap tahunnya, jabatan fungsional tertentu memiliki jumlah yang lebih banyak dari jabatan lainnya.

Dari berbagai kategori di atas, PNS Fungsional Kabupaten Tangerang yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) berjumlah 351 atau sekitar 82%, sedangkan pegawai yang belum bersertifikat sebanyak 77 pegawai atau sebanyak 17%. Penilaian umum terhadap PNS dapat dilihat dari Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit. Berikut adalah capaian Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 77
Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 dan 2022

Indikator	Tahun	
	2021	2022
Indeks Profesionalitas ASN	41,44	56,80

Indeks Sitem Merit	276,00	296,50
--------------------	--------	--------

Sumber: Laporan Akhir Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang 2023

Pada tahun 2022, Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Tangerang adalah 56,80. Capaian tersebut meningkat 15,38 dari tahun 2021 yang capaian indeksnya adalah 41,44. Meskipun mengalami peningkatan, Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Tangerang masih berada pada kategori sangat rendah (<60). Capaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2022 adalah 296,50. Capaian tersebut meningkat 20,5 dari tahun sebelumnya dan masuk pada kategori III/baik (250-324). Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Capaian Indeks Sitem

E. Penelitian dan Pengembangan

1) Indeks Inovasi Daerah

Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahana untuk meningkatkan inovasi daerah. Inovasi daerah diukur melalui Indeks Inovasi daerah yang dihitung oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak Tahun 2019.

Tabel 2. 78
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2022

Indikator	2020		2021		2022	
	Skor Indeks	Kategori	Skor Indeks	Kategori	Skor Indeks	Kategori
Kota Serang	232	Kurang Inovativ	49,71	Inovativ	60,56	Sangat Inovativ
Kota Tangerang Selatan	3.793	Sangat Inovativ	51,66	Inovativ	59,88	Inovativ
Kabupaten Tangerang	2.274	Sangat Inovativ	41,16	Inovativ	54,70	Inovativ
Kabupaten Lebak	1.390	Sangat Inovativ	46,46	Inovativ	53,88	Inovativ
Kota Tangerang	10.762	Sangat Inovativ	62,7	Sangat Inovativ	53,23	Inovativ
Kabupaten Pandeglang	1.831	Sangat Inovativ	50,83	Inovativ	47,56	Inovativ
Kabupaten Serang	1.839	Sangat Inovativ	35,77	Inovativ	41,44	Inovativ
Kota Cilegon	340	Kurang Inovativ	17,16	Kurang Inovativ	37,06	Inovativ
Provinsi Banten	8.191	Sangat Inovativ	60,52	Sangat Inovativ	50,41	Inovativ

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri

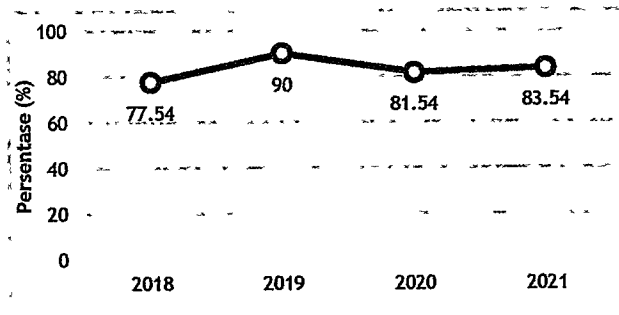
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2022 adalah 54,70 dengan kategori Inovativ. Jika dibandingkan dengan semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tangerang berada di urutan ke 3. Pada tahun yang sama, Indeks Inovasi Daerah memiliki skor yang lebih besar dari skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Banten.

F. Pengawasan

1) Tindak Lanjut Temuan BPK

Tindak lanjut temuan BPK merupakan proses untuk pengentasan permasalahan dalam pemeriksaan di BPK dengan tujuan untuk memastikan permasalahan telah teratasi dan mencegah permasalahan tersebut terulang kembali. Gambar diatas menunjukkan persentase tindak lanjut temuan BPK di Kabupaten Tangerang yang dalam tren lima tahun terakhir cenderung

fluktuatif. Adanya peningkatan di tahun 2020-2021 menunjukkan peran APIP semakin optimal dalam menjalankan tugasnya.



Gambar 2.190

Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

2) Nilai Maturitas SPIP

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat dijadikan alat ukur pada kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam mengukurnya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan besar dalam mensukseskan usaha pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2. 79

Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Maturitas SPIP	1,3	1,3	3,06	3	3
Nilai Kapabilitas APIP	n/a	n/a	n/a	3	3

Sumber: RPJM Kabupaten Tangerang 2019-2023, RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026, dan : Laporan Akhir Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang 2023

Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3 (BPKP, 2023). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 nilai maturitas SPIP dan kapabilitas APIP Kabupaten Tangerang adalah 3 dengan kategori terdefinisi. Walaupun dapat dinilai baik, nilai tersebut berada di KKM dan masih dapat ditingkatkan.

G. Layanan Masyarakat

1) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. IPP diukur berdasarkan enam aspek, yaitu (1) kebijakan pelayanan; (2) profesionalisme SDM; (3) sarana dan prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); (5) konsultasi dan pengaduan; serta (6) inovasi pelayanan. Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah sebesar 4,12 (A-) dalam kategori 'Sangat Baik' (4,10-4,50). Capaian tersebut meningkat 0,21 dari tahun 2021 yang capaian indeksnya adalah 3,91 dengan kategori 'Baik' (3,51-4,00).

Tabel 2. 80

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang Tahun 2021 dan 2022

Indikator	Tahun	
	2021	2022

Indeks Pelayanan Publik	3,91	4,12
-------------------------	------	------

Sumber: Laporan Akhir Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang 2023

Selain Indeks Pelayanan Publik, kinerja bidang layanan masyarakat juga dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM). Capaian IKM Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 adalah 86,36 dengan kategori sangat baik. Selama 6 tahun ke belakang, angka tersebut mengalami tren peningkatan.

Tabel 2. 81

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	71,2	76,3	75,0	81,4	83,6	86,3
	5	9	5	5	6	6

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023

H. Sekretariat Dewan

- 1) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Penyediaan RKT ini penting untuk memastikan bahwa Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. RKT juga akan membantu Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan capaian pada tahun 2018 hingga 2022 adalah 'ada'.

- 2) Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Penyusunan dan integrasi program-program kerja DPRD dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKPD) merupakan hal yang penting agar program-program kerja DPRD memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur. RPJM dan RKPD membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memastikan bahwa program-program kerja DPRD dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan efektif. Berdasarkan capaian pada tahun 2018 hingga 2022 adalah 'ada'.

- 3) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memastikan bahwa program-program yang akan dilaksanakan sudah terintegrasi dan terukur. Hal ini akan membantu DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal adanya temuan bahwa program-program DPRD belum terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD, maka hal tersebut dapat ditindak lanjuti dengan memastikan bahwa program-program DPRD sudah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD. Tindak lanjut ini akan membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2009. Visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam dokumen tersebut adalah *“Kabupaten Tangerang Berdaya Saing didukung Masyarakat Madani”*.

Berdasarkan analisis capaian sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025 yang diwujudkan dalam realisasi capaian kinerja jangka menengah diperoleh hasil, yaitu: (1) Periode 2008-2013 = 115% (Sangat Memuaskan); (2) Periode 2013-2018 = 140,95% (Sangat Memuaskan); (3) Periode 2018-2023 = 105,32% (Sangat Memuaskan). Adapun capaian kinerja indikator kinerja makro Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 82
Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang

Indikator Pembangunan	Wilayah	Kondisi Awal (2023)	Gambaran Kondisi
Indeks Pembangunan Manusia	Kab. Tangerang	75,56	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan besaran yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59 persen, dengan capaian IPM pada tahun 2012 sebesar 68,83, dan meningkat menjadi 75,56 di tahun 2023. Namun kondisi IPM di Kabupaten Tangerang selalu di bawah angka pencapaian Provinsi Banten dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
	Prov. Banten	75,77	
	Nasional	74,39	
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Kab. Tangerang	5,18	Perekonomian Kabupaten Tangerang yang didukung oleh sektor industri dan perdagangan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, PDRB ADHK Kab. Tangerang sebesar 108.570,43 miliar rupiah dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,18% dan capaian tersebut diatas provinsi dan nasional. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang berada di atas nasional, tetapi cenderung mengalami perlambatan.
	Prov. Banten	4,81	
	Nasional	5,05	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Kab. Tangerang	6,94	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun (membaik), yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,68% per tahun. tingginya angka pengangguran Kab. Tangerang yaitu karakter investasi padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja serta
	Prov. Banten	7,97	
	Nasional	5,45	

Indikator Pembangunan	Wilayah	Kondisi Awal (2023)	Gambaran Kondisi
			ketidakmampuan kompetensi SDM penduduk Kab, Tangerang untuk mengakses tenaga kerja.
Persentase Penduduk Miskin (%)	Kab. Tangerang	6,93	Capaian Persentase Penduduk Miskin dalam 10 tahun terakhir cenderung menurun (membaik). Namun, dalam lima tahun terakhir Persentase Penduduk Miskin Kab. Tangerang meningkat dan di atas Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, Persentase Penduduk Miskin Kab. Tangerang tertinggi ketiga di mana yang tertinggi adalah Kabupaten Pandeglang
	Prov. Banten	6,17	
	Nasional	9,36	
Indeks Gini	Kab. Tangerang	0,286	Indeks Gini Kab. Tangerang tahun 2023 sebesar 0,286 yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah. Tren dalam 10 tahun terakhir Indeks Gini Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan lebih rendah dibanding Indeks Gini Provinsi Banten dan nasional.
	Prov. Banten	0,368	
	Nasional	0,388	

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Secara umum capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan dalam 119 periode 2005-2022 mengalami tren positif dan diatas angka rata-rata Provinsi Banten dan Nasional. Akan tetapi, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditargetkan mencapai 80 pada tahun 2025 masih jauh dari pencapaian. Peningkatan capaian Pendapatan Per Kapita periode 2005-2022 termasuk meningkat (*on the track*) dan perlu dipertahankan. Capaian indikator Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan periode 2005-2022 adalah membaik (moderat), tetapi masih berada dibawah capaian rata-rata Provinsi Banten. Faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 83
Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Keberadaan sumber daya manusia aparatur yang terus dikembangkan kompetensinya untuk memiliki kompetensi yang tepat dalam memberikan pelayanan publik yang prima	Terbentuknya daerah otonom baru Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya secara geografis merupakan wilayah Kabupaten Tangerang, mempengaruhi rencana dan implementasi agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping itu juga berakibat pada pelaksanaan pelayanan publik yang tidak optimal pada fase transisi pasca berdirinya Kota Tangerang Selatan.
Fasilitas sarana prasarana yang terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan	Hambatan penyalarsan kebijakan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Hal ini antara lain seperti kebijakan relokasi industri ke wilayah lain, ketersediaan transportasi publik yang belum memadai, hingga kebijakan alih fungsi lahan yang belum selaras dengan kebutuhan sektor pertanian

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat mendukung digitalisasi layanan publik yang dapat dimanfaatkan baik bagi aparatur dan juga masyarakat pengguna layanan Pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap meningkatnya keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Kemandirian fiskal merupakan salah satu tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah	Kecepatan merespon berbagai permasalahan publik yang memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat yang selama ini belum optimal. Hal ini menjadi tantangan terhadap perkembangan ekonomi lokal, termasuk kemudian menjadi penyebab minimnya inovasi pengembangan sektor strategis di Kabupaten Tangerang. Dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, permasalahan publik juga dapat dilihat dari kondisi dimana penduduk lokal kalah bersaing dengan penduduk pendatang dalam akses ke lapangan kerja
	Kompetensi sumber daya manusia aparatur belum secara keseluruhan memiliki kompetensi yang sesuai dalam mendukung kebutuhan organisasi. Disamping itu, persebaran kualitas sumber daya manusia aparatur juga belum merata. Misalnya di sektor pendidikan, jumlah ketersediaan guru di Pemerintah Kabupaten Tangerang juga belum merata. Ketersediaan tenaga kesehatan juga masih terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan untuk <u>melayani masyarakat secara optimal</u>
	Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintah daerah yang disebabkan pergantian kepala daerah dan restrukturisasi kelembagaan. Dampak dari hal tersebut salah satunya yaitu manajemen sumber daya manusia <u>aparatur yang belum optimal</u>
	Terjadinya bencana non-alam pandemi COVID19 pada awal 117 tahun 2020 hingga pada saat laporan ini disusun masih berlangsung situasi pandemi, menjadi hambatan dalam mengeksekusi agenda-agenda pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi dan refocusing anggaran pembangunan untuk sektor kesehatan terutama pada periode tahun 2020-2021. Pada sektor informal, pandemi COVID19 menyebabkan banyak perusahaan tutup dan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja <u>karyawan dan meningkatnya angka pengangguran</u>

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

Oleh karena itu, peningkatan IPM, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran perlu dijadikan sebagai isu strategis pembangunan dan program prioritas dalam penyusunan dokumen perencanaan kedepan, baik baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek dengan target yang realistis.

Berdasarkan penjabaran di atas, berikut beberapa kesimpulan mengenai evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025:

- 1) Dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025 disusun kurang mengikuti kaidah perundang-undangan yaitu UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Dokumen kurang mampu menjelaskan target capaian indikator kinerja yang ingin dicapai di akhir periode
- 2) Dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009 sehingga tidak sesuai dengan periode RPJPN yang dimulai tahun 2005-2025 karena adanya pemekaran daerah otonom Kota Tangerang Selatan dan pergantian kepala daerah. Kemudian, dokumen RPJMD yang tersedia hanya periode 2008-2013, 2013-2018 dan 2018-2023, sementara dokumen periode sebelumnya (2008) tidak tersedia
- 3) Strategi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tidak dapat diukur dampak terhadap pembangunan karena tidak ada *baseline* dan target capaian yang ditetapkan. Hasil evaluasi terhadap capaian

- Indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah menunjukkan peningkatan dari angka yang ditargetkan di awal
- 4) Secara garis besar, capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan dalam periode 2005-2022 mengalami tren positif dengan rata-rata di atas provinsi dan nasional. Hanya Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditargetkan sebesar 80 di tahun 2025, masih jauh dari pencapaian
 - 5) Predikat capaian indikator Pendapatan Per Kapita periode 2005-2022 adalah meningkat (*on the track*) dan perlu dipertahankan. Sementara predikat Capaian indikator Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan periode 2005-2022 adalah meningkat (moderat) tetapi berada di bawah capaian rata-rata provinsi.
 - 6) Capaian indikator pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mengalami penurunan akibat kondisi perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19

Sementara itu, rekomendasi yang diberikan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan RPJPD Kabupaten Tangerang ke depan perlu mengikuti peraturan perundang-undangan dan kaidah yang berlaku. Hal ini mengingat dokumen RPJPD memiliki posisi sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen kerangka kelembagaan dan regulasi jangka panjang dalam pelaksanaan pembangunan.
- 2) Penyusunan RPJPD Kabupaten Tangerang ke depan, perlu memerhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan target indikator capaian melalui *cascading* sasaran dan indikator terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan yang signifikan pada masing-masing strategi dan arah kebijakan sesuai potensi dan karakteristik daerah.
- 3) Peningkatan IPM, penurunan angka kemiskinan, dan angka pengangguran perlu dijadikan isu strategis dan program prioritas dalam penyusunan dokumen perencanaan ke depan dalam periode jangka pendek hingga panjang, dengan target yang realistis.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Proyeksi Kependudukan

Proyeksi penduduk dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan penduduk pada 20 tahun mendatang. Proyeksi penduduk berguna untuk memperkirakan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk beserta dengan ketersediaan fasilitas layanan pada tahun mendatang.

Badan Pusat Statistik Nasional mengeluarkan publikasi Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020). Selain itu, pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Bappeda bekerja sama dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Banten dan perangkat daerah terkait, pada tahun 2021 telah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2046. Dokumen ini menjadi pedoman dan acuan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam menyelenggarakan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Tangerang. Dokumen tersebut mempertimbangkan analisis situasi kependudukan yang dilihat berdasarkan aspek 5 pilar pembangunan kependudukan, yaitu: kuantitas penduduk, kualitas penduduk, kondisi keluarga, persebaran dan mobilitas penduduk, serta data dan informasi kependudukan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi acuan dalam perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Tangerang.

Perhitungan proyeksi penduduk menggunakan metode kohort dengan pendekatan deterministik. Proyeksi penduduk dengan metode kohort dilakukan dengan mendetailkan jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang

berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Berikut jumlah penduduk dan hasil perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 84
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2023

Kecamatan	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Balaraja	106,02	108,93	109,84	117,38	120,15	121,24	124,13
Jayanti	57,18	58,97	60,14	65,17	65,72	66,08	70,73
Tigaraksa	126,89	132,99	138,13	150,77	159,54	164,08	163,53
Jambe	41,57	43,33	44,97	49,58	52,32	53,68	55,65
Cisoka	73,62	76,75	79,77	87,14	98,29	100,45	97,59
Kresiek	58,88	59,45	61,59	66,58	68,76	69,68	71,80
Kronjo	57,5	50,85	51,81	59,31	62,37	63,20	65,60
Mauk	77,99	78,85	79,51	85,06	86,35	87,37	91,38
Kemiri	41,31	40,7	42,81	47,03	48,83	49,75	50,98
Sukadiri	54,54	55,59	57,06	61,27	64,57	65,85	66,68
Rajeg	129,39	137,27	141,48	160,78	197,62	205,1	188,21
Pasar Kemis	224,18	235,26	233,81	249,22	277,21	281,6	255,35
Teluknaga	127,8	129,06	135,68	154,53	163,25	166,05	167,98
Kosambi	103,08	102,26	99,3	107,26	115,21	115,62	111,71
Pakuhaji	100,01	101,36	104,86	116,03	120,62	122,55	127,33
Sepatan	88,4	90,76	93,34	103,72	119,31	122,33	112,29
Curug	145,7	152,01	152,41	165,67	175,69	177,01	176,62
Cikupa	183,27	188,68	189,64	202,37	208,21	208,95	209,14
Panongan	98,61	104,1	108,37	118,69	134,31	138,63	130,00
Legok	99,72	101,3	106,06	115,94	120,5	123,00	124,32
Pagedangan	84,86	86,77	88,65	98,59	109,16	110,76	111,22
Cisauk	70,87	72	74,25	82,5	93,92	97,38	91,44
Sukamulya	60,18	60,98	61,84	67,94	70,33	71,59	74,31
Kelapa Dua	144,94	148,82	151,51	160,8	169,26	169,87	167,55
Sindang Jaya	76,16	77,73	80,99	87,74	92,63	94,37	95,58
Sepatan Timur	80,48	83,38	86,99	97,35	108,19	111,17	105,99
Solear	74,67	75,06	79,6	88,27	97,88	100,58	101,97
Gunung Kaler	45,7	43,23	45,66	50,69	51,42	51,89	56,16
Mekar Baru	34,86	32,24	34,91	40,25	41,93	42,66	44,15
Jumlah	2.668,37	2.728,65	2.794,97	3.057,6	3.293,53	3.352,47	3.309,37

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka 2017-2024

Tabel 2. 85
Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang (5 Tahunan) Tahun 2025-2045

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2025**	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Balaraja	0,027	126,45	125,02	127,67	129,07	124,11
Jayanti	0,029	73,47	75,75	80,70	69,01	64,26
Tigaraksa	0,053	169,24	174,39	186,16	185,48	184,50
Jambe	0,052	59,06	64,22	72,62	60,44	57,37
Cisoka	0,064	103,25	112,57	126,27	111,20	111,03
Kresiek	0,034	74,47	76,71	79,82	79,21	75,12
Kronjo	0,019	69,23	72,76	80,76	55,94	46,77
Mauk	0,023	94,62	96,65	100,13	103,33	101,19
Kemiri	0,038	52,88	54,15	57,88	60,11	59,11
Sukadiri	0,038	69,70	73,00	76,92	82,52	82,32
Rajeg	0,097	205,43	242,81	290,66	198,70	189,59
Pasar Kemis	0,047	255,33	246,18	231,43	307,96	321,14

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2025**	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Teluknaga	0,054	174,41	179,12	192,87	178,09	165,71
Kosambi	0,023	113,03	109,98	108,08	77,28	65,06
Pakuhaji	0,041	133,20	139,91	151,89	143,61	138,68
Sepatan	0,067	116,17	118,47	126,88	122,77	116,94
Curug	0,04	181,35	181,86	187,63	162,08	145,59
Cikupa	0,027	209,65	203,67	196,19	210,42	208,95
Panongan	0,071	135,65	145,34	153,86	171,22	183,85
Legok	0,043	128,06	132,95	135,21	168,22	181,78
Pagedangan	0,055	118,88	135,00	148,15	134,09	139,61
Cisauk	0,066	96,37	105,77	113,49	126,97	138,16
Sukamulya	0,035	77,84	84,45	87,44	109,63	120,84
Kelapa Dua	0,032	171,28	174,16	162,44	185,55	185,82
Sindang Jaya	0,044	99,58	106,21	110,68	161,82	181,71
Sepatan Timur	0,067	110,44	117,82	122,52	83,85	87,28
Solear	0,061	110,47	129,88	149,36	140,68	153,21
Gunung Kaler	0,026	59,38	65,95	69,58	72,03	75,53
Mekar Baru	0,041	46,25	50,37	52,58	63,72	69,70
Jumlah	0,047	3.435,16	3.595,11	3.735,03	3.754,99	3.774,93

Sumber: Hasil Olahan, 2024

A. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

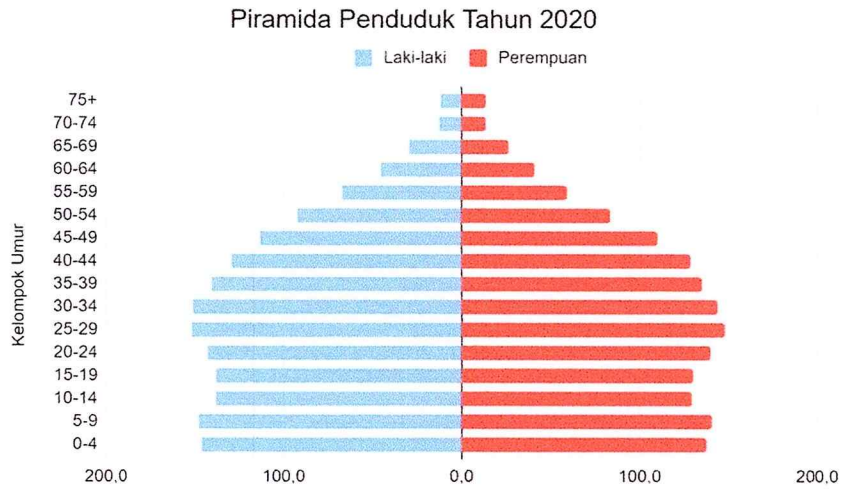
Tabel 2. 86

Proyeksi Penduduk (Jiwa) menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tangerang (5 Tahunan) Tahun 2020-2045

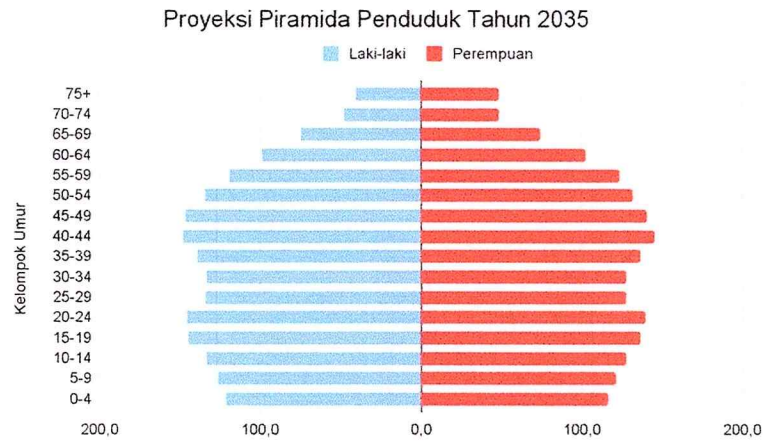
Kelompok Umur	Tahun					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	283.330	261.570	247.310	237.360	236.300	235.240
5-9	288.460	282.910	261.140	247.340	245.770	244.210
10-14	267.500	288.480	282.270	261.140	259.595	258.040
15-19	268.230	266.740	287.240	281.630	281.660	281.700
20-24	282.860	266.070	263.890	285.470	287.175	288.880
25-29	299.850	280.600	262.400	262.020	261.605	261.190
30-34	294.890	298.260	277.540	261.180	259.450	257.710
35-39	276.060	293.080	295.150	275.920	274.505	273.090
40-44	258.270	273.890	290.020	292.910	293.700	294.480
45-49	223.330	255.280	270.280	286.820	288.590	290.370
50-54	175.390	218.810	250.020	265.260	267.140	269.010
55-59	127.020	169.560	211.750	242.570	246.290	250.010
60-64	86.130	120.210	160.840	201.600	206.710	211.820
65-69	55.640	78.700	110.330	148.340	153.065	157.790
70-74	25.290	47.740	68.100	96.260	99.715	103.170
75+	24.470	33.260	56.850	89.210	93.720	98.220
Jumlah	3.236.720	3.435.160	3.595.110	3.735.030	3.754.990	3.774.930
Jumlah Penduduk berdasarkan Komposisi Umur						
0-14	839.290	832.960	790.720	745.840	741.665	737.490
15-64	2.292.030	2.442.500	2.569.130	2.655.380	2.666.825	2.678.260

Kelompok Umur	Tahun					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
65+	105.400	159.700	235.280	333.810	346.500	359.180
Komposisi Umur %						
0-14	25,93	24,25	21,99	19,97	19,75	19,54
15-64	70,81	71,10	71,46	71,09	71,02	70,95
65+	3,26	4,65	6,54	8,94	9,23	9,51
Dependency Ratio %	41,22	40,64	39,94	40,66	40,80	40,95

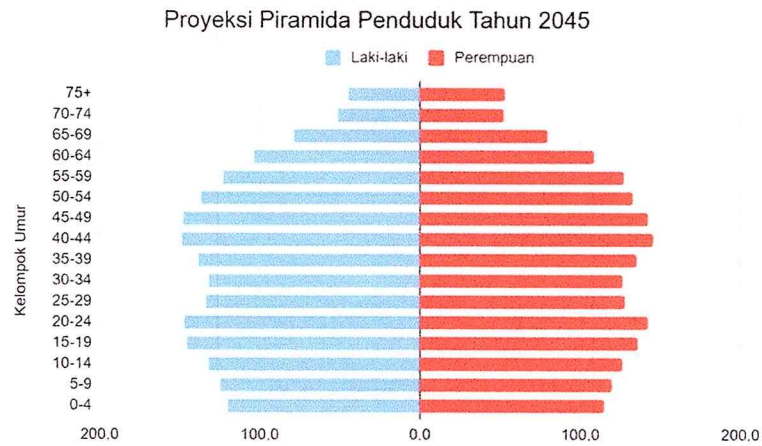
Sumber: Proyeksi Sensus Penduduk Provinsi Banten 2020-2035 (Diolah)



Gambar 2.191
Piramida Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2023



Gambar 2.192
Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2035
Sumber: Hasil Olahan, 2023



Gambar 2.193
 Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2045
 Sumber: Hasil Olahan, 2023

Berdasarkan perbandingan hasil analisis proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur, menunjukkan bahwa tren angka ketergantungan Kabupaten Tangerang hingga tahun 2045 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2045, penduduk Kabupaten Tangerang didominasi penduduk usia produktif berusia 16 hingga 64 tahun.

2.6.2 Proyeksi Sarana dan Prasarana

A. Proyeksi Kebutuhan Rumah Tangga/ Tempat Tinggal

Perhitungan tempat tinggal eksisting dilakukan dengan asumsi data kependudukan dengan jumlah total anggota keluarga pada tahun 2022. Diasumsikan jumlah anggota keluarga adalah 5 orang, sehingga perkiraan jumlah rumah eksisting pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 87
 Jumlah Rumah Tinggal Eksisting di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023

Parameter	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	2.728,65	2.794,97	3.057,60	3.293,53	3.352,47	3.362,60
Kebutuhan Rumah (Ribuan)	546	559	612	659	670	672,52

Sumber: Hasil Olahan, 2023

Perhitungan proyeksi kebutuhan perumahan dan tempat tinggal menggunakan asumsi bahwa satu rumah dihuni oleh 1 keluarga beranggotakan 5 orang sesuai dengan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. perhitungan jumlah perumahan dihitung dari jumlah proyeksi penduduk yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis kebutuhan rumah dan tempat tinggal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 88
 Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Paramater	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	3.435,16	3.595,11	3.735,05	3.754,99	3.774,93
Kebutuhan Rumah (ribu)	687,03	719,03	747,01	751,00	754,99

Sumber: Hasil Olahan, 2024

B. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Sumber air baku di Kabupaten Tangerang berasal dari sumber air permukaan dan sumber air tanah. Sumber air permukaan berasal dari sungai, situ rawa dan embung. Terdapat 3 sungai besar yang melintasi Kabupaten Tangerang yaitu Sungai Cisadane dengan debit tahunan mencapai 77.644 m³/detik, Sungai Cidurian dengan debit maksimum pada 1999 mencapai 21 m³/detik, dan Sungai Cimanceuri dengan debit rata-rata hingga 9,3042 L/detik. Terdapat 6 situ dan 12 rawa yang dapat dimanfaatkan yang berpotensi sebagai sumber air baku alternatif di Kabupaten Tangerang. Selain itu, Kabupaten Tangerang memiliki dua embung, yaitu: (1) Embung Gagak seluas 86.460 m² di Kampung Kebon Cabe Desa Gagak Kecamatan Pakuhaji dengan debit hingga 45.5 L/detik; serta (2) Embung Cigarukgak di Desa Kemuning Kecamatan Kresek memiliki luas 1.770.000 m² dengan debit hingga 180 L/detik.

Berdasarkan data dalam RISPAM, Kabupaten Tangerang memiliki berbagai potensi cadangan air tanah (CAT Serang-Tangerang) dengan debit 3-10 L/detik/km². Selain itu, wilayah ini juga memiliki 5 cekungan air bawah tanah (CABT) yang sangat potensial untuk dimanfaatkan, yakni potensi sebagai imbunan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m³/tahun dan potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m³/tahun.

Perhitungan kebutuhan air bersih eksisting dan proyeksi diperlukan untuk mengetahui berapa banyak gap yang perlu dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan air bersih suatu wilayah. Perhitungan kebutuhan air bersih mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kebutuhan air bersih setiap individu ditetapkan minimal 60 liter/hari/orang untuk kebutuhan domestik dan 15 % dari kebutuhan domestik untuk kebutuhan non-domestik. Kondisi air bersih eksisting pada Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 89
 Jumlah Air Bersih Eksisting Kabupaten Tangerang pada Tahun 2018-2022

Parameter	Standar	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	2.728,65	2.794,97	3.057,60	3.293,53	3.352,47	3.362,60
Kebutuhan Domestik (m ³)	60 L/hari/orang	59.757.522,60	61.209.821,10	66.961.418,10	72.128.372,70	73.419.136,80	73.640.940,00
Kebutuhan Non-domestik (m ³)	15% Kebutuhan Domestik	8.963.628,39	9.181.473,17	10.044.212,72	10.819.255,91	11.012.870,52	11.046.141,00

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih diperlukan untuk menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan air selain air minum seperti memasak, mencuci, mandi dan lain sebagainya. Menurut Perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Tangerang Tahun 2045 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 90
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Parameter	Standar	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	3.435,16	3.595,11	3.735,03	3.754,99	3.774,93
Kebutuhan Domestik (m ³)	60 L/hari/orang	75.230.004	78.733.347	81.797.157	82.234.281	82.670.967
Kebutuhan Non-domestik (m ³)	15% Kebutuhan Domestik	11.284.501	11.810.068	12.269.639	12.335.142	12.400.645

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2023, rencana sistem jaringan sumber daya air berfokus pada pengelolaan DAS, air tanah dangkal (CAT), embung dan air baku SPAM Regional yang berasal dari Waduk Karian (di Kabupaten Lebak). Selain itu, dalam Dokumen RISPAM Kabupaten Tangerang dijabarkan rencana pengembangan kapasitas SPAM dan pengembangan zona pelayanan PERUMDAM TKR. Tantangan kedepan adalah ancaman penurunan kualitas dan kuantitas air baku akibat penurunan cadangan air tanah dangkal serta pencemaran air. Maka dari itu, diperlukan upaya pelestarian sumber air baku dan/atau konservasi daerah tangkapan air, peningkatan cakupan layanan SPAM melalui Perumdam TKR dan SPAM Regional, serta kerja sama dengan perusahaan swasta untuk optimalisasi penyediaan air bersih di Kabupaten Tangerang.

C. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Berdasarkan data BPS Provinsi Banten (2024)⁴, produksi listrik PLN di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 sebesar 10,05 ribu GWh dengan daya terpasang 4,95 juta VA. Sumber energi listrik yang melayani wilayah Kabupaten Tangerang sebagian besar dari PLTU Lontar. PLTU Lontar memiliki empat unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.260 MW yang terhubung dengan Sistem Kelistrikan Jawa-Bali. Selain itu, juga dikembangkan sumber energi terbarukan seperti energi surya (PJU-TS) dan rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA).

Perhitungan listrik eksisting dan proyeksi diperlukan untuk mengetahui berapa banyak gap yang perlu dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan listrik suatu wilayah. Perhitungan jumlah eksisting listrik menggunakan basis data kependudukan, jumlah pelanggan listrik, dan jumlah kapasitas listrik yang terjual sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 91
Kapasitas Ketenagalistrikan Eksisting Kabupaten Tangerang pada Tahun 2019-2023

Parameter	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	2.794.969	3.057.599	3.185.552	3.273.321	3.309.365
Jumlah Pelanggan Listrik	917.146	969.308	1.024.463	1.082.241	1.414.477

⁴ Sumber data dari PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten

Parameter	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Daya Terpasang (VA)	3.278.742.351	3.403.422.454	3.583.602.153	3.809.577.053	2.282.153.880
Produksi Listrik (KWh)				9.542.408.161	5.516.898.042
Listri Terjual (KWh)	6.727.015.257	6.372.014.194	6.998.194.799	7.302.655.080	5.390.589.567
Susut/Hilang (KWh)	622.737.103	520.880.534	567.537.328	478.553.316	127.667.340

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Perhitungan proyeksi kebutuhan listrik mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Perhitungan proyeksi kebutuhan listrik selain mengacu perhitungan proyeksi kebutuhan listrik mempertimbangkan jumlah penduduk yang telah dihitung sebelumnya. Cara perhitungan proyeksi mengacu pada SNI, juga harus mengacu terhadap peraturan yang di berlaku di wilayah setempat seperti PLN Kabupaten Tangerang, Peraturan Umum instalasi Listrik (PUIL), serta peraturan lain yang masih dipakai seperti AVE. Selain itu, oerhitungan proyeksi kebutuhan listrik mengacu pada tren jumlah pelanggan listrik, produksi listrik, dan kapasitas listrik yang terjual di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten. Tren menunjukkan informasi sebagai berikut yang menjadi landasan perhitungan proyeksi kebutuhan listrik:

- a) Kebutuhan listrik untuk RT = 1.766 kWh/pelanggan RT. Hasil tersebut dihitung berdasarkan jumlah pelanggan listrik RT dan kapasitas listrik terjual RT di Provinsi Banten.
- b) Persentase kebutuhan listrik untuk sektor RT = 21,32% dari total listrik terjual. Hasil tersebut diperoleh dari tren lima tahun terakhir di Kabupaten Tangerang dengan asumsi pada Poin (a).
- c) Persentase kebutuhan listrik untuk sektor lainnya (sosial, ekonomi) = 66,8% dari total listrik terjual atau 3,2 kali dari kebutuhan listrik untuk sektor RT pada Poin (b).
- d) Persentase penerangan jalan = 15% dari kebutuhan listrik untuk sektor RT pada Poin (b), sebagaimana mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Berikut perhitungan kebutuhan listrik Kabupaten Tangerang tahun 2045.

Tabel 2. 92
Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Parameter	Standar	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	jiwa	3.435.160	3.595.110	3.735.030	3.754.990	3.774.930
Kebutuhan Listrik Rumah Tangga (KWh)	1.767 kWh/ per pelanggan RT*	1.517.430.999	1.588.095.375	1.649.894.126	1.658.711.160	1.667.519.359
Listrik untuk kegiatan sosial dan ekonomi lingkungan (KWh)*	3,2 kali dari Kebutuhan RT	4.869.700.068	5.096.474.344	5.294.797.287	5.323.092.683	5.351.359.727
Penerangan Jalan (KWh)**	15% dari Kebutuhan RT	730.455.010	764.471.152	794.219.593	798.463.902	802.703.959
Jumlah (GWh)		7.118	7.449	7.739	7.780	7.822

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan data eksisting yang menunjukkan bahwa produksi listrik PLN di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 sebesar 10,05 ribu GWh masih dapat mencukupi untuk kebutuhan listrik hingga 2045 sebesar 7,8 ribu GWh. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2023, rencana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan akan berfokus pada pengembangan kapasitas PLTU Lontar dan pengembangan jaringan SUTET, SUTT, dan SKTT. Dalam pemenuhan kebutuhan listrik untuk 20 tahun kedepan, kapasitas PLTU Lontar akan ditingkatkan sebesar 300-400 MW, rencana pengembangan PLTU dengan kapasitas 500 MW, serta pengembangan jaringan baru ketenagalistrikan (SUTET 500 kilovolt, SUTT 150 kilovolt, dan SKTT 150 kilovolt). Selain itu, dalam menjalankan komitmen nasional untuk transisi ke EBT dan *zero emission*, diperlukan arah kebijakan mengenai pengembangan energi terbarukan dan efisiensi pemanfaatan energi, serta kerja sama pemerintah dengan pihak terkait (badan usaha, swasta, dan lain sebagainya) untuk memastikan pemenuhan kebutuhan listrik yang optimal dan berkelanjutan.

D. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan data SIPSN⁵ (2022), capaian persentase timbulan sampah yang dikelola Kabupaten Tangerang sebesar 60,66% dengan timbulan sampah sebesar 841.497,68 ton, timbulan yang terkelola sebesar 510.448,98 ton, dan daur ulang sampah sebesar 11.858,98 ton. Fasilitas pengelolaan sampah yang di Kabupaten Tangerang, yaitu (1) Bank sampah sebanyak 102 unit; (2) TPST 3R sebanyak 36 unit; serta (3) TPA Jatiwaringin. Berdasarkan data dari Statistik Sektorial Kabupaten Tangerang, jumlah areal pengelolaan sampah (tahun 2017-2019) stagnan pada angka 941 km². Sementara itu dari sisi armada sampah yang dapat mengangkut 2.925 ton/hari atau 51% dari total sampah.

Perhitungan timbulan sampah eksisting dan proyeksi diperlukan untuk mengetahui berapa banyak timbulan sampah yang perlu diatasi pada masa mendatang. Perhitungan timbulan sampah didasarkan pada kondisi jumlah penduduk dan berapa banyak sampah yang dihasilkan pada level domestik, komersial dan fasilitas umum. Untuk lebih jelasnya, perhitungan timbulan sampah pada tahun eksisting (2022) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 93
Timbulan Sampah (Liter Eksisting) di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

Parameter	Standar	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk	Jiwa (Ribu Jiwa)	2728,65	2794,97	3057,6	3293,53	3352,47	3362,6
Sampah domestik	2,28 lit/jiwa/hari	6.221.331,12	6.372.529,32	6.971.325,72	7.509.255,24	7.643.636,16	7.666.728
Sampah komersial	0,29 lit/jiwa/hari	791.309,66	810.541,01	886.703,71	955.124,57	972.216,88	975.154
Sampah fasilitas umum	0,13 lit/jiwa/hari	354.725,02	363.345,97	397.487,87	428.159,29	435.821,36	437.138

Sumber: Hasil Olahan, 2023

Tabel 2. 94
Proyeksi Timbulan Sampah (Liter) di Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Parameter	Standar	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk	Jiwa (Ribu Jiwa)	3.435,16	3.595,11	3.735,03	3.754,99	3.774,93
Sampah domestik	2,28 lit/jiwa/hari	7.832.164,8	8.196.896,4	8.515.868,4	8.561.377,2	8.606.840,4

⁵ Website resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

Parameter	Standar	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Sampah komersial	0,29 lit//jiwa/hari	996.196,4	1.042.587,7	1.083.158,7	1.088.947,1	1.094.729,7
Sampah fasilitas umum	0,13 lit//jiwa/hari	446.570,8	467.366,9	485.553,9	488.148,7	490.740,9

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Dengan proyeksi timbunan sampah di atas, analisis kebutuhan sarana prasarana untuk menampung dan mengelola sampah yang mungkin akan dihasilkan. Setiap kebutuhan ini dihitung berdasarkan jumlah minimal lingkup layanan dalam standar nasional. Oleh karena itu, dihasilkan kebutuhan sarana prasarana persampahan sebagai berikut.

Tabel 2. 95

Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan Kabupaten Tangerang Tahun 2045

Kecamatan	Proyeksi Penduduk 2045 (ribu)	Kebutuhan Bak Sampah Kecil (2500 jiwa)	Kebutuhan TPS (30.000 jiwa)	Kebutuhan TPA (120.000 jiwa)
Balaraja	119,42	48	4	1
Jayanti	82,30	33	3	1
Tigaraksa	189,50	76	6	2
Jambe	82,83	33	3	1
Cisoka	143,02	57	5	1
Kresek	79,66	32	3	1
Kronjo	87,75	35	3	1
Mauk	98,74	39	3	1
Kemiri	58,78	24	2	0
Sukadiri	79,16	32	3	1
Rajeg	381,49	153	13	3
Pasar Kemis	194,83	78	6	2
Teluknaga	197,74	79	7	2
Kosambi	96,08	38	3	1
Pakuhaji	160,77	64	5	1
Sepatan	128,36	51	4	1
Curug	180,32	72	6	2
Cikupa	169,97	68	6	1
Panongan	161,79	65	5	1
Legok	132,50	53	4	1
Pagedangan	171,90	69	6	1
Cisauk	124,17	50	4	1
Sukamulya	91,50	37	3	1
Kelapa Dua	144,63	58	5	1
Sindang Jaya	114,28	46	4	1
Sepatan Timur	126,32	51	4	1
Solear	187,59	75	6	2
Gunung Kaler	76,00	30	3	1
Mekar Baru	55,57	22	2	0

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Dalam 20 tahun kedepan, pengelolaan persampahan di Kabupaten Tangerang diarahkan menjadi sistem sirkular. Pengelolaan dengan sistem sirkular perlu ditunjang dengan sarana pengelolaan daur ulang sampah di tingkat rumah tangga dan komunal (Bank Sampah dan TPS 3R) serta peningkatan kapasitas infrastruktur persampahan (TPS dan TPA) yang didukung dengan teknologi ramah lingkungan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2023, rencana pengembangan jaringan persampahan akan berfokus pada pengembangan TPS dan peningkatan kapasitas TPA Jatiwaringin. Pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah menggunakan sistem terbuka dan didukung oleh sistem teknologi ramah lingkungan serta dapat dikempangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA).

E. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Peningkatan kesehatan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas kesehatan menjadi penting untuk diperhatikan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses fasilitas tersebut. Perhitungan jumlah eksisting dan proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan penting dilakukan agar dapat memperkirakan daya dukung dan daya tampung fasilitas kesehatan di masa mendatang. Pada kondisi eksisting, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 96

Jumlah Fasilitas Kesehatan Eksisting Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Jenis Fasilitas	Rumah Sakit (Umum)	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
Jumlah Fasilitas	22	44	37

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Perhitungan kebutuhan fasilitas kesehatan Kabupaten Tangerang untuk 20 tahun mendatang dihitung menggunakan SNI 03-1733-2004. Fasilitas kesehatan yang diproyeksikan meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu. Perhitungan proyeksi fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 97

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

	Eksisting (2022)	Tahun				Keterangan
		2025	2030	2035	2045	
Jumlah Penduduk	3.352.470	3.412.075	3.595.110	3.735.050	3.754.990	
Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Kesehatan						
Rumah Sakit	22	22	22	22	22	Memenuhi
Puskemas	44	44	44	44	44	Memenuhi
Puskesmas Pembantu	37	37	37	37	37	Memenuhi

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Tangerang tahun 2022 adalah 22 unit rumah sakit. Rumah sakit pada tahun 2045 diproyeksikan tetap berjumlah 22 unit karena jumlah tersebut dianggap mampu melayani penduduk hingga 20 tahun ke depan. Persebaran lokasi rumah sakit sudah cukup merata. Meskipun tidak setiap kecamatan memiliki rumah sakit, pelayanan dapat terpenuhi oleh kecamatan-kecamatan yang memiliki rumah sakit. Terlepas dari hal tersebut, perlu ditingkatkan kualitas layanan rumah sakit serta kapasitas sumber daya manusia selama 20 tahun ke depan.

Puskesmas di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 tersebar di setiap kecamatan dengan jumlah total 44 unit. Puskesmas pada tahun 2045 diproyeksikan berjumlah tetap karena menurut SNI jumlah tersebut dapat melayani jumlah penduduk 20 tahun ke depan, bahkan secara telah melampaui jumlah standar yang dibutuhkan.

Puskemas pembantu di Kabupaten Tangerang berjumlah 37 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2045, proyeksi kebutuhan untuk puskesmas pembantu adalah tetap berjumlah 37 unit karena posisi puskesmas pembantu sebagai pendukung kegiatan puskesmas yang artinya jumlah unit melihat kembali pada kebutuhan masing-masing desa/kelurahan.

Posyandu di Kabupaten Tangerang berjumlah 2.341 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2045, proyeksi kebutuhan untuk posyandu adalah 3.134 unit. Artinya, dalam 20 tahun kedepan diperlukan peningkatan layanan

posyandu melalui penambahan jumlah posyandu dan kapasitas fasilitas di setiap posyandu.

Tabel 2. 98
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2045

Kecamatan	Proyeksi Penduduk 2045	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu	Jumlah Posyandu
Balaraja	119.421	1	4	96
Jayanti	82.301	1	3	66
Tigaraksa	189.497	2	6	152
Jambe	82.832	1	3	66
Cisoka	143.017	1	5	114
Kresiek	79.659	1	3	64
Kronjo	87.750	1	3	70
Mauk	98.741	1	3	79
Kemiri	58.785	0	2	47
Sukadiri	79.165	1	3	63
Rajeg	381.489	3	13	305
Pasar Kemis	194.834	2	6	156
Teluknaga	197.736	2	7	158
Kosambi	96.076	1	3	77
Pakuhaji	160.770	1	5	129
Sepatan	128.362	1	4	103
Curug	180.316	2	6	144
Cikupa	169.968	1	6	136
Panongan	161.791	1	5	129
Legok	132.499	1	4	106
Pagedangan	171.900	1	6	138
Cisauk	124.166	1	4	99
Sukamulya	91.505	1	3	73
Kelapa Dua	144.634	1	5	116
Sindang Jaya	114.284	1	4	91
Sepatan Timur	126.320	1	4	101
Solear	187.589	2	6	150
Gunung Kaler	76.003	1	3	61
Mekar Baru	55.575	0	2	44
Total		33	131	3.134
Eksisting (2022)		44	37	2.341

Sumber: Hasil Olahan, 2024

F. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Perhitungan proyeksi fasilitas pendidikan menggunakan basis data proyeksi jumlah penduduk usia jenjang pendidikan tertentu. dari data yang telah dianalisis sebelumnya, dihitung terlebih dahulu pada tahun 2025-2045 berapa proyeksi jumlah anak jenjang SD dan SMP sehingga dapat dihitung kebutuhan fasilitas pendidikan pada 20 tahun mendatang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah telah diatur jumlah maksimal peserta didik pada satu rombongan belajar dan jumlah maksimal rombongan belajar pada satu jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2. 99
Perencanaan Fasilitas Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar	Jumlah Rombongan Belajar per Satuan Pendidikan	Estimasi Jumlah Peserta Didik per Satuan Pendidikan
SD/MI	28	6 sampai 24	168 sampai 672
SMP/MTs	32	3 sampai 33	96 sampai 1.056

Sumber: Permendikbud No.47 Tahun 2023 (Diolah)

Dalam mengetahui kebutuhan gap dalam 20 tahun mendatang diperlukan perhitungan fasilitas pendidikan eksisting pada tahun eksisting (2023). Dari data jumlah fasilitas eksisting tersebut kemudian dibandingkan dengan proyeksi pada tahun mendatang. Selisih jumlah fasilitas pendidikan proyeksi dan eksisting dapat dijadikan acuan untuk memberi gambaran kepada pembuat kebijakan. Jumlah fasilitas pendidikan eksisting dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 100
Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2022 (Eksisting)

Kecamatan	Tahun 2022			
	SD	SLTP	SMA	SMK
Cisoka	39	20	5	4
Solear	29	15	2	4
Tigaraksa	52	23	7	12
Jambe	16	5	2	2
Cikupa	59	21	5	11
Panongan	35	15	5	8
Curug	51	12	9	10
Kelapa Dua	55	28	15	9
Legok	30	9	2	7
Pagedangan	32	9	4	1
Cisauk	18	7	4	4
Pasar Kemis	57	30	9	12
Sindang Jaya	28	8	4	2
Balaraja	35	9	7	9
Jayanti	24	11	9	7
Suka Mulya	22	9	0	6
Kresek	32	10	3	5
Gunung Kaler	24	10	5	5
Kronjo	30	5	3	1
Mekar Baru	22	9	1	3
Mauk	31	6	3	3
Kemiri	16	13	3	8
Sukadiri	18	10	8	4
Rajeg	50	18	9	12
Sepatan	23	16	5	11
Sepatan Timur	22	8	3	1
Paku haji	38	11	6	3
Teluknaga	44	19	6	10
Kosambi	41	15	4	3
Jumlah	973	381	148	177

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Dalam menghitung proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan diperlukan data jumlah penduduk jenjang sekolah pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Perhitungan penduduk pada setiap jenjang sekolah pada 20 tahun mendatang dilakukan untuk mendapatkan gambaran berapa jumlah kebutuhan fasilitas yang diperlukan agar dapat melaksanakan proses pendidikan dengan maksimal. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk per jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 101
 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2045

Jumlah Penduduk menurut Jenjang Pendidikan						Keterangan
	Eksisting	2025	2030	2035	2045	
SD	391.268	399.410	378.274	354.554	350.192	
SMP	160.646	168.734	170.356	160.784	159.556	
SMA	160.938	160.038	172.344	168.972	169.020	
Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan						
SD	1037	1.189	1.126	1.055	1.042	Belum Memenuhi
SMP	475	439	444	419	416	Memenuhi
SMA/SMK	325	370	399	391	391	Belum Memenuhi

Sumber: Hasil Olahan, 2023

Hasil proyeksi kebutuhan sarana pendidikan menunjukkan sarana SD dan SMA belum memenuhi standar di Kabupaten Tangerang. Strategi dalam pemenuhan sarana pendidikan di Kabupaten Tangerang yaitu dengan menambah jumlah sekolah dan/atau meningkatkan kapasitas rombongan belajar. Selain itu dalam rencana pembangunan sekolah baru memerlukan pertimbangan persebaran dan jangkauan layanan pendidikan.

G. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Perdagangan

Perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas perdagangan penting untuk dilakukan agar dapat mengakomodasi keperluan untuk melakukan aktivitas ekonomi yang nyaman, aman, efektif dan efisien di Kabupaten Tangerang. Perhitungan proyeksi fasilitas perdagangan didasarkan pada jumlah penduduk pada tahun proyeksi kemudian dihitung standar minimal keperluan jumlah fasilitas perdagangan pada masing masing komponen. Selain fokus terhadap kuantitas, peningkatan kualitas sarana perdagangan seperti pasar perlu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan interaksi antara penjual dan pembeli sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan revitalisasi beberapa pasar serta melakukan inovasi digital seperti penerapan pembayaran menggunakan sistem QR Code. Penerapan tersebut menjadi bagian dari GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai), Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), serta menjadi implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 102
 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Uraian	Standar	Eksisting 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)		3.362,6	3.435,16	3.595,11	3.735,03	3.754,99	3.774,93
Proyeksi Fasilitas Perdagangan							
Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000 jiwa / unit	114	115	120	125	125	126
Pusat Perbelanjaan dan Niaga (Toko, pasar, bank, kantor)	120.000 jiwa / unit	28	29	30	31	31	31

Sumber: Hasil Olahan, 2024

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045

Indonesia genap berusia 100 tahun pada 2045 mendatang, Pada tahun ini diharapkan Indonesia telah mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dirumuskan Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Maksud dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang mampu memanfaatkan potensi negara kepulauan untuk ketangguhan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Sementara itu, Indonesia yang Bersatu memiliki makna kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Adapun Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai NKRI yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.. Indonesia sebagai negara maju diharapkan dapat mencapai ketangguhan perekonomian dengan menempati posisi lima besar di dunia berbasiskan pada pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Sebagai negara berkelanjutan, Indonesia berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, serta keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup, dan tata kelolanya. Visi tersebut akan menysasar pada lima aspek utama meliputi peningkatan nilai pendapatan perkapita yang diharapkan akan setara dengan negara maju, berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan, meningkatnya pengaruh negara di kancah internasional, peningkatan daya saing dan sumber daya manusia, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Tabel 2. 103
Sasaran dalam Indonesia Emas 2045

5 SASARAN PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS 2045	2025 (Baseline)	2045 (Target)
SASARAN 1 (Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju)		
GNI per kapita (USD)	5.500 – 5.520	30.300
Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15,0
Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0
SASARAN 2 (Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang)		
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	0,5-0,8
Rasio Gini (Indeks)	0,379 – 0,382	0,290 – 0,320
Kontribusi PDB KTI (%)	21,4	28,5
SASARAN 3 (Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat)		
<i>Global Power Index (Peringkat)</i>	34 (tahun 2023)	15 besar
SASARAN 4 (Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia)		
Indeks Modal Manusia	0,56	0,73
SASARAN 5 (Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission)		
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00

Sumber : Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 juga dirumuskan indikator arah pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda pembangunan), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan.

Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 ini dituangkan dalam 8 (delapan) misi agenda pembangunan, yaitu (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, ditopang dengan; (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta (8) Kestinambungan Pembangunan. Di bawah ini merupakan tabel tahapan perencanaan misi Indonesia Emas 2045.

Tabel 2. 104

2025-2029 Penguatan Transformasi	2030-2034 Akselerasi Transformasi	2035-2039 Ekspansi Global	2040-2045 Perwujudan Indonesia Emas
Transformasi Sosial			
(1) Kesehatan untuk Semua; (2) Pendidikan Berkualitas yang Merata; (3) Perlindungan Sosial yang Adaptif			
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Manusia Indonesia yang unggul
Transformasi Ekonomi			
(1) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; (2) Penerapan Ekonomi Hijau; (3) Transformasi Digital; (4) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; (5) Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	<i>Economic Power House</i> yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh	Negara Berpendapatan Tinggi
Transformasi Tata Kelola			
(1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif			
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi informatif, partai politik berintegritas, dan masyarakat sipil partisipatif	Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, partai politik modern, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia			
(1) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial; (2) Stabilitas Ekonomi Makro; (3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan			
Memperkuat Supremasi Hukum dan Stabilitas, serta membangun Kekuatan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan dan Ketangguhan Diplomasi sebagai	Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas, serta membangun Kekuatan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan dan Ketangguhan Diplomasi sebagai	Indonesia yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM berdemokrasi substansial, aman dan nyaman, serta berpengaruh dan	Indonesia yang berdaulat, aman, dan damai serta berpengaruh dan memimpin tatanan dunia

2025-2029 Penguatan Transformasi	2030-2034 Akselerasi Transformasi	2035-2039 Ekspansi Global	2040-2045 Perwujudan Indonesia Emas
landasan transformasi dan pembangunan	landasan transformasi dan pembangunan	memimpin di kawasan	
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi			
(1) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; (2) Keluarga Berkualitas, Kestaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif; (3) Lingkungan Hidup Berkualitas; (4) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan; (5) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia yang berkelanjutan
Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan			
Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi infrastruktur, dan pemanfaatan potensi energi sesuai karakteristik wilayah	Percepatan pembangunan pusat-pusat ekonomi baru termasuk pengembangan superhub ekonomi IKN	Peningkatan konektivitas kualitas internasional untuk mendorong ekspansi global	Menjaga ketersediaan infrastruktur energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			
Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan			

Sumber : Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Tabel 2. 105
Indikator Capaian dalam RPJPN 2025-2045

Arah Pembangunan	Indikator	Baseline		Sasaran Nasional 2045
		Nasional	Kab.Tangerang	
Transformasi Sosial				
Kesehatan Untuk Semua	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,4	71,48	80
	2 Kesehatan Ibu dan Anak			
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	77	16
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek pada balita) (%)	18,80	21,4	5
	3 Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	272		76
Pendidikan Berkualitas yang Merata	4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	98,9	99,5
	5 Hasil Pembelajaran			
	Rata-rata Nilai PISA			
	a-i Membaca	396	-	485
a-ii Matematika	404	-	490	

Arah Pembangunan	Indikator	Baseline		Sasaran Nasional 2045	
		Nasional	Kab.Tangerang		
	a-iii Sains	416	-	487	
	Rata-rata nilai asesmen nasional				
	b-i Literasi Membaca	62,89	56,12	75,73	
	b-ii Numerasi	54,36	40,04	68,72	
	Rata-rata Lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	9,63	12,00	
	Harapan Lama Sekolah	13,32	13,43	14,81	
	6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	-	60	
7 Presentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	11,73	75,00		
Perlinfungan Sosial yang Adaptif	8 Tingkat kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	6,03	0,5 – 0,8	
	9 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	-	99,5	
	10 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22	-	60	
Transformasi Ekonomi					
	11	Produtivitas Industri dan Pertanian			
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		Rasio PDB industri pengolahan (%)	20,8	32,76	28,0
		Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	3,2 – 3,4		3,3 – 3,2
		12 Pengembangan Pariwisata			
		Rasio PDB pariwisata (%)	4,6	1,76	8,0
		Devisa pariwisata (miliar USD)	22,10	-	100
		13 Proporsi PDB ekonomi kreatif (%)	7,92	-	11,00
		14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil Dan Menengah (%)	1,44	9,56	5,00
		Rasio Kewirausahaan (%)	3,14	1,91	8,00
		Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDB (%)	1,1	1,77	5,0
		Return Of Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	2,50	5,6
		15 Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 – 5,00	7,03	4,00
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35		80

Arah Pembangunan	Indikator	Baseline		Sasaran Nasional 2045	
		Nasional	Kab.Tangerang		
	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,30		70,00
	17	Tingkat Penguasaan Iptek			
		Pengeluaran IPTEK dan inovasi (% PDB)	0,30		2,2 – 2,3
		Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	60		30 besar
Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
		Indeks Ekonomi Hijau	70,8		90,65
		Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	24	70
Transformasi Digital	19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	43		20 besar
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Biaya logistik (% PDB)	13,5		8
	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)		34,63	27,2
		Ekspor barang dan jasa (%PDB)	21,0 – 21,6	17,55	40
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
		Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34		48,92
		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	67,00		100
		Persentase Desa Mandiri (%)	4,00	5	16,25
Transformasi Tata Kelola					
Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Materi Hukum	0,51		0,71
	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2,89	5,00
		Indeks Pelayanan Publik	3,68	4,23	5,00
	27	Anti Korupsi			
		Indeks Integritas Nasional	74,52		96,98
		Indeks Persepsi Korupsi	38		60
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia					
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28	Indeks Pembangunan Hukum	0,69		0,89
	29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya (%)		67,5	80,0
		Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Sedang	Tinggi (>80)
Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,70 – 11,20	2,01 (2023)	18,0 – 20,0
	32	Tingkat inflasi	2,5 ± 1	4,56 (2022)	2,0 ± 1
	33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
Aset perbankan/PDB (%)		66,9		200	

Arah Pembangunan	Indikator	Baseline		Sasaran Nasional 2045
		Nasional	Kab.Tangerang	
	Aset dana pensiun/PDB (%)	8,0		60
	Aset asuransi/PDB (%)	9,1		20
	Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8		120
	Total kredit/PDB (%)	37,8		80-90
34	Inklusi keuangan (%)	91		98
Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan	35 <i>Asia Power Index (Diplomatic Influence)</i>	61,54		75-80
	36 <i>Asia Power Index (Militer Influence)</i>	16		45
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi				
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	52	68,15
	38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77		84,20
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	64,71	80,00
	40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0,46	0,15
Lingkungan Hidup Berkualitas	41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44		0,75
	42 Kualitas Lingkungan Hidup			
	i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,53		87,05
	ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	72,02		77,50
	iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	77,97		79,74
	iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	81,02		88,77
	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	88,27	70
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	26 (16% terdaur ulang)	64,75	90 (35% terdaur ulang)	
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43 Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju Kedaulatan Pangan			
	Ketahanan Energi			
	Indeks Ketahanan Energi	6,77		8,24
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	7,21		0,77
	Ketahanan Air			
	Kapasitas Tampung Air (m ³ /Kapita)	65,18		200
Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,20	98,74	100	
Resiliensi terhadap	44 Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung	0,137		0,11

Arah Pembangunan	Indikator	Baseline		Sasaran Nasional 2045
		Nasional	Kab.Tangerang	
Bencana dan Perubahan Iklim	Akibat Bencana Relatif Terhadap PDB (%)			
	45 Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
	Kumulatif	28,12		51,51
	Tahunan	36,65		80,98

Sumber : Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, BPS Provinsi Banten, BPS Kabupaten Tangerang

2.7.2 Pusat Pertumbuhan Wilayah Jawa dan Provinsi Banten

Wilayah Pulau Jawa menjadi pusat terkonsentrasinya kegiatan ekonomi Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang didukung dengan ketercukupan sarana prasarana. Hal tersebut menjadikan Wilayah Jawa memiliki pasar yang luas dan tumbuh secara cepat. Pada Tahun 2022, Wilayah Jawa berkontribusi sebesar 56,38% terhadap perekonomian nasional dengan potensi pertumbuhan sebesar 5,9% sampai 6,5% per tahun. Maka dari itu, diproyeksikan pada Tahun 2045 mendatang sebagian besar wilayah Jawa akan menjadi kawasan perkotaan dengan kawasan fungsionalitas yang dibagi menjadi 3 jenis yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat aglomerasi. Untuk melihat arah pembangunan secara lebih lanjut, berikut merupakan potret pembangunan Wilayah Jawa beserta Kabupaten Tangerang selama Tahun 2022 (beberapa indikator menggunakan data 2019-2021, dikarenakan keterbatasan data) yang terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 106
Potret Pembangunan Wilayah Jawa dan Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	Indikator	Nasional	Banten	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Tangerang
Bidang Ekonomi									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.31	5.03	5.25	5.45	5.31	5.15	5.34	5.47
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	9.57	6.24	4.61	7.98	10.98	11.49	10.49	7.12
3	Rasio Gini	0.381	0.377	0.412	0.412	0.366	0.459	0.365	0.282
4	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	6	6.09	7.93	6.02	6.43	6.63	6.31	5.73
Bidang Sosial									
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.91	73.32	81.65	73.12	72.79	80.64	72.75	72.97
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.86	8.09	7.18	8.31	5.57	4.06	5.49	7.88
Kondisi Kesehatan									
7	Umur Harapan Hidup (UHH)	71.85	70.39	73.32	73.52	74.57	75.08	71.74	70.28
8	Prevalensi Stunting (%)	21.6	20	14.8	20.2	20.8	16.4	19.2	21.1

No	Indikator	Nasional	Banten	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Tangerang
9	Jumlah Kab/Kota belum Tereliminasi Malaria	196	2	0	2	2	1	0	-
Kondisi Pendidikan									
10	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8.69	9.13	11.31	8.78	7.93	9.75	8.03	8.92
11	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.1	13.05	13.08	12.62	12.81	15.65	13.37	12.85
Angka Partisipasi Murni (APM)									
12	SD/Sederajat	97.88	97.93	98.37	98.29	98.39	99.43	98.09	94.61
	SMP/Sederajat	80.89	84.67	84.22	82.8	81.02	85.28	83.8	74.02
	SMA/Sederajat	61.97	59.54	60.88	58.6	61.17	74.5	62.1	57.89
Jaminan Sosial									
13	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	86.9	87	176	83	89	90	90	83.21
Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja									
14	Pekerja Formal (%)	56.19	56.53	209.95	36.01	40.43	40.38	46.22	-
	Pekerja Nonformal (%)	13.06	15.23	39.75	6.2	4.72	6.27	5.05	-
Bidang Sarana Prasarana									
15	Tampungan per Kapita (m3/kap)	57.53	0.81	0	133.33	59.49	0	18.43	-
16	Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	19.47	8.35	35.01	11.85	20.77	17.03	19.62	-
17	Sanitasi Aman (%)	10.16	15.25	21.75	10	9.08	13.74	8.04	-
18	Penanganan Persampahan (%)	33.27	46.53	97.69	39.18	22.79	36.36	29.43	60.66
19	Rumah Layak Huni (%)	60.66	60.98	36.23	53.37	67.02	84.94	66.28	71.8
20	Pemenuhan Kebutuhan Listrik per Kapita (kWh)	1122	2001.83	3096.85	1104.48	730.12	847.26	970.28	
21	Porsi Kapasitas Pembangkit Listrik Terbarukan (%)	15.47	0.16	0.22	34.06	5.6	0	4.53	
22	Jangkauan 4G di Kawasan Permukiman (%)	96.97	99.98	100	100	99.94	100	99.86	
Kemantapan Jalan									
23	Nasional (%)	92.55	92.87	95.96	96.33	92.09	99.03	92.57	-

No	Indikator	Nasional	Banten	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Tangerang
	Provinsi (%)	74.46	89.22	100	88.32	90	71.56	93.66	-
	Kabupaten/Kota (%)	62.26	78.1	N/A	80.96	80.91	75.64	83.35	-
Bidang Tata Kelola									
24	Indeks Pelayanan Publik		Baik	Sangat Baik	Prima	Prima	Prima	Prima	4.12
25	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	74.43	75.25	77.14	81.93	74.63	74.83	73.87	82.92
26	Indeks Integritas	71.94	70.71	73.3	75.67	78.17	78.76	73.11	-
Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan									
27	Indeks Risiko Bencana Indonesia (RBI)	135.56	144.51	65.58	131.62	115.38	119.56	121.7	146.93
28	Indeks Ketahanan Pangan	60.1	73.78	78.25	77.55	82.95	80.88	79.85	77
29	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (%)	10.21	2.46	3.42	6.75	12.34	13.48	10.27	-

■ kinerja dibawah capaian nasional

■ kinerja lebih baik dibandingkan capaian nasional

Sumber : Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, BPS Provinsi Banten

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa indikator pembangunan yang masih di bawah capaian nasional. Maka dari itu, diperlukan arah pembangunan strategis bagi Wilayah Pulau Jawa utamanya dalam mencapai target Indonesia Emas 2045. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Indonesia Emas 2045, transformasi ekonomi di Wilayah Jawa diproyeksikan sebagai industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi. Dalam Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, disebutkan tema pembangunan Wilayah Jawa sebagai “Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, dengan 5 prioritas sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing glonal (talenta global); serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T.
- 2) Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian untuk mendukung kemandirian pangan.
- 3) Percepatan pembangunan berbasis pengembangan *multi-infrastructure* dan *maritime backbone* dan *global/major port* yang mumpuni, transformasi menuju industri sirkular dan pembangunan hijau, penguatan kawasan konservasi strategis, serta optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.
- 4) Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan

digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.

- 5) Penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana (mitigasi pada wilayah perkotaan dan pedesaan), serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim (terutama pada kawasan perkotaan dan kawasan strategis)

Sesuai dengan agenda pembangunan Indonesia Emas 2045, dirumuskan arah kebijakan transformasi yang terdiri atas transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Selain itu, dalam dokumen tersebut tertuang arah kebijakan landasan transformasi yang terdiri dari supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; serta ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan penjabaran sebagai berikut.

A. Arah Kebijakan Transformasi

Sebagai wujud pengembangan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing dalam upaya transformasi sosial dirumuskan beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Perluasan upaya promotif-preventif dan budaya perilaku hidup sehat;
- b. Pengendalian penyakit menular dan percepatan penurunan stunting;
- c. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan;
- d. Pendekatan pelayanan kesehatan lansia;
- e. Pengembangan sistem rujukan berbasis kompetensi;
- f. Perbaikan kualitas lingkungan sehat di pemukiman kumuh kota;
- g. Pemenuhan sarana prasarana untuk mendukung pola hidup sehat (ruang terbuka hijau, sarana aktivitas fisik, konektivitas transportasi, dan prasarana penanganan limbah medis);
- h. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun;
- i. Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah;
- j. Peningkatan literasi dan edukasi;
- k. Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi strata-3
- l. Pengembangan hub pendidikan tinggi global; peningkatan partisipasi pendidikan tinggi; pengadaan prodi perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah; serta penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia;
- m. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi; dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal.
- n. Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah terutama Jawa bagian selatan
- o. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marjinal.

Upaya transformasi ekonomi yang dilakukan untuk mewujudkan Wilayah Jawa sebagai koridor “Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi” adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan industri hijau ramah lingkungan di wilayah pesisir dan pelabuhan seperti Banten Utara, Kawasan Rebana-Jawa Barat, Pesisir Utara Jawa Tengah, dan Metropolitan Surabaya;
- b. Pengembangan kawasan strategis industri, seperti kawasan strategis industri Serang-Tangerang (Klaster industri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan industri orientasi ekspor);
- c. Pengembangan industri jasa bernilai tambah tinggi dan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi;

- d. Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian selatan;
- e. Pengembangan kawasan strategis pariwisata;
- f. Pengembangan kawasan strategis pertanian yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi;
- g. Pengembangan sentra produksi pangan, peningkatan produksi pangan lokal, serta pemberian insentif dan dukungan bagi petani untuk menggunakan teknologi dan inovasi pertanian ramah lingkungan;
- h. Pengembangan perikanan baik tangkap dan budidaya, termasuk pengembangan dan pemanfaatan *blue energy*;
- i. Peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM;
- j. Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, dan perluasan akses teknologi;
- k. Pengembangan perkotaan (mengacu pada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan;
- l. Pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan;
- m. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- n. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan yang inklusif dan global.

Untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, Transformasi tata kelola diarahkan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Optimasi regulasi;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil;
- c. Peningkatan respon terhadap laporan pelayanan publik;
- d. Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga;
- e. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE;
- f. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- g. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja.

B. Arah Kebijakan Landasan Transformasi

Arah kebijakan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia pada Wilayah Jawa dititikberatkan pada arah kebijakan penataan keuangan daerah, dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal;
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah; penyandang disabilitas, dan lansia.
- c. Serta penguatan pengendalian inflasi daerah.

Arah kebijakan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai bagian dari landasan transformasi difokuskan kepada beberapa kebijakan meliputi:

- a. Penguatan pendidikan berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
- b. Revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat;
- c. Pelestarian kebudayaan lokal;
- d. Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui *hub* kebudayaan dan industri kreatif;
- e. Peningkatan ketahanan pangan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
- f. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia;
- g. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia;
- h. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;

- i. Peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Diversifikasi produk pangan;
- k. Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien;
- l. Penerapan tata ruang permanen pada kawasan sentra produksi pangan;
- m. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air;
- n. Mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi *clean energy*;
- o. Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi;
- p. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan;
- q. Peningkatan kerjasama internasional untuk mengembangkan teknologi *clean energy*;
- r. Pengimplementasian pengembangan tata ruang;
- s. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung;
- t. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami;
- u. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- v. Penguatan ketangguhan area pesisir;
- w. Pengelolaan risiko bencana;
- x. Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Jawa

2.7.3 Arah Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Tangerang

Sesuai dengan arahan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043, salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari kawasan perkotaan Jabodetabek untuk pengembangan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman, transportasi udara, kelautan dan perikanan, serta pendidikan. Selain itu, Perkotaan Kronjo, Perkotaan Tigaraksa, dan Perkotaan Pagedangan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dalam mendukung pemanfaatan potensi Wilayah Jawa, dirumuskan kebijakan arah pengembangan kewilayahan Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa;
- b. Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut;
- c. Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi;
- d. Pemanfaatan ALKI I di wilayah Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu;
- e. Optimalisasi dan pengembangan bandara utama, salah satunya dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta di Banten, dimana Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai Kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta;
- f. Pengembangan jalan tol di Wilayah Jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik;
- g. Pengembangan transportasi perkotaan seperti pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di wilayah metropolitan;
- h. Penguatan kerjasama Wilayah Metropolitan Jakarta dan sekitarnya;
- i. Penurunan ketimpangan antara desa-kota dan wilayah utara-selatan di Wilayah Jawa, terutama melalui peningkatan konektivitas antarwilayah;

- j. Percepatan pembangunan, optimalisasi/penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna meningkatkan *access to market* dan *access to information* pada kawasan-kawasan afirmasi di Jawa;
- k. Pengembangan sistem *smartgrid* ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan.
- l. Pengembangan kerjasama multi-pihak dalam penyediaan infrastruktur kewilayahan melalui skema kerjasama *Government to Government*, *Business to Government*, *Government to Business*, dan skema kerjasama lainnya.

Sesuai dengan pembagian Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang termasuk dalam WKP I dengan tema pengembangan “Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang berkembang cenderung terus membesar dan berpotensi mendorong perkembangan mega urban”. Fungsi dan peranan WKP I sebagai peyangga kawasan perkotaan Jabodetabek serta wilayah perbatasan daerah untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, kelautan, perikanan, permukiman atau perumahan, dan pendidikan. Berdasarkan kebijakan pengembangan kewilayahan di Provinsi Banten, sektor unggulan dan potensial wilayah di Kabupaten Tangerang meliputi pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertambangan dan energi, peruntukan industri, dan pariwisata.

Adapun arahan RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043, program pengembangan Kabupaten Tangerang sebagai PKN maupun PKL adalah program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Sementara itu, program untuk pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi daya dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu program pengelolaan keanekaragaman hayati, dan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, arahan dari nasional melalui pengembangan Proyek Strategis Nasional dalam beberapa proyek pengembangan infrastuktur permukiman, jalan strategis, dan pariwisata melalui kerjasama badan usaha dan swasta di Kabupaten Tangerang. Proyek tersebut diantaranya Pengembangan Kawasan Terpadu BSD City, Jalan Tol Serpong-Balaraja, dan pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 *Tropical Coastland*. Dengan pengembangan PSN tersebut dapat menjadi peluang usaha, investasi, serta *multiplier effect* terhadap peluang lapangan pekerjaan⁶.

⁶ Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2024). Pemerintah Tetapkan 14 PSN Baru, Hasil Kajian Lengkap untuk Pemerataan Sektor Pembangunan dari Infrastuktur hingga Pariwisata, Pendidikan, dan Kesehatan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan *gap* kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Di bawah ini merupakan permasalahan pembangunan Kabupaten Tangerang berdasarkan aspek dan/atau bidang urusan pemerintah daerah.

3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Aspek Geografi

Berdasarkan wilayah administrasi, Kabupaten Tangerang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jakarta atau menjadi bagian dari aglomerasi perkotaan Jabodetabek-punjur. Aglomerasi tersebut mendorong perekonomian Kabupaten Tangerang yang berorientasi pada industri dan perdagangan-jasa. Bagian utara Kabupaten Tangerang merupakan kawasan pesisir yang memiliki potensi kelautan dan perikanan, wilayah penyangga ekosistem mangrove, dan juga memiliki risiko bencana. Potensi bencana tsunami terletak di sepanjang pesisir pantai utara yang berjarak 1 km dari bibir pantai. Wilayah yang memiliki risiko bencana tsunami tinggi yaitu wilayah Kecamatan Kronjo, Kemiri, dan Mauk. Potensi bencana banjir berupa banjir rob (pasang surut) di kawasan pesisir utara dan banjir di sepanjang aliran sungai.

B. Aspek Demografi

Dalam konteks demografi, distribusi penduduk di Kabupaten Tangerang tergolong tidak merata, menciptakan disparitas yang signifikan antara kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi dan terendah. Perbedaan mencapai 86%, dengan Kecamatan Pasar Kemis menunjukkan kepadatan tertinggi mencapai 10.864,31 jiwa/km², sementara Kecamatan Kronjo memiliki kepadatan terendah sebesar 1.428,9 jiwa/km². Kecamatan yang berbatasan dengan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi penduduk cenderung masih fokus di sekitar wilayah perkotaan.

Selain itu, tantangan demografi yang perlu diperhatikan di Kabupaten Tangerang adalah fenomena *ageing population*. Meskipun dalam 10 tahun terakhir terjadi penurunan angka ketergantungan dan hasil proyeksi penduduk tahun 2045 menunjukkan dominasi usia produktif, namun kualitas dan produktivitas angkatan kerja menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain itu, keberadaan masyarakat usia lanjut perlu dipertimbangkan baik dari segi layanan kesehatan maupun ekonomi. Fokus peningkatan kualitas hidup dan produktivitas lansia di Kabupaten Tangerang dapat berjalan selaras dengan strategi pemberdayaan masyarakat usia lanjut yang dilakukan pemerintah pusat dalam rangka mendukung *silver economy*.

3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada suatu wilayah diukur dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang berada di atas nasional, tetapi cenderung mengalami perlambatan. Selain itu, indikator Persentase Penduduk Miskin cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Permasalahan lainnya adalah ketimpangan ekonomi yang ditunjukkan dengan indikator persentase penduduk berpendapatan Desil 1-4 (atau 40% terendah) sebesar 37,6% atau sekitar 1,2 juta jiwa. Walaupun Indeks Gini dalam kategori 'Rendah', diperlukan upaya untuk menurunkan ketimpangan. Ketimpangan dipicu oleh nilai tambah sektor pertanian yang rendah, industri padat modal yang menyerap sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah tinggi, dan berbagai faktor lainnya.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan landasan utama dalam mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan melalui akses dan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat. Capaian kinerja pendidikan dapat dilihat melalui Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Permasalahan yang dihadapi adalah angka RLS baru mencapai 8,93 masih berada di bawah 9 tahun untuk SMP dan 12 tahun untuk jenjang SMA. Hal ini disebabkan kurangnya kapasitas internal penduduk dalam partisipasi pendidikan, ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang belum merata, serta masih adanya kasus peserta didik yang putus sekolah.

2) Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu kunci mencapai kesejahteraan yang menyeluruh. Namun, Kabupaten Tangerang masih memiliki tantangan krusial yang dihadapi yaitu angka stunting pada balita yang berada di atas capaian provinsi, dengan angka 21,1%. Hal ini disebabkan belum optimalnya pelayanan dasar kesehatan dan kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, ditunjukkan oleh hanya 51,3% bayi di bawah 6 bulan yang menerima ASI eksklusif. Selain itu, tantangan yang dihadapi Kabupaten Tangerang disebabkan oleh keterbatasan data dalam bidang kesehatan dan masih kurangnya kesadaran ibu untuk pergi ke posyandu, ditunjukkan dengan keaktifan posyandu yang belum mencapai 100%, yakni 55,96% di tahun 2022.

3) Tenaga Kerja

Kesejahteraan dalam bidang tenaga kerja merupakan dasar dalam memastikan perlindungan, keadilan, dan keberlangsungan bagi seluruh kelompok masyarakat pekerja. Permasalahan yang dimiliki Kabupaten Tangerang dalam bidang tenaga kerja adalah tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,94% (lebih tinggi dibanding capaian nasional). Hal ini disebabkan oleh adanya perlambatan industri, rendahnya kompetensi angkatan kerja, serta kesempatan kerja dan informasi lowongan pekerjaan yang terbatas. Selanjutnya, dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan PDRB terhadap tenaga kerja menurun. Selain dipengaruhi oleh tingginya TPT, produktivitas dan nilai tambah sektor yang menurun juga menyebabkan terjadinya masalah tersebut.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Permasalahan terkait bidang kesenian adalah rendahnya persentase kelompok kesenian yang aktif serta belum tersedianya gedung kesenian. Pada tahun 2018, Kabupaten Tangerang pernah menyusun DED auditorium budaya, tetapi belum terealisasi. Selain itu, pembinaan terhadap pelaku seni dan budaya masih belum dilakukan secara optimal. Sementara itu,

permasalahan yang dihadapi Kabupaten Tangerang dalam bidang olahraga adalah belum terciptanya iklim pelatihan atlet yang terstruktur.

3.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Kabupaten Tangerang memiliki beberapa tantangan bidang pendidikan yang perlu diselesaikan. Masalah tersebut terbagi ke dalam beberapa aspek berikut:

- **Aspek Partisipasi dan Aksesibilitas**
Beberapa masalah yang terkait partisipasi dan aksesibilitas pendidikan adalah pendidikan anak usia dini yang tidak optimal (ditunjukkan oleh cakupan PAUD sebesar 47%, APK PAUD baru mencapai 21,07, serta angka partisipasi anak usia 4-6 tahun hanya sebesar 15,6%); rendahnya angka partisipasi sekolah bagi penduduk berumur 16-18 tahun (67,7%); angka putus sekolah bagi jenjang SD (0,13%), SMA (0,15%), dan SMK (0,47%) yang capaiannya cukup tinggi di Provinsi Banten; angka melanjutkan sekolah belum mencapai 100% untuk jenjang SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA akibat faktor ekonomi; dan rendahnya proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar (20,3%).
- **Aspek Sarana dan Prasarana Pendukung**
Berdasarkan data, terdapat 42% ruang kelas pada jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak. Hal ini disebabkan kurangnya pemeliharaan ruang kelas dan kurangnya pemerataan perbaikan fasilitas pendidikan karena terbatasnya dana. Selain itu dalam tiga tahun terakhir, rasio ketersediaan sekolah cenderung menurun.
- **Aspek Guru dan Tenaga Pendidik**
Masalah terkait tenaga pendidik adalah belum seluruh guru di jenjang SD dan SMP memenuhi kualifikasi S1/D-IV, menurunnya persentase guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, persentase guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang terendah di Provinsi Banten, serta rendahnya profesionalisme guru, tenaga pendidikan, dan tenaga struktural.

2) Kesehatan

Beberapa masalah terkait bidang kesehatan yang terjadi di Kabupaten Tangerang terbagi ke dalam beberapa aspek berikut:

- **Aspek kesehatan ibu, bayi, dan balita**
Angka kematian bayi Kabupaten Tangerang tertinggi kedua di Provinsi Banten dengan jumlah kasus kematian bayi terbanyak. Hal ini disebabkan adanya fenomena tiga terlambat (terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat); belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak; serta kurangnya cakupan tenaga medis. Selain itu, kasus kematian ibu berada di atas target AKI nasional, dengan angka 183 per 100.000. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, kapasitas internal ibu dan keluarga, belum optimalnya pemenuhan gizi, ibu hamil yang tidak menetap dan berpindah fasilitas kesehatan, serta ibu hamil bekerja yang menyulitkan pemantauan. Kabupaten Tangerang juga menghadapi tantangan tingginya cakupan balita penderita pneumonia (2,7%). Hal ini disebabkan oleh lingkungan yang kurang sehat dan memadai, belum konsistennya pelaksanaan tata laksana kasus pneumonia balita sesuatu standar, belum adanya

keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam pencatatan dan pelaporan kasus, serta belum adanya data hasil survei insidensi baik secara nasional maupun regional yang dapat dijadikan acuan yang lebih valid. Masalah lain terkait aspek ini adalah kurangnya posyandu untuk balita akibat lokasi yang belum merata

- Kasus penyakit menular

Kabupaten Tangerang memiliki jumlah kasus TBC tinggi, dengan jumlah kasus terbanyak di Provinsi Banten (27,04%). Selain itu, masalah lainnya adalah tingginya prevalensi kasus DBD dan tingginya *case fatality rate* DBD (2,7%), disebabkan oleh kondisi lingkungan, kurangnya usaha preventif kasus DBD, serta fenomena tiga terlambat

- Aspek tenaga medis

Permasalahan terkait tenaga medis adalah belum optimalnya cakupan tenaga medis bidan dan perawat akibat kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan, ditunjukkan dengan rasio bidan per 100.000 penduduk baru mencapai 25, dan rasio perawat per 100.000 penduduk ada di angka 91. Selain itu, adanya kasus komplikasi kebidanan, yang disebabkan oleh belum optimalnya peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi, fenomena tiga terlambat, serta belum optimalnya angka partisipasi posyandu. Kasus komplikasi kebidanan tersebut juga belum seluruhnya dapat ditangani sesuai standar (sebanyak 14.884 kasus). Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi, serta belum optimalnya angka partisipasi posyandu.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tangerang terkait dengan infrastruktur jalan dan sarana-prasarana permukiman dasar. Data dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 memperlihatkan luasan RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Tangerang masih seluas 17,05% pada tahun 2021. Selain itu, permasalahan mengenai belum optimalnya kinerja jalan disebabkan oleh pesatnya peningkatan volume kendaraan dan tidak sesuainya kapasitas jalan. Isu lainnya adalah belum optimalnya kinerja saluran drainase. Saluran drainase yang terhambat menyebabkan angka kejadian banjir semakin meningkat. Tercatat angka kejadian banjir melonjak dari 6 kejadian pada tahun 2021 menjadi 42 kejadian pada tahun 2022. Permasalahan drainase ini merupakan dampak dari banyaknya sampah yang menyumbat jalannya air dan kurangnya jumlah resapan air.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang yaitu terdapat 30% areal kawasan kumuh perkotaan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi dan kerja sama dalam penanganan kawasan kumuh serta rendahnya kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur permukiman. Infrastruktur rumah tangga yang perlu mendapat perhatian adalah cakupan layanan sanitasi, layanan air minum, dan layanan jalan. Kebutuhan akan perumahan perlu dihitung dan diproyeksikan di masa mendatang sehingga meminimalisir permukiman kumuh di Kabupaten Tangerang. Program rehabilitasi kawasan kumuh menjadi salah satu solusi yang ditawarkan, namun program ini perlu ditanggguhkan karena kawasan kumuh yang direhabilitasi pun dapat menjadi kumuh kembali apabila tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik. Dinas Permukiman Kabupaten Tangerang menyampaikan dalam FGD bahwa terbatasnya kapasitas anggaran menjadi salah satu penyebab paling krusial

dalam upaya pengendalian dan pengelolaan pembangunan kawasan permukiman.

5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan terkait bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah rendahnya tingkat waktu tanggap daerah layanan manajemen kebakaran. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas data kebencanaan dan kebakaran, belum adanya dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran dan dokumen rencana kontingensi per jenis bencana, rendahnya kapasitas aparatur BPBD dalam kebencanaan dan kebakaran, serta masih terbatasnya akses informasi rawan bencana bagi masyarakat. Selain itu, permasalahan lain adalah masih terjadinya pelanggaran K3 dan pelanggaran Perda di Kabupaten Tangerang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan Perda dan Perkada, kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam Satlinmas.

6) Sosial

Permasalahan bidang sosial di Kabupaten Tangerang adalah belum optimalnya layanan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu belum optimalnya pembinaan dan pengawasan PPKS, belum optimalnya operator data DTKS di tingkat desa, serta belum optimalnya koordinasi lintas lembaga atau sektor. Selain itu, tingkat kesenjangan, keterlantaran, serta kekerasan pada anak disabilitas dan kelompok rentan lainnya di Kabupaten Tangerang masih tergolong tinggi. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya sarana prasarana kebutuhan dasar bagi anak dan lansia terlantar serta belum optimalnya fasilitas pelayanan pengasuhan rehabilitasi anak dan lansia terlantar.

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Permasalahan bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang adalah kompetensi tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang dalam 10 tahun terakhir cenderung menurun, tetapi angka tersebut berada di atas nasional. Data menunjukkan rasio pencari kerja yang ditempatkan (atau serapan tenaga kerja) tahun 2012-2021 cenderung rendah dimana pada tahun 2021 sebesar 21,33%. Hal ini dipengaruhi oleh kualifikasi pencari kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja dan informasi lowongan kerja yang terbatas. Permasalahan lainnya adalah besaran tenaga kerja yang dilatih masih rendah dimana tahun 2019 hanya sebanyak 400 orang. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kapasitas balai latihan kerja dan/atau lembaga pelatihan kerja dan jenis pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, permasalahan yang dihadapi adalah menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dalam empat tahun terakhir akibat pemberdayaan perempuan yang belum optimal. Capaian angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender masih berada di bawah Provinsi Banten. Rendahnya capaian tersebut disebabkan oleh tingginya kekerasan pada perempuan dan anak serta rendahnya kualitas hidup perempuan terutama dalam mengakses pendidikan. Selain itu, permasalahan lainnya adalah masih adanya kasus kekerasan pada anak dan kurangnya pendampingan PPA dan KB.

3) Pangan

Kinerja bidang urusan pangan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya Skor Pola Pangan Harapan (PPH), ketersediaan pangan utama, dan cadangan pangan daerah. Capaian Skor PPH Kabupaten Tangerang tergolong rendah yang disebabkan oleh kurangnya keragaman pangan yang bergizi seimbang serta belum optimalnya sosialisasi GERMAS pola konsumsi masyarakat. Capaian ketersediaan pangan utama menunjukkan tren yang menurun. Hal tersebut disebabkan oleh anomali musim, sistem pengelolaan cadangan pangan daerah yang belum optimal, belum optimalnya kelembagaan dan sistem distribusi pangan, harga bahan pakan unggas yang tidak stabil, serta revitalisasi irigasi dibagian utara (pada tahun 2022).

4) Lingkungan Hidup

Capaian kinerja lingkungan hidup dapat ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Saat ini, capaian IKLH di Kabupaten Tangerang sebesar 61,07 dengan capaian lebih rendah dibanding angka provinsi dan nasional. Hal ini dipengaruhi oleh polusi udara dari aktivitas industri, transportasi, dan lain sebagainya; belum optimalnya pelayanan IPAL domestik dan industri, dan belum optimalnya pemeliharaan tanaman mangrove.

Secara garis besar, permasalahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang adalah terkait persampahan dan penyediaan air. Pertama, persentase timbulan sampah yang dikelola hanya sebesar 60,66% dengan hanya 1,41% sampah yang didaur ulang dari total timbulan sampah. Penyebab hal tersebut adalah belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat regional dan mikro, ditunjukkan dengan kondisi kapasitas armada pengangkut sampah hanya mencapai 51% serta total timbulan sampah yang melebihi kapasitas TPS dan TPA. Dalam beberapa tahun kedepan, TPA Jatiwaringin akan melebihi kapasitas dan tantangan kedepannya adalah *demand* yang semakin tinggi tetapi keterbatasan lahan. Maka dari itu, diperlukan kerjasama antar regional dalam pengembangan TPA dengan metode pengelolaan sampah yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, serta pengembangan pengelolaan sampah di tingkat makro seperti TPS dan bank sampah dalam rangka menekan timbulan sampah yang masuk ke TPA.

Kedua, tantangan lainnya adalah pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Tangerang. Telaah dalam KLHS RPJPD Kab. Tangerang menunjukkan bahwa terdapat 84.338,35 Ha lahan dengan kategori krisis air, disebabkan oleh pencemaran aktivitas industri, permukiman dan pertanian. Maka dari itu diperlukan kerjasama antar regional dalam pengembangan pengolahan air bersih, program normalisasi sungai/situ, konservasi area sumber air baku dan kawasan resapan air di Kabupaten Tangerang.

5) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan terkait administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah belum optimalnya pengelolaan data administrasi kependudukan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem Dinas Komunikasi dan Informatika dengan data administrasi dan kependudukan; kurangnya SDM dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan; masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kependudukan; serta inovasi pelayanan yang optimal.

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, permasalahan yang dihadapi adalah kapasitas BUMDES masih belum optimal. Dari 132

BUMDES, hanya terdapat 22 unit yang aktif, dan 15 unit yang bersertifikat. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKD) dan belum terpenuhinya dokumen administrasi untuk sertifikasi BUMDES. Permasalahan lainnya berkaitan dengan belum optimalnya posyandu yang saat ini beroperasi secara aktif (55,96%).

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang terkait bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah meningkatnya persentase *unmet need* keluarga berencana dalam tiga tahun terakhir akibat keterbatasan akses layanan, stigma, dan kendala ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang mengalami penurunan yang disebabkan oleh kurangnya informasi, keterbatasan akses, dan stigma yang terkait dengan pemakaian kontrasepsi jangka panjang. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga menghadapi tantangan terkait keberlanjutan penganggaran karena 70% anggaran saat ini masih berasal dari APBN sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya pergeseran politis.

8) Perhubungan

Permasalahan bidang urusan Perhubungan di Kabupaten Tangerang adalah belum optimalnya pelayanan transportasi jaringan angkutan umum serta pengendalian standar keselamatan dan keamanan transportasi. Hal ini disebabkan oleh minimnya perlengkapan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas jalan serta peningkatan pengguna kendaraan pribadi tidak selaras dengan peningkatan layanan angkutan umum. Permasalahan angkutan umum ditunjukkan melalui tingginya kebutuhan moda transportasi darat, tetapi minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum masih rendah. Pemerintah daerah mengharapkan Kabupaten Tangerang juga dapat mengembangkan layanan konektivitas MRT dan LRT di kawasan Jabodetabek sebagai salah satu moda transportasi publik serta optimalisasi layanan angkutan umum utama di simpul-simpul aktivitas masyarakat yang intensitas sedang-tinggi.

9) Komunikasi dan Informatika

Permasalahan bidang urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tangerang adalah belum maksimalnya penyelenggaraan informasi publik. Hal ini disebabkan oleh sistem pengumpulan dan *update* data yang membutuhkan waktu lama, minimnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam mendiseminasikan data, serta data sektoral belum dimanfaatkan sebagai evaluasi pembangunan. Permasalahan lainnya adalah belum tersedianya persandian antar perangkat daerah yang disebabkan oleh tingkat keamanan persandian yang belum kuat.

10) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kinerja bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dapat diukur dengan persentase usaha yang aktif dan kapasitas pendapatan usaha. Data menunjukkan persentase koperasi aktif cenderung menurun dalam lima tahun terakhir dan pada tahun 2022 hanya mencapai 35,7%. Capaian tersebut lebih rendah dibanding Provinsi Banten. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya aspek pemodalan dan promosi serta pendataan perpindahan status koperasi menjadi koperasi tingkat provinsi. Permasalahan lainnya adalah dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan jumlah tenaga kerja dan pendapatan UKM. Hal ini disebabkan belum optimalnya aspek permodalan, minimnya inovasi dan adopsi teknologi dalam meningkatkan nilai tambah produk, diversifikasi produk yang masih

rendah, dan adanya perubahan pengkategorian berdasarkan pendapatan usaha.

11) Penanaman Modal

Permasalahan bidang urusan Penanaman Modal di Kabupaten Tangerang yaitu belum optimalnya realisasi investasi yang ditunjukkan dengan realisasi investasi PMA dan PMA cenderung fluktuatif dalam 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal, kurangnya informasi mengenai potensi dan peluang investasi, perubahan sistem perijinan menjadi OSS, serta kurangnya kepatuhan melaporkan kegiatan penanaman modal.

12) Kepemudaan dan Olahraga

Cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Tangerang tergolong masih rendah. Tidak hanya itu, saat ini prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional masih minim karena iklim pelatihan atlet yang belum terstruktur. Permasalahan lainnya adalah daya saing pemuda saat ini belum optimal.

13) Statistik

Permasalahan terkait bidang statistik adalah data yang ditampilkan di laman satu data tidak sepenuhnya ditemukan (banyak data yang kosong). Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu, beberapa konfirmasi hasil analisis data sektoral yang tidak ditanggapi, data sektoral dan publikasi statistik yang dihasilkan oleh produsen data belum seluruhnya terinput dalam portal data, serta kurangnya kegiatan statistik dari BPS.

14) Kebudayaan

Permasalahan bidang kebudayaan adalah belum optimalnya pengembangan potensi kebudayaan. Hal ini ditunjukkan oleh belum adanya gedung kesenian di Kabupaten Tangerang dan proyek pembangunan pariwisata yang baru sampai di tahap perencanaan.

15) Perpustakaan

Dalam bidang perpustakaan, permasalahan yang dimiliki Kabupaten Tangerang adalah belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat dan menurunnya jumlah kunjungan perpustakaan. Permasalahan tersebut disebabkan belum optimalnya sarana prasarana sesuai standar, terbatasnya kompetensi SDM dan promosi layanan, belum meratanya sebaran perpustakaan, serta adanya tren literasi secara daring.

16) Kearsipan

Permasalahan terkait bidang kearsipan adalah belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku. Selain itu, masih kurangnya fokus terhadap arsip terkait penyimpanan kekayaan intelektual (misal keberadaan naskah kuno).

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Pariwisata

Kinerja bidang urusan Pariwisata dapat ditinjau dari jumlah wisatawan dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Data menunjukkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Tangerang termasuk rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengembangan kompetensi SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif, kurangnya tata kelola kawasan strategis pariwisata, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan

pariwisata. Pemerintah daerah baru mengelola 1 daerah yaitu Ketapang sebagai fokus wisata.

2) Pertanian

Permasalahan utama bidang urusan Pertanian di Kabupaten Tangerang yaitu rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Hal ini disebabkan oleh persentase penduduk yang bekerja dalam sektor ini tergolong kecil yaitu hanya 4,9% (bukan merupakan sektor dominan di Kabupaten Tangerang), rendahnya kapasitas pelaku usaha sektor pertanian, kurangnya sarana dan teknologi yang mendukung pertanian, rendahnya kualitas dan daya saing produk pertanian dan peternakan, rendahnya manajemen pengelolaan Balai Penyuluh Pertanian, kurangnya pasokan air untuk lahan pertanian (akibat pencemaran), serangan hama, dan penyakit tanaman, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun.

3) Perdagangan

Sektor perdagangan berkontribusi ketiga terbesar atau 11,05% terhadap PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2022. Akan tetapi, laju pertumbuhan sektor perdagangan cenderung melambat. Hal ini disebabkan oleh dampak dari pandemi serta belum optimalnya sarana perdagangan dan pemasaran produk.

4) Perindustrian

Permasalahan bidang urusan perindustrian di Kabupaten Tangerang adalah penurunan kontribusi sektor industri dalam PDRB dan laju pertumbuhan sektor perindustrian cenderung melambat. Hal ini disebabkan oleh dampak dari pandemi (gelombang PHK dan penurunan produktivitas industri karena keterbatasan bahan baku impor), pergeseran struktur ekonomi Tangerang ke sektor tersier, kinerja daya saing produk industri belum optimal, pindahnya industri ke daerah lain, belum optimalnya pembinaan pelaku kelompok pengrajin

5) Kelautan dan Perikanan

Kinerja bidang urusan kelautan dan perikanan dapat ditinjau dari kesejahteraan nelayan, hasil dan produktivitas perikanan, dan konsumsi ikan perkapita. Data menunjukkan pendapatan pelaku usaha perikanan tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya rantai pemasaran produk perikanan, kurangnya pengetahuan pembudidaya ikan dan nelayan, pola pembinaan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan bagi nelayan kurang sehingga produktivitas kurang, belum optimalnya pemasaran produk dan tingginya biaya operasional, serta belum optimalnya pengembangan kapasitas kelembagaan perikanan dan bina kelompok nelayan. Permasalahan lainnya adalah konsumsi ikan perkapita per tahun di Kabupaten Tangerang masih di bawah capaian Provinsi Banten dan target nasional. Hal ini disebabkan oleh pola pembinaan dan kurangnya upaya fasilitasi untuk peningkatan konsumsi ikan bagi konsumen.

D. Fokus Layanan Urusan Penunjang

1) Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang terkait perencanaan pembangunan adalah belum optimalnya konsistensi penjabaran dokumen perencanaan, disebabkan belum maksimalnya koordinasi antar instansi. Capaian Konsistensi penjabaran dokumen perencanaan pada tahun 2022 adalah 95,12%. Konsistensi penjabaran dokumen perencanaan dapat menunjukkan

pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan dokumen kebijakan yang terkait dengan tujuan pembangunan daerah. Capaian konsistensi yang maksimal dapat membuat pelaksanaan pembangunan semakin dekat dengan tujuannya.

2) Keuangan

Permasalahan bidang keuangan di Kabupaten Tangerang adalah tingginya persentase SILPA terhadap APBD. Capaian persentase SILPA terhadap APBD pada tahun 2022 adalah 11,31%. Angka tersebut dapat mengindikasikan kondisi yang baik dan kondisi yang kurang baik. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program kegiatan. Kedepannya Kabupaten Tangerang akan membuat sistem yang mengendalikan rencana anggaran dan realisasi anggaran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

3) Kepegawaian

Permasalahan bidang urusan kepegawaian di Kabupaten Tangerang yaitu rendahnya Indeks Profesionalitas ASN. Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2022 adalah 56,80 dengan kategori sangat rendah (<60). Profesionalitas ASN yang masih rendah dapat menghambat pencapaian kinerja yang seharusnya dapat optimal. Hal ini disebabkan oleh penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi profesionalitas ASN.

4) Pengawasan

Permasalahan bidang urusan Pengawasan di Kabupaten Tangerang yaitu belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK. Capaian tindak lanjut Temuan BPK pada tahun 2022 adalah 83,54%. Temuan BPK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi penting untuk ditindaklanjuti karena pada temuan tersebut berpotensi terjadi penyalahgunaan keuangan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada unit kerja.

5) Sekretariat Dewan

Permasalahan bidang urusan Sekretariat Dewan di Kabupaten Tangerang yaitu belum optimalnya penyelenggaraan kinerja, tugas, dan fungsi DPRD. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya penyusunan dan pembahasan raperda.

Tabel 3.1
Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tangerang

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	MASALAH POKOK	MASALAH UTAMA	ISU STRATEGIS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angka kematian bayi tertinggi kedua di Provinsi Banten dan memiliki jumlah kasus kematian bayi terbanyak di Provinsi Banten (Tahun 2022) ▪ Masih terdapat kasus kematian ibu ▪ Kurangnya posyandu untuk balita ▪ Masih ditemukannya kasus stunting dan balita gizi buruk (Prevalensi stunting 21,1%,Tahun 2022) ▪ Cakupan tenaga medis bidan dan perawat yang belum optimal ▪ Tingginya kasus komplikasi kebidanan dan masih ada kasus yang belum ditangani (85,9% sudah ditangani tahun 2022) ▪ Cakupan balita yang menderita pneumonia tertinggi kedua di Provinsi Banten (Tahun 2020, 2,7%) ▪ Jumlah kasus TBC masih cukup tinggi ▪ Tingginya prevalensi kasus DBD dan tingginya <i>case fatality rate</i> DBD. ▪ Belum seluruh komplikasi kebidanan ditangani sesuai standar 	<p>Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>Belum Optimalnya Pembangunan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia</p>	<p>Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan anak usia dini yang tidak optimal ▪ Rendahnya angka partisipasi sekolah bagi penduduk berumur 16-18 tahun dan masih berada di bawah capaian provinsi (67,7%, Tahun 2021). ▪ Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD, SMA, dan SMK cukup tinggi ▪ Angka melanjutkan sekolah belum mencapai 100% untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA ▪ Terdapat 42% ruang kelas jenjang SD dan SMP dengan kondisi bangunan rusak ▪ Rasio ketersediaan sekolah cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir ▪ Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar cukup rendah yaitu di angka 20,3% (Tahun 2022) 	<p>Belum optimalnya kualitas pendidikan</p>	<p>Belum Optimalnya Pembangunan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia</p>	<p>Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia</p>

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	MASALAH POKOK	MASALAH UTAMA	ISU STRATEGIS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guru di SD dan SMP belum seluruhnya memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan menurunnya presentase guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV terendah di Provinsi (Tahun 2021) ▪ Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Struktural Lainnya masih rendah 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya layanan PMKS ▪ Masih tingginya tingkat kesenjangan, keterlantaran, kekerasan kepada anak disabilitas dan kelompok rentan lainnya 	Belum optimalnya pemberdayaan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan	Belum Optimalnya Pembangunan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan kontribusi sektor industri dalam PDRB dan laju pertumbuhan sektor cenderung melambat ▪ Pendapatan pelaku usaha perikanan masih rendah ▪ Cakupan kelompok bina nelayan menurun ▪ Sektor perdagangan berkontribusi ke-3 terbesar dalam PDRB, tetapi laju pertumbuhan fluktuatif cenderung melambat ▪ Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ▪ Rendahnya kunjungan wisatawan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten ▪ Persentase koperasi aktif cenderung menurun dalam lima tahun terakhir dan pada tahun 2022 hanya mencapai 35,7%. Capaian tersebut lebih rendah dibanding Provinsi Banten ▪ Dalam lima tahun terakhir terlihat adanya penurunan jumlah tenaga kerja dan pendapatan UKM 	Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan	Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio pencari kerja yang ditempatkan (atau serapan tenaga kerja) tahun 2012-2021 cenderung rendah dimana pada tahun 2021 sebesar 21,33% ▪ Besaran tenaga kerja yang dilatih masih rendah dimana tahun 2019 hanya sebanyak 400 orang 	Belum optimalnya pembangunan dan daya saing ketenagakerjaan	Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	MASALAH POKOK	MASALAH UTAMA	ISU STRATEGIS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya perlambatan industri dapat mempengaruhi menurunnya serapan tenaga kerja ▪ Terbatasnya kesempatan kerja dan terbatasnya informasi lowongan kerja ▪ Ketimpangan dipicu oleh nilai tambah sektor pertanian yang rendah, industri padat modal yang menyerap sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah tinggi, dan berbagai faktor lainnya. 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya inovasi dan adopsi teknologi dalam kegiatan UMKM ▪ Kurangnya sarana dan teknologi yang mendukung pertanian ▪ Belum optimalnya pelatihan atau kegiatan pengembangan kapasitas SDM dalam adopsi IPTEK ▪ Keterbatasan kapasitas pembiayaan pengembangan IPTEK 	Belum optimalnya penguasaan IPTEK dalam kegiatan perekonomian	Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tantangan penguatan rantai antar pusat pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap pasar.untuk akselerasi sektor utama ekonomi Kab. Tangerang (sektor perindustrian, manufaktur, dan jasa) ▪ Tantangan posisi strategis Kab. Tangerang sebagai penyangga Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek 	Belum optimalnya penyelenggaraan integrasi antar kawasan pertumbuhan ekonomi domestik dan regional	Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum maksimalnya penyelenggaraan informasi publik ▪ Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi profesionalitas ASN ▪ Belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK 	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintah
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya tingkat waktu tanggap daerah layanan manajemen kebakaran ▪ Pelanggaran K3 dan pelanggaran Perda masih terjadi 	Belum optimalnya penanganan ketertiban dan keamanan masyarakat serta pembinaan lembaga politik/ demokrasi	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintah

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	MASALAH POKOK	MASALAH UTAMA	ISU STRATEGIS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dalam empat tahun terakhir (2019-2022) ▪ Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang dibawah capaian Provinsi Banten ▪ Masih adanya kasus kekerasan pada anak dan kurangnya pendampingan PPA dan KB ▪ Minimnya prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional ▪ Daya saing pemuda belum optimal 	Pembangunan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, anak yang belum optimal	Belum Optimalnya Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase timbulan sampah yang dikelola hanya 60,66% dan hanya 1,41% sampah yang di daur ulang dari total timbulan sampah ▪ IKLH Kab Tangerang lebih rendah dibanding Provinsi Banten dan nasional. Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 22,67 atau kategori kurang 	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Belum Optimalnya Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan pangan utama menurun ▪ Cadangan Pangan Daerah belum optimal ▪ Penyediaan air di Kabupaten Tangerang saat ini terdapat 83% lahan terlampaui, artinya 84.338,35 Ha merupakan lahan dengan kategori krisis air. 	Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan; Terlampauinya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Belum Optimalnya Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya tingkat waktu tanggap daerah layanan manajemen bencana khususnya kebakaran 	Belum optimalnya manajemen kebencanaan	Belum Optimalnya Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya konsistensi penjabaran dokumen perencanaan ▪ Belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait dalam bidang penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian 	Belum optimalnya keterpaduan dalam penataan ruang	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	MASALAH POKOK	MASALAH UTAMA	ISU STRATEGIS
<ul style="list-style-type: none">▪ Belum tercakupnya seluruh wilayah terhadap akses sanitasi layak▪ Sistem drainase yang tersumbat	Belum optimalnya sarana prasarana infrastruktur perkotaan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none">▪ Tingginya persentase SILPA terhadap APBD yang disebabkan oleh belum optimalnya efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program kegiatan	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintah

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan permasalahan yang telah dikelompokkan ke dalam 32 urusan pemerintahan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pendidikan
2. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat
3. Belum optimalnya pemberdayaan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan
4. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan
5. Belum optimalnya pembangunan dan daya saing ketenagakerjaan
6. Belum optimalnya penguasaan IPTEK dalam kegiatan perekonomian
7. Belum optimalnya penyelenggaraan integrasi antar kawasan pertumbuhan ekonomi domestik dan regional
8. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
9. Belum optimalnya pelayanan publik
10. Masih rendahnya profesionalitas ASN
11. Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah
12. Belum optimalnya penanganan ketertiban dan keamanan masyarakat serta pembinaan lembaga politik/ demokrasi
13. Belum optimalnya kapasitas fiskal daerah dan kerjasama antar daerah
14. Pengembangan potensi kebudayaan belum optimal
15. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, anak yang belum optimal
16. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
17. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
18. Terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
19. Belum optimalnya manajemen kebencanaan
20. Belum optimalnya keterpaduan dalam penataan ruang
21. Belum optimalnya sarana prasarana infrastruktur perkotaan
22. Belum optimalnya perencanaan pembangunan permukiman
23. Belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi
24. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah

3.2 Isu Strategis

3.2.1 Isu Internal

A. Telaah Dokumen Rencana Sektoral

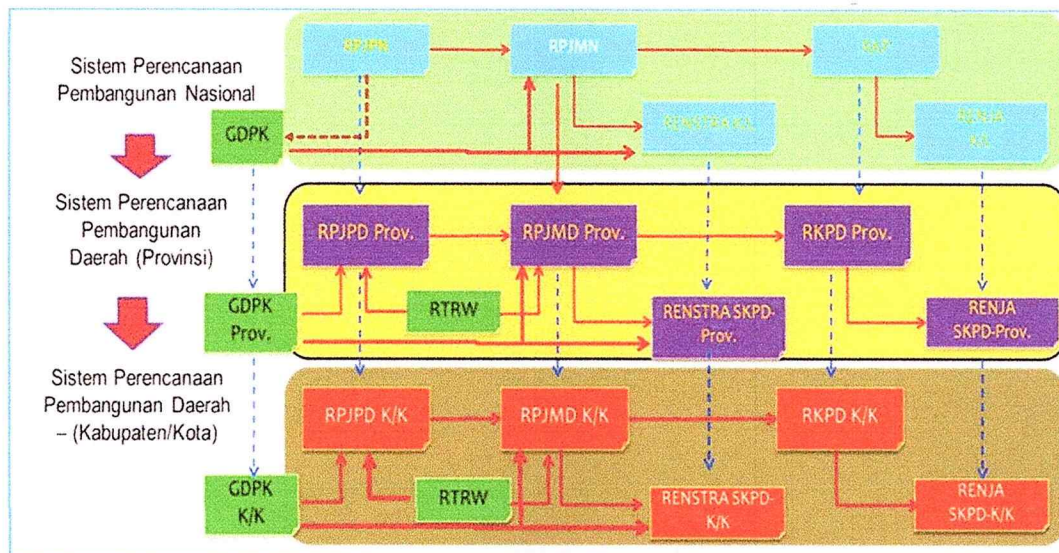
1) *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Tangerang 2022-2046

Grand Design Pembangunan Kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 yang menyebutkan 5 (lima) pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; (1) Pengendalian kuantitas penduduk, (2) Peningkatan kualitas penduduk, (3) Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, (4) Pembangunan keluarga berkualitas, (5) Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang harus menjadi bagian dari isi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkolaborasi dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Banten dan instansi terkait lainnya untuk merancang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2046. Dokumen perencanaan ini memiliki peran penting sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam melaksanakan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Tangerang. Tujuan utama adalah menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang sebagai prasyarat untuk mencapai populasi tanpa pertumbuhan, dengan menurunkan tingkat fertilitas dan mortalitas serta meratakan persebaran

penduduk. Salah satu target utama adalah mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang pada tahun 2026 dan seterusnya hingga tahun 2046. Untuk mencapai kondisi ini, sangat diharapkan agar angka kelahiran total (TFR) mencapai 2,1 anak per wanita atau netreproduction (NRR) sebesar 1 anak per wanita pada tahun 2026. Hal ini akan mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, terutama dalam hal perencanaan jumlah anak dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan panduan "Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar" yang diterbitkan oleh BKKBN pada tahun 2020, GDPK adalah kerangka utama atau rencana inti yang mencakup visi, misi, arah kebijakan, tujuan, serta target dalam pengembangan di sektor pembangunan. Ini juga mencakup lima pilar pembangunan dan merupakan pengembangan lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). GDPK bertindak sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



Gambar 3.1

Kedudukan GDPK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Tangerang 2022-2046

Tabel 3.2

Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator dalam Pilar Pembangunan Kependudukan

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator/Parameter
Pengendalian Kuantitas Penduduk	Mengendalikan jumlah penduduk melalui pengaturan fertilitas	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur pendewasaan usia perkawinan Mengatur jarak antar kelahiran Meningkatkan akses pelayanan dan pembinaan kesertaan KB 	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan batas minimal usia perkawinan Pengaturan jarak kelahiran dalam keluarga Peningkatan akses pelayanan dan pembinaan kesertaan KB 	<ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan penduduk (%) Pendewasaan usia perkawinan (tahun) TFR (%) Keikutsertaan KB (%)
	Mengendalikan jumlah penduduk dengan menurunkan angka mortalitas	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi, 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> Angka kematian ibu (per 1000 kelahiran hidup)

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator/ Parameter
		balita, anak-anak, remaja, dan lansia <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan persalinan • Meningkatkan pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) 	pelayanan minimum <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pelayanan Puskesmas untuk PONEC dan PONEK untuk rumah sakit • Meningkatkan status gizi remaja putri, wanita usia subur, dan balita 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) • Usia harapan hidup (tahun)
Peningkatan Kualitas Penduduk	• Meningkatkan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan • Meningkatkan kompetensi penduduk • Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan • Peningkatan kompetensi penduduk • Penurunan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Sekolah • Rata-rata lama sekolah (tahun) • Indeks Pembangunan Manusia • Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Mengoptimalkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISP-K)	Prevalensi balita kurang gizi (%)
	• Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sarana/fasilitas kesehatan yang berkualitas • Meningkatkan jumlah kepesertaan JKN-KIS • Meningkatkan status gizi masyarakat • Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular • Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak • Meningkatkan PHBS masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola manajemen dan klinis serta sumberdaya kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan • Meningkatkan jumlah kepesertaan JKN-KIS - Peningkatan status gizi masyarakat • Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular • Meningkatkan sanitasi total berbasis masyarakat dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan (JKN-KIS) • Persentase tempat tinggal penduduk terhadap akses sanitasi (%)

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator/ Parameter
			kemitraan dengan lintas sektor dan swasta dalam penyehatan lingkungan • Meningkatkan promosi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	
Pembangunan Keluarga Berkualitas	Meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan ketahanan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan status ekonomi penduduk • Mengurangi kesenjangan ekonomi • Meningkatkan perlindungan penduduk rentan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan tingkat pengangguran terbuka • Meningkatkan layanan pencari kerja melalui pelatihan dan pembinaan produktivitas • Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pengangguran Terbuka (%) • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) • Tingkat kemiskinan • Cakupan kepemilikan jaminan sosial (%)
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, dan tumbuh kembang anak dan remaja • Meningkatkan perencanaan kehidupan dan pendampingan penduduk usia lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga • Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, dan tumbuh kembang anak dan remaja - Penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia 	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga pra sejahtera (%) • Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	Mobilitas, migrasi dan pembangunan yang merata	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan wilayah - Mengurangi mobilitas penduduk ke kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah • Pembatasan mobilitas ke kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Laju pertumbuhan penduduk antar daerah (%) • Persentase infratraktur wilayah dalam kondisi baik • Pertumbuhan penduduk kota antar daerah

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator/ Parameter
Penataan Data dan Informasi Kependudukan dan Administrasi Penduduk	Terwujudnya sistem data kependudukan yang terintegrasi dalam satu sistem informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tertib administrasi kependudukan • Meningkatkan kinerja kearsipan melalui implementasi teknologi dan digitalisasi • Meningkatkan cakupan pemanfaatan teknologi untuk mengakselerasi kualitas dan kapasitas pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan data dan informasi kependudukan • Peningkatan sistem pengolahan dan penyajian data kependudukan • Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penduduk dapat menunjukkan catatan sipil berupa e-KTP dan akte kelahiran • Persentase penduduk menguasai akses komputer

Sumber: *Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Tangerang*

2) Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tangerang 2022-2027

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tangerang dibuat dengan tujuan menjadi panduan dan referensi bagi pemerintah Kabupaten Tangerang dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program-program yang diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut. RPKD juga bertujuan menjadi landasan untuk menetapkan target pembangunan yang akan membantu mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Selain itu, RPKD disusun sebagai panduan bagi pemerintah dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Tangerang. Tujuan dan sasaran rencana penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tangerang tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1 Membangun sistem, fasilitas dan infrastruktur pendidikan formal dan non-formal yang berkualitas, merata dan menyeluruh bagi keluarga miskin, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek pendidikan
 - b. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender
 - c. Sistem, fasilitas dan infrastruktur pendidikan formal dan non-formal yang memadai untuk seluruh penduduk Kabupaten Tangerang terutama penduduk miskin akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk sehingga dapat memenuhi kualifikasi dalam bekerja dan dapat menjalankan usaha yang diminati dengan keterampilan yang dimilikinya. Hal ini tentu akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan penduduk.
- 2) Tujuan 2 Membangun sistem informasi lapangan pekerjaan yang inklusif
- 3) Tujuan 3 Membuka lapangan pekerjaan secara luas bagi keluarga miskin, dengan sasaran yang sama yaitu:
 - a. Meningkatkan lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang bekerja

Tujuan 1, 2 dan 3 sangat berkaitan dengan kondisi pengangguran di Kabupaten Tangerang. Kondisi sosial yang belum merata seperti kepemilikan perangkat komunikasi juga menjadi kendala bagi

penduduk miskin untuk memperoleh informasi mengenai lapangan kerja sehingga sistem informasi dan lapangan kerja harus dibuat lebih inklusif untuk dapat menjangkau lapisan terbawah masyarakat.

- 4) Tujuan 4 Membangun sistem, fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang berkualitas, merata dan menyeluruh bagi keluarga miskin, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan
 - 2. Sistem, fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang berkualitas, merata bagi seluruh penduduk Kabupaten Tangerang terutama penduduk miskin.

Hal ini akan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat.

- 5) Tujuan 5 Meningkatkan produktivitas para pelaku usaha (UMKM), petani, nelayan dan profesi lainnya, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - 1. Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, UMKM dan sektor pariwisata
 - 2. Selain lapangan pekerjaan, dorongan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang juga perlu diberikan kepada para pelaku usaha menengah, kecil dan mikro serta para pekerja di bidang pertanian, perikanan dan bidang lainnya.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas usaha yang berujung pada meningkatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

- 6) Tujuan 6 Mengurangi kawasan padat penduduk dan kumuh, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu:
 - 1. Meningkatnya luasan lingkungan hidup berkualitas
 - 2. Meningkatnya pengelolaan sampah Penataan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup sangat penting dilakukan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hal ini akan berujung pada peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia (penduduk) terutama pada aspek kesehatan.
- 7) Tujuan 7 Membangun Bank Data Akurat Kabupaten Tangerang, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu:

Terbentuknya Bank Data Akurat Kabupaten Tangerang yang terintegrasi Data merupakan hal dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan dan program yang tepat sasaran. Oleh karena itu, tujuan ketujuh ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta pembangunan yang efektif bagi masyarakat.

Secara lebih rinci, tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Urusan berdasarkan Isu Strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator	Urusan
Isu Strategis 1 : Aksesibilitas ke fasilitas pendidikan formal jenjang sekolah menengah dan non formal masih belum merata			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam aspek pendidikan	Pendidikan	Angka IPM	Pendidikan
		Rata-rata lama sekolah	
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Urusan
Isu strategis 2: Aksesibilitas ke pekerjaan (tempat kerja dan lapangan pekerjaan) masih belum merata			
Membangun sistem informasi lapangan pekerjaan yang inklusif	Meningkatnya lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang bekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Ketenagakerjaan
Membuka lapangan pekerjaan secara luas bagi keluarga miskin			
Isu strategis 3: Fasilitas kesehatan belum merata dan belum memadai			
Membangun sistem, fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang berkualitas, merata dan menyeluruh bagi keluarga miskin	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Kesehatan
		Prevalensi Stunting	
		Cakupan Jaminan Kesehatan	
Isu Strategis 4 : Dukungan dan pemenuhan kebutuhan para pelaku usaha masih belum menyeluruh dan belum merata			
Meningkatkan produktivitas para pelaku usaha (UMKM), petani, nelayan dan profesi lainnya	Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, UMKM dan sektor pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Koperasi dan UKM
		Laju Pertumbuhan (dari tahun ke tahun) sektor perikanan, pertanian dan pariwisata	
		Tingkat Kemiskinan	
		Jumlah UMKM dan IKM aktif	
Isu Strategis 5: Belum adanya penataan migrasi dan pembinaan bagi para migran			
Mengurangi Kawasan padat penduduk dan kumuh	Meningkatnya luasan lingkungan hidup berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan PUPR
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase timbunan sampah yang ditangani	
Isu Strategis 6: Belum adanya data akurat yang terintegrasi antar sektor			
Membangun Bank Data Akurat Kabupaten Tangerang	Terbentuknya Bank Data akurat Kabupaten Tangerang yang terintegrasi	Kelengkapan Bank Data akurat	Statistik

Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Tangerang

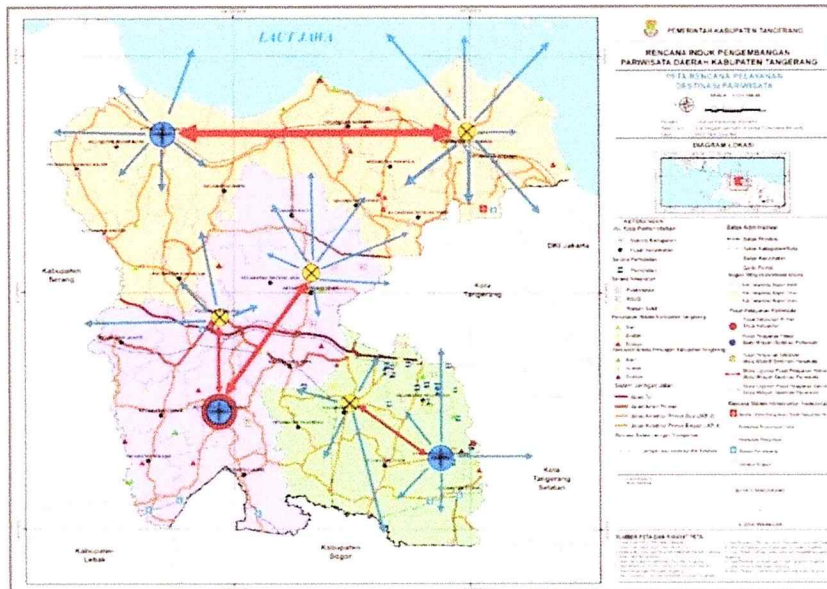
3) Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tangerang 2023-2043

Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tangerang berisikan arahan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tangerang. Di dalamnya memuat analisis, visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tangerang serta arahan detail berupa rencana pengembangan perwilayahan dan program pembangunan kepariwisataan. Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tangerang adalah “Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang yang nyaman, berbudaya, berbasis masyarakat, serta berkelanjutan”.

Berdasarkan visi tersebut di atas, disusunlah misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tangerang sebagai berikut.

1. Pengembangan Objek Wisata dan Kebudayaan
2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia
3. Peningkatan Aksesibilitas, Sarana dan Prasarana Pariwisata
4. Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Kepariwisata

Misi di atas selanjutnya dijabarkan melalui tujuan-tujuan yang ada di dalamnya. Kemudian disusun kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan yang bermuara pada rencana pembangunan perwilayahan pariwisata. Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata terbagi menjadi dua, yaitu rencana struktur perwilayahan pariwisata yang dimuat dalam peta dan rencana kawasan pengembangan pariwisata dan Kawasan strategis pariwisata.



Gambar 3.2

Peta Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata dan Pelayanan Destinasi Pariwisata Kabupaten Tangerang

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2043

Wilayah destinasi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian utara dengan tema wisata kawasan pesisir, bagian barat dengan tema wisata alam dan budaya, dan bagian timur dengan tema wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*). Pusat-pusat pelayanan pariwisata tersebar di beberapa titik yang dihubungkan oleh jaringan transportasi. Penyusunan rencana struktur tersebut telah mengacu pada arahan sistem perkotaan Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031.

- 4) Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2037

Dalam mendorong pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Tangerang yang menjadi *leading sector*, pemerintah daerah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2037. Dokumen RPIK menjabarkan arahan untuk mewujudkan *Industri Kabupaten Tangerang Cerdas, Hijau Menuju Kesejahteraan Masyarakat*. Industri Unggulan Daerah Kabupaten Tangerang yaitu (1) industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki; (2) industri makanan dan minuman; (3) industri tekstil dan pakaian jadi; serta (4)

industri kreatif. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tangerang bertujuan untuk:

- memberikan gambaran dan arah Rencana Pembangunan Industri Daerah;
- memberikan landasan hukum dan pedoman Rencana Pembangunan Industri Daerah;
- mengembangkan potensi pertumbuhan sektor industri;
- meningkatkan nilai tambah industri;
- meningkatkan serapan tenaga kerja;
- meningkatkan kontribusi PDRB daerah;
- meningkatkan ekspor produk industri;
- memperkuat rantai pasok produk industri unggulan antar kecamatan;
- meningkatkan daya saing dan meningkatkan sumber daya manusia terampil;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat

5) Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2036

Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Tangerang disusun sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat seiring berkembangnya jumlah rumah tangga dan kawasan permukiman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Sistem Penyediaan Air, pengembangan dan perencanaan SPAM memiliki tujuan untuk menciptakan pengelolaan air minum yang berkualitas, berkuantitas, dan berkelanjutan kepada publik secara menyeluruh dengan harga yang terjangkau. Upaya pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efisien, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui identifikasi sumber-sumber air baku yang dapat dimanfaatkan baik bersumber dari air permukaan, air tanah, maupun mata air; identifikasi kebutuhan dasar air bersih masyarakat dan ketersediaan potensi air baku masa depan; Menyusun rencana pengelolaan air bersih masyarakat; dan menyusun rencana anggaran investasi penyediaan air bersih.

Kabupaten Tangerang memiliki potensi air permukaan berupa sungai dan situ/rawa dan air bawah tanah yang tergabung dalam cekungan air tanah Serang-Tangerang. Berdasarkan satuan wilayah sungai, Kabupaten Tangerang dilalui oleh 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit sebagai berikut.

Tabel 3.4
Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Tangerang

No	Nama DAS
1	DAS Cidurian
2	DAS Cirumpak
3	DAS Cipayeun
4	DAS Cikapadilán
5	DAS Cisadane
6	DAS Ciasin
7	DAS Cirarab
8	DAS Cimauk
9	DAS Cileleus
10	DAS Cimanceuri
11	DAS Ciranggon

Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang

Selain sungai, Kabupaten Tangerang juga memiliki badan air yang menampung air hujan dan *run-off* berupa situ/danau dan rawa yang tersebar di seluruh wilayah dengan daftar sebagai berikut.

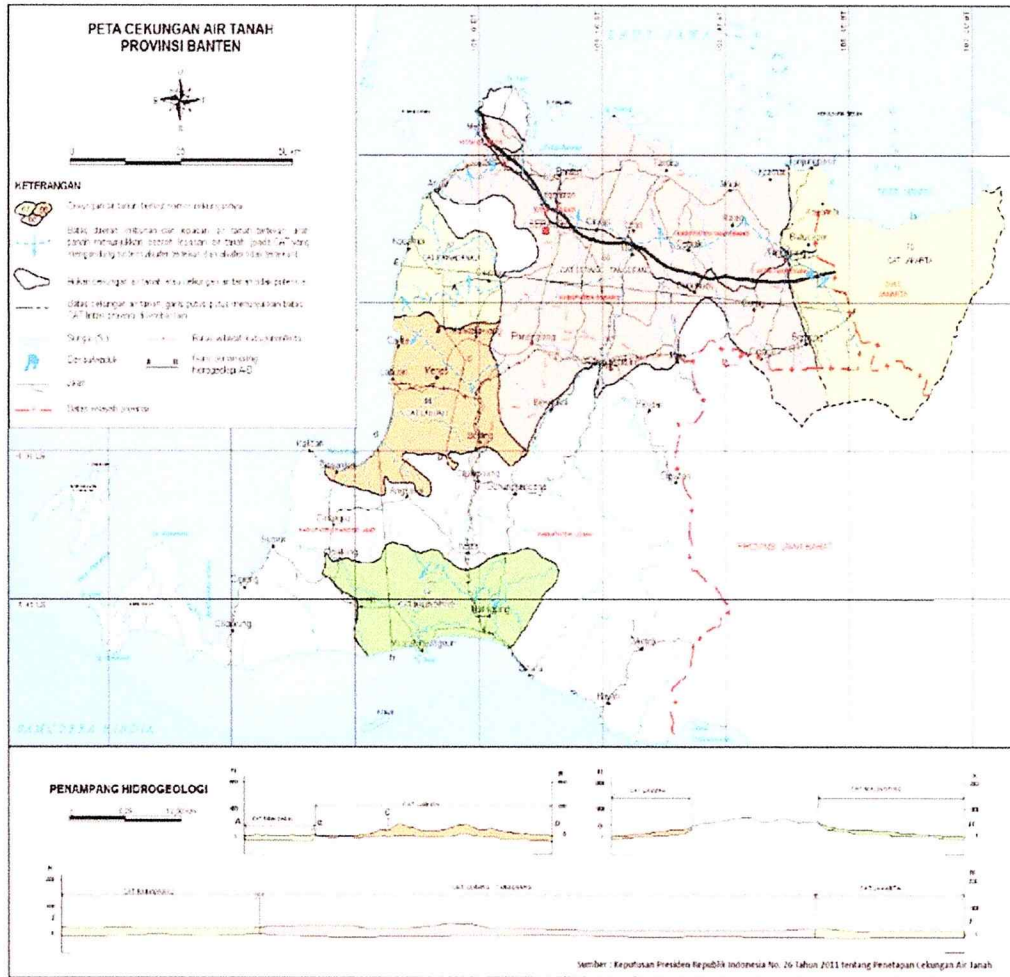
Tabel 3.5

Situ/Danau/Rawa di Kabupaten Tangerang

No	Nama Situ/Rawa/Danau	Desa	Kecamatan
1	Situ Jengkol	Cikuya	Solear
2	Situ Cihuni	Cihuni	Pagedangan
3	Situ Kelapa Dua	Kelapa Dua	Kelapa Dua
4	Situ Bojong	Bojong	Cikupa
5	Situ Pasir gadung	Pasir Gadung	Cikupa
6	Situ Warung Rebo	Wanakerta	Sindang Jaya
7	Situ Kwaron	Wanakerta	Sindang Jaya
8	Situ Cilongok	Sukamantri	Pasar Kemis
9	Situ Pondok	Sukaharja	Sindang Jaya
10	Situ Patrasana	Patrasana	Kresek
11	Situ Pangodokan	Kutabumi	Pasar Kemis
12	Situ Jambu	Jambu Karya	Rajeg
13	Situ Garukgak	Talok	Kresek
14	Situ Gabus	Tamiang	Gunung Kaler
15	Situ Genggong	Tamiang	Gunung Kaler
16	Situ Panggang/Gelam	Gelam Jaya	Pasar Kemis
17	Situ Sulang	Lebakwangi	Sepatan
18	Situ Dadap	Pangadegan	Pasar Kemis
19	Situ Koja	Pisangan Jaya	Sepatan
20	Situ Kepuh	Pakuhaji	Pakuhaji
21	Situ Gede	Pekayon	Sukadiri
22	Situ Setingin	Klebet	Kemiri
23	Situ Kemuning	Buni Ayu	Sukamulya
24	Situ Sarakan	Sarakan	Sepatan
25	Situ Ranca Ilat	Cirumpak	Kronjo
26	Situ Waluh	Kosambi Dalam	Mekarbaru

Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang

Selain air permukaan, Kabupaten Tangerang juga menyimpan potensi air tanah yang tergabung ke dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang. Debit air tanah di Kabupaten Tangerang diketahui berkisar antara 3-10 liter/dt/km². Potensi CAT dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu potensi umbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m³/tahun dan potensi aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m³/tahun.



Gambar 3.3

Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Banten

Sumber: Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Tangerang saat ini disediakan dan diselenggarakan oleh PDAM Tirta Kerta Raharja. Perusahaan air minum ini telah melayani 6 zona (5 zona PERUMDAM TKR dan 1 zona swasta) yang dibagi di beberapa kecamatan. Pemenuhan ketersediaan air di keenam zona tersebut didistribusikan melalui 10 SPAM yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.6
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Tangerang

No.	SPAM	Unit Air Baku	Intake	Unit Produksi	Unit Distribusi
1.	SPAM Cikokol	Sungai Cisadane	Pompa 5x600 lt/dt	Kapasitas Pengolahan sebesar 1.275 lt/dt	Melayani wilayah Karawaci, Priuk, Jatiuwung, dan Kalideres
2.	SPAM Perumnas	Sungai Cisadane	Pompa 125 lt/dt	Kapasitas terpakai sebesar 120 lt/dt	Melayani wilayah Perumnas, Cibodas, dan Jatiuwung
3.	SPAM Babakan	Sungai Cisadane	Pompa 2x20 lt/dt	Kapasitas pengolahan sebesar 80 lt/dt	Melayani wilayah Pelayanan I (zona A)
4.	SPAM Bojong Renged	Sungai Cidurian	Pompa 2x50 lt/dt	Kapasitas pengolahan sebesar 100 lt/dt	Melayani Kecamatan Teluknaga dan Kosambi sebanyak 8.700 pelanggan

No.	SPAM	Unit Air Baku	Intake	Unit Produksi	Unit Distribusi
5.	SPAM Solear	Sungai Cidurian	Pompa 100 lt/dt	Kapasitas pengolahan sebesar 100 lt/dt	Melayani Kecamatan Solear, Tigaraksa, dan Balaraja sebanyak 12.848 pelanggan
6.	SPAM Cisauk	Sungai Cidurian	Pompa 50 lt/dt	Kapasitas pengolahan sebesar 50 lt/dt	Melayani Kecamatan Cisauk sebanyak 7.800 pelanggan
7.	SPAM Kronjo	Sungai Cipasilian	Pompa 10 lt/dt	Kapasitas terpakai sebesar 10 lt/dt	Melayani Kecamatan Kronjo sebanyak 650 pelanggan
8.	SPAM Kresiek	Sungai Cimanceri	Pompa 15 lt/dt	Kapasitas pengolahan sebesar 15 lt/dt	Melayani Kecamatan Rajeg sebanyak 1.200 pelanggan
9.	SPAM Mauk	Irigasi Sungai Cisadane	Pompa 15 lt/dt	Kapasitas pengolahan dan terpakai sebesar 15 lt/dt	Melayani Kecamatan Mauk sebanyak 1.900 unit
10.	SPAM Rajeg	Irigasi Sungai Cisadane	Pompa 25 lt/dt	Kapasitas pengolahan dan terpakai sebesar 25 lt/dt	Melayani kecamatan Rajeg sebanyak 3.400 pelanggan

Sumber: RISPAM Kabupaten Tangerang 2022-2036

Berdasarkan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa terdapat beberapa kawasan kecamatan yang tidak mendapatkan sumber air minum. Sehingga penyediaan cakupan layanan air minum di Kabupaten Tangerang belum merata secara menyeluruh. Terdapat beberapa kecamatan yang harus mendistribusikan sumber airnya ke kecamatan lain yang mengalami krisis air. Oleh karenanya diperlukan pengelolaan dan pengendalian potensi ketersediaan air bersih dan air minum di Kabupaten Tangerang sehingga terpenuhinya kebutuhan air bagi seluruh rumah tangga.

6) Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2041

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2041 disahkan melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 116 Tahun 2021. Dokumen ini diterbitkan dengan maksud untuk mewujudkan keterpaduan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman, mewujudkan lingkungan hunian yang mendukung perikehidupan terpadu, mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, mewujudkan penggunaan sumber daya, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang. Visi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang yaitu *“Terwujudnya lingkungan perumahan dan kawasan lingkungan perumahan dan permukiman di Kabupaten Tangerang yang layak, sehat, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat serta keterpaduannya dengan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang terintegrasi dengan sistem perkotaan”*. Misi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah *“Membantu semua orang agar dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif, dan berkelanjutan”*.

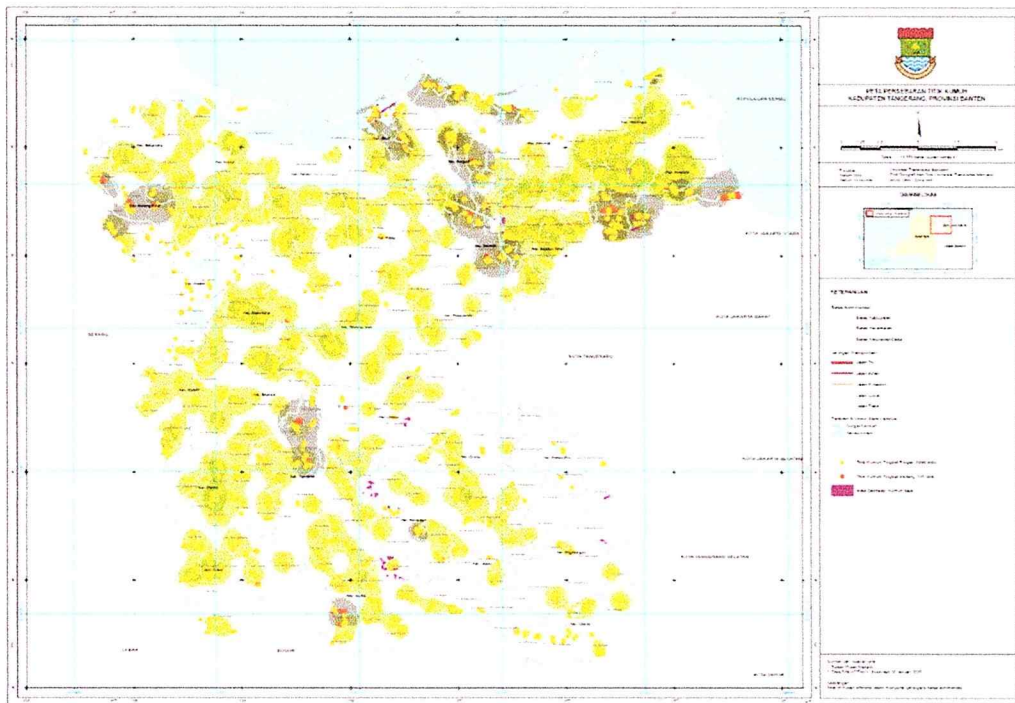
Strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Tangerang tahun 2020-2039 adalah sebagai berikut.

- a. Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan baru dan hunian vertikal untuk mengatasi *backlog* perumahan;
- b. Pembangunan baru dan peningkatan kualitas perumahan swadaya;
- c. Pembangunan baru dan peningkatan kualitas perumahan mendukung pariwasta;
- d. Peningkatan kualitas permukiman kawasan strategis dan permukiman tradisional;
- e. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kota Baru;
- f. Peningkatan kualitas kawasan kumuh secara bertahap untuk mengurangi luasan kawasan kumuh;
- g. Pembangunan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada perumahan dan kawasan permukiman termasuk wilayah terdampak bencana; dan
- h. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman.

Saat ini, kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi dan sedang terhitung kurang lebih sebanyak 27.937 hektar meliputi 21 kecamatan. Sementara, permukiman perdesaan dengan kepadatan penduduk rendah terhitung kurang lebih sebanyak 16.631 hektar meliputi 8 kecamatan. Berdasarkan pengamatan primer dan sekunder yang dilakukan, diketahui dari seluruh kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan beberapa permasalahan mendesak yang perlu ditangani dan diantisipasi yaitu:

- Lingkungan Permukiman Kumuh

Keberadaan permukiman kumuh menunjukkan kesejahteraan tinggal masyarakat di Kabupaten Tangerang yang belum sepenuhnya merata. Saat ini masih terdapat sekitar 30% kawasan permukiman kumuh dan persentase jumlah rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh wilayah.



Gambar 3.4

Persebaran Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Tangerang

Sumber: Lampiran Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 50/Kep.1807-Huk/2021

Kawasan permukiman kumuh ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sebagian besar keluarga merupakan bagian dari keluarga kurang sejahtera karena kesulitan ekonomi. Lokasi permukiman kumuh tersebar di kawasan perkotaan, kawasan nelayan, bantaran sungai, hingga tersembunyi di balik bangunan-bangunan besar perumahan maupun pertokoan.

- **Kurangnya Ketersediaan Prasarana Permukiman yang Memadai**
Prasarana permukiman yang terdiri dari penerangan jalan umum (PJU), layanan air minum, serta layanan air limbah dan sanitasi perlu diperluas agar dapat menjangkau seluruh wilayah secara menyeluruh. Pada beberapa titik permukiman spontan, penerangan jalan masih kurang sehingga meningkatkan bahaya dan tindak kriminal. Selain itu, masalah pembuangan air limbah juga ditemukan karena masih banyak keluarga yang mengandalkan buangan alami sehingga mengakibatkan penumpukan air limbah. Hal ini berbahaya dan dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan lingkungan.
- **Berkembangnya Industri Rumah Tangga Polutif di Kawasan Perumahan Padat**
Beberapa kawasan padat di Kabupaten Tangerang diisi oleh kegiatan industri rumah tangga. Namun, kegiatan ini keberadaannya tidak sesuai dengan fungsi perumahan sehingga menimbulkan polusi air dan tanah di kawasan permukiman. Upaya relokasi industri rumah tangga polutif menjadi solusi saat ini, kegiatan akan dipindahkan ke area yang lebih didukung dengan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri.
- **Intervensi Lahan Permukiman ke Kawasan Lindung**
Pertumbuhan kepadatan permukiman di Kabupaten Tangerang diperkirakan akan semakin meningkat mengingat semakin tingginya jumlah penduduk. Kebutuhan akan tempat tinggal tumbuh pesat sehingga ketersediaan lahan pun menjadi konsentrasi yang perlu dipikirkan. Kondisi ini memungkinkan adanya mekanisme regulasi dan kontrol serta pengendalian untuk mempertahankan kawasan lindung agar tidak diambil/diintervensi untuk pemenuhan kebutuhan permukiman.
- **Penurunan Kualitas Lingkungan Permukiman**
- **Masalah Kepemilikan Lahan dan Bangunan**

3.2.2 Isu Eksternal

A. Isu Global

1) **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals***
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB dalam hal ini telah ditetapkan RAD TPB/SDGs Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2023. Berdasarkan persentase capaian TPB¹ untuk Kab. Tangerang 55% sudah terpenuhi sesuai target pada rencana pembangunan. Sementara terdapat 25% belum terpenuhi, sedangkan untuk beberapa indikator yang sudah terlaksana namun belum sesuai target atau tercapai sebagian yaitu 20%. Pilar Sosial merupakan indikator terbanyak, kemudian pada pilar hukum dan tata Kelola hanya terdapat 3 indikator.

2) Demografi Global dan Bonus Demografi

Demografi global sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat tetapi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Berdasarkan kajian BPS (2022), bahwa proyeksi jumlah penduduk tahun 2035 di Kab. Tangerang mencapai 3,73 juta jiwa. Komposisi penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) mencapai 71,09% dari jumlah penduduk dengan rasio ketergantungan sebesar 40,66% pada tahun 2035. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan (Bappenas, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda, kapasitas tenaga kerja dalam menghadapi tantangan persaingan kerja. Dengan adanya persaingan kerja juga berdampak pada pilihan dalam berkeluarga dan penurunan angka kelahiran sebagaimana terjadi di negara-negara maju (Efendi, 2024)².

Selain itu, tantangan lainnya adalah peningkatan porsi penduduk lanjut usia atau *ageing population* sehingga pemerintah perlu menyiapkan mekanisme perlindungan sosial dan cakupan jaminan kesehatan bagi lansia. Dalam merespon tantangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan menjadi mandat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program-program untuk mewujudkan lansia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

3) Urbanisasi Global

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan penduduk dunia di perkotaan atau Urbanisasi Global. Perkotaan menjadi pusat pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penghidupan layak, serta peningkatan daya saing dan inovasi. Akan tetapi, fenomena ini menjadi tantangan pembangunan jangka panjang yaitu pembangunan perkotaan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah, inklusivitas dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu, tantangan pembangunan jangka panjang perlu memperhatikan pembangunan perdesaan. Kawasan perdesaan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang disertai dengan inovasi dalam rangka menciptakan nilai tambah produktivitas SDA (e.g. pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan lain sebagainya). Maka, dari itu, perkotaan dan perdesaan

¹ Dalam Dokumen Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2023

² Zuanna (2007) dalam Efendi (2024). Menghadapi Penuaan Penduduk Indonesia. Dilansir dari: https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/artikel/menghadapi-penuaan-penduduk-indonesia/#_ftn4

menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dalam wilayah melalui membangun keterhubungan atau integrasi ekonomi (e.g. hilirisasi, rantai pasok, transformasi digital, dan lain sebagainya) melalui pembangunan infrastuktur kewilayahan.

4) Geopolitik dan Geoekonomi

Salah satu target pembangunan Indonesia 2045 adalah lepas dari negara *middle income trap* menjadi bagian negara maju yang berdaya saing global. Dinamika geopolitik berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi negara dan regional salah satunya dinamika daya tarik investasi dan perdagangan global-nasional-regional. Posisi Kabupaten Tangerang yang berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai kota global atau *Alpha*³ dan konurbasi Jabodetabek-punjur dalam konteks perekonomian global menjadi potensi mendorong sektor sekunder dan tersier. Selain itu kerja sama antar negara dan institusi global tentunya akan mendorong akselerasi ekonomi negara berkembang dalam hal pendanaan komitmen global. Berbagai potensi tersebut menjadi tantangan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu *Asean Free Trade Area* (AFTA) juga berpengaruh pada dinamika ekonomi dan perdagangan Kabupaten Tangerang. Dengan terbukanya pasar bebas di kawasan ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya.

5) Tren Ekonomi Global

Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat ke-4 Produk Domestik Bruto terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat pada tahun 2050. Tren ekonomi global menunjukkan perubahan dari industri padat karya ke industri padat modal, pergerseran dari industri pengolahan ke industri perdagangan dan jasa (termasuk ICT), disrupsi teknologi dan perubahan struktur demografi yang memengaruhi preferensi konsumen (pasar) terhadap produk dan layanan serta *silver economy* dan *aging society* yang menunjukkan membaiknya layanan kesehatan dan kualitas pendidikan. Berdasarkan Goldman Economics Paper, prasyarat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi besar di dunia, yaitu: (1) kualitas kelembagaan; (2) keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi; (3) pendidikan; (4) stabilitas makro; dan (5) kualitas infrastruktur.

6) Perkembangan Teknologi

Disrupsi teknologi merupakan fenomena perkembangan teknologi yang berpengaruh pada perilaku masyarakat, pasar, industri, dan lain sebagainya. Disrupsi teknologi ditandai dengan inovasi-inovasi yang mendorong produktivitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya dan operasional. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal dan meminimalkan risiko disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things (IOT)*, Kecerdasan Buatan (AI), rekayasa genetik, *nanotechnology*, dan lain sebagainya akan mempengaruhi sektor manufaktur, perkembangan pendidikan-kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Selain itu, teknologi membuka peluang pembangunan ekonomi, mendorong inovasi, dan transformasi tata kelola kinerja pelayanan publik (Bappenas, 2023).

³ Kelompok peneliti *Globalization and World Cities* (GaWC) yang berpusat di Longborough University membagi perkotaan di dunia ke dalam empat kelas perkotaan (*Alpha, Beta, Gamma dan Sufficiency*). *Alpha* adalah kelompok perkotaan yang memiliki pengaruh dan dominasi kuat atas dinamika dan perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan adanya pemusatan institusi ekonomi global (kantor pusat, kantor cabang) di kota-kota tersebut.

7) Persaingan Sumber Daya Alam

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk global, serta peningkatan standar hidup dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dan ketidakseimbangan *supply-demand*. Hal ini dapat menjadi tantangan pembangunan kedepan yang mempengaruhi munculnya berbagai isu seperti peningkatan ketimpangan, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, diperlukan arah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang mengoptimalkan pada nilai tambah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8) Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon

Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Pada *Paris Agreement* tahun 2015, Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Kajian Bappenas (2019)⁴ menunjukkan capaian penurunan emisi GRK Indonesia dapat mencapai 43% di tahun 2030. Maka dari itu, ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi landasan penting arahan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang dalam mendukung capaian target nasional. Upaya strategis yang menjadi arahan dalam pembangunan rendah karbon di Kabupaten Tangerang, yaitu: (1) mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan penggunaan kendaraan listrik rendah emisi (atau *electric vehicle*); (2) peningkatan efisiensi energi; (4) mematuhi komitmen konservasi sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; serta (5) peningkatan produktivitas lahan.

B. Isu Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai arahan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan pembangunan yang signifikan dalam dinamika global sebagai negara berkembang dan tantangan kedepannya adalah menjadi negara maju. Isu dan tantangan pembangunan ke depan, yaitu:

- rendahnya tingkat produktivitas di tengah peningkatan persaingan global
- kualitas dan kuantitas SDM dalam penelitian belum memadai
- deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
- belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
- belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
- rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;
- produktivitas tenaga kerja indonesia relatif tertinggal
- pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan
- rendahnya penggunaan EBT dan efisiensi energi
- kualitas pendidikan yang masih rendah

⁴ Diperoleh dari Dokumen Pembangunan Rendah Karbon : Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia oleh Bappenas dan LCDI (2019). Diakses dari <https://lcdi-indonesia.id/dokumenpublikasipembangunanrendahkarbon/>

- belum meratanya akses jaminan sosial
- disharmoni regulasi dan kelembagaan instansi yang terfragmentasi
- belum meratanya kualitas pelayanan publik
- tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati

Berdasarkan berbagai permasalahan dan isu pembangunan dalam nasional di atas, isu strategis pembangunan jangka panjang nasional yaitu (1) Pertumbuhan ekonomi dan produktivitas; (2) Kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi; (3) Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi; (4) Tata kelola pemerintahan; (5) Transformasi digital; serta (6) Infrastruktur yang belum merata.

Maka dari itu dalam RPJPN 2025-2045 dirumuskan Visi Indonesia Emas 2045: “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Lima sasaran utama Visi Indonesia 2045, yaitu: (1) Pendapatan per kapita setara negara maju; (2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional mengikat; (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; serta (5) Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*. Lima sasaran tersebut diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 indikator utama pembangunan.

Dalam dokumen RPJPN 2025-2045 memuat Transformasi Kewilayahan *Supercorridor* Sumatera-Jawa. Dalam perspektif makroregional, Sumatera berperan sebagai *hinterland* dan *supply ground* atas aglomerasi penduduk di Jawa dan Semenanjung Malaya-Singapura-RRT yang berperan sebagai *market/demand generator*. Dalam mendukung transformasi tersebut, tema pengembangan Pulau Jawa yaitu “Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan” dan Kabupaten Tangerang diarahkan menjadi bagian Kawasan Strategis Industri Serang-Tangerang.

Berdasarkan tren ekonomi regional Kabupaten Tangerang terus tumbuh 3-4% dan 71-72% ekonomi Kabupaten Tangerang didominasi oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Real Estate. Dengan arahan pengembangan sektor industri dan transformasi kewilayahan, maka diperlukan *Industrial Policy* di Kabupaten Tangerang. Hilirisasi industri pengolahan di Kabupaten Tangerang terkonsentrasi disekitar Jalan Toll Jakarta-Merak dan terdapat 94 industri pengguna logam baja dan 184 industri pengguna petrokimia di Kabupaten Tangerang (Bappenas, 2023)⁵. Maka dari itu arahan kebijakan hilirisasi industri pengolah di Kabupaten Tangerang, yaitu:

- Konsep *Economy circular* untuk mengurangi impor bahan baku dan mengurangi limbah sampah melalui pendekatan 9R (*refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, recovery*)
- Penggunaan energi terbarukan melalui REBID (*Renewable Energy Base Base Industry Development*)/REBED (*Renewable Energy Base Economic Development*) (pabrik *co-generation*, dan lain sebagainya)
- Pengembangan infrastruktur jalan, transportasi, dan logistik
- Peningkatan kapasitas tenaga kerja dengan *Technical Vocational Education and Training* (TVET)
- Pengembangan pusat riset dan inovasi di dalam kawasan industri

Selain pengembangan ekonomi regional, dalam dokumen tersebut memuat arahan penataan kawasan pesisir : Wisata *Aquaculture* Ketapang. Permasalahan di kawasan pesisir seperti abrasi, pencemaran air laut, dan

⁵ Dokumen Paparan Direktorat Regional 1 Kementerian PPN/Bappenas mengenai Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dan arahan RPJPD Kabupaten Tangerang pada 24 Oktober 2023

rumah tidak layak huni menjadi tantangan pembangunan pesisir Kabupaten Tangerang. Desa Ketapang Kec. Mauk, Kab. Tangerang menjadi *best practice* pengembangan kawasan pesisir di Asia Timur yang diharapkan dapat menjadi percontohan penataan kawasan pesisir lainnya di Kab. Tangerang (Bappenas, 2023).

C. Isu Regional

Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah yang memiliki bonus demografi cukup tinggi di Pulau Jawa. Menurut BKKBN, tahun berakhirnya bonus demografi di Provinsi Banten adalah tahun 2046. Sementara itu, di tahun 2050 angka ketergantungan di Provinsi Banten berada di angka 52,83, artinya 100 orang produktif akan menanggung 52 hingga 53 orang tidak produktif (BPS, 2023).

Berdasarkan posisi geostrategis, Provinsi Banten merupakan pintu gerbang yang berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta sebagai daerah khusus pengembangan ekonomi. Dari sisi perdagangan, selain menjadi penghubung jalur perdagangan Sumatera dan Jawa, Provinsi Banten merupakan bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional. Lokasi wilayah Provinsi Banten juga menjadi titik potensial aglomerasi perekonomian dan permukiman.

Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari aglomerasi Jabodetabek merupakan isu pembangunan jangka panjang dimana tantangannya adalah mendorong *Economic Engine* dengan tetap berlandaskan daya dukung dan prinsip keberlanjutan. Tren dalam 10 tahun terakhir menunjukkan wilayah Jabodetabek mengalami transformasi struktur ekonomi ke tersier dengan sektor penopang perekonomian adalah sektor Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, serta Perdagangan dan Reparasi.

Perekonomian Kabupaten Tangerang yang ditopang oleh sektor Industri Pengolahan menghadapi tantangan deindustrialisasi dimana pertumbuhan industri telah mencapai titik jenuh karena pergeseran daya tarik industri ke bagian timur Jawa. Selain itu, jika membandingkan PDRB per kapita Kabupaten Tangerang dengan wilayah Jabodetabek tergolong rendah dan ini berdampak pada kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa. Tantangan pembangunan kedepan Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari Jabodetabek mengarahkan ke sektor ekonomi tersier yang berorientasi pada pengembangan industri teknologi dan informasi digital untuk pasar global.

Maka dari itu, diperlukan sinergi kerjasama Jabodetabek dalam membangun *Economic Engine* terintegrasi. Sinergi kerjasama tersebut berupa kerjasama pengembangan sektor unggulan Jabodetabek, pengembangan potensi pasar dan skala ekonomi di tingkat global, serta pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jabodetabek⁶.

Provinsi Banten dengan Kabupaten Tangerang sebagai bagian yang integral, memiliki beberapa tantangan rencana pembangunan yaitu pembangunan MRT Balaraja Cikarang, pembangunan Kota Baru Publik Maja, pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, serta pembangunan *coastal reservoir* di muara Sungai Cisadane.

Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

- Lingkungan dan kebencanaan, terkait dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan dan kewaspadaan terhadap bencana
- Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang berada dalam posisi *lower-middle income*

⁶ Supriatna., Y (2024). Paparan Masa Depan Aglomerasi Jabodetabek Pasca Ibukota. Musrenbang RP JPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

- Pendidikan dan inovasi, melalui dukungan merdeka belajar dan pengembangan pola pikir berinovasi untuk meningkatkan partisipasi sekolah
- Peningkatan fasilitas kesehatan dan penyelesaian kasus kesehatan
- SDM, kependudukan, dan pemberdayaan masyarakat & desa, melalui peningkatan kapasitas SDM serta pembangunan dan kemandirian desa
- Daya saing infrastruktur dan kewilayahan, melalui peningkatan infrastruktur laut, darat dan udara, serta pengembangan kewilayahan sektor pariwisata dengan dukungan interkoneksi telekomunikasi
- Daya saing investasi, industri, dan perdagangan melalui peningkatan investasi guna mendukung pengembangan industrialisasi dan perdagangan
- Tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong birokrasi yang berdampak

3.2.3 Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang

Berdasarkan hasil telaah isu internal pembangunan sepuluh tahun terakhir di Kabupaten Tangerang serta isu eksternal dari isu global, kebijakan nasional (sasaran RPJP Nasional 2025-2045) maupun regional (Provinsi Banten dan Jabodetabek) dirumuskan isu strategis Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

A. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal penting dalam meraih visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2022 Kabupaten Tangerang memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Kabupaten Tangerang. Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan dimulai dari sedini mungkin. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Kualitas dan daya saing SDM tercermin dalam beberapa aspek yaitu kualitas dan partisipasi pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta pembangunan dan pemberdayaan perempuan serta anak.

- 1) Kualitas dan partisipasi pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Tantangan yang saat ini dihadapi Kabupaten Tangerang adalah rendahnya partisipasi pendidikan, ketercukupan sarana pendukung, rendahnya IPTEKIN (Ilmu, Pengentahuan, Teknologi, dan Inovasi), rendahnya literasi digital, serta kualifikasi tenaga pendidik. Perlu kebijakan yang bersifat holistik sehingga Kabupaten Tangerang dapat memperkuat kualitas dan daya saing SDM yang menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial masa depan.
- 2) Derajat kesehatan masyarakat berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam rangka memperkuat daya saing SDM untuk menghadapi tantangan masa depan. Tantangan yang saat ini dihadapi Kabupaten Tangerang berkaitan dengan kesehatan ibu dan bayi, penyakit menular dan tidak menular, ketersediaan tenaga kesehatan, dan sarana pendukung. Untuk itu, perlu penyelesaian yang mencakup penguatan sistem kesehatan, peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dasar, dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit.

- 3) Pemberdayaan dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan sosial masyarakat. Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan dalam pemberdayaan fakir miskin dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Diperlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan sosial, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan pekerjaan, serta pengembangan program perlindungan sosial yang lebih inklusif.

B. Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan dan pemerataan ekonomi menjadi aspek penting dalam kemajuan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dalam pencapaian tujuan besar tersebut berbagai tantangan pembangunan dihadapi oleh Kabupaten Tangerang yaitu pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan kesenjangan pembangunan ekonomi.

1) Produktivitas dan daya saing kegiatan ekonomi

- a. Daya saing ekonomi dan investasi. Sektor produktif merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PDRB Kabupaten Tangerang, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan, perdagangan besar, dan konstruksi. Namun, jika melihat tren bahwa pertumbuhan ketiga sektor fluktuatif dan cenderung melambat pada lima tahun terakhir. Industri yang berorientasi pada padat modal menghadapi tantangan deindustrialisasi dini. Kondisi deindustrialisasi muncul ketika terjadi penurunan produktivitas sektor industri sehingga sektor industri manufaktur tidak lagi menjadi pangsa kontribusi terhadap perekonomian. Maka dari itu diarahkan untuk transformasi industri padat karya ke industri padat modal.
- b. Penguatan sumber daya lokal. Kabupaten Tangerang memiliki sektor ekonomi potensial berbasis SDA yang belum dioptimalkan. Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, kelautan & perikanan, serta peternakan belum menunjukkan performa yang baik karena produktivitasnya yang stagnan. Permasalahan ini disebabkan oleh kapasitas SDM dan kelembagaan sektor belum optimal serta operasional dan kualitas produk hasil sektor yang belum berdaya saing. Berdasarkan hasil FGD, faktor penting yang mempengaruhi produktivitas sektor pertanian adalah ketersediaan air untuk irigasi pertanian, alih fungsi lahan pertanian menjadi terbangun, dan minimnya regenerasi petani. Sektor pertanian dan kelautan & perikanan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam arti luas juga berperan untuk ketahanan pangan dan konsumsi pangan yang bergizi.
- c. Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Tangerang adalah ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Berdasarkan data P3K Kemenko PMK (2022), persentase penduduk dengan berpendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 37,6% atau sekitar 1,26 juta jiwa. Capaian tersebut lebih baik dibanding Provinsi Banten sebesar 40% dari jumlah penduduk Banten. Walaupun Indeks Gini Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 dalam kategori rendah yaitu 0,282, tetapi diperlukan upaya untuk

menurunkan ketimpangan. Ketimpangan dipicu oleh nilai tambah sektor pertanian yang rendah sementara industri padat modal yang menyerap sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah tinggi.

- 2) Pembangunan dan daya saing ketenagakerjaan. Selain itu dari faktor sumber daya manusia utamanya angkatan kerja yang belum memenuhi kualifikasi pasar kerja. Produktivitas tenaga kerja yang rendah yang ditandai dengan pendapatan per kapita yang rendah di beberapa sektor (pertanian, penyedia makan minum) akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat alias persentase penduduk miskin. Maka dari itu diperlukan upaya untuk penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya melalui pengembangan UMKM, investasi terhadap pelatihan tenaga kerja, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, serta mendorong pemberdayaan dan kepastian jaminan sosial untuk semua terutama kelompok rentan. Dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penopang ekonomi masyarakat dan serapan tenaga kerja diperlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan inovasi produk. Maka dari itu diperlukan upaya meningkatkan kapasitas SDM yang berorientasi *entrepreneur* untuk membuka peluang inovasi, pasar baru, dan dalam arti luas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penguasaan IPTEK dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. IPTEK berperan dalam optimalisasi dan mengakselerasi nilai tambah dari sektor perekonomian. Maka dari itu, tantangan kedepan adalah kemampuan daerah dalam mengadopsi IPTEK serta penguatan talenta digital. Selain itu, penggunaan IPTEK juga mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang membuka peluang investasi dan kesempatan kerja hijau (*Green Jobs*).
- 4) Integrasi dalam Penguatan Ekonomi Domestik - Regional. Perekonomian Kabupaten Tangerang disokong oleh sektor perindustrian, manufaktur, dan jasa. Dalam mendorong nilai tambah dan peluang investasi membutuhkan penguatan rantai antar pusat pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap pasar. Terlebih lagi posisi Kabupaten Tangerang yang strategis sebagai penyangga Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek, sehingga diperlukan arahan strategis jangka panjang dalam Pembangunan Kabupaten Tangerang. Dalam penguatan ekonomi domestik-regional perlu didukung dengan peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur terintegrasi dan konektivitas antar wilayah, memperkuat akses ke pasar regional, serta mengurangi biaya logistik.

C. Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur bagi pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan lingkungan menjadi salah satu isu strategis Kabupaten Tangerang. Koordinasi dan keterpaduan penataan ruang serta penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan dasar perlu dicapai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penataan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang baik memperlihatkan bahwa daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan maksimal. Infrastruktur yang berkualitas minimal dapat memfasilitasi kehidupan sosial dan lingkungan secara efektif, membantu mendorong ekonomi yang baik, dan mampu bertahan dalam waktu yang lama (CSIS, 2017). Isu penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Tangerang ditunjukkan oleh belum optimalnya perencanaan pembangunan permukiman, belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lingkungan

perkotaan, dan belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi.

- 1) Penyediaan Infrastruktur Lingkungan. Permasalahan mengenai penyediaan infrastruktur lingkungan bagi pelaksanaan fungsi dan kegiatan perkotaan ditunjukkan dari masalah yang berkaitan dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kinerja jaringan jalan, dan kinerja drainase. Maka dari diperlukan arahan untuk penyelenggaraan penataan ruang yang terpadu melalui pemenuhan infrastruktur dasar, sosial, dan ekologis.
- 2) Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman. Kondisi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman memperlihatkan seberapa besar kesejahteraan tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data sekunder yang ditemukan, isu strategis pembangunan kawasan permukiman ditandai dengan masalah pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman serta persentase kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni yang masih tinggi. Selain itu, diperlukan perencanaan penyediaan perumahan sebagai pemenuhan dasar bermukim masyarakat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi. Maka dari itu, diperlukan arahan untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau yang didukung dengan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman serta mekanisme *creative financing* pembiayaan perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat untuk kepemilikan rumah dan bermukim dengan layak.
- 3) Pemenuhan dan Integrasi Layanan Transportasi. Isu ini ditunjukkan melalui masalah kinerja jaringan jalan angkutan umum dan belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas. Maka dari itu diperlukan rencana pengembangan transportasi umum massal (angkutan umum berbasis rel dan jalan) yang terintegrasi dan menjangkau kawasan strategis di Kabupaten Tangerang dan Jabodetabek. Selain itu, arahan pembangunan tersebut perlu diikuti dengan program strategis dalam mendorong akses masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

Selain itu, arahan dari nasional dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional dalam beberapa proyek pengembangan infrastruktur permukiman, jalan strategis, dan pariwisata melalui kerjasama badan usaha dan swasta. Proyek tersebut diantaranya Pengembangan Kawasan Terpadu BSD City, Jalan Tol Serpong-Balaraja, dan pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastland. Kawasan Terpadu BSD City akan dibangun dengan luasan sekitar 59,6 Ha dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus yang didukung dengan fasilitas Pendidikan – *Biomedical – Digital*. Kawasan tersebut akan dilewati oleh Jalan Tol Serpong – Balaraja. Pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastland akan menjadi pusat pariwisata dan ekonomi kreatif dengan luasan sekitar 1.756 ha dengan konsep *Green Area* dan *Eco-City*. Dengan pengembangan PSN tersebut dapat menjadi peluang usaha, investasi, serta *multiplier effect* terhadap peluang lapangan pekerjaan⁷.

D. Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ketahanan sosial dan kebudayaan menjadi aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat dan mempertahankan identitas kebudayaan daerah. Ketahanan sosial daerah ditunjukkan melalui pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan anak, pembangunan pemuda, serta kerukunan beragama. Sementara itu, pengendalian lingkungan hidup

⁷ Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2024). Pemerintah Tetapkan 14 PSN Baru, Hasil Kajian Lengkap untuk Pemerataan Sektor Pembangunan dari Infrastruktur hingga Pariwisata, Pendidikan, dan Kesehatan

merupakan hal mendasar dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan. Target pembangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan di tingkat regional.

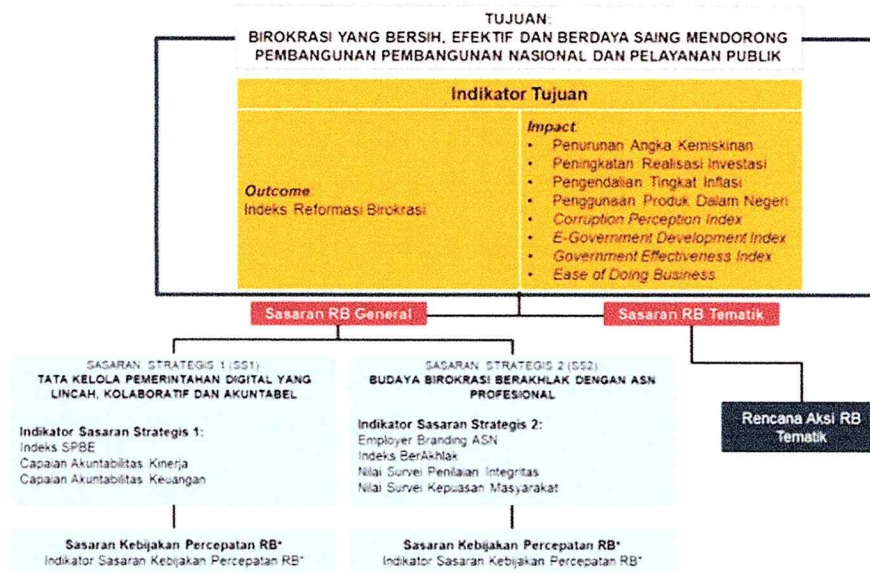
- 1) Karakter Masyarakat dalam Keberagaman Budaya. Karakter masyarakat perlu diperkuat dalam rangka membangun kohesi sosial dan harmoni di tengah keberagaman budaya. Saat ini, potensi kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Tangerang belum secara optimal dikembangkan. Diperlukan arahan-arahan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai inklusivitas sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial, budaya, dan ekonomi.
- 2) Pembangunan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, serta anak. Kesetaraan gender merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, yakni ketika seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya tanpa terbatas gender tertentu. Salah satu aspek yang dapat merepresentasikan kesetaraan gender adalah aspek pembangunan gender dan pemberdayaan wanita & anak. Saat ini, pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tidak hanya itu, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu diperlukan upaya perluasan akses perempuan dan anak terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang ekonomi. Penting untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, pelibatan komunitas, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Tidak hanya perempuan dan anak, pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan melalui kemampuan berinovasi dan kreativitas. Sayangnya, saat ini peran pemuda belum optimal terutama dalam bidang keolahragaan. Ke depan, diperlukan kebijakan proaktif yang mampu memperluas ruang partisipasi pemuda sehingga potensi prestasi akan semakin meningkat.
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan modal dasar pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya alam berperan dalam menjaga ketahanan pangan, air, dan energi. Tantangan yang saat ini dihadapi berkaitan dengan ketersediaan pangan serta ketersediaan sumber daya air. Kabupaten Tangerang perlu mengembangkan program waduk/bendungan untuk meretensi air permukaan dan memanfaatkan potensi air tanah dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang. Solusi jangka panjang melibatkan peningkatan kolaborasi lembaga, optimalisasi pengelolaan cadangan pangan, dan diversifikasi sumber air untuk memenuhi kebutuhan wilayah.
- 4) Kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 menunjukkan kategori sedang, dengan kualitas udara menjadi perhatian utama akibat belum optimalnya pengawasan asap buangan pabrik, pembangkit listrik tenaga batu bara, asap kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah secara terbuka. Data KLHS mencatat bahwa 83% lahan di Kabupaten Tangerang telah terlampaui daya dukung airnya, mengindikasikan krisis air pada lahan seluas 84.338,35 Ha. Tantangan lainnya adalah mempertahankan luas lahan konservasi dari tekanan fungsi lahan menjadi terbangun. Solusi yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah optimalisasi pengawasan emisi, peningkatan pengelolaan limbah, dan perlindungan

kawasan konservasi sebagai penyangga pembangunan untuk menjaga ketersediaan air, kualitas udara, serta ketahanan pangan.

- 5) Manajemen kebencanaan. Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki potensi kebencanaan yang tinggi, yaitu bencana cuaca ekstrim, banjir rob, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tsunami. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam manajemen kebencanaan berbasis risiko (atau mitigasi *Risk Risiko*), pengawasan ketat terhadap kelestarian lingkungan, serta penguatan sistem informasi dan peringatan dini. Melalui upaya tersebut diharapkan Kabupaten Tangerang dapat mengoptimalkan respons terhadap kebencanaan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan daya saing SDM dalam menghadapi ancaman bencana.

E. Tata Kelola Pemerintah

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi dapat memperlihatkan kinerja pemerintah dalam mengupayakan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.



Gambar 3.5

Kerangka Logis Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi setelah Penajaman
Sumber: Permen PANRB No. 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Gambar di atas memperlihatkan bahwa evaluasi RB terbagi ke dalam RB general dan RB tematik dengan indikator *income* dan *outcome* sesuai diagram tertera. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 adalah 76,67 dengan kategori "BB". Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Berdasarkan data pada aspek pelayanan umum, Indikator penyusun yang perlu diperhatikan untuk mencapai Indeks Reformasi Birokrasi yang lebih baik lagi adalah Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Tingkat Digitalisasi Arsip, Tingkat Kematangan

Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Indeks Sistem Merit, Survei Penilaian Integritas, Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi), Realisasi Investasi (Rencana Aksi), Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi), Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi), Pengendalian Infasi (Rencana Aksi). Maka dari itu, diperlukan arahan transformasi penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola pemerintah yang akuntabel, berintegritas, dan adaptif sebagaimana mandat dari RPJP Nasional 2025-2045.

- 1) Profesionalitas ASN menjadi aspek penting dalam pencapaian kinerja dan implementasi kebijakan daerah. Maka dari itu diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas ASN berbasis merit serta menjamin kesejahteraan ASN.
- 2) Kapasitas Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan dalam tata kelola fiskal dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam 10 tahun terakhir, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Tangerang dalam kategori Cukup (30-40%) dan Baik (40-50%) serta capaian tersebut lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten. Maka dari itu diperlukan upaya reformasi tata kelola fiskal, mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan, serta peningkatan kapasitas SDM dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
- 3) Stabilitas perekonomian daerah melalui pengendalian inflasi. Pada tahun 2023, Inflasi Banten berada dalam sasaran nasional yaitu $3,0\% \pm 1,0\%$. Akan tetapi, tetap diperlukan sinergi dalam pengendalian inflasi untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang.
- 4) Tata laksana pemerintah yang akuntabel diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah dalam bekerja dalam kerangka kerja yang efektif untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Maka dari itu diperlukan upaya untuk pemerataan dan peningkatan standar pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan publik, pengembangan kapasitas SDM, dan kepastian regulasi dalam layanan publik.
- 5) Penegakan hukum dan pembinaan demokrasi. Penguatan supremasi hukum dan demokrasi yang berkeadilan menjadi landasan transformasi pembangunan Kabupaten Tangerang. Persentase penyelesaian tindak pidana tahun 2021 telah mencapai 70%. Penegakan dan kepastian hukum tentunya mendukung iklim investasi yang kondusif. Maka dari itu, diperlukan upaya dalam jaminan penegakan hukum dan pengawasan terhadap penanganan tindak kriminal melalui penguatan lembaga hukum. Selain itu, capaian Indeks Demokrasi Provinsi Banten sebesar 78,75 serta Kabupaten Tangerang yang merupakan bagian Provinsi Banten, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam pelaksanaan demokrasi.

Tabel 3.7
 Penyelarasan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 dengan Isu Global, Isu Nasional, Isu Strategis RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045, dan Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang

Permasalahan dan Isu RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045		Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional Prov Banten	Isu Strategis Prioritas KLHS RPJPD Kab. Tangerang
Permasalahan Pembangunan Kab. Tangerang	Isu Strategis RPJPD Kab. Tangerang				
Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat Belum optimalnya kualitas pendidikan Belum optimalnya pemberdayaan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Demografi Global dan Bonus Demografi ▪ Urbanisasi Global ▪ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas Sumber Daya Manusia 	Sumber Daya Manusia yang Produktif, Unggul dan Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan Belum optimalnya pembangunan dan daya saing ketenagakerjaan Belum optimalnya penguasaan IPTEK dalam kegiatan perekonomian Belum optimalnya penyelenggaraan integrasi antar kawasan pertumbuhan ekonomi domestik dan regional	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ▪ Geopolitik dan Geoekonomi ▪ Tren Ekonomi Global ▪ Perkembangan Teknologi ▪ Persaingan Sumber Daya Alam ▪ Krisis iklim dan Pembangunan Rendah Karbon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas ▪ Transformasi Digital 	Pembangunan Perekonomian yang Tangguh dan Inklusif Keamanan, Ketahanan, dan Kerjasama antar Wilayah serta Ekonomi Makro yang Tangguh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Belum optimalnya pelayanan publik Masih rendahnya profesionalitas ASN Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ▪ Geopolitik dan Geoekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata Kelola Pemerintah 	Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan ▪ Tingkat SDM rendah terhadap pelayanan pemerintah berbasis elektronik

Permasalahan dan Isu RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045		Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional Prov Banten	Isu Strategis Prioritas KLHS RPJPD Kab. Tangerang
Permasalahan Pembangunan Kab. Tangerang	Isu Strategis RPJPD Kab. Tangerang				
<p>Belum optimalnya penanganan ketertiban dan keamanan masyarakat serta pembinaan lembaga politik/ demokrasi</p> <p>Belum optimalnya kapasitas fiskal daerah dan kerjasama antar daerah</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah</p>					
<p>Pengembangan potensi kebudayaan belum optimal</p> <p>Pembangunan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, anak yang belum optimal</p> <p>Menurunnya kualitas lingkungan hidup</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan; Terlampauinya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</p> <p>Belum optimalnya manajemen kebencanaan</p>	<p>Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ▪ Persaingan Sumber Daya Alam ▪ Krisis iklim dan Pembangunan Rendah Karbon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi 	<p>Pengembangan Kehidupan Sosial dan Budaya yang Berkearifan Luhur</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih Fungsi Lahan Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman dan Industri ▪ Pendangkalan Aliran Sungai serta Terkendala dalam Penanganan Normalisasi Fungsi Sungai ▪ Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup ▪ Rendahnya Tingkat Mitigasi Bencana di Kawasan Permukiman dan Perumahan Perdesaan ▪ Belum Optimalnya Kinerja Saluran Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Industri
<p>Belum optimalnya keterpaduan dalam penataan ruang</p> <p>Belum optimalnya sarana prasarana infrastruktur perkotaan</p>	<p>Penyelenggaraan Penataan Ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ▪ Geopolitik dan Geoekonomi ▪ Tren Ekonomi Global 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastruktur yang Belum Merata 	<p>Manajemen Kewilayahan yang Adaptif dan Berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Permasalahan dan Isu RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045		Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional Prov Banten	Isu Strategis Prioritas KLHS RPJPD Kab. Tangerang
Permasalahan Pembangunan Kab. Tangerang	Isu Strategis RPJPD Kab. Tangerang				
Belum optimalnya perencanaan pembangunan permukiman Belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkembangan Teknologi ▪ Persaingan Sumber Daya Alam ▪ Krisis iklim dan Pembangunan Rendah Karbon 			

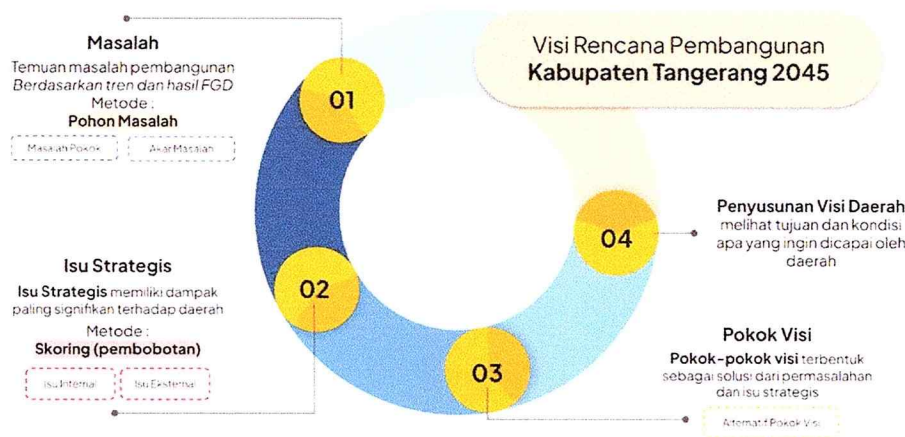
Sumber: Hasil Olahan, 2024

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi pembangunan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

4.1 Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang. Perumusan visi mempertimbangkan faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), serta menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan.



Gambar 4.1
Konsep Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Tangerang
Sumber: Hasil Olahan, 2023

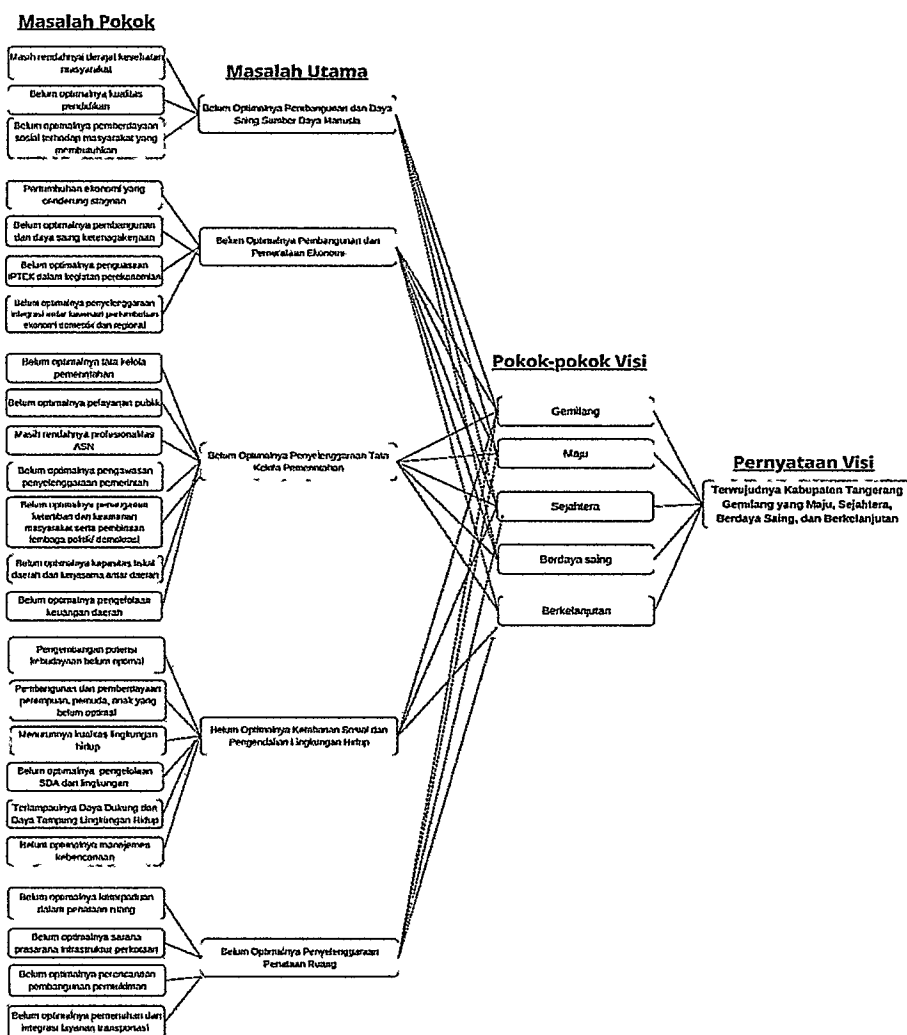
Perumusan visi pembangunan Kabupaten Tangerang 2045 didasarkan pada masalah utama atau isu strategis pembangunan. Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Tangerang, yaitu: (1) Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM); (2) Pembangunan dan pemerataan ekonomi; (3) Penyelenggaraan penataan ruang; (4) Ketahanan sosial dan pengendalian lingkungan hidup; serta (5) Tata kelola pemerintah. Tabel dan gambar di bawah ini menunjukkan perumusan pokok-pokok visi berdasarkan masalah utama atau isu strategis pembangunan Kabupaten Tangerang.

Tabel 4.1
Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Tangerang

No	Masalah Utama	Isu Strategis	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Belum Optimalnya Pembangunan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Gemilang, Maju, Sejahtera, Berdaya Saing	TERWUJUDNYA KABUPATEN TANGERANG GEMILANG YANG

No	Masalah Utama	Isu Strategis	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
2	Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	Gemilang, Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, Berkelanjutan	MAJU, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN
3	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Gemilang, Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, Berkelanjutan	
4	Belum Optimalnya Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Gemilang, Sejahtera, Berkelanjutan	
5	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintah	Gemilang, Maju, Sejahtera, Berdaya Saing	

Sumber: Hasil Olahan, 2024



Gambar 4.2
 Diagram Konsep Visi RPJPD Kabupaten Tangerang
 Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dengan berlandaskan pemikiran tersebut, maka visi RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2045 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANGERANG GEMILANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN”

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Tangerang Gemilang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

- 1) Gemilang. Kabupaten Tangerang Gemilang dengan slogan Satya Karya Kerta Raharja menggambarkan harapan yang ingin diraih oleh Kabupaten Tangerang di masa depan yaitu mewujudkan kehidupan yang makmur, adil, dan sejahtera dengan memberdayakan potensi daerah yang dimiliki. Branding Kabupaten Tangerang disimbolkan dengan pohon mangrove yang melambangkan kekokohan, perbedaan, dan kolaborasi, serta memiliki kekuatan akar yang kokoh untuk mampu bertahan. Selain itu, branding Kabupaten Tangerang Gemilang disimbolkan dengan seekor ayam wareng bernama “Gilang” yang berarti cahaya terang, digunakan untuk memperkenalkan kebudayaan Kabupaten Tangerang ke daerah-daerah lain.
Kabupaten Tangerang berupaya untuk mewujudkan kabupaten sebagai pusat kegiatan industri, kawasan permukiman yang terintegrasi, dan pengembangan perkotaan baru yang didukung dengan pertanian yang berkelanjutan.
- 2) Maju. Kabupaten Tangerang pada tahun 2045 menjadi salah satu kabupaten yang maju tidak hanya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga dalam kebudayaan dan peradaban, sehingga menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Kabupaten Tangerang yang maju juga berarti memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi didukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang andal, serta infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.
- 3) Sejahtera. Seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan; fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; serta memiliki pendapatan yang mencukupi secara berkeadilan.
- 4) Berdaya Saing. Terwujudnya Kabupaten Tangerang yang unggul, senantiasa berinovasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai daerah yang diperlihatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap IPTEK, kelembagaan pemerintahan yang akuntabel, dan perekonomian yang maju.
- 5) Berkelanjutan. Kata “berkelanjutan” dimaknai sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim; keadilan dan kesetaraan; serta ketangguhan ekonomi berlandaskan ekonomi lestari.

4.1.1 Sasaran Visi

RPJPN Indonesia 2025-2045 disusun dengan target membangun Indonesia Emas 2045, tercermin dalam 5 sasaran visi, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan) pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Ketercapaian visi Kabupaten Tangerang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, ditunjukkan dengan 5 (lima) sasaran visi sebagai berikut:

1. Sasaran pertama, meningkatnya pendapatan per kapita. Sasaran ini mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan

pendapatan per kapita setara negara maju. Peningkatan pendapatan per kapita di Kabupaten Tangerang ditunjukkan dengan PDRB per kapita mencapai sekitar 453 juta rupiah di tahun 2045. Peningkatan pendapatan per kapita ini didorong oleh pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan. Sementara itu, capaian kontribusi PDRB untuk sektor industri sebesar 30 persen pada tahun 2045.

2. Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Sasaran ini mendukung pencapaian sasaran visi nasional untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan yang berkurang. Seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita, maka kesejahteraan penduduk akan meningkat.
3. Sasaran ketiga, kepemimpinan daerah sebagai hub integrasi ekonomi Pulau Sumatera-Jawa serta Penyangga industri Nasional. Sasaran ini diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah.
4. Sasaran keempat, peningkatan daya saing sumber daya manusia. Sasaran ini mendukung pencapaian sasaran nasional daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Sasaran ini didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, penguasaan teknologi, inovasi, dan kreativitas. Sasaran tersebut diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,6 pada tahun 2045.
5. Sasaran kelima, penurunan emisi GRK menuju Net Zero Emission. Sasaran ini mendukung pencapaian sasaran visi pembangunan nasional yaitu intensitas emisi GRK menuju net-zero emission. Sasaran kelima ini merupakan gambaran komitmen Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Tabel 4.2
Penyelarasan Sasaran Visi RPJP Nasional 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Banten 2025-2045 dengan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju	GNI Perkapita (USD)	5.500 – 5.520	30.300	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	72,21-72,42	384,94-415,51	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	64,07	453
		Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,62	98,90		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	6,07-6,30	6.15-6,40
		Kontribusi PDB Marnufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	30,48-31,20	34,99-36,13		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	32,76	34,99 – 36,13
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	0,5 - 0,8	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,50	0,04-0,54	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,03	0,04-0,29
		Rasio Gini (Indeks)	0,379-0,382	0,290-0,320		Rasio Gini (Indeks)	0,344-0,365	0,300-0,351		Rasio Gini (Indeks)	0,270	0,210
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,94	3,43		Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang terhadap	21,24	21,31

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
										Provinsi Banten (%)		
						Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28-5,33	5,89-6,89		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	6,50
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 Besar	Kepemimpinan Daerah sebagai Hub Integrasi Ekonomi Pulau Sumatera-Jawa serta Penyangga Industri Nasional	Indeks Daya Saing Daerah (%)	3,70-3,90	4,50-4,80	Kepemimpinan Daerah sebagai Hub Integrasi Ekonomi Pulau Sumatera-Jawa serta Penyangga Industri Nasional	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	3,6	4,5
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,56	0,73	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	0,54	0,71	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	74,91	84,6
5	Intensitas Emisi	Penurunan	38,6	93,5	Penurunan Emisi	Penurunan Intensitas	43,56	93,42	Penurunan Emisi	Penurunan Intensitas Emisi	43,56	93,42

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
	GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Intensitas Emisi GRK (%) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	76,49	83,00	GRK menuju Net Zero Emission	Emisi GRK (%) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,92	74,92	GRK menuju Net Zero Emission	GRK (%) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	61,57	66,61

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal-internal daerah, serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

4.2.1 Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Tangerang

Perumusan misi pembangunan mengacu pada visi pembangunan, masalah pokok, dan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tangerang periode sebelumnya. Tabel di bawah ini merupakan perumusan dan penjelasan misi RPJPD Kabupaten Tangerang.

Tabel 4.3
Perumusan dan Penjelasan Misi RPJPD Kabupaten Tangerang

No	Masalah Utama	Masalah Pokok	Pokok Visi	Pernyataan Visi	Misi
1	Belum Optimalnya Pembangunan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya kualitas pendidikan	Gemilang, Maju, Sejahtera, Berdaya Saing	KABUPATEN TANGERANG GEMILANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
		Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat			
		Belum optimalnya pemberdayaan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan			
2	Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan	Gemilang, Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, Berkelanjutan		Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		Belum optimalnya pembangunan dan daya saing ketenagakerjaan			
		Belum optimalnya penguasaan IPTEK dalam kegiatan perekonomian			
		Belum optimalnya penyelenggaraan integrasi antar kawasan			

No	Masalah Utama	Masalah Pokok	Pokok Visi	Pernyataan Visi	Misi
		pertumbuhan ekonomi domestik dan regional			
3	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Gemilang, Maju, Sejahtera, Berdaya Saing		Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien
		Belum optimalnya pelayanan publik			
		Masih rendahnya profesionalitas ASN			
		Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah			
4	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya penanganan ketertiban dan keamanan masyarakat serta pembinaan lembaga politik/ demokrasi			Misi 4: Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Perekonomian Daerah
5	Keamanan daerah dan stabilitas ekonomi makro daerah	Belum optimalnya kapasitas fiskal daerah dan kerjasama antar daerah			Misi 4: Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Perekonomian Daerah
6	Belum Optimalnya Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Pengembangan potensi kebudayaan belum optimal	Gemilang, Sejahtera, Berkelanjutan		Misi 5 : Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat yang Tangguh untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Hidup
7	Ketahanan Sosial - Budaya dan Ekologi	Pembangunan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, anak yang belum optimal			
		Menurunnya kualitas lingkungan hidup			

No	Masalah Utama	Masalah Pokok	Pokok Visi	Pernyataan Visi	Misi
		Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan; Terlampauinya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup			
		Belum optimalnya manajemen kebencanaan			
8	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Belum optimalnya keterpaduan dalam penataan ruang	Gemilang, Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, Berkelanjutan		Misi 6 : Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang untuk Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
9	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Belum optimalnya sarana prasarana infrastruktur perkotaan			Misi 7 : Mewujudkan Pemenuhan Kapasitas dan Layanan Sarana Prasarana secara Menyeluruh
		Belum optimalnya perencanaan pembangunan permukiman			
		Belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi			
10	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Gemilang, Maju, Sejahtera, Berdaya Saing		Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Didukung Kolaborasi dan Manajemen Berbasis Risiko

Sumber: Hasil Olahan, 2024

4.2.2 Penjelasan Misi RPJPD Kabupaten Tangerang

A) Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

Kemajuan pembangunan yang merata salah satunya didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, transformasi sumber daya manusia menjadi modal penting yang kualitasnya perlu ditingkatkan melalui bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan gender serta sosial. Misi Kabupaten Tangerang yang pertama terdiri dari upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan yang tinggi, serta perlindungan sosial yang lebih optimal. Pendidikan yang berkualitas dicapai melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta pemantapan kompetensi peserta didik. Selanjutnya, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dicapai melalui pemenuhan fasilitas kesehatan & tenaga kesehatan, peningkatan teknologi bidang kesehatan, penguatan peran lintas sektor, pemberdayaan & peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan perilaku hidup sehat, pemenuhan jaminan kesehatan nasional, serta peningkatan promotif & preventif. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan perlindungan sosial optimal adalah peningkatan kolaborasi, kapasitas, dan kapabilitas kelembagaan.

B) Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perekonomian yang maju dan berkeadilan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktivitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi. Hal tersebut didorong dengan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas, akselerasi ekosistem UMKM, serta pengembangan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan adaptif terhadap transformasi digital. Kabupaten Tangerang berada dalam posisi strategis aglomerasi perkotaan dengan kontribusi perekonomian terbesar di Indonesia. Keunggulan kompetitif Kabupaten Tangerang dapat didorong melalui inovasi dalam sektor unggulan-potensial serta penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui integrasi ekonomi domestik dan regional dalam mengakses pasar dan kemudahan pergerakan orang-barang. Akselerasi pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan perekonomian yang berkeadilan dan inklusif dengan menjadikan kawasan perkotaan dan perdesaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan kapasitas dan keunggulan kompetitif regional serta pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip berkelanjutan (e.g. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, *Green Growth*, *Blue-Green Economy*, dan lain sebagainya).

C) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip good governance (*consensus oriented, accountable, transparent, responsive, equitable and inclusive, effective and efficient, follows the rule of law, and participatory*). Pemakaian tiga kata kunci tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kab. Tangerang kedepannya dapat menonjol dalam hal akuntabel, efektif, dan efisien. Misi ketiga RPJPD Kabupaten Tangerang diraih melalui beberapa upaya yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, mewujudkan aparatur pemerintahan berkualitas, mewujudkan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan optimal, serta mewujudkan pelayanan publik yang prima. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dapat diwujudkan melalui integrasi tupoksi dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebagai efisiensi sistem. Selanjutnya, aparatur pemerintahan perlu diposisikan sebagai komponen pemerintah dalam meraih Indonesia Emas 2045 dengan diimbangi pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang optimal.

D) Misi 4: Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Perekonomian Daerah

Penegakan hukum yang inklusif dan berkeadilan dilakukan dalam rangka mewujudkan demokrasi tangguh dan keamanan daerah. Sementara itu, ekonomi makro yang stabil diwujudkan melalui pengelolaan fiskal daerah yang efisien dan kerjasama antarwilayah. Stabilitas keamanan dan perekonomian daerah dapat terwujud melalui arah kebijakan seperti penguatan penegakan hukum dan demokrasi yang berkeadilan dan inklusif, peningkatan stabilitas ekonomi makro daerah yang beriringan dengan optimalisasi pengelolaan fiskal daerah, serta mendorong kerja sama daerah dalam regional dan intra-regional Kabupaten Tangerang.

E) Misi 5: Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat yang Tangguh untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Kelembagaan masyarakat yang tangguh mendukung ketahanan sosial dan ekologi dalam lingkup pembangunan berkelanjutan. Hal ini akan membentuk masyarakat yang adaptif dan berkualitas dalam rangka mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketangguhan kelembagaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup dapat terwujud melalui penguatan kelembagaan kebudayaan daerah, mendorong kebijakan yang terkait dengan inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat rentan, mendorong manajemen pengelolaan lingkungan yang sirkular, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta penguatan kapasitas daerah dalam adaptasi dan mitigasi bencana.

F) Misi 6: Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang untuk Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

Keterpaduan penataan ruang menjelaskan bahwa daerah mampu menciptakan integrasi pusat-pusat kegiatan melalui pembangunan dan pengendalian tata ruang yang efektif dan efisien serta untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara adil. Pembangunan daerah harus dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif untuk melandasi penataan ruang yang terpadu dan berkeadilan. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan misi ini adalah pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan regulasi. Selain itu pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang perlu diperkuat dari segi kesesuaian pemanfaatan daya dukung dan daya tampung wilayah.

G) Misi 7: Mewujudkan Pemenuhan Kapasitas dan Layanan Sarana Prasarana secara Menyeluruh

Peningkatan kapasitas sarana prasarana berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum secara menyeluruh merupakan perwujudan pemerataan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi ke-7 dicapai melalui upaya mewujudkan pemenuhan sarana-prasarana ramah lingkungan, pembangunan permukiman optimal, serta sistem transportasi yang terintegrasi. Penyediaan sarana-prasarana ramah lingkungan diwujudkan selaras dengan pembangunan Kabupaten Tangerang yang berkelanjutan serta mendukung peningkatan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan hunian layak huni dan infrastruktur rumah tangga. Sementara itu, integrasi sistem transportasi dapat dipenuhi dengan pembangunan infrastruktur jalan, dan sarana transportasi publik.

H) **Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Didukung Kolaborasi dan Manajemen Berbasis Risiko**

Dalam mencapai Visi Kabupaten Tangerang 2045 diperlukan upaya dalam mengawal kaidah pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan yang berkesinambungan tercipta melalui konsistensi perencanaan dan pembiayaan pembangunan, tata kelola fiskal yang optimal dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta kerangka pengendalian dan manajemen risiko dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Konsisten perencanaan ditunjukkan dengan konsistensi periodisasi dan substansi perencanaan dari nasional dan daerah. Dalam tata kelola fiskal dan keuangan daerah diperlukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, kerangka pengendalian pembangunan dan manajemen risiko yang terpadu, kontinu, partisipatif dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah.

Tabel 4.4
 Penyeragaman Misi Pembangunan RPJPN dan Misi Pembangunan RPJPD Provinsi ke dalam Misi Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Banten 2025-2045	RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
2.		Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif	Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3.		Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien
4.	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial dan Perekonomian Daerah yang Stabil	Mewujudkan Keamanan dan Perekonomian Daerah yang Stabil
5.		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Sosial Budaya yang Beradab dan Ekologi yang Lestari	Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat yang Tangguh untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Hidup
6.	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Perkuatan Pemerataan, dan Interkoneksi Pembangunan	Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang untuk Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Banten 2025-2045	RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Memadai, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Mewujudkan Pemenuhan Kapasitas dan Layanan Sarana Prasarana secara Menyeluruh
8.		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan yang Inovatif dan Berdaya Saing Global	Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Didukung Kolaborasi dan Manajemen Berbasis Risiko

Sumber: Hasil Olahan, 2024

BAB V
 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

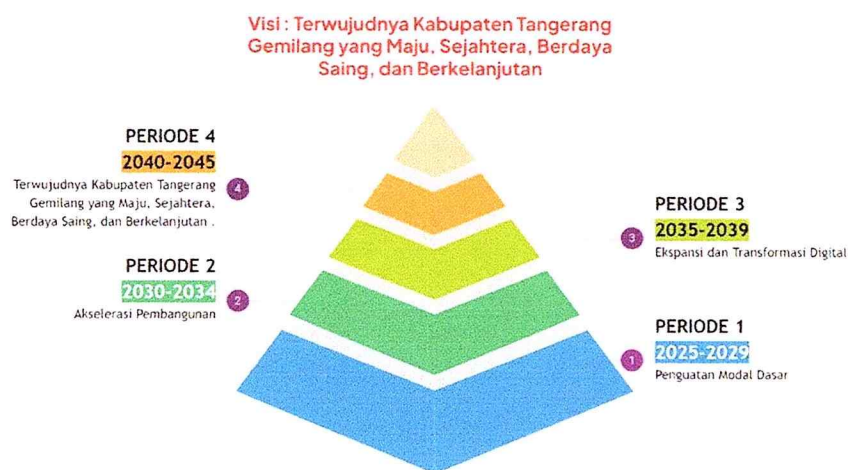
5.1 Arah Kebijakan

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang dalam periode dua puluh tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode dua puluh tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045 serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025. Tabel dan gambar bagan di bawah ini merupakan rumusan capaian indikator makro, sasaran, indikator, dan arah kebijakan lima tahunan rencana pembangunan Kabupaten Tangerang.

Tabel 5.1
 Target Capaian Indikator Makro

Indikator Makro	Satuan	Capaian tahun 2023	Target Capaian				
			Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,56	77,93	79,95	82,03	84,60	
PDRB Per Kapita	juta rupiah	51,54	115,32	205,37	319,33	453,00	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,18	5,50	5,70	6,00	6,50	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,94	6,0	5,0	4,1	3,30	
Persentase Penduduk Miskin	%	6,93	3,1-4,0	1,3-2,4	0,6-1,5	0,04-0,29	
Rasio Kontribusi PDRB	Sektor Pertanian	%	6,3	6,08-6,32	6,10-6,35	6,12-6,37	6,15-6,40
	Sektor Pariwisata	%	1,5	1,83-2,07	2,04-2,55	2,28-3,13	2,65-4,00
	Sektor Industri Pengolahan	%	33,65	33,2-33,4	33,7-34,2	34,3-35,1	34,99-36,13
Indeks Gini	Indeks	0,286	0,27	0,25	0,23	0,21	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,07	62,58	63,84	65,10	66,61	

Sumber: Hasil Olahan, 2024



Gambar 5.1
 Tahapan Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045
 Sumber: Hasil Olahan, 2023

Tabel 5.2
Penyelarasan Pentahapan Pembangunan Lima Tahun antara RPJPN, RPJPD Provinsi Banten dan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Pentahapan per lima tahun dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045	Pentahapan per lima tahun dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045	Pentahapan per lima tahun dalam RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045
1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Penguatan Transformasi	1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Penguatan Modal Dasar	1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Penguatan Modal Dasar
2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Akselerasi Transformasi	2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Peningkatan Pembangunan	2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Akselerasi Pembangunan
3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039: Ekspansi Global	3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039: Pengembangan Kapabilitas	3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039: Ekspansi dan Transformasi Digital
4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045: Perwujudan Indonesia Emas	4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045: Perwujudan Capaian Pembangunan	4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045: Terwujudnya Kabupaten Tangerang Gemilang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan

Sumber: Hasil Olahan, 2024

5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahunan

Arah kebijakan pembangunan daerah direncanakan ke dalam 4 periode dalam rentang waktu 5 tahun pada masing-masing periode. Arah kebijakan setiap periode dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Pertama (2025-2029)

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun pertama (periode 1) di Kabupaten Tangerang difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui: (1) Peningkatan ketersediaan, kualitas, aksesibilitas sarana serta kelembagaan pembangunan SDM; (2) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan komoditas sektor ekonomi; (3) Penguatan Kualitas Aparatur Pemerintahan; (4) Penataan regulasi hukum serta peningkatan kapasitas kelembagaan demokrasi dan keuangan daerah; (5) Penguatan nilai agama dan budaya serta peningkatan kelembagaan masyarakat yang tangguh dalam membentuk lingkungan hidup berkelanjutan; (6) Pemenuhan infrastruktur dasar serta infrastruktur penghubung perdesaan-perkotaan dan antar wilayah; (7) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar permukiman dan pengentasan permukiman kumuh; serta (8) Reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah.

2) Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Kedua (2030-2034)

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun kedua (periode 2) di Kabupaten Tangerang difokuskan pada akselerasi pembangunan daerah. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui: (1) Pemerataan sarana, pemerataan aksesibilitas, dan peningkatan kapasitas pembangunan SDM; (2) Peningkatan produktivitas dan pengembangan hilirisasi SDA; (3) Pengembangan sumber daya pada tata kelola pemerintahan; (4) Peningkatan pengawasan ketertiban umum dan optimalisasi sektor keuangan daerah; (5) Penguatan lingkungan pendukung untuk meningkatkan ketahanan daerah dan membentuk masyarakat yang adaptif; (6) Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan wilayah perdesaan-perkotaan dan antar wilayah serta kepastian hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang; (7) Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar serta layanan sistem transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan; serta (8) Optimalisasi sumber pendanaan menjadi non-pemerintah.

3) Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Ketiga (2035-2039)

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun ketiga (periode 3) di Kabupaten Tangerang difokuskan pada ekspansi dan transformasi digital. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui: (1) Pengembangan kapabilitas SDM yang cakap dalam penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (2) Pengarusutamaan inovasi teknologi dan ekosistem digital dalam mendorong produktivitas, efisiensi, dan meningkatkan skala pasar; (3) Pemanfaatan Teknologi Informasi secara penuh dalam menjalankan tata kelola pemerintahan; (4) Penguatan supremasi hukum serta efektivitas fiskal daerah; (5) Pengembangan dan penguatan teknologi untuk produktivitas sumber daya dan ketangguhan masyarakat; (6) Penguatan keterhubungan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang terpadu serta penerapan teknologi dalam optimalisasi kebijakan penataan ruang; (7) Penerapan teknologi dalam optimalisasi kinerja dan layanan infrastruktur serta modernisasi sistem pelayanan transportasi; serta

(8) Peningkatan dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber pendanaan non-pemerintah.

4) Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Keempat (2040-2045)

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun keempat (periode 4) di Kabupaten Tangerang difokuskan pada pemantapan capaian pembangunan. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui: (1) Pemantapan kondisi, kualitas, aksesibilitas, kapasitas, dan layanan pembangunan SDM; (2) Pemantapan perekonomian berdaya saing, merata, dan produktivitas kuat; (3) Pemantapan tata kelola pemerintahan sebagai perangkat pencapaian tujuan pembangunan; (4) Pemantapan penegakan hukum dan demokrasi berkeadilan serta stabilitas ekonomi makro; (5) Pemantapan kontribusi masyarakat yang inklusif dalam mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan; (6) Pemantapan keterpaduan pembangunan dan penataan ruang dengan prinsip berkelanjutan; (7) Optimalisasi kinerja layanan infrastruktur yang terintegrasi dan ramah lingkungan; serta (8) Pemantapan pengelolaan keuangan baik melalui pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah.

Tabel 5.3
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

MISI	TAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025-2045			
	PERIODE I (2025–2029)	PERIODE II (20230–2034)	PERIODE III (2035–2039)	PERIODE IV (2040–2045)
	Pentahapan per lima tahun	Pentahapan per lima tahun	Pentahapan per lima tahun	Pentahapan per lima tahun
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	Peningkatan ketersediaan, kualitas, aksesibilitas sarana serta kelembagaan pembangunan SDM	Pemerataan sarana, pemerataan aksesibilitas, dan peningkatan kapasitas pembangunan SDM	Pengembangan kapabilitas SDM yang cakap dalam penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pemantapan kondisi, kualitas, aksesibilitas, kapasitas, dan layanan pembangunan SDM
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan komoditas sektor ekonomi	Peningkatan produktivitas dan pengembangan hilirisasi SDA	Pengarusutamaan inovasi teknologi dan ekosistem digital dalam mendorong produktivitas, efisiensi, dan meningkatkan skala pasar	Pemantapan perekonomian berdaya saing, merata, dan produktivitas kuat
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Penguatan Kualitas Aparatur Pemerintahan	Pengembangan sumber daya pada tata kelola pemerintahan	Pemanfaatan Teknologi Informasi secara penuh dalam menjalankan tata kelola pemerintahan	Pemantapan tata kelola pemerintahan sebagai perangkat pencapaian tujuan pembangunan

MISI	TAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025-2045			
	PERIODE I (2025–2029)	PERIODE II (20230–2034)	PERIODE III (2035–2039)	PERIODE IV (2040–2045)
	Pentahapan per lima tahun	Pentahapan per lima tahun	Pentahapan per lima tahun	Pentahapan per lima tahun
Misi 4: Mewujudkan Keamanan dan Perekonomian Daerah yang Stabil	Penataan regulasi hukum serta peningkatan kapasitas kelembagaan demokrasi dan keuangan daerah	Peningkatan pengawasan ketertiban umum dan optimalisasi sektor keuangan daerah	Penguatan supremasi hukum serta efektivitas fiskal daerah	Pemantapan penegakan hukum dan demokrasi berkeadilan serta stabilitas ekonomi makro
Misi 5 : Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat yang Tangguh untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Hidup	Penguatan nilai agama dan budaya serta peningkatan kelembagaan masyarakat yang tangguh dalam membentuk lingkungan hidup berkelanjutan	Penguatan lingkungan pendukung untuk meningkatkan ketahanan daerah dan membentuk masyarakat yang adaptif	Pengembangan dan penguatan teknologi untuk produktivitas sumber daya dan ketangguhan masyarakat	Pemantapan kontribusi masyarakat yang inklusif dalam mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan
Misi 6 : Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang untuk Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	Pemenuhan infrastruktur dasar serta infrastruktur penghubung perdesaan-perkotaan dan antar wilayah	Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan wilayah perdesaan-perkotaan dan antar wilayah serta kepastian hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Penguatan keterhubungan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang terpadu serta penerapan teknologi dalam optimalisasi kebijakan penataan ruang	Pemantapan keterpaduan pembangunan dan penataan ruang dengan prinsip berkelanjutan
Misi 7 : Mewujudkan Pemenuhan Kapasitas dan Layanan Sarana	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar permukiman dan	Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar serta layanan sistem transportasi yang	Penerapan teknologi dalam optimalisasi kinerja dan layanan infrastruktur serta modernisasi sistem pelayanan transportasi	Optimalisasi kinerja layanan infrastruktur yang terintegrasi dan ramah lingkungan

MISI	TAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025-2045			
	PERIODE I (2025–2029)	PERIODE II (20230–2034)	PERIODE III (2035–2039)	PERIODE IV (2040–2045)
	Pentahapan per lima tahun	Pentahapan per lima tahun	Pentahapan per lima tahun	Pentahapan per lima tahun
Prasarana secara Menyeluruh	pengentasan permukiman kumuh	terintegrasi dan ramah lingkungan		
Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Didukung Kolaborasi dan Manajemen Berbasis Risiko	Reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah	Optimalisasi sumber pendanaan menjadi non-pemerintah	Peningkatan dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber pendanaan non-pemerintah	Pemantapan pengelolaan keuangan baik melalui pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Tabel 5.4
Jabaran Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Visi RPJPD 2025-2045: Terwujudnya Kabupaten Tangerang Gemilang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan

Misi	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	<i>Peningkatan ketersediaan, kualitas, aksesibilitas sarana serta kelembagaan pembangunan SDM</i>	<i>Pemerataan sarana, pemerataan aksesibilitas, dan peningkatan kapasitas pembangunan SDM</i>	<i>Pengembangan kapabilitas SDM yang cakap dalam penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</i>	<i>Pemantapan kondisi, kualitas, aksesibilitas, kapasitas, dan layanan pembangunan SDM</i>
	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana & prasarana pendidikan	Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Pendidikan	Pengembangan sarana & prasarana pendidikan	Pemantapan kondisi sarana & prasarana pendidikan
	Peningkatan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	Pemerataan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	Pemantapan akses terhadap pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat
	Peningkatan aksesibilitas lulusan pendidikan terhadap lapangan kerja	Pemerataan akses lulusan pendidikan terhadap lapangan kerja melalui pelatihan kompetensi ketenagakerjaan	Pengembangan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja sesuai bidang keahlian dan talenta digital	Pemantapan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja sesuai bidang keahlian
	Peningkatan kualitas pendidikan melalui meningkatkan literasi dan	Peningkatan upaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang mendukung adanya	Peningkatan upaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang	Pemantapan kapasitas peserta didik untuk bersaing di lapangan

Misi	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	kemampuan matematika bagi seluruh peserta didik	penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi	mendukung kewirausahaan	pekerjaan keahlian tinggi
	Peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai & memenuhi standar serta peningkatan kuantitas & kualitas SDM bidang kesehatan; Peningkatan dasar sistem pengelolaan data terintegrasi dalam rangka monitoring stunting	Pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis; Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dalam rangka percepatan penurunan stunting	Pengembangan & pemanfaatan teknologi, digitalisasi dan bioteknologi sektor kesehatan	Pemantapan pelayanan transformasi kesehatan
	Peningkatan peran lintas sektor kesehatan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kesadaran, kemauan serta kemampuan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kualitas dan akses sanitasi	Pemantapan perilaku hidup sehat dan kualitas & akses sanitasi
	Pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk semua kelompok masyarakat	Penyediaan jaminan kesehatan nasional secara berkelanjutan	Peningkatan promotif dan preventif melalui JKN dan Standar Pelayanan Minimal	Keterkecukupan jaminan kesehatan nasional yang efektif, efisien, dan merata
	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor melalui peningkatan SDM dan optimalisasi sistem pendataan PPKS	Peningkatan kapabilitas dan kapasitas PPKS melalui pemberdayaan berbasis kewirausahaan	Peningkatan kolaborasi pentahelix dalam penanggulangan masalah sosial	Pemerataan dan pemantapan perlindungan sosial adaptif masyarakat
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian	<i>Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan</i>	<i>Peningkatan produktivitas dan pengembangan hilirisasi SDA</i>	<i>Pengarusutamaan inovasi teknologi dan ekosistem digital</i>	<i>Pemantapan perekonomian berdaya saing,</i>

Misi	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<i>pengembangan komoditas sektor ekonomi</i>		<i>dalam mendorong produktivitas, efisiensi, dan meningkatkan skala pasar</i>	<i>merata, dan produktivitas kuat</i>
	Pengembangan dan penguatan komoditas (jenis usaha) industri dengan ekspor bersih perdagangan; optimalisasi kemudahan investasi	Pengembangan kawasan strategis industri hijau ramah lingkungan dan berbasis inovasi; peningkatan produktivitas hasil produk industri; mendorong investasi untuk digitalisasi dan inovasi	Pengembangan infrastruktur pendukung dalam meningkatkan efisiensi distribusi dan skala pasar; mendorong investasi yang mendukung ekonomi hijau	Pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktivitas kuat, berdaya saing, nilai tambah tinggi, serta peningkatan realisasi investasi
	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan/atau kawasan strategis komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan; pengembangan serta pemanfaatan lahan pertanian dan wilayah pesisir; pemberdayaan petani dan nelayan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah serta efisiensi rantai distribusi komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan; serta pengembangan skema <i>corporate farming</i> dan tata kelola pertanian dengan pertanian poli-kultur	Pengarusutamaan digitalisasi dan inovasi teknologi dalam mendorong produktivitas, efisiensi, dan diversifikasi produk hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan	Pemantapan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi
	Pengembangan sentra-sentra ekonomi strategis melalui penyediaan akses dan layanan infrastruktur untuk sektor industri kreatif dan pariwisata;	Percepatan pengembangan dan pengintegrasian sentra-sentra ekonomi strategis untuk sektor industri kreatif dan pariwisata	Penguatan implementasi teknologi digital dalam promosi sentra-sentra ekonomi strategis untuk sektor industri kreatif dan pariwisata	Optimalisasi implementasi teknologi dan inovasi digital dalam sektor industri kreatif dan pariwisata

Misi	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Pengembangan sektor ekonomi tematik berbasis SDA lokal serta mendorong kemandirian usaha mikro (industri rumah tangga) dan ekonomi kreatif melalui pengembangan inkubator bisnis	Pengembangan komoditas UMKM berdasarkan klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah; Pengembangan kemitraan strategis UMKM dengan industri sedang-besar; Pengembangan inovasi dalam pembiayaan usaha UMKM; memperkuat koperasi sebagai agregator/konsolidator UMKM	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan ekosistem digital dan penguatan kerjasama antar pelaku usaha untuk memperluas akses pasar di tingkat regional, nasional, dan global	Pemantapan dan akselerasi ekosistem UMKM untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi; penguatan regulasi, kelembagaan, serta SDM koperasi
	Peningkatan intensitas pelatihan tenaga kerja untuk memiliki kapasitas <i>entrepreneur</i> , optimalisasi jaminan kesejahteraan tenaga kerja	Peningkatan <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> tenaga kerja melalui pengembangan Balai Latihan Kerja dan kerja sama sekolah vokasi/kejuruan	Peningkatan kapasitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan peluang lapangan kerja digital	Pemantapan kapasitas tenaga kerja terhadap transformasi digital dan SDM digital
	Peningkatan kapasitas riset inovasi dan pemenuhan akses digital di seluruh wilayah; Peningkatan kapasitas pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Ekspansi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dari sektor berkelanjutan (ekonomi biru, ekonomi hijau, dan bioekonomi); Perluasan sistem jaringan EBT di sektor transportasi, industri, dan rumah tangga	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau (perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon)	Pemantapan penguasaan IPTEK dan pertumbuhan ekonomi dari sektor berkelanjutan

Misi	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan dan rantai pasok antar wilayah melalui kerjasama antar daerah utamanya daerah pusat aglomerasi	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung sektor perdagangan dan ekspor-impor	Peningkatan ekspansi ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi dalam rantai pasok global	Pemantapan integrasi konektivitas antar kawasan pertumbuhan ekonomi (perdesaan-perkotaan), kawasan strategis, kawasan aglomerasi, <i>superhub</i> antar wilayah, dan ekspansi global
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	<i>Penguatan Kualitas Aparatur Pemerintahan</i>	<i>Pengembangan sumber daya pada tata kelola pemerintahan</i>	<i>Pemanfaatan Teknologi Informasi secara penuh dalam menjalankan tata kelola pemerintahan</i>	<i>Pemantapan tata kelola pemerintahan sebagai perangkat pencapaian tujuan pembangunan</i>
	Pemantapan pembagian tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) pada seluruh instansi pemerintahan serta menyusun rencana pengadopsian teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dan berjangka panjang	Pembangunan infrastruktur teknologi informasi (TI) pada instansi pemerintahan secara menyeluruh yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien	Pengintegrasian dan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam tata kelola pemerintahan secara maksimal	Pemantapan tata laksana pemerintahan yang berbasis teknologi informasi
	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Pengembangan kompetensi dan nilai-nilai moral ASN yang sesuai dengan kebutuhan	Memperketat sistem manajemen ASN terutama yang terkait dengan profesionalitas	Peningkatan standar kualitas dan standar kinerja ASN

Misi	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
			serta <i>reward and punishment</i>	
	Pemantapan pemahaman SPIP kepada seluruh Instansi yang terkait serta menyusun kebijakan dan SOP yang berhubungan dengan SPIP	Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian instansi pemerintahan serta pemenuhan dan peningkatan kompetensi APIP yang sesuai kebutuhan	Pengembangan berkelanjutan pada SPIP	Pemantapan SPIP dan kapabilitas APIP
	Pemantapan kebijakan dan pemahaman pelayanan publik pada seluruh instansi pemerintahan	Penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Memaksimalkan pelayanan publik yang prima
Misi 4: Mewujudkan Keamanan dan Perekonomian Daerah yang Stabil	<i>Penataan regulasi hukum serta peningkatan kapasitas kelembagaan demokrasi dan keuangan daerah</i>	<i>Peningkatan pengawasan ketertiban umum dan optimalisasi sektor keuangan daerah</i>	<i>Penguatan supremasi hukum serta efektivitas fiskal daerah</i>	<i>Pemantapan penegakan hukum dan demokrasi berkeadilan serta stabilitas ekonomi makro</i>
	Penataan regulasi hukum dan keamanan daerah; Peningkatan kapasitas lembaga demokrasi yang kuat dan akuntabel	Penguatan kelembagaan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Penguatan stabilitas keamanan daerah	Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi dan penguatan kapasitas lembaga demokrasi yang berintegritas	Pemantapan penegakan hukum dan pelaksanaan demokrasi yang berkeadilan, aman, dan inklusif
	Peningkatan kapasitas fiskal dan stabilitas sektor keuangan daerah;	Penguatan pengelolaan fiskal dan moneter melalui optimalisasi pengelolaan	Optimalisasi pengelolaan fiskal dan keuangan daerah;	Penguatan kerjasama antar daerah serta

Misi	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Pembentukan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan; kerjasama pembangunan infrastruktur antar daerah utamanya kawasan aglomerasi; pengendalian inflasi daerah	sektor keuangan daerah; penguatan kerjasama antar daerah; pengendalian inflasi daerah	Peningkatan jumlah penerimaan daerah dan efektivitas belanja daerah; pengembangan kerjasama pengembangan infrastruktur melalui <i>creative financing</i> ; pengendalian inflasi daerah	kerjasama badan usaha – swasta; Optimalisasi pengelolaan fiskal dan keuangan daerah; Pemantapan pengendalian inflasi daerah
Misi 5 : Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat yang Tangguh untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Hidup	<i>Penguatan nilai agama dan budaya serta peningkatan kelembagaan masyarakat yang tangguh dalam membentuk lingkungan hidup berkelanjutan</i>	<i>Penguatan lingkungan pendukung untuk meningkatkan ketahanan daerah dan membentuk masyarakat yang adaptif</i>	<i>Pengembangan dan penguatan teknologi untuk produktivitas sumber daya dan ketangguhan masyarakat</i>	<i>Pemantapan kontribusi masyarakat yang inklusif dalam mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan</i>
	Penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembentukan karakter dan peningkatan ketangguhan masyarakat	Penyediaan akses partisipasi yang inklusif; Peningkatan karakter masyarakat yang tangguh dan adaptif	Pengoptimalan karakter individu, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan dan bencana; Penguatan partisipasi masyarakat secara inklusif	Pemantapan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi perubahan dan bencana

Misi	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Penguatan kelembagaan kesetaraan gender	Peningkatan kapasitas perempuan dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan	Pengoptimalan upaya pembangunan manusia berbasis gender dan peningkatan pendidikan talenta digital perempuan	Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender
	Penguatan kelembagaan kepengurusan anak; pembinaan kepemudaan dalam peningkatan potensi prestasi terutama dalam bidang keolahragaan	Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam melindungi dan memberdayakan lingkungan yang baik dan aman untuk anak; penguatan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Peningkatan kerjasama mitra nasional dan internasional	Pemantapan perlindungan dan pemenuhan hak anak; pemantapan prestasi pemuda dalam bidang keolahragaan
	Penguatan regulasi terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam	Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan teknologi untuk efisiensi dan produktivitas sumber daya serta menekan pencemaran lingkungan	Pemantapan kinerja dalam rangka mencapai lingkungan hidup berkualitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam
	Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional	Pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah dan persampahan melalui kerja sama layanan pengelolaan antar daerah (kerjasama antar regional)	Pengembangan dan penerapan teknologi dalam pengelolaan limbah dan persampahan	Pemantapan manajemen pengelolaan limbah dan persampahan yang sirkuler
	Mendorong penguatan ketahanan pangan dan gizi;	Pengembangan diversifikasi dan konservasi energi,	Penerapan teknologi tepat guna dalam	Pemantapan ketahanan energi,

Misi	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Perlindungan, pengembangan, dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; peningkatan diversifikasi tanam; serta peningkatan layanan irigasi masyarakat	pengembangan <i>corporate farming</i> , optimalisasi layanan infrastruktur pertanian, pengembangan diversifikasi pangan dan keterjangkauan pangan	mendorong produktivitas sektor pertanian, penerapan efisiensi energi dan pengoptimalan EBT; penerapan manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air	air, dan pangan dengan mendorong konservasi dan efisiensi penggunaan sumber daya alam
	Peningkatan kapasitas pembangkit listrik dan keandalan sistem kelistrikan	Peningkatan suplai listrik untuk kawasan permukiman dan kawasan kegiatan lainnya	Pengembangan dan penerapan teknologi hijau sebagai sumber-sumber listrik alternatif	Pengendalian kapasitas listrik yang merata dan menyeluruh
	Pengembangan sumber-sumber air bersih dalam meningkatkan pasokan air baku dan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air	Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan air daerah dalam menjaga <i>supply</i> dan <i>demand</i> yang sesuai	Penerapan teknologi dalam peningkatan kinerja layanan infrastruktur sumber air	Pengendalian pemanfaatan sumber daya air dengan menjaga dan mengawasi kuantitas serta kualitas air baku untuk kebutuhan
	Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbon	Penerapan upaya dekarbonisasi sumber energi, pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan; serta memperkuat fungsi konservasi hutan mangrove yang berada di pesisir utara	Penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal dan terintegrasi serta pengoptimalan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap	Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya mitigasi bencana dan pengendalian krisis iklim

Misi	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
		sekaligus sebagai daya tarik wisata <i>eco-tourism</i>	bencana dan krisis iklim	
Misi 6 : Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang untuk Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	<i>Pemenuhan infrastruktur dasar serta infrastruktur penghubung perdesaan-perkotaan dan antar wilayah</i>	<i>Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan wilayah perdesaan-perkotaan dan antar wilayah serta kepastian hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang</i>	<i>Penguatan keterhubungan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang terpadu serta penerapan teknologi dalam optimalisasi kebijakan penataan ruang</i>	<i>Pemantapan keterpaduan pembangunan dan penataan ruang dengan prinsip berkelanjutan</i>
	Pemenuhan layanan dasar utamanya daerah perdesaan; Pengembangan infrastruktur penghubung perkotaan dan perdesaan	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan regulasi pengelolaan wilayah perkotaan dan perdesaan	Penguatan pusat-pusat pertumbuhan perkotaan dan perdesaan yang terpadu sebagai penggerak ekonomi kawasan sekitarnya dan pemerataan pembangunan wilayah	Pemantapan pemerataan pembangunan dan keterpaduan penataan ruang

Misi	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	Peningkatan ketaatan kesesuaian penataan ruang dengan daya dukung dan daya tampung wilayah	Peningkatan upaya pengendalian pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang daerah	Pengoptimalan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui kebijakan daerah serta keterbukaan akses digital informasi geospasial	Peningkatan upaya pemanfaatan ruang sesuai arahan untuk mewujudkan keberlanjutan
Misi 7 : Mewujudkan Pemenuhan Kapasitas dan Layanan Sarana Prasarana secara Menyeluruh	<i>Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar permukiman dan pengentasan permukiman kumuh</i>	<i>Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar serta layanan sistem transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan</i>	<i>Penerapan teknologi dalam optimalisasi kinerja dan layanan infrastruktur serta modernisasi sistem pelayanan transportasi</i>	<i>Optimalisasi kinerja layanan infrastruktur yang terintegrasi dan ramah lingkungan</i>
	Rehabilitasi lahan hijau perkotaan dan peningkatan kualitas resapan air serta perbaikan jalur-jalur drainase kota	Pengoptimalan fungsi drainase perkotaan dan RTH sebagai pengendali banjir	Pengembangan ruang terbuka hijau yang sekaligus berperan sebagai ruang kegiatan publik	Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau yang berkelanjutan
	Perbaikan dan peningkatan kondisi infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Perluasan jangkauan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman ke area yang sulit mendapatkan sumber air	Penerapan teknologi sebagai upaya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman	Pengawasan dan pemantapan kinerja infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman
	Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi	Peningkatan efisiensi penyediaan lahan perumahan	Pengoptimalan pemenuhan rumah layak huni bagi	Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan

Misi	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
	rumah dan reformasi subsidi perumahan dari pemerintah daerah	yang selaras dengan perencanaan tata ruang	masyarakat secara menyeluruh sebagai upaya peningkatan kesejahteraan tempat tinggal	kawasan permukiman
	Penyelenggaraan perbaikan kondisi jalan hingga ke jalan permukiman dan pengendalian kapasitas konektivitas	Pengembangan sistem transportasi berbasis angkutan massal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hub transportasi	Pengintegrasian hub-hub transportasi angkutan massal dengan daerah-daerah di sekitarnya serta modernisasi sistem pelayanan transportasi darat	Pengendalian lalu lintas jalan dan perawatan kondisi hub-hub transportasi
Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Didukung Kolaborasi dan Manajemen Berbasis Risiko	<i>Reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah</i>	<i>Optimalisasi sumber pendanaan menjadi non-pemerintah</i>	<i>Peningkatan dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber pendanaan non-pemerintah</i>	<i>Pemantapan pengelolaan keuangan baik melalui pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah</i>
	Reformasi tata kelola fiskal daerah; Peningkatan kompetensi ASN pengelola keuangan daerah	Optimalisasi pembiayaan pembangunan pemerintah dan non-pemerintah, Pemantapan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah	Penciptaan inovasi dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien

Sumber: Hasil Olahan, 2024

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang merupakan kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode perencanaan yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah dan arah kebijakan. Sasaran pokok dirumuskan dengan memperhatikan sasaran visi dan arah pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045, dilengkapi dengan indikator dan target yang harus dicapai sesuai dengan pentahapan arah kebijakan. Berikut sasaran pokok yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2025-2045:

MISI 1 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI

Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tangerang sebesar 8,92 tahun di tahun 2022 dan ditargetkan dapat meningkat hingga mencapai 16 tahun melalui peningkatan ketersediaan & kualitas sarana prasarana serta sumber daya manusia bidang pendidikan. Harapan lama sekolah sebesar 12,85 tahun 2022 diharapkan akan mencapai target 18 tahun di tahun 2045. Pencapaian target ini dilakukan melalui peningkatan & pemerataan akses terhadap pendidikan usia dini, menengah, dan tinggi. Pengembangan kualitas pendidikan melalui peningkatan nilai asesmen kompetensi minimum dilaksanakan melalui pemantapan kompetensi peserta didik dalam kemampuan literasi dan matematika, pembelajaran kewirausahaan, serta penguasaan teknologi dalam penerapan akademik.

Terwujudnya Derajat Kesehatan yang Tinggi

Usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Tangerang sebesar 70,28 tahun pada tahun 2022 dan ditargetkan mencapai angka 80,54 tahun pada tahun 2045. Selain itu, di tahun 2045, angka kematian ibu ditargetkan menurun mencapai angka 10. Target-target tersebut dicapai melalui pemenuhan fasilitas kesehatan & tenaga medis serta pemanfaatan bioteknologi dan digitalisasi bidang kesehatan.

Prevalensi stunting dan gizi buruk dari angka 0,4 pada tahun 2022 ditargetkan turun hingga 6 pada tahun 2045. Pencapaian target dilakukan melalui peningkatan peran lintas sektor, pemberdayaan & peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemantapan perilaku hidup sehat.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dengan capaian 83,21% di tahun 2021, ditargetkan mencapai 100% di tahun 2045 melalui pemenuhan jaminan kesehatan nasional secara berkelanjutan serta peningkatan promotif & preventif.

Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Optimal

Persentase penduduk miskin masih berada di angka 6,92% pada tahun 2022 dan ditargetkan menurun mencapai angka 0,04-0,29% pada tahun 2045. Sementara itu, cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditargetkan meningkat mencapai 99,5%. Target-target tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kolaborasi, kapasitas, dan kapabilitas kelembagaan serta perlindungan sosial.

MISI 2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG KOKOH MELALUI PEMBANGUNAN DAN PEMERATAAN EKONOMI YANG BERKEADILAN BERBASIS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Terwujudnya Perekonomian yang Maju Melalui Pengembangan dan Diversifikasi Sektor Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 mencapai 5,47% dan pada tahun 2045 dapat tumbuh menjadi 6,50%.

Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh produktivitas unggulan yang kuat, berdaya saing, dan berlandaskan ekonomi lestari. Maka dari itu diperlukan beberapa arahan strategis, yaitu:

- 1) Pengarusutamaan transformasi digital dalam mendorong produktivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi secara berkelanjutan yang disertai dengan penguatan talenta digital.
- 2) Hilirisasi industri prioritas dan peningkatan produktivitas komoditas sektor potensial yaitu pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui strategi penguatan ekonomi lokal (berbasis *social learning*) serta pengarusutamaan teknologi pertanian (misalnya ekosistem *aquaculture*).
- 3) Diversifikasi sektor ekonomi potensial melalui penguatan ekonomi lokal dengan mendorong UMKM serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dalam rangka membuka lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

Posisi Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Jakarta menjadi nilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Tangerang di sektor perdagangan dan jasa. Dengan begitu penetapan wilayah Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Jakarta dapat diarahkan sebagai kawasan investasi industri teknologi padat modal (berbasis *Research and Development* dan TIK).

Terwujudnya Kesejahteraan Angkatan Kerja dalam Mendorong Pendapatan Per Kapita Tinggi dan Pemerataan Distribusi Pendapatan

Kesejahteraan angkatan kerja dengan pendapatan per kapita setara negara maju menjadi salah satu sasaran visi Indonesia Emas 2045. Kapasitas dan daya saing angkatan kerja merupakan pelaku utama dalam pembangunan Kabupaten Tangerang. Dalam mencapai target tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang, yaitu peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* tenaga kerja melalui pengembangan Balai Latihan Kerja dan kerja sama sekolah vokasi/kejuruan dengan mitra pemberi kerja (mis. perusahaan), peningkatan kapasitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk penciptaan talenta digital, serta optimalisasi jaminan kesejahteraan tenaga kerja.

Terwujudnya Penguasaan IPTEK dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Penguatan IPTEK merupakan salah satu kunci dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Investasi dalam pengembangan IPTEK diarahkan untuk pengembangan SDM di tingkat perguruan tinggi, pendidikan vokasi, dan balai latihan kerja. Pengembangan IPTEK akan berdampak pada peningkatan inovasi diversifikasi ekonomi, daya saing daerah, serta transisi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka transformasi pembangunan ekonomi yang hijau. Maka dari itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang, yaitu ekspansi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dari sektor berkelanjutan (ekonomi biru, ekonomi hijau, dan bioekonomi); perluasan sistem jaringan EBT di sektor transportasi, industri, dan rumah tangga, serta penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau (perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon).

Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional

Kabupaten Tangerang berada dalam posisi strategis aglomerasi perkotaan dengan kontribusi perekonomian terbesar di Indonesia. Integrasi ekonomi domestik dan regional penting dalam akselerasi pertumbuhan

ekonomi, inovasi dan efisiensi kegiatan ekonomi, peningkatan akses pasar, penciptaan lapangan kerja, dan tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang, yaitu penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan rantai pasok antar wilayah melalui kerjasama antar daerah, percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung sektor perdagangan dan ekspor-impor, serta pemantapan integrasi konektivitas antar kawasan pertumbuhan ekonomi (perdesaan-perkotaan), kawasan strategis, *superhub* antar wilayah, dan ekspansi global.

MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF, DAN EFISIEN

Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Tata laksana pemerintahan mencakup keseluruhan sistem, proses, dan prosedur kerja pemerintahan. Tata laksana pemerintahan ke depannya diharapkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Tata laksana yang efektif dan efisien sangat membantu pemerintah daerah untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tangerang. Hal-hal yang terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) harus disesuaikan dan dibuat pemahaman yang sama antara satu sama lain agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Teknologi informasi juga perlu dimanfaatkan dalam mempermudah pekerjaan.

Terwujudnya Aparatur Pemerintahan yang Berkualitas

Aparatur pemerintahan sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kualitas Aparatur pemerintahan diharapkan dapat terus meningkat dan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang selalu berubah-ubah. Pada periode akhir rencana jangka panjang ini, aparatur pemerintahan diposisikan sebagai komponen pemerintahan yang telah sangat siap dalam penyempurnaan Indonesia Emas 2045.

Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Optimal

Penyelenggaraan pemerintahan rawan akan terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada lingkup pemerintahan. Oleh karena itu, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus terus dijalankan dengan seoptimal mungkin. Temuan-temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran harus diusut tuntas dan diperbaiki.

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Dalam undang-undang pelayan publik, institusi penyelenggaraan negara adalah salah satu penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi tersebut berperan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Kondisi pelayanan publik Kabupaten Tangerang diharapkan dapat terus meningkat dan pada periode-periode akhir pembangunan jangka panjang ini dapat mencapai kondisi yang sangat prima dalam melayani masyarakat.

MISI 4 : MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH

Terwujudnya Penegakan Hukum dan Demokrasi Yang Berkeadilan Dan Inklusif

Penguatan supremasi hukum dan demokrasi yang berkeadilan menjadi landasan transformasi pembangunan Kabupaten Tangerang. Capaian Indeks Demokrasi Provinsi Banten sebesar 78,75 dan Kabupaten Tangerang yang menjadi bagian Provinsi Banten diperlukan upaya dalam penyelenggaraan demokrasi. Arah kebijakan untuk penguatan hukum dan demokrasi berkeadilan di Kabupaten Tangerang adalah penataan regulasi hukum dan keamanan daerah; Peningkatan kapasitas lembaga demokrasi yang kuat dan akuntabel, peningkatan kapasitas SDM, serta penyederhanaan regulasi berbasis teknologi dan penguatan kapasitas lembaga demokrasi yang berintegritas.

Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dan Penguatan Kerjasama Daerah

Tax Ratio Kabupaten Tangerang tahun 2020 sebesar 15,79% dan capaian ini baik dalam penguatan kapasitas pendapatan daerah. Maka dari itu, dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang diperlukan upaya dalam mewujudkan stabilitas ekonomi makro, kesinambungan fiskal pemerintah daerah, serta kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang antara lain: penguatan pengelolaan fiskal dan moneter melalui optimalisasi pengelolaan sektor keuangan daerah serta pembentukan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan internal daerah dan antar daerah.

MISI 5 : MEWUJUDKAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG TANGGUH UNTUK MENDUKUNG KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP

Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dalam Keberagaman

Kebudayaan dan keagamaan merupakan unsur penting yang diperlukan dalam membentuk masyarakat tangguh dan adaptif. Upaya tersebut diwujudkan dalam arah kebijakan yaitu; (1) Penguatan nilai agama dan kebudayaan serta kelembagaan masyarakat; (2) Penguatan lingkungan pendukung dalam membentuk masyarakat adaptif dan tangguh; dan (3) Pengembangan dan penguatan teknologi untuk produktivitas masyarakat. Indikator yang menggambarkan sasaran pokok berikut adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan target 2045 sebesar 63,5-77.

Terwujudnya Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak Yang Optimal

Pada tahun 2045, Indeks Ketimpangan Gender ditargetkan mencapai angka 0,21-0,22, dilaksanakan melalui penguatan lembaga kesetaraan gender, peningkatan kapasitas perempuan, serta peningkatan pendidikan talenta digital perempuan. Target Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2045 mencapai 74,75 ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan anak, pemberdayaan masyarakat & lingkungan yang aman untuk anak, dan peningkatan kerjasama mitra yang lebih luas.

Terwujudnya Manajemen Pengelolaan Lingkungan yang Sirkular

Pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui manajemen pengelolaan lingkungan yaitu pengelolaan sampah dan limbah yang sirkular. Pada tahun 2045, ditargetkan 100% timbulan sampah terkelola dengan integrasi manajemen pengelolaan yang sirkular. Target tersebut dapat dicapai dengan arahan strategis, yaitu pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah dan persampahan melalui kerjasama antar daerah (atau KSDD), pengembangan ekonomi sirkular pada industri prioritas, penyediaan infrastruktur penunjang pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu.

Meningkatnya Ketahanan Daerah

Pengoptimalan pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Tangerang diwujudkan dengan peningkatan indeks ketahanan pangan, ketersediaan energi per kapita (minimal 2400), dan ketersediaan protein per kapita pada tahun 2045. Sasaran ini dilaksanakan melalui pengembangan diversifikasi dan konservasi energi pangan, pengembangan *corporate farming*, penerapan teknologi pangan, serta pendorongan konservasi dan efisiensi penggunaan sumber daya alam.

Pemerataan suplai listrik dan penerapan teknologi sebagai sumber listrik alternatif menjadi upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target pemenuhan kebutuhan listrik per kapita sebesar 3.500 kWh dan rasio elektrifikasi sebesar 100% di tahun 2045. Pada tahun 2022, capaian daya dukung-tampung air mencapai 83% lahan terlampaui. Untuk mewujudkan target penurunan mencapai angka 40% lahan terlampaui dan sumber air yang berkualitas di tahun 2045, dilakukan upaya pengembangan sumber air, peningkatan kualitas manajemen pengelolaan dan pemanfaatan teknologi dengan tujuan mengoptimalkan infrastruktur.

Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim

Perwujudan mitigasi bencana dan perubahan iklim ditunjukkan dengan penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) dan penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (GRK). Pada tahun 2045, IRB Kabupaten Tangerang ditargetkan dalam kategori sedang yaitu sebesar 80 dan persentase penurunan GRK mencapai target nasional yang sebesar 80,89%. Target tersebut dapat dicapai melalui arahan strategis, yaitu peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana, pengembangan infrastruktur kebencanaan, pengembangan sumber energi terbarukan, serta pengembangan industri hijau.

MISI 6:MEWUJUDKAN KETERPADUAN PENATAAN RUANG UNTUK PEMBANGUNAN WILAYAH YANG MERATA DAN BERKEADILAN

Terwujudnya Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkeadilan

Penataan ruang yang terpadu dan berkeadilan merupakan landasan penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif dalam rangka menekan ketimpangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Tangerang. Maka dari itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang adalah pemenuhan layanan dasar utamanya daerah perdesaan, pengembangan infrastruktur penghubung perkotaan dan perdesaan, pengembangan dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan perkotaan dan perdesaan yang terpadu sebagai penggerak ekonomi kawasan sekitarnya, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan regulasi pengelolaan wilayah.

Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang yang terpadu dengan kesesuaian daya dukung dan daya tampung wilayah menjadi landasan penyangga bagi pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. Maka dari itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang adalah peningkatan ketaatan kesesuaian penataan ruang dengan daya dukung dan daya tampung wilayah, peningkatan upaya pengendalian pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang daerah, serta pengoptimalan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui kebijakan daerah serta keterbukaan akses digital informasi geospasial.

MISI 7:MEWUJUDKAN PEMENUHAN KAPASITAS DAN LAYANAN SARANA PRASARANA SECARA MENYELURUH

Terwujudnya Pemenuhan Sarana-Prasarana Ramah Lingkungan

Penyediaan sarana-prasarana ramah lingkungan berperan sebagai penyangga pembangunan Tangerang yang berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan krisis iklim, serta tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang adalah optimalisasi peran RTH dan elemen hijau perkotaan, optimalisasi sistem drainase, dan penyediaan sarana-prasarana adaptasi dan mitigasi bencana.

Terwujudnya Pembangunan Permukiman yang Optimal

- Kesejahteraan masyarakat dalam bertempat tinggal diharapkan dapat meningkat seiring pemenuhan kebutuhan infrastruktur rumah tangga terpenuhi. Setiap rumah tangga di Kabupaten Tangerang ditargetkan dapat terlayani oleh prasarana air minum dan sanitasi yang layak secara menyeluruh (100%) pada tahun 2045. Layanan infrastruktur rumah tangga yang layak dapat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang karena masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih minimal.
- Penanganan dan rehabilitasi permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni menjadi upaya dalam memberikan kualitas tempat hidup yang layak bagi seluruh masyarakat. Pada tahun 2045, ditargetkan sudah tidak ada lagi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang. Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan permukiman menjadi konsentrasi yang perlu diperhatikan melihat perkembangan jumlah penduduk ketersediaan lahan permukiman juga semakin menipis.

Terwujudnya Sistem Transportasi yang Terintegrasi

Transportasi yang terintegrasi diwujudkan melalui rencana-rencana pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi massal. Pengembangan kapasitas jalan ditargetkan dapat meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi baik menjadi 100% pada tahun 2045 sehingga dapat meningkatkan kualitas keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Sarana transportasi berbasis massal juga sepatutnya dapat dikembangkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Ketersediaan terminal dan stasiun sebagai hub-hub transportasi ditargetkan dapat menjadi solusi kemacetan di kawasan perkotaan dan mampu menjangkau seluruh wilayah.

MISI 8:MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN DIDUKUNG KOLABORASI DAN MANAJEMEN BERBASIS RISIKO

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Efisien

Keuangan daerah yang dipergunakan dalam pembangunan daerah harus dikelola secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dikelola secara cermat agar tidak terjadi *misalokasi* dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang tidak berlebihan.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah pembangunan daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Banten sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah Kabupaten

Tangerang. Mengacu pada arah pembangunan RPJPN tahun 2025-2045, maka arah pembangunan Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5
 Penyelarasan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Banten 2025-2045		RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing	IE1. Kesehatan untuk semua	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	Mewujudkan Derajat Kesehatan yang Tinggi
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Optimal
2.	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Mewujudkan Perekonomian yang Maju melalui Pengembangan dan Diversifikasi Sektor Ekonomi
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		IE5. Penerapan Ekonomi Hijau		Mewujudkan penguasaan IPTEK dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
		IE 6. Transformasi Digital		IE6. Transformasi Digital		Mewujudkan Integrasi ekonomi domestik dan regional
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Mewujudkan Penataan Infrastruktur yang Terpadu
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		IE8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Mewujudkan Pembangunan Permukiman yang Optimal

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Banten 2025-2045		RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
3.	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Berkualitas Mewujudkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Optimal Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima
4.	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Mewujudkan Keamanan yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial dan Perekonomian Daerah yang Stabil	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial IE11. Stabilitas Ekonomi Makro IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Mewujudkan Keamanan dan Perekonomian Daerah yang Stabil	Mewujudkan penegakan hukum dan demokrasi yang berkeadilan dan inklusif Mewujudkan stabilitas ekonomi makro daerah dan penguatan kerjasama daerah Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh dan kondusif

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Banten 2025-2045		RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
5.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Mewujudkan Sosial Budaya yang Beradab dan Ekologi yang Lestari	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dalam Keberagaman
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Mewujudkan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak Yang Optimal
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Mewujudkan manajemen pengelolaan lingkungan yang sirkular
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Meningkatnya kemandirian pangan dan ketahanan daerah
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Hasil Olahan, 2024

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi Daerah

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penjabaran dari arah kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi, serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan karakteristik Kabupaten Tangerang dalam mendukung tercapainya visi Kabupaten Tangerang. Adapaun arah kebijakan dan penyalarsan arah kebijakan transformasi Kabupaten Tangerang secara rinci terantum pada tabel berikut:

Tabel 5.6
 Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transformasi Sosial	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Transformasi Sosial	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
		2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.		2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
		3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.		3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
		4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.		4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
		5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan sesuai standar untuk menciptakan manusia yang berdaya saing dan inovatif		5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, salah satunya melalui pengembangan inovasi <i>medical tourism</i> .
		6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.		6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
		7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.		7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		8. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan).		8. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan di wilayah kecamatan yang perlu perhatian khusus
		9. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan).		9. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas di wilayah kecamatan yang perlu perhatian khusus
		10. Pemenuhan kualitas SDM dan pengelolaan data dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting serta TBC melalui lintas program dan lintas sektor		10. Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
		11. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat untuk menuju <i>zero new stunting</i>		11. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
		12. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.		12. Percepatan eliminasi penyakit tuberkulosis
		13. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang inklusif).		13. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang inklusif).

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		14. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan berkualitas untuk pendidikan menengah atas		14. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan berkualitas untuk pendidikan menengah atas
		15. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.		15. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
		16. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, ramah disabilitas, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.		16. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, ramah disabilitas, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
		17. Pemantapan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk menghasilkan lulusan berdaya saing global		17. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
		18. Penguatan kurikulum pendidikan menengah atas berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)		18. Penguatan kurikulum pendidikan menengah atas berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
		19. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta		19. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis riset inovatif, berdasar kondisi lokal, potensi, dan

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).		keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
		20. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.		20. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
		21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.		21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
		22. Peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan yang mendorong daya saing dan kemampuan kerja melalui penguatan kompetensi dan keahlian baru kewirausahaan		22. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
		23. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.		23. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, diantaranya melalui pengembangan <i>Center of Excellence (CoE)</i>
		24. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan).		24. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan
		25. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga		25. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan).		kependidikan yang berkualitas
		26. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)		26. Penguatan sarpras pendidikan untuk mata pelajaran terkait STEAM
		27. Pemantapan penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global dengan dukungan Pemerintah Pusat.		27. Penguatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat dasar melalui pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM)
		28. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan).		28. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama di wilayah kecamatan yang perlu perhatian khusus
		29. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan).		29. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama di wilayah kecamatan yang perlu perhatian khusus
		30. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan).		30. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama di wilayah kecamatan yang perlu perhatian khusus

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		31. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas <i>intraregion</i> dan <i>interregion</i> pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)		31. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas <i>intraregion</i> dan <i>interregion</i> di wilayah kecamatan yang perlu perhatian khusus
		32. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique and high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan).		32. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi di wilayah kecamatan yang perlu perhatian khusus
		33. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .		33. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .
		34. Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat		34. Peningkatan kualitas layanan perhubungan di wilayah kecamatan yang perlu perhatian khusus

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan) melalui bertambahnya <i>demand</i> .		
		35. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.		35. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
		36. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan).		36. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		37. Pemantapan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan).		37. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat
		38. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecimeneengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan).		38. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat
		39. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.		39. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
		40. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.		40. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
		41. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.		41. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
		42. Percepatan penyediaan dan peningkatan kses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah		42. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.		mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.
2	Transformasi Ekonomi	1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Banten Utara (Cidanau-Ciujung-Cidurian) dan Banten Selatan (Ciliman-Cisawarna-Cilemer-Pasir Eurih)	Transformasi Ekonomi	1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan lahan pangan berkelanjutan di kawasan strategis pertanian di wilayah Tangerang Utara dan Tengah
		2. Pemantapan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).		2. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
		3. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.		3. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
		4. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.		4. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>5. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplace/platform</i>.</p> <p>6. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian</p> <p>7. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.</p> <p>8. Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian.</p> <p>9. Peningkatan produktivitas ekonomi dan</p>		<p>5. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplace/platform</i>.</p> <p>6. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian</p> <p>7. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.</p> <p>8. Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian.</p> <p>9. Pengembangan ekonomi biru berbasis</p>

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, penguatan <i>ease of doing business</i> pada investasi pariwisata dan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif yang berdaya saing berbasiskan hak kekayaan budaya dan intelektual</p> <p>10. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.</p> <p>11. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i>.</p>		<p>keunggulan wilayah.</p> <p>10. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.</p> <p>11. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i>.</p>

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		12. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.		12. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
		13. Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi perikanan.		13. Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi perikanan.
		14. Penyediaan ruang, infrastruktur esensial terintegrasi (jalan, pelabuhan, <i>power supply</i> , dsb) bagi upaya membangkitkan minat investor, peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produksi perikanan		14. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
		15. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.		15. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
		16. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan serta inovasi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas pengembangan perikanan		16. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		17. Peningkatan riset dan inovasi dalam penyediaan instrumen pengendali hama, obat, pakan ramah lingkungan dan ekonomis untuk meningkatkan produktivitas pengembangan perikanan budidaya		17. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
		18. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri. Serang-Tangerang (klaster industri logam dasar, industri petrokimia, industri makanan dan minuman, industri mesin, industri tekstil, industri <i>consumer goods & general manufactures</i>).		18. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Serang-Tangerang (klaster industri logam dasar, industri petrokimia, industri makanan dan minuman, industri mesin, industri tekstil, industri <i>consumer goods & general manufactures</i>).
		19. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan penguatan logistik daerah yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (antara lain jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi).		19. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (antara lain jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi).
		20. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal,		20. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal,

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.</p> <p>21. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jabodetabek</p> <p>22. Penguatan kelayakan Kota Serang sebagai ibukota provinsi menuju kota metropolitan yang memiliki kualitas fungsional, kualitas visual, dan kualitas lingkungan</p>		<p>antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.</p> <p>21. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan</p> <p>22. <i>Kewenangan Provinsi</i></p>

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>23. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya)</p> <p>24. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.</p> <p>25. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green and grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.</p> <p>26. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.</p> <p>27. Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan</p>		<p>23. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya)</p> <p>24. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.</p> <p>25. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green and grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.</p> <p>26. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.</p> <p>27. Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan</p>

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan.		infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan.
		28. Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek.		28. Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan
		29. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek.		29. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan
		30. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.		30. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
		31. Pemantapan atraksi, amenitas, aksesibilitas dan ansilari pada destinasi wisata sesuai standar global serta peningkatan <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i> , terutama pada kawasan perkotaan		31. <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata perkotaan (<i>urban tourism</i>).

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>32. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif disesuaikan dengan preferensi wisatawan dan potensi keunggulan daerah</p> <p>33. Penguatan kepariwisataan daerah melalui budaya ramah wisatawan, diferensiasi atraksi dan <i>trademark</i> wisata berdasarkan kekhasan daerah yang bercitra rasa global serta kolaboratif pemasaran pariwisata dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha berbasis digital</p> <p>34. Peningkatan hub ekonomi kreatif melalui konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan klaster ekonomi kreatif yang didukung oleh rantai pasok yang inklusif, berdaya saing global, dan berkelanjutan</p> <p>35. Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i>, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa, serta pengembangan konektivitas langsung</p>		<p>32. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.</p> <p>33. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.</p> <p>34. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>35. Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i>, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian</p>

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Sumatra-Jawa (di Selat Sunda)		
		36. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa untuk mendukung peningkatan perkotaan sebagai hub klaster ekonomi yang unggul dan berdaya saing		36. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa
		37. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Banten untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: - Rangkasbitung-Panimbang; dan - Panimbang-Muarabinuangeun		37. <i>Kewenangan Provinsi dan Pusat</i>
		38. Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek.		38. <i>Kewenangan Provinsi dan Pusat</i>
		39. Reaktivasi layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Rangkasbitung-Pandeglang (termasuk elektrifikasi dan jalur ganda).		39. <i>Kewenangan Provinsi dan Pusat</i>
		40. Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama		40. <i>Kewenangan Provinsi dan Pusat</i>

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pada ruas Rangkasbitung-Merak.		
		41. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Banten/Ciwandan dan Cigading.		41. <i>Kewenangan Provinsi dan Pusat</i>
		42. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta		42. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
		43. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global melalui penguatan sinergi riset dan industri besar dalam hilirisasi mother industri, pengembangan skema rekrutmen dan insentif melalui <i>talent pool</i> , pemagangan industri, dan beasiswa		43. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		44. 43. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya melalui hunian compact yang terintegrasi antar fungsi tempat tinggal, kantor, kesehatan, transportasi, rekreasi, dsb (<i>walkable city</i>)		44. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
		45. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.		45. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.
		46. Penguatan ekosistem ekonomi biru melalui industri berbasis kelautan, perdagangan, transportasi dan logistik, pariwisata, energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, serta konservasi dan jasa ekosistem melalui pendekatan pilar ekonomi, lingkungan, sosial, dan enabler		46. Penguatan ekosistem ekonomi biru melalui industri berbasis kelautan, perdagangan, transportasi dan logistik, pariwisata, energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, serta konservasi dan jasa ekosistem melalui pendekatan pilar ekonomi, lingkungan, sosial, dan enabler
		47. Industrialisasi koperasi melalui pemantapan regulasi, peningkatan SDM yang berkesetaraan gender, hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi riset dan inovasi teknologi baru berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah.		47. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		48. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan/pemodalan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.		48. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
		49. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.		49. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.
		50. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.		50. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
		51. Peningkatan produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD melalui penguatan penerapan asas-asas <i>good governance</i> , penguatan karakter budaya wirausaha, penguatan iklim bisnis, kejelasan regulasi serta pelaksanaan pembinaan sesuai standar global		51. Peningkatan produktivitas BUMD.
		52. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber		52. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan</p>		<p>sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan</p>

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>53. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p>		<p>pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan</p> <p>53. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p>
3	Transformasi	1. Penyederhanaan dan peningkatan		1. Penyederhanaan dan peningkatan

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tata Kelola	<p>kualitas regulasi di daerah</p> <p>2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</p> <p>3. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat</p> <p>4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah</p> <p>5. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Banten, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Banten yang profesional dan bebas korupsi</p> <p>6. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital</p> <p>7. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i>, dan <i>punishment</i>, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja</p>	Transformasi Tata Kelola	<p>kualitas regulasi di daerah</p> <p>2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</p> <p>3. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat</p> <p>4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah</p> <p>5. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Banten, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Banten yang profesional dan bebas korupsi</p> <p>6. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital</p> <p>7. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i>, dan <i>punishment</i>, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja</p>

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		8. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat		8. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
		9. Penguatan integritas partai politik sesuai kewenangan provinsi		9. Penguatan integritas partai politik sesuai kewenangan provinsi
4	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas sesuai kewenangan provinsi	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas sesuai kewenangan provinsi
		2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional		2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
		3. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut sesuai kewenangan provinsi serta dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat		3. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut sesuai kewenangan provinsi serta dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat
		4. Penguatan pengendalian inflasi daerah		4. Penguatan pengendalian inflasi daerah

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5. Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/ sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan) sesuai kewenangan provinsi serta dukungan anggaran dari Pemerintah		5. <i>Kewenangan Provinsi dan Pusat</i>
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Penguatan nilai kebudayaan Banten dalam jati diri dan kehidupan bermasyarakat berasaskan Pancasila 2. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan 3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis 4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami 5. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan sesuai kewenangannya, sistem	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila 2. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan 3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis 4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami, salah satunya dengan pengembangan potensi hutan mangrove untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui perdagangan karbon atau <i>carbon trade</i> . 5. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan sesuai kewenangannya,

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi dengan dukungan program dan anggaran dari Pemerintah Pusat		sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi dengan dukungan program dan anggaran dari Pemerintah Pusat
		6. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal		6. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
		7. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang		7. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
		8. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan		8. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		9. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam partisipasi pembangunan		9. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam partisipasi pembangunan
		10. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air		10. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
		11. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>		11. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>
6	Implementasi Transformasi	1. Pemantapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Implementasi Transformasi	1. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah
		2. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)		2. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
		3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir		3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir
		4. Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition</i>)		4. Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition</i>)

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p><i>and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p> <p>5. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan</p> <p>6. Percepatan pelaksanaan reforma agraria</p> <p>7. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i>, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara</p>		<p><i>and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p> <p>5. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan</p> <p>6. Percepatan pelaksanaan reforma agraria</p> <p>7. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i>, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara</p>

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri		pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri
		8. Penegakan mitigasi struktural terhadap keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim serta penguatan kapasitas masyarakat, mitigasi non struktural, dan sistem peringatan dini bencana		8. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
		9. Pemanjapan pelaksanaan pemerintahan melalui pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>		9. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>
		10. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah		10. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
		11. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi		11. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten
		12. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional		12. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional
		13. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan		13. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan

NO	RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN TANGERANG 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan		pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan
		14. Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko		14. Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko

Sumber: Hasil Olahan, 2024

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Tangerang mengacu pada Indikator Utama Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Banten dengan target tahun 2045 yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan arah pembangunan dan sasaran pokok yang akan dicapai sebagai penjabaran visi misi Kabupaten Tangerang. Berikut penyelarasan antara indikator utama pembangunan dalam RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Banten, dan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045.

Tabel 5.7
 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJP Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Banten
 Tahun 2025-2045

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi Banten 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
TRANSFORMASI SOSIAL			TRANSFORMASI SOSIAL			TRANSFORMASI SOSIAL			
IE1	Kesehatan untuk Semua			Kesehatan untuk Semua			Mewujudkan Derajat Kesehatan yang Tinggi		
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80,0	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,20	80,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,48	80,54
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:		
	a) Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122,0	16,0	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	101,0	10,0	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	77	10
	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80	5,0	b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,3	6,5	b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,4	6
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Penanganan Tuberkulosis:			Penanganan Tuberkulosis:		
				a) Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)	95,0	95,0	a) Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)	90	100
				b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)	92,8	98,0	b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)	90	100
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,0	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,77	99,50	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,9	100
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata			Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas		
5	Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi Banten 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
a.	Rata-rata nilai PISA			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			a) Persentase kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	Membaca	396,0	485,0	i) Literasi Membaca (%)	12,50-25,00	62,50-75,00	i) Nilai Literasi SD (%)	60,6	80
	Matematika	404,0	490,0	ii) Numerasi (%)	0,00-12,50	62,50-62,50	ii) Numerasi SD (%)	44,87	75
	Sains	416,0	487,0						
	Rata-rata nilai asesmen nasional			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	b-i Literasi Membaca	62,89	75,73	i) Literasi Membaca (%)	34,43-36,43	65,23-67,23	i) Nilai Literasi SMP (%)	68,12	85
	b-ii Numerasi	54,36	68,72	ii) Numerasi (%)	26,81-28,81	61,02-63,02	ii) Numerasi SMP (%)	67,04	80
b.	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	9,33	12,00	a) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	9,86-9,86	12,49-12,52	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	9,63	16
c.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,32	14,81	b) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,31-13,32	14,72-14,77	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	13,43	18
6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	9,84	9,84-10,26	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,73	20
7	Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang	66,78	75	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang	64,42	75,00			

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi Banten 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
	keahlian menengah tinggi (%)			Keahlian Menengah Tinggi (%)					
IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif			Perlindungan Sosial yang Adaptif			Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Optimal		
8	Tingkat kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	0,5-0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,50	0,04-0,54	Persentase penduduk miskin (%)	6,03	0,04-0,29
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	46,80	92,52	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	15,33	99,5
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,0	60,0	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	26,00	65,00	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	33,14	65
TRANSFORMASI EKONOMI			TRANSFORMASI EKONOMI			TRANSFORMASI EKONOMI			
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Mewujudkan Perekonomian yang Maju melalui Pengembangan dan Diversifikasi Sektor Ekonomi		
11	Produktivitas Industri dan Pertanian								
	Rasio PDB industri pengolahan (%)	20,8	28	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	30,48-31,20	34,99-36,13	Rasio kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	32,76	34,99-36,13
	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	3,2 – 3,4	3,3 – 3,2						
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata		
a.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6	8,0	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,45	4,17	a) Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,76	2,65-4,00
b.	Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	22,10	100	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	496,89	1.242,23	b) Jumlah Tamu Wisatawan	77,5	193,74

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi Banten 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
				(Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*			Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*		
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	11,00	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	5,38	4,62			
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil Dan Menengah (%)	1,44	5,00	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	11,71	13,76	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	9,56	19
				b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	5,29	9,36			
b.	Rasio Kewirausahaan (%)	3,14	8,00	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,11	3,95	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,69	4,18
c.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,0	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,87	4,99	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,77	12,5
d.	Return of Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,89	5,69	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,50	5,50
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
	a)Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 – 5,00	4,00	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,78-7,24	6,17-7,14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)		
	b)Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	80	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	56,00	85,00			

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi Banten 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,30	70,00	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	50,00	61,60	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69,67	90
17	Tingkat penguasaan IPTEK			Indeks Inovasi Daerah (indeks)	58,00-65,00	85,00	Indeks Inovasi Daerah (indeks)	63,64 (Sangat Inovatif)	80 (Sangat Inovatif)
a.	Pengeluaran Iptek dan inovasi (% PDB)	0,30	2,2-2,3						
b.	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	60	30 besar						
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau			Mewujudkan Penguasaan IPTEK dan Inovasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan		
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
a.	Indeks Ekonomi Hijau (indeks)	70,8	90,65	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)	57,58	73,90	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	24	72,2
b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,50	72,21			
IE6	Transformasi Digital			Transformasi Digital			Mewujudkan Penguasaan IPTEK dan Inovasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan		
19	Indeks Daya Saing Digital Ditingkat Global (peringkat)	43	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi* (indeks)	6,3	7,8	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi* (indeks)	6,5	7,8
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Mewujudkan Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional		
20	Biaya logistik (% PDB)	13,5	8,0	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	6,37	4,41	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	34,63	35,06
21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	30,1 – 30,2	27,2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	34,55	29,72			

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi Banten 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
a.	Indeks Integritas Nasional (indeks)	74,52	96,98	Indeks Integritas Nasional (indeks)	72,74	87,63	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPF) (indeks)	3,2	3,22
b.	Indeks Persepsi Korupsi (indeks)	38	60						
							Nilai Sistem Merit	308,31	400
							Indek Professionalitas ASN	60,91	91-100
							Nilai Maturitas SPIP	4	>4,5
							Nilai Kapabilitas APIP	4	Level 5 (Optimized)
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH			KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH		
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Mewujudkan Penegakan Hukum dan Demokrasi yang Berkeadilan dan Inklusif		
28	Indeks Pembangunan Hukum (indeks)	0,69	0,89	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	70,00	100,00	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100	100
				Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60,00	80,00			
29	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya (%)	67,5	80,0	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	55,29	72,67	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (%)	75	100
30	Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi	Indeks Demokrasi Daerah (indeks)	Sedang	Tinggi
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro			Stabilitas Ekonomi Makro			Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dan Penguatan Kerjasama Daerah		
31	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,70-11,20	18,0-20,0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,55	5,00	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,01 (2023)	5
32	Tingkat inflasi (%)	2,5 + 1	2,0 + 1	Tingkat Inflasi (%)	3,20-3,60	1,10-3,00	Tingkat Inflasi (%)		2

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi Banten 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
33	Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan				4,56 (2022)	
	a) Aset perbankan/PDB (%)	66,9	200	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	33,34	77,20			
	b) Aset dana pensiun/PDB (%)	8,0	60	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,77	7,39			
	c) Aset asuransi/PDB (%)	9,1	20	c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	17.909.655,76	199.641.708,14			
	d) Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120						
	e) Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90	d) Total Kredit/PDRB (%)	25,00	66,80			
34	Inklusi keuangan (%)	91	98	Inklusi Keuangan (%)	91,83	99,02			
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan			Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan			Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dan Penguatan Kerjasama Daerah		
35	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influencer</i>)	61,54	75,0-80,0	Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi/ <i>sister province</i> (Jumlah)	2,00	8,00	Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten (Jumlah)	0	2
36	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	16	45	Indeks Ketahanan Nasional (indeks)	Cukup Tangguh	Sangat Tangguh			
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI		
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dalam Keberagaman		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (indeks)	58,39	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (indeks)	53,63-53,67	62,37-62,77	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (indeks)	52	63,5 - 77
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (indeks)	76,77	84,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (indeks)	70,68-70,77	76,92-77,91			
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Mewujudkan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak Yang Optimal		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi Banten 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (indeks)	70,29	80,00	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (indeks)	69,76-69,76	74,75-74,78	Indeks Pembangunan Keluarga (indeks)	64,71	74,75
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)	0,425	0,15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)	0,442-0,441	0,220-0,206	Indeks Ketimpangan Gender (indeks)	0,46	0,21-0,22
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas			Lingkungan Hidup Berkualitas			Mewujudkan Manajemen Pengelolaan Lingkungan yang Sirkular		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (indeks)	0,44	0,75	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (indeks)	0,524	0,626	Kualitas Lingkungan Hidup		
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup					
	a).i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,53	87,05	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (indeks)	66,92	74,92	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	61,57	66,61
	a).ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	72,02	77,50						
	a).iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	77,97	79,74						
	a).iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	81,02	88,77						
	b) Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	70	b) Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	15,39	70,00	b) Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	88,27	100
	c) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	26 (16% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	c) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	5,00	90,00	c) Persentase Timbulan Sampah Yang Terkelola (%)	64,75	100
				d) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh	49,00	100,00			

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi Banten 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
				Pengumpulan Sampah (%RT)					
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Pangan			Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Meningkatnya Kemandirian Pangan dan Ketahanan Daerah		
43	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju Kedaulatan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
a.	Ketahanan Energi			Ketahanan Energi			Ketahanan Energi		
	- Indeks Ketahanan Energi	6,77	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	2.386,00	3.270,00	Pemenuhan Kebutuhan Listrik Per Kapita (kWh)	1247,8	3.500
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	200,00	170,00	Rasio Elektrifikasi	97,66	100
							Kemandirian Pangan		
b.	Prevalensi Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan (%)	7,21	0,77	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	2,65	0,67	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	2,2	0,57
c.	Ketahanan Air			Ketahanan Air			Ketahanan Air		
	- Kapasitas Tampungan Air Per Kapita (M ³ /Kapita)	65,18	200	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,99	15,73			
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,20	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30,46	100,00	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	98,74	100
IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim		
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif Terhadap PDB (%)	0,137	0,11	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	105,17	89,56-76,17	Indeks Risiko Bencana (IRB)	122,39	80

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Provinsi Banten 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
45	Presentasi Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
a.	Kumulatif	28,12	51,51	a. Kumulatif	2,26	25,42	a. Kumulatif	2,20	26,00
b.	Tahunan	32,65	80,89	b. Tahunan	8,93	70,70	b. Tahunan	8,90	71,00

Sumber: Hasil Olahan, 2024

*) proxy – sama seperti target Provinsi Banten

Tabel 5.8
Penyelarasan Misi, Sasaran Pokok, Indikator Pembangunan, dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi									
Mewujudkan Derajat Kesehatan yang Tinggi	Terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,48	80,54	Peningkatan peran lintas sektor kesehatan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kesadaran, kemauan serta kemampuan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kualitas dan akses sanitasi	Pemantapan perilaku hidup sehat dan kualitas & akses sanitasi
		2	Kesehatan Ibu dan Anak: a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	77	10	Peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai & memenuhi standar serta peningkatan kuantitas & kualitas SDM	Pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis; Peningkatan kualitas dan kapasitas	Pengembangan & pemanfaatan teknologi, digitalisasi dan bioteknologi sektor kesehatan	Pemantapan pelayanan transformasi kesehatan
				b) Prevalensi Stunting	21,4	6			

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		3	(pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Penanganan Tuberkulosis:			bidang kesehatan; Peningkatan sistem pengelolaan data terintegrasi dalam rangka monitoring stunting	SDM dalam rangka percepatan penurunan stunting		
		a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90,00	100				
		b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90,00	100				
		4	Cakupan kepesertaan jaminan	98,90	100	Pemenuhan jaminan kesehatan	Penyediaan jaminan kesehatan	Peningkatan promotif dan preventif	Keterkecukupan jaminan kesehatan

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			kesehatan nasional (%)			nasional untuk semua kelompok masyarakat	nasional secara berkelanjutan	melalui JKN dan Standar Pelayanan Minimal	nasional yang efektif, efisien, dan merata
Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	5 a)	Persentase kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			Peningkatan kualitas pendidikan melalui meningkatkan literasi dan kemampuan matematika bagi seluruh peserta didik	Peningkatan upaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang mendukung adanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi	Peningkatan upaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang mendukung kewirausahaan	Pemantapan kapasitas peserta didik untuk bersaing di lapangan pekerjaan keahlian tinggi
			i) Nilai Literasi SD	59,28	80				
			ii) Numerasi SD	47,11	75				
		b)	Persentase satuan pendidikan yang						

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
		i)	Nilai Literasi SMP	69,83	85				
		ii)	Numerasi SMP	65,09	80				
		c)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,63	16	Peningkatan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	Pemerataan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	Pemantapan akses terhadap pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		d)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,43	18	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana & prasarana pendidikan	Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Pendidikan	Pengembangan sarana & prasarana pendidikan	Pemantapan kondisi sarana & prasarana pendidikan
		6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	11,73	20	Peningkatan aksesibilitas lulusan pendidikan terhadap lapangan kerja	Pemerataan akses lulusan pendidikan terhadap lapangan kerja melalui pelatihan kompetensi ketenagakerjaan	Pengembangan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja sesuai bidang keahlian dan talenta digital	Pemantapan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja sesuai bidang keahlian
Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Optimal	Terwujudnya perlindungan sosial yang optimal	8	Persentase Penduduk Miskin	6,03	0,04-0,29	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor melalui peningkatan	Peningkatan kapabilitas dan kapasitas PPKS melalui pemberdayaan berbasis kewirausahaan	Peningkatan kolaborasi pentahelix dalam penanganan masalah sosial	Pemerataan dan pemantapan perlindungan sosial adaptif masyarakat
		9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	15,33	99,5				

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		10	aan Kabupaten (%) Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	33,14	65	SDM dan optimalisasi sistem pendataan PPKS			
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi									
Mewujudkan Perekonomian yang Maju melalui Pengembangan dan Diversifikasi Sektor Ekonomi	Terwujudnya perekonomian yang maju melalui pengembangan dan diversifikasi ekonomi	11	Rasio kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	32,76	34,99-36,13	Pengembangan dan penguatan komoditas (jenis usaha) industri dengan ekspor bersih perdagangan; optimalisasi kemudahan investasi	Pengembangan kawasan strategis industri hijau ramah lingkungan dan berbasis inovasi; peningkatan produktivitas hasil produk industri; mendorong	Pengembangan infrastruktur pendukung dalam meningkatkan efisiensi distribusi dan skala pasar; mendorong investasi yang mendukung	Pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktivitas kuat, berdaya saing, nilai tambah tinggi, serta peningkatan realisasi investasi

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045			ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG				
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
						investasi untuk digitalisasi dan inovasi	ekonomi hijau		
		1 2 a)	Sektor Pariwisata Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PBRB (%)	1,76	2,65-4,00	Pengembangan sentra-ekonomi strategis melalui penyediaan akses dan layanan infrastruktur untuk sektor industri kreatif dan pariwisata;	Percepatan pengembangan dan pengintegrasian sentra-ekonomi strategis untuk sektor industri kreatif dan pariwisata	Penguatan implementasi teknologi digital dalam promosi sentra-ekonomi strategis untuk sektor industri kreatif dan pariwisata	Optimalisasi implementasi teknologi digital dalam sektor industri kreatif dan pariwisata
		b)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	77,5	193,74				
		1 4	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			Peningkatan kemandirian ekonomi untuk	Pengembangan komoditas UMKM berdasarkan	Penguatan proses bisnis UMKM melalui	Pemantapan dan akselerasi ekosistem

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		a)	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	9,56	19	mendorong usaha mikro (industri rumah tangga) dan industri kreatif	klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah	perluasan ekosistem digital dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dengan inkubator bisnis, pelatihan, dan permodalan	UMKM untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi
		b)	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,69	4,18				
		c)	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,77	12,5				
		d)	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,5	5,5				
	Terwujudnya kesejahteraan	15	Tingkat Penganggura	7,03	3,3	Peningkatan intensitas	Peningkatan up-skilling	Peningkatan kapasitas	Pemantapan kapasitas

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	angkatan kerja dalam mendorong pendapatan per kapita tinggi dan pemerataan distribusi pendapatan	1 6 1 7	n Terbuka (TPT) (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Indeks Inovasi Daerah	69,67 63,64 (Sangat Inovatif)	90 80 (Sangat Inovatif)	pelatihan tenaga kerja untuk memiliki kapasitas enterpreneur; optimalisasi jaminan kesejahteraan tenaga kerja	dan re-skilling tenaga kerja melalui pengembangan Balai Latihan Kerja dan kerja sama sekolah vokasi/kejuruan	tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan lapangan kerja digital	tenaga kerja terhadap transformasi digital dan SDM digital
Mewujudkan Penguasaan IPTEK dan Inovasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya penguasaan IPTEK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	1 8 a 9	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) indeks Pembangunan Teknologi	24 6,5	72,2 7,8	Peningkatan kapasitas riset inovasi dan pemenuhan akses digital di seluruh wilayah; Peningkatan kapasitas pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Ekspansi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dari sektor berkelanjutan (ekonomi biru, ekonomi hijau, dan bioekonomi); Perluasan sistem jaringan EBT	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau (perdagangan karbon, offsetting,	Pemantapan penguasaan IPTEK dan pertumbuhan ekonomi dari sektor perkelanjutan

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			informasi dan Komunikasi*				di sektor transportasi, industri, dan rumah tangga	dan pajak karbon)	
Mewujudkan Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	Terwujudnya Integrasi ekonomi domestik dan regional	2 1 2 2 2 3 a b	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan Persentase rumah layak huni Persentase Desa Mandiri (%)	34,63 17,55 89,66 5	35,06 35	Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan dan rantai pasok antar wilayah melalui kerjasama antar daerah utamanya daerah pusat aglomerasi	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung sektor perdagangan dan ekspor-impor	Peningkatan ekspansi ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi dalam rantai pasok global	Pemantapan integrasi konektivitas antar kawasan pertumbuhan ekonomi (perdesaan-perkotaan), kawasan strategis, kawasan aglomerasi, superhub antar wilayah, dan ekspansi global

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien									
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	2 4 2 5	Indeks Reformasi Hukum Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	86,73 2,89	100 5	Pemantapan pembagian tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) pada seluruh instansi pemerintahan serta menyusun rencana pengadopsian teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dan berjangka panjang	Pembangunan infrastruktur TI pada instansi pemerintahan secara menyeluruh yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien	Pengintegrasian dan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan secara maksimal	Pemantapan tata laksana pemerintahan yang berbasis teknologi informasi
Mewujudkan Pelayanan	Terwujudnya Pelayanan	2 6	Indeks Pelayanan Publik	4,23	5	Penguatan database dan sistem	Pengembangan kompetensi dan nilai-nilai	Memperketat sistem manajemen	Peningkatan standar kualitas dan

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045			ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG				
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Publik yang Prima	Publik yang Prima	27	Anti Korupsi) a) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPF)	3,2	3,22	informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	moral ASN yang sesuai dengan kebutuhan	ASN terutama yang terkait dengan profesionalitas serta reward and punishment	standar kinerja ASN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Terwujudnya aparatur pemerintahan yang berkualitas		Nilai Sistem Merit Indeks Professionalitas ASN	308,31 60,91	400 91-100	Pemantapan kebijakan dan pemahaman pelayanan publik pada seluruh instansi pemerintahan	Penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Memaksimalkan pelayanan publik yang prima
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal		Nilai Maturitas SPIP Nilai Kapabilitas APIP	4 4	>4,5 Level 5 (Optimized)	Pemantapan pemahaman SPIP kepada seluruh Instansi yang terkait serta	Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian instansi	Pengembangan berkelanjutan pada SPIP	Pemantapan SPIP dan kapabilitas APIP

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
						menyusun kebijakan dan SOP yang berhubungan dengan SPIP	pemerintahan serta pemenuhan dan peningkatan kompetensi APIP yang sesuai kebutuhan		
Misi 4 : Mewujudkan Keamanan dan Perekonomian Daerah yang Stabil									
Mewujudkan Penegakan Hukum dan Demokrasi yang Berkeadilan dan Inklusif	Terwujudnya penegakan hukum dan demokrasi yang berkeadilan dan inklusif	2 8 2 9 3 0	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%) Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (%) Indeks Demokrasi Daerah	100 75 Sedang	100 100 Tinggi	Penataan regulasi hukum dan keamanan daerah; Peningkatan kapasitas lembaga demokrasi yang kuat dan akuntabel	Penguatan kelembagaan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Penguatan stabilitas keamanan daerah	Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi dan penguatan kapasitas lembaga demokrasi yang berintegritas	Pemantapan penegakan hukum dan pelaksanaan demokrasi yang berkeadilan, aman, dan inklusif
Mewujudkan Stabilitas	Terwujudnya stabilitas	3 1	Rasio Pajak Daerah	2,01 (2023)	5	Peningkatan kapasitas	Penguatan pengelolaan	Optimalisasi pengelolaan	Penguatan kerjasama

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Ekonomi Makro Daerah dan Penguatan Kerjasama Daerah	ekonomi makro daerah dan penguatan kerjasama daerah	3 2 3 5	terhadap PDRB (%) Tingkat Inflasi (%) Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten (jumlah)	4,56 (2022) 0	2 2	fiskal dan stabilitas sektor keuangan daerah; Pembentukan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan; kerjasama pembangunan infrastruktur antar daerah utamanya kawasan aglomerasi; pengendalian inflasi daerah	fiskal dan moneter melalui optimalisasi pengelolaan sektor keuangan daerah; penguatan kerjasama antar daerah; pengendalian inflasi daerah	fiskal dan keuangan daerah; Peningkatan jumlah penerimaan daerah dan efektivitas belanja daerah; pengembangan kerjasama pengembangan infrastruktur melalui creative financing; pengendalian inflasi daerah	antar daerah serta kerjasama badan usaha - swasta; Optimalisasi pengelolaan fiskal dan keuangan daerah; Pemantapan pengendalian inflasi daerah
Misi 5 : Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat yang Tangguh untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Hidup									

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dalam Keberagaman	Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dalam Keberagaman	3 7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	52	63.5-77	Penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembentukan karakter dan peningkatan ketangguhan masyarakat	Penyediaan akses partisipasi yang inklusif; Peningkatan karakter masyarakat yang tangguh dan adaptif	Pengoptimalan karakter individu, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan dan bencana; Penguatan partisipasi masyarakat secara inklusif	Pemantapan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi perubahan dan bencana
Mewujudkan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Anak yang Optimal	Terwujudnya Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak Yang Optimal	3 9	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64,71	74,75	Penguatan kelembagaan kepengurusan anak dan keluarga	Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam melindungi dan memberdayakan lingkungan	Peningkatan kerjasama mitra dalam pemberdayaan anak dan keluarga	Pemantapan perlindungan dan pemenuhan hak anak; pemantapan kualitas dan ketangguhan keluarga

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045			ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG				
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		40	Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Indeks Ketimpangan Gender	0,46	0,21-0,22	Penguatan kelembagaan kesetaraan gender	yang baik dan aman untuk anak dan keluarga; Peningkatan kapasitas perempuan dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan	Pengoptimalan upaya pembangunan manusia berbasis gender dan peningkatan pendidikan talenta digital perempuan	Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender
						Pembinaan kepemudaan dalam peningkatan potensi prestasi	Penguatan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Peningkatan kerjasama mitra nasional dan internasional dalam rangka peningkatan prestasi dan partisipasi pemuda	Pemantapan prestasi pemuda dalam bidang keolahragaan

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Mewujudkan Manajemen Pengelolaan Lingkungan yang Sirkular	Terwujudnya Manajemen Pengelolaan Lingkungan yang Sirkular	4	Indeks Tutupan Lahan	46,7	48,04	Penguatan regulasi terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam	Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan teknologi untuk efisiensi dan produktivitas sumber daya serta menekan pencemaran lingkungan	Pemantapan kinerja dalam rangka mencapai lingkungan hidup berkualitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam
		1							
		4	Kualitas Lingkungan Hidup						
		2							
		a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.57	66.61	dampak kegiatan industri dan permukiman, berupa insentif dan disinsentif kawasan pertanian			
		b	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	88,27	100	Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan	Pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah dan	Pengembangan dan penerapan teknologi dalam	Pemantapan manajemen pengelolaan limbah dan

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		c)	Persentase timbulan sampah yang terkelola	64,75	100	dari tingkat domestik (mikro) hingga regional	persampahan melalui kerja sama layanan pengelolaan antar daerah (kerjasama antar regional)	pengelolaan limbah dan persampahan	persampahan yang sirkuler
Meningkatnya Kemandirian Pangan dan Ketahanan Daerah	Meningkatnya Ketahanan Daerah	4 3 a) i) ii) b)	Ketahanan energi, air, dan pangan Ketahanan energi Pemenuhan kebutuhan listrik per kapita (kWh) Rasio elektrifikasi Kemandirian Pangan	1.247,80 97,66	3.500 100	Peningkatan kapasitas pembangkit listrik dan keandalan sistem kelistrikan	Peningkatan suplai listrik untuk kawasan permukiman dan kawasan kegiatan lainnya	Pengembangan dan penerapan teknologi hijau sebagai sumber-sumber listrik alternatif	Pengendalian kapasitas listrik yang merata dan menyeluruh
						Perlindungan, pengembangan	Pengembangan diversifikasi teknologi	Penerapan teknologi	Pemantapan ketahanan

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		i)	Indeks ketahanan pangan	77,17	85,44	n, dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; peningkatan diversifikasi tanam; serta peningkatan layanan irigasi masyarakat	dan konservasi energi, pengembangan corporate farming, optimalisasi layanan infrastruktur pertanian, pengembangan diversifikasi pangan dan keterjangkauan pangan	tepat guna dalam mendorong produktivitas sektor pertanian, penerapan efisiensi energi dan pengoptimalan EBT; penerapan manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air	energi, air, dan pangan dengan mendorong konservasi dan efisiensi penggunaan sumber daya alam
		c)	Ketahanan Air			Pengembangan sumber-sumber air bersih dan sarana pengelolaan sanitasi air bersih yang	Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan air daerah dalam menjaga supply dan	Penerapan teknologi dalam peningkatan kinerja layanan infrastruktur sumber air	Pengendalian pemanfaatan sumber daya air dengan menjaga dan mengawasi kuantitas serta kualitas
		i)	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air	98,74	100				

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			Siap Minum Perpipaan (%)			memadai dalam meningkatkan pasokan air baku serta pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air, baik kawasan perkotaan maupun perdesaan	demand yang sesuai		air baku untuk kebutuhan
Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	4	Indeks Risiko Bencana (IRB)	122,39	80	Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui	Penerapan upaya dekarbonisasi sumber energi, pengembangan sistem	Penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal dan terintegrasi	Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			Indeks Kualitas Udara	69,36	77,36	mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbon	peringatan dini kebencanaan; serta memperkuat fungsi konservasi hutan mangrove yang berada di pesisir utara sekaligus sebagai daya tarik wisata eco-tourism	serta pengoptimalan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap bencana dan krisis iklim	mitigasi bencana dan pengendalian krisis iklim
Misi 6 : Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang untuk Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan									
	Terwujudnya penataan ruang yang tepadu dan berkeadilan		Indeks Williamson	menurun	menurun	Pemenuhan layanan dasar utamanya daerah perdesaan; Pengembangan	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan regulasi pengelolaan wilayah perkotaan	Penguatan pusat-pusat pertumbuhan perkotaan dan perdesaan yang terpadu	Pemantapan pemerataan pembangunan dan keterpaduan penataan ruang

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
						n infrastruktur dan	perdesaan	sebagai	
						infrastruktur	perdesaan	penggerak	
						penghubung		ekonomi	
						perkotaan		kawasan	
						dan		sekitarnya	
						perdesaan		dan	
								pemerataan	
								pembanguna	
								n wilayah	
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW	96%	100%	Peningkatan ketaatan kesesuaian penataan ruang dengan daya dukung dan daya tampung wilayah	Peningkatan upaya pengendalian pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang daerah	Pengoptimalan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui kebijakan daerah serta keterbukaan akses digital informasi geospasial	Peningkatan upaya pemanfaatan ruang sesuai arahan untuk mewujudkan keberlanjutan
Misi 7 : Mewujudkan Pemenuhan Kapasitas dan Layanan Sarana Prasarana secara Menyeluruh									
	Terwujudnya pemenuhan sarana-		Persentase drainase baik (%)	meningkat	100	Rehabilitasi lahan hijau perkotaan	Pengoptimalan fungsi drainase	Pengembangan ruang terbuka hijau	Peningkatan kualitas ruang

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	prasarana ramah lingkungan		Persentase RTH kawasan perkotaan (%)	18	minimal 30%	dan peningkatan kualitas resapan air serta perbaikan jalur-jalur drainase kota	perkotaan dan RTH sebagai pengendali banjir	yang sekaligus berperan sebagai ruang n kegiatan publik	terbuka hijau yang berkelanjutan
	Terwujudnya pembangunan permukiman yang optimal		Persentase layanan air minum RT (%)	100	100	Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah dan reformasi subsidi perumahan dari pemerintah daerah	Peningkatan efisiensi penyediaan lahan perumahan yang selaras dengan perencanaan tata ruang	Pengoptimalan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh sebagai upaya peningkatan kesejahteraan tempat tinggal	Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan kawasan permukiman
			Persentase areal kawasan kumuh (%)	27	0				
			Persentase rumah layak huni (%)	89,66	100				

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045				ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG			
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Terwujudnya sistem transportasi yang terintegrasi		Persentase jalan dalam kondisi baik (%) Cakupan layanan transportasi	96,48 meningkat	100 (Setiap kecamatan memiliki hub transportasi)	Penyelenggaraan perbaikan kondisi jalan hingga ke permukiman dan pengendalian kapasitas konektivitas	Pengembangan sistem transportasi berbasis angkutan massal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hub transportasi	Pengintegrasian hub-hub transportasi massal dengan daerah-daerah di sekitarnya serta modernisasi sistem pelayanan transportasi darat	Pengendalian lalu lintas jalan dan perawatan kondisi hub-hub transportasi
Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Didukung Kolaborasi dan Manajemen Berbasis Risiko									
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien		Indeks Kemandirian Fiskal Nilai SAKIP Opini BPK	0,54 77,81 WTP	0,75 - 1,00 90-100 WTP	Reformasi tata kelola fiskal daerah; Peningkatan kompetensi ASN pengelola	Optimalisasi pembiayaan pembangunan pemerintah dan non-pemerintah, Pemantapan penggunaan	Penciptaan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045			ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TANGERANG				
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
						keuangan daerah;	teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah		

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 5.9
Arah Pembangunan, Sararan Pokok, dan Indikator Utama Pembangunan Daerah Berdasarkan Capaian Target Periode 5 (lima)
Tahunan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045		Target Capaian Indikator				
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	Per Periode Lima Tahun			
					Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi								
Mewujudkan Derajat Kesehatan yang Tinggi	Terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,48	73,21	75,42	77,71	80,54
		2	Kesehatan Ibu dan Anak:					
		a)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	77,00	51,19	30,73	18,45	10,00
		b)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,40	16,59	12,08	8,79	6,00
		3	Penanganan Tuberkulosis:					
		a)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90,00	93,22	97,4	100,0	100,0
		b)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90,00	92,56	95,9	100,0	100,0
		4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,90	100,0	100,0	100,0	100,0

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045		Target Capaian Indikator				
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	Per Periode Lima Tahun			
					Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	5	a) Persentase kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
			i) Nilai Literasi SD	60,60	64,06	68,7	73,6	80,0
			ii) Numerasi SD	47,87	49,73	56,5	64,3	75,0
			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
			i) Nilai Literasi SMP	56,12	71,20	75,26	79,54	85,00
			ii) Numerasi SMP	40,04	69,45	72,59	75,87	80,00
			c) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,63	10,66	12,10	13,74	16,00
			d) Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,43	14,24	15,32	16,49	18,00
		6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	11,73	13,05	14,91	17,04	20,00

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045		Target Capaian Indikator				
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	Per Periode Lima Tahun			
					Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Optimal	Terwujudnya perlindungan sosial yang optimal	7	Persentase Penduduk Miskin	6,03	3,1-4,0	1,3-2,4	0,6-1,5	0,04-0,29
		8	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	15,33	25,24	47,09	87,84	99,50
		9	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	33,14	37,92	44,88	53,11	65,00
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								
Mewujudkan Perekonomian yang Maju melalui Pengembangan dan Diversifikasi Sektor Ekonomi	Terwujudnya perekonomian yang maju melalui pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi	10	Rasio kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	32,76	33,2-33,4	33,7-34,2	34,3-35,1	34,99-36,13
		11	Sektor Pariwisata					
		a)	Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,76	1,83-2,07	2,04-2,55	2,28-3,13	2,65-4,00
		b)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	77,50	93,09	117,05	147,18	193,74
		12	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045		Target Capaian Indikator				
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	Per Periode Lima Tahun			
					Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
		a)	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	9,56	10,97	13,02	15,46	19,00
		b)	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,69	2,94	3,28	3,66	4,18
		c)	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,77	2,62	4,27	6,95	12,5
		d)	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,50	2,93	3,56	4,34	5,5
	Terwujudnya kesejahteraan angkatan kerja dalam mendorong pendapatan per kapita tinggi dan pemerataan distribusi pendapatan	13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,03	6,04	5,00	4,14	3,30
		14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69,67	73,33	78,18	83,35	90,00
		15	Indeks Inovasi Daerah	63,64 (Sangat Inovatif)	66,62 (Sangat Inovatif)	70,54 (Sangat Inovatif)	74,69 (Sangat Inovatif)	80,00 (Sangat Inovatif)
Mewujudkan Penguasaan IPTEK dan Inovasi dalam	Terwujudnya penguasaan IPTEK dalam mendorong	16	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
		a)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	24	29,91	39,40	51,88	72,20

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045		Target Capaian Indikator				
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	Per Periode Lima Tahun			
					Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	17	indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	6,5	6,74	7,06	7,38	7,80
Mewujudkan Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	Terwujudnya Integrasi ekonomi domestik dan regional	18	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	34,63	34,72	34,82	34,93	35,06
		19	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	17,55	20,15	23,94	28,45	35,00
		20	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
		a)	Persentase rumah layak huni	89,66	94,69	100	100	100
		b)	Persentase Desa Mandiri (%)	5,00	8,22	15,30	28,47	60,00
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien								
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	21	Indeks Reformasi Hukum	86,73	89,24	92,47	95,82	100
		22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,89	3,22	3,70	4,24	5,00
Mewujudkan Pelayanan	Terwujudnya Pelayanan	23	Indeks Pelayanan Publik	4,23	4,37	4,56	4,76	5,00
		24	Anti Korupsi					

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045		Target Capaian Indikator				
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	Per Periode Lima Tahun			
					Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
Publik yang Prima	Publik yang Prima	a)	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPF)	3,2	3,20	3,21	3,21	3,22
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Terwujudnya aparatur pemerintahan yang berkualitas		Nilai Sistem Merit Indek Professionalitas ASN	308,31 60,91	324,79 66,0-67,3	346,63 73,0-76,1	369,95 80,7-86,2	400 91-100
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal		Nilai Maturitas SPIP Nilai Kapabilitas APIP	4 4	4,1 4	4,3 4	4,4 5	>4,5 Level 5 (Optimized)
Misi 4 : Mewujudkan Keamanan dan Perekonomian Daerah yang Stabil								
Mewujudkan Penegakan Hukum dan Demokrasi yang Berkeadilan dan Inklusif	Terwujudnya penegakan hukum dan demokrasi yang berkeadilan dan inklusif	25	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100	100	100	100	100
		26	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (%)	75	85	95	100	100
		27	Indeks Demokrasi Daerah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dan	Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah dan	28	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,01 (2023)	2,41	3,03	3,80	5,00
		29	Tingkat Inflasi (%)	4,56 (2022)	3,82	3,11	2,53	2,00

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045		Target Capaian Indikator				
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	Per Periode Lima Tahun			
					Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
Penguatan Kerjasama Daerah	penguatan kerjasama daerah	30	Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten (jumlah)	0	1	2	2	2
Misi 5 : Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat yang Tangguh untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Hidup								
Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dalam Keberagaman	Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dalam Keberagaman	31	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	52	54,1-56,2	56,9-62,0	59,8-69,4	63,5-77
Mewujudkan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Anak yang Optimal	Terwujudnya Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak Yang Optimal	32	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64,71	66,60	69,05	71,58	74,75
		33	Pembangunan dan Pemberdayaan Gender					
			Indeks Ketimpangan Gender	0,46	0,39	0,32	0,27	0,21-0,22
Mewujudkan Manajemen Pengelolaan Lingkungan yang Sirkular	Terwujudnya Manajemen Pengelolaan Lingkungan yang Sirkular	34	Indeks Tutupan Lahan	46,67	46,95	47,29	47,70	48,04
		35	Kualitas Lingkungan Hidup					
		a)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,57	62,58	63,84	65,35	66,61
		b)	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	88,27	90,50	93,37	96,33	100

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045		Target Capaian Indikator				
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	Per Periode Lima Tahun			
					Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
		c)	Persentase timbulan sampah yang terkelola	64,75	70,63	78,74	87,78	100
Meningkatnya Kemandirian Pangan dan Ketahanan Daerah	Meningkatnya Ketahanan Daerah	36	Ketahanan energi, air, dan pangan					
		a)	Ketahanan energi					
		i)	Pemenuhan kebutuhan listrik per kapita (kWh)	1247,8	1533,66	1984,77	2568,57	3500
		ii)	Rasio elektrifikasi	97,66	98,12	100,00	100,00	100
		b)	Kemandirian Pangan					
		i)	Indeks Ketahanan Pangan	77,17	78,76	80,79	82,87	85,44
		c)	Ketahanan Air					
		i)	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	98,74	100	100	100	100
Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	37	Indeks Risiko Bencana (IRB)	122,39	112,4	101,1	90,9	80
		38	Indeks Kualitas Udara	69,36	70,96	72,96	75,36	77,36

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045		Target Capaian Indikator				
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	Per Periode Lima Tahun			
					Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
Misi 6 : Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang untuk Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan								
	Terwujudnya penataan ruang yang tepadu dan berkeadilan		Indeks Williamson	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW (%)	96	98,0	100,0	100,0	100
Misi 7 : Mewujudkan Pemenuhan Kapasitas dan Layanan Sarana Prasarana secara Menyeluruh								
	Terwujudnya pemenuhan sarana-prasarana ramah lingkungan		Persentase drainase baik (%)	meningkat	meningkat	100	100	100
			Persentase RTH kawasan perkotaan (%)	18	20,16	23,24	26,78	minimal 30%
	Terwujudnya pembangunan permukiman yang optimal		Persentase layanan air minum RT (%)	100	100	100	100	100
			Persentase areal kawasan kumuh (%)	27,00	16,04	8,37	4,37	0
			Persentase rumah layak huni (%)	89,66	94,69	100	100	100
	Terwujudnya sistem		Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	96,48	100	100	100	100

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	Indikator Pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045		Target Capaian Indikator				
		No	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	Per Periode Lima Tahun			
					Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
	transportasi yang terintegrasi		Cakupan layanan transportasi	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	100 (Setiap kecamatan memiliki hub transportasi)
Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Didukung Kolaborasi dan Manajemen Berbasis Risiko								
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien		Indeks Kemandirian Fiskal Nilai SAKIP Opini BPK	0,54 77,81 WTP	0,61 80,64 WTP	0,71 84,31 WTP	0,83 88,16 WTP	0,75 - 1,00 90-100 WTP

5.2.4 Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*)

Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) merupakan bagian dalam rencana pembangunan Provinsi Banten yang diarahkan untuk pembangunan kabupaten-kota. Di bawah ini merupakan transformatif super prioritas Kabupaten Tangerang yang diarahkan dalam RPJPD Provinsi Banten.

- 1) Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) Sektor Tata Kelola Pemerintahan dan Hukum
 - a. Percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait akses layanan pemerintahan yang didasari oleh berbagai aspirasi masyarakat melalui pengembangan pusat kegiatan wilayah maupun pusat pertumbuhan ekonomi baru
 - b. Optimalisasi pelayanan birokrasi (pengembangan Badan Layanan Umum)
 - c. Digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mendukung birokrasi yang cepat dan tangkas.
- 2) Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) Sektor Sosial
 - a. Pendidikan merupakan Kunci Peradaban, dengan indikasi pengembangan pendidikan yakni Pengembangan KEK BSD sebagai hub Pendidikan Tinggi Kelas Dunia, Digitalisasi, dan Kesehatan.
 - b. Penopang utama aksesibilitas kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan untuk menguatkan tingkat kesehatan masyarakat dan berdampak bagi angka harapan hidup.
- 3) Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) Sektor Ekonomi
 - a. Pembangunan dan pengembangan kawasan industri: Kawasan Industri Hijau Cileles (3.100 ha)
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi KP3B
 - c. Pengembangan *Central Business District* pada Kawasan Pesisir Utara Banten
 - d. Penguatan Kawasan Agrikultur Pangan berkelanjutan Serang, Pandeglang, Lebak dan Tangerang
 - e. Peningkatan konektivitas antar wilayah terutama penghubung kawasan strategis regional-nasional (e.g. PSN PIK dan BSD) melalui pengembangan jalan baru dan transportasi publik.
 - f. Pengembangan Mass Rapid Transportation (MRT) East-West Cikarang Jakarta-Balaraja (Phase 2 West Balaraja-Kembangan 29,9 Km) dengan potensi pengembangan Balaraja-Merak (70 Km);
 - g. Pengembangan *Light Rail Transit* (LRT) yang terintegrasi menghubungkan pusat kegiatan wilayah di Kabupaten Tangerang (misalnya antara Citra Raya dan Survarna Sutra) serta terhubung dengan aglomerasi perkotaan wilayah Jabodetabek.
 - h. Arah kebijakan dalam manajemen risiko dalam pengembangan proyek strategis wilayah dan nasional. Salah satunya adalah kebijakan untuk meminimalisir risiko sosial-lingkungan dalam proses pembebasan lahan, perencanaan, pembangunan, serta operasional dari infrastruktur tersebut.
 - i. Perencanaan sektor pariwisata melalui Rencana Induk Pariwisata yang selaras dengan perencanaan di Provinsi Banten
- 4) Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) Sektor Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 - a. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau Regional
 - b. Pembangunan Sumber Daya Air

- c. Pembangunan SPAM Regional Karian yang bertujuan memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
- d. Pembangunan TPS3R Regional.
- e. Pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan

BAB VI PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. Sebagaimana diketahui bersama, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja Indonesia Emas 2045. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang yang berdimensi tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, maupun antara Pusat dan Daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam RPJPD menjadi salah satu perhatian untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memperoleh manfaat dan pembangunan secara adil. Maka dari itu, diperlukan strategi dalam mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dan keterlibatan aktif menjadi bagian dalam pembangunan daerah.

Perencanaan Pembangunan Nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan, meliputi tahapan: (1) Penyusunan rencana; (2) Penetapan rencana; (3) Pengendalian pelaksanaan rencana; serta (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Tahap pengendalian pelaksanaan rencana bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui kegiatan koreksi dengan menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun tahap evaluasi pelaksanaan rencana berupa kegiatan mengumpulkan serta menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Hasil evaluasi menjadi landasan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah periode berikutnya.

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan juga disebutkan bahwa tujuan dari pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan adalah menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Di tingkat kabupaten/kota, kepala daerah melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan, meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja. Selanjutnya dalam

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan, kepala daerah di tingkat kabupaten/kota bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

6.2 Kaidah Pembiayaan Pembangunan

Kaidah pembiayaan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah prinsip-prinsip dan aturan yang digunakan untuk memastikan bahwa pembiayaan pembangunan daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Beberapa kaidah umum yang biasanya diterapkan dalam pembiayaan RPJPD, yaitu kesesuaian dengan rencana dan prioritas; keterlibatan sumber daya lokal; diversifikasi sumber pembiayaan; kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan; transparansi dan akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas; perencanaan dan penganggaran jangka panjang; pengelolaan risiko; keterlibatan masyarakat; serta pemantauan dan evaluasi. Dengan menerapkan kaidah-kaidah ini, diharapkan pembiayaan dalam RPJPD dapat dilakukan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Sementara itu, dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah terdapat alternatif sumber pembiayaan melalui beberapa skema berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Pendanaan dari berbagai sumber dengan mengutamakan prinsip kebijakan *money follow program*, seperti anggaran daerah, dana perimbangan, hibah, investasi swasta, dan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber dan meningkatkan stabilitas keuangan;
4. Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP);
5. Inovasi pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Adapun mekanisme insentif dalam pembiayaan pembangunan jangka panjang ini bertujuan untuk mendorong partisipasi, investasi, dan kontribusi dari berbagai pihak. Beberapa mekanisme yang dapat diterapkan antara lain: insentif fiskal melalui pengurangan pajak ataupun kredit pajak; subsidi langsung maupun hibah dari pemerintah; insentif pembiayaan melalui pinjaman dengan suku bunga rendah atau jaminan kredit; insentif investasi; skema *Public Private Partnership* (PPP) melalui pembagian risiko atau kepemilikan dan pengelolaan; inovasi dan teknologi melalui pendanaan untuk penelitian dan pengembangan (R&D) maupun penerapan teknologi baru; insentif sosial berupa pengembangan kapasitas lokal; penyediaan infrastruktur dan fasilitas; serta insentif berupa penurunan risiko. Dengan menggunakan insentif yang tepat, pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

6.3 Kaidah Pelaksanaan Manajemen Risiko

Perencanaan daerah perlu memerhatikan manajemen risiko sebagai suatu proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran jangka panjang daerah. Tujuan dari manajemen risiko yaitu meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah; meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara; serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Adapun manfaat dari adanya manajemen risiko adalah sebagai masukan dalam perbaikan perencanaan dan efektivitas kinerja; meningkatkan akuntabilitas kinerja; menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan

dan pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjalankan rencana pembangunan nasional, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi, baik di dalam maupun lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya. Peraturan ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan, salah satu aspek penting yang diperhatikan adalah peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang *good governance* dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Maka dari itu, pedoman manajemen risiko menjadi budaya penting dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang 68/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dalam rangkaian proses perencanaan, diperlukan analisis risiko, yaitu sebagai suatu proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Sementara itu, manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring, dan reuiu yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya. Pengelolaan risiko dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut: (1) Pengembangan budaya sadar risiko; (2) Pembentukan struktur pengelolaan risiko; serta (3) Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

6.4 Kaidah Mekanisme Perubahan dan Komunikasi Publik

Perubahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dirancang untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik yang berkembang. Kaidah mekanisme perubahan dalam RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 penting untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang yang dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Komunikasi publik melibatkan masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia dilakukan berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Kabupaten Tangerang Gemilang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Tangerang dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana. Dalam mendorong partisipasi masyarakat diperlukan upaya atau strategi komunikasi secara efektif, transparan, dan inklusif, serta memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat diterima dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005

